



MAJALENGKA

Yang Tak Pernah Selesai Didefinisikan



ENDI ROCHAENDI

**MAJALENGKA
YANG TAK PERNAH
SELESAI
DIDEFINISIKAN:**

ZIARAH INTELEKTUAL ATAS INGATAN,
SIMBOL, DAN KEBERADAAN

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser, Fonogram atau Lembaga Penyiaran

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

**MAJALENGKA
YANG TAK PERNAH SELESAI
DIDEFINISIKAN:**

**ZIARAH INTELEKTUAL ATAS INGATAN,
SIMBOL, DAN KEBERADAAN**

ENDI ROCHAENDI



DUTA MEDIA PRESS

Jalan Abiyasa, Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Web: dutamediapress.com

Email: dutamediapress@gmail.com

WA: +62 889-5489-917

**MAJALENGKA YANG TAK PERNAH SELESAI
DIDEFINISIKAN:
ZIARAH INTELEKTUAL ATAS INGATAN, SIMBOL, DAN
KEBERADAAN**

ENDI ROCHAENDI

Editor:

Nur Kholik

Tata Letak:

Kharizmma Phratamma Noorfatwa

Desain Cover:

Adhitama Ginongpratidina Noorachman

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

vi, 441

ISBN:

978-634-04-0315-2

Terbit Pada:

Juni 2025

PENERBIT

DUTA MEDIA PRESS

Jalan Abiyasa, Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Web: dutamediapress.com

Hak Cipta 2025 @ Penulis

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis.*

KATA PENGANTAR

Majalengka bukan sekadar titik koordinat dalam sistem administrasi kewilayahan atau deretan huruf pada kop surat institusi resmi. Ia adalah ruang batin yang menyimpan denyut sejarah yang tak selalu terkatakan, kesunyian ritus yang menua dalam diam, serta gema simbolik yang lahir dari pertemuan antara waktu yang tak henti berjalan, tanah yang terus memberi pijakan, dan ingatan kolektif yang bersifat cair, lentur, sekaligus rapuh. Dalam pengertian ini, Majalengka bukan hanya tempat—ia adalah lanskap eksistensial, tempat manusia Majalengka menjejak, menafsir, dan menjalin keberadaan dengan tradisi, warisan, dan hasrat untuk memahami diri mereka sendiri melalui cermin kebudayaan.

Buku ini hadir sebagai sebuah *ziarah intelektual*, bukan untuk merumuskan kebenaran tunggal yang final, melainkan untuk membuka lorong-lorong tafsir yang lama terkunci oleh formalitas sejarah. Ia tidak menyodorkan kepastian, tetapi menawarkan kepekaan—bahwa sejarah, pada hakikatnya, adalah mosaik dari ingatan yang tercerai, narasi yang bertaut secara tak sempurna, serta suara-suara yang tak selalu mendapat tempat dalam arsip resmi. Ia bukan semata susunan kronologis kejadian, tetapi medan perjumpaan antara apa yang ditulis dan yang dirasakan, antara yang terdokumentasi dan yang diwariskan melalui tubuh-tubuh budaya, tutur lisan, serta gestur keseharian yang kerap luput dari perhatian birokrasi sejarah.

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan serpihan catatan yang saya tulis sepanjang perjalanan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Permuseuman, Kepurbakalaan, Kesenjaraan, dan Nilai-Nilai Tradisi (Muskala) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka, sejak tahun 2012 hingga hari ini. Catatan-catatan tersebut lahir dari pengalaman langsung: dari pertemuan dengan para sesepuh yang menjaga pengetahuan dengan sunyi, dari diskusi panjang dalam forum-forum sejarah lokal, dari observasi terhadap situs-situs yang tak terpetakan secara administratif, dan dari refleksi batin atas jejak budaya yang terus berbisik meski diabaikan oleh pembangunan yang serba tergesa. Setelah melalui proses penyuntingan ulang, pengorganisasian isi, serta penajaman perspektif, catatan-catatan ini saya satukan dalam buku ini sebagai bentuk kontribusi awal yang dapat dijadikan bahan reflektif dan dasar akademik bagi upaya penyusunan *Naskah Rekonstruksi Sejarah Majalengka* secara lebih utuh.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menambah keruh polemik yang selama ini menyelimuti kesejarahan Hari Jadi Majalengka, yang hingga kini masih menjadi perdebatan terbuka di ruang publik. Sebaliknya, buku ini lahir dari keyakinan bahwa perbedaan tafsir adalah bukti hidupnya kesadaran sejarah dalam tubuh masyarakat. Perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan epistemik. Sebab yang terus diperdebatkan bukan hanya perkara *tanggal*, melainkan tentang bagaimana sebuah komunitas menafsir asal-usulnya,

meneguhkan identitasnya, dan merumuskan arah masa depannya. Di titik inilah, kita perlu membedakan antara “Majalengka” sebagai entitas budaya yang tumbuh secara organik dalam jalinan kosmologis, dan “Kabupaten Majalengka” sebagai konstruksi administratif yang dibentuk oleh logika negara-bangsa modern.

Majalengka yang diziarahi dalam buku ini adalah Majalengka yang tidak bisa dipaksa masuk dalam kerangka peringatan formal. Ia tidak hadir dalam selemba prasasti atau akta kelahiran, melainkan bersemayam dalam nyanyian para sinden yang diwariskan dari generasi ke generasi; dalam tarian Topeng Beber yang semakin sepi panggung; dalam kisah yang dituturkan para sesepuh di beranda rumah dan surau-surau tua; dalam bahasa Sunda lokal yang hidup di dapur, di ladang, dan di pasar. Ia juga hadir dalam mitos-mitos sungai, dalam legenda gunung, dan dalam denyut hidup masyarakat yang memahami tanah sebagai ibu, bukan sekadar properti. Inilah Majalengka yang tak menuntut untuk disahkan, tetapi cukup untuk dihargai dan dihayati.

Kami berharap buku ini dapat memperkaya perspektif dalam diskusi-diskusi kultural dan historis mengenai Majalengka, khususnya dalam kerangka *Seminar Uji Publik Naskah Akademik Perubahan Hari Jadi Majalengka* yang dilaksanakan pada 7 Mei 2025. Kami sepenuhnya menyadari bahwa sejarah bukan ruang hampa. Ia dibentuk oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Namun kami juga percaya bahwa sejarah yang sehat adalah sejarah yang

sanggup mendengarkan banyak suara—termasuk suara-suara kecil yang selama ini tak mendapat ruang dalam narasi dominan. Sejarah yang terbuka terhadap ketidaktuntasan, yang menghargai pluralitas memori, dan yang tidak tergesa menyimpulkan.

Akhirnya, kepada para pembaca—baik akademisi, peneliti, pegiat budaya, maupun masyarakat Majalengka dari berbagai latar—kami tidak menyuguhkan buku ini sebagai kitab kebenaran, melainkan sebagai undangan. Sebuah undangan untuk berdialog, untuk mendengar, dan mungkin, untuk bertanya kembali: apa yang sesungguhnya kita maksud ketika kita menyebut “Majalengka”? Apakah ia sekadar batas wilayah administratif, atau justru medan spiritual tempat kita belajar mengenali diri, merajut akar, dan menyusun arah? Semoga buku ini tidak berhenti di mata yang membaca, tetapi mengalir sebagai percakapan yang menyala di ruang batin kita masing-masing—tentang tanah, tentang nama, dan tentang keberadaan.

Majalengka, 7 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Sejarah Majalengka: Benarkah 535 Tahun	1
Sejarah Majalengka: 7 Juni 1490, 11 Februari 1840 atau Tanggal Lain	19
Sejarah yang Tak Lagi Menuntut Kepastian: Sebuah Catatan	33
Ketika Sejarah Majalengka Digugat	67
Sejarah Majalengka atau Sejarah Kabupaten Majalengka	97
Bagian I: Sejarah Yang Tersembunyi Dalam Senyap	117
1. Narasi Resmi dan Yang Tersisih	119
2. Majalengka Dalam Peta Kerajaan: Antara Talaga, Sumedanglarang dan Cirebon	137
3. Tanggal yang Diperdebatkan, Ingatan yang Terlupakan	151
Bagian II: Simbol, Mitos dan Bahasa yang Merawat Diri	163
4. Toponimi dan Makna: Majalengka sebagai Simbol Diri	165
5. Obyek Pemajuan Kebudayaan: Cermin Ingatan dan Jalan Pulang Majalengka	177
6. Upacara yang (Tak) Kita Ingat: Menyigi Ritus, Merawat Ingatan, Menimbang Makna	197
7. Bahasa sebagai Penjaga Waktu	211

Bagian III: Eksistensi yang Menolak Dibekukan	225
8. Ketika Sejarah Menjadi Doa, Bukan Dokumen	227
9. Tanah, Ingatan dan Identitas	239
10. Menulis Sejarah sebagai Tindakan Etis	253
Penutup	267
Lampiran	283
1. Sejarah Majalengka: Antara Mithos, Realita dan fakta	285
2. Sejarah Majalengka: Kontroversi Yang Tetap Dipelihara	305
3. Kronologi Narasi Sejarah Majalengka dari Berbagai Versi	317
4. Peta Simbolik Ruang Budaya Majalengka	343
5. Kontroversi Rekonstruksi Sejarah Majalengka: Antara Validitas Historiografis dan Kepentingan Representasi Identitas Lokal	351
6. Mengapa Sejarah Majalengka Harus Direkonstruksi? Dari Ingatan Kolektif Menuju Peta Batin dan Strategi Peradaban	369
7. Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Majalengka: Pergulatan Kepentingan Di Antara Tiga Keturunan (Katumenggungan Talaga, Kerajaan Sumedanglarang dan Kesultanan Cirebon)	387
8. Rekonstruksi Sejarah Majalengka: Ketika Tanggal Lahir Diperdebatkan?	401
9. Memahami Majalengka Sebagai Ruang Budaya: Sebuah Analisis Kritis dan Reflektif ...	425
Riwayat Hidup Penulis	439

Sejarah Majalengka: Benarkah 535 Tahun?

*(Telaah Kritis terhadap Penetapan Tahun Berdirinya
Kabupaten Majalengka)*

Pendahuluan

Pengetahuan sejarah bukan sekadar soal mengingat masa lalu, melainkan juga cara suatu komunitas memaknai keberadaannya di tengah waktu yang bergerak. Sejarah, dalam hal ini, merupakan cermin tempat masyarakat bercermin—membaca siapa mereka, dari mana mereka datang, dan ke mana arah kebudayaan mereka dibawa. Ketika sebuah wilayah seperti Kabupaten Majalengka menetapkan sebuah tanggal sebagai hari jadi, yang sedang dikerjakan bukan hanya pencatatan administratif, melainkan juga upaya membingkai identitas kolektif dalam narasi waktu yang dilembagakan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kebenaran historis dari tanggal tersebut bukan sekadar perkara angka, tetapi menyangkut integritas pengetahuan yang diwariskan lintas generasi.

Dalam konteks ini, angka 7 Juni 1490 yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka tidak dapat dilepaskan dari wacana historiografis yang menyangkut validitas sumber, metode verifikasi, serta kepentingan ideologis yang menyertainya. Apakah angka ini bersumber dari dokumen historis yang sah dan teruji secara akademik? Atau justru merupakan konstruksi simbolik yang

dilembagakan tanpa dasar empiris yang kokoh? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu masuk penting bagi pembacaan ulang sejarah lokal secara kritis, agar perayaan identitas tidak melupakan akurasi dan tanggung jawab terhadap kebenaran sejarah itu sendiri.

Pembahasan

Penetapan usia sebuah kota atau kabupaten tidak dapat direduksi semata-mata sebagai perhitungan kronologis yang bersifat administratif. Ia merupakan praktik historis yang melibatkan proses legitimasi atas narasi masa lalu, artikulasi identitas kolektif, dan pembentukan memori sosial yang turut menentukan arah kultural suatu komunitas. Dalam konteks Kabupaten Majalengka, angka 7 Juni 1490 yang dijadikan sebagai hari jadi resmi daerah tersebut mencuat bukan hanya sebagai penanda waktu, tetapi sebagai klaim sejarah yang membawa implikasi ideologis dan epistemologis. Artinya, angka tersebut tidak hanya menyatakan kapan suatu wilayah dianggap “lahir”, tetapi juga bagaimana dan oleh siapa narasi kelahiran itu dibentuk, dirawat, serta disebarluaskan.

Oleh karena itu, pertanyaan kritis yang patut diajukan adalah: apa landasan historiografis dari angka 1490 tersebut, dan bagaimana metode pengambilan tahun itu dilakukan? Sejauh ini, berbagai kajian akademik dan telaah historis belum menunjukkan adanya sumber primer yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Majalengka sebagai sebuah entitas administratif ataupun kerajaan lokal telah eksis secara formal

pada tahun tersebut. Penetapan tanggal 7 Juni 1490 tampaknya lebih merupakan konstruksi mentifak—yakni suatu artefak mental atau hasil konsensus simbolik—daripada fakta historis yang memiliki jejak dokumenter yang otentik. Dalam historiografi modern, keabsahan sebuah tanggal kelahiran wilayah harus dapat dilacak melalui bukti-bukti konkret seperti manuskrip, arsip pemerintahan, atau catatan kolonial yang dapat diverifikasi secara metodologis.

Kekaburan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan kritis dalam menilai narasi sejarah lokal. Apabila penetapan usia Kabupaten Majalengka semata-mata didasarkan pada asumsi atau tradisi lisan yang belum melalui validasi ilmiah, maka potensi terjadinya mitologisasi sejarah sangat besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam pemahaman masyarakat terhadap warisan sejarahnya sendiri. Lebih dari itu, legitimasi atas narasi tersebut juga dapat digunakan secara politis untuk membangun citra kebudayaan atau mengukuhkan otoritas tertentu, yang pada akhirnya menjauhkan masyarakat dari upaya pemaknaan sejarah secara reflektif dan partisipatif.

Penetapan usia suatu daerah seperti Kabupaten Majalengka seyogianya ditempatkan dalam kerangka kerja historiografi kritis, yang menekankan keterbukaan terhadap berbagai sumber sejarah, penggunaan metodologi ilmiah yang ketat, serta komitmen terhadap etika interpretasi. Narasi sejarah yang kokoh bukanlah yang dipaksakan melalui otoritas administratif, melainkan yang tumbuh dari hasil

dialog antara fakta, memori kolektif, dan refleksi akademik. Melalui pendekatan semacam ini, sejarah tidak hanya menjadi instrumen peringatan atau selebrasi seremonial, tetapi juga wahana pembelajaran yang memerdekakan masyarakat untuk mengenali akar, memahami perjalanan, dan merumuskan masa depan secara lebih bijaksana.

Prinsip-prinsip historiografi kritis tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai Hari Jadi Kabupaten Majalengka – sebuah keputusan simbolik yang hingga kini terus dijadikan rujukan seremonial oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun secara historiografis, penetapan ini masih menyimpan problematika serius karena lebih banyak bersandar pada sumber-sumber sekunder, narasi turun-temurun, dan konstruksi mitologis yang belum terverifikasi melalui dokumen primer yang sah. Absennya bukti tekstual berupa prasasti, piagam kerajaan, naskah lokal otentik, maupun arsip kolonial yang menyebutkan secara eksplisit tahun 1490 sebagai tonggak administratif atau politis berdirinya Majalengka menjadi persoalan epistemologis yang tidak dapat diabaikan.

Kajian sejarah modern menuntut validitas penanggalan historis yang bertumpu pada keberadaan sumber primer yang dapat diuji melalui pendekatan filologis, arkeologis, dan historiografis. Tidak ditemukannya dokumen resmi yang mencantumkan Majalengka sebagai suatu entitas administratif pada tahun tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tanggal tersebut ditetapkan berdasarkan

fakta historis yang terdokumentasi, atau justru merupakan hasil dari imajinasi kolektif yang dilembagakan secara politis? Jika yang terjadi adalah yang kedua, hal ini mengindikasikan proses mitologisasi sejarah yang berlangsung demi kebutuhan identitas dan mobilisasi simbolik, bukan sebagai hasil pembacaan sejarah yang kritis dan metodologis.

Lebih jauh, apabila ditelusuri melalui perspektif sejarah kolonial, struktur administratif Kabupaten Majalengka baru terbentuk secara resmi pada abad ke-19, tepatnya ketika Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan reorganisasi wilayah melalui sistem *regentschap* (kabupaten) di wilayah Priangan Timur. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintahan lokal sebagai respon terhadap kebutuhan kontrol administratif dan eksploitasi sumber daya di bawah kebijakan kolonial. Dalam arsip-arsip kolonial maupun dalam sistem administrasi resmi yang diadopsi Belanda, tidak ditemukan penegasan bahwa Majalengka telah memiliki struktur pemerintahan kabupaten sejak abad ke-15. Ini menegaskan bahwa keberadaan Majalengka dalam format kabupaten sebagaimana dimaknai hari ini, merupakan konstruksi administratif modern, bukan kontinuitas langsung dari sistem pemerintahan tradisional pra-kolonial.

Kesadaran historis semacam itu menjadi penting sebagai dasar bagi peninjauan ulang terhadap fondasi narasi Hari Jadi Kabupaten Majalengka. Dalam semangat akademik yang menjunjung keterbukaan intelektual dan tanggung jawab sejarah, langkah korektif ini tidak dimaksudkan untuk

meniadakan makna simbolik atau nilai kultural yang telah melekat dalam peringatan tersebut, melainkan justru untuk memperkuatnya melalui basis sejarah yang lebih kokoh, terverifikasi, dan akuntabel. Sejarah, pada akhirnya, tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi identitas, tetapi juga sebagai cermin intelektual untuk menilai bagaimana kita sebagai masyarakat memahami asal-usul, perubahan, dan dinamika kolektif secara jujur dan kritis.

Pusat-pusat kekuasaan awal di wilayah yang kini disebut Majalengka berakar pada eksistensi kerajaan-kerajaan lokal seperti Talaga Manggung, serta berada dalam orbit pengaruh Kerajaan Galuh. Relasi historisnya juga menyiratkan keterhubungan genealogis dan politik dengan Kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon. Konstelasi kekuasaan di wilayah ini memperlihatkan bahwa Majalengka tidak lahir sebagai entitas tunggal dan mapan sejak awal, melainkan sebagai hasil dari interaksi dan kontestasi antara berbagai kekuatan regional yang membentuk jaringan politik agraris yang dinamis.

Transformasi politik di wilayah yang kini disebut Majalengka tidak dapat dilepaskan dari ekspansi Kesultanan Cirebon pada awal abad ke-16. Tercatat bahwa pada tahun 1528, wilayah Rajagaluh ditaklukkan, disusul oleh Talaga pada tahun 1530. Dua pusat kekuasaan lokal yang sebelumnya berdiri relatif otonom ini akhirnya masuk ke dalam hegemoni Cirebon, yang saat itu tengah mengonsolidasikan kekuasaan regional melalui diplomasi

genealogis dan kekuatan militer. Penaklukan ini bukan sekadar perubahan rezim, tetapi juga menjadi penanda awal dari proses restrukturisasi sosial, politik, dan keagamaan yang lebih luas, termasuk masifnya penyebaran Islam di wilayah pedalaman Priangan Timur.

Setelah integrasi Rajagaluh dan Talaga ke dalam struktur pemerintahan Cirebon, terjadi proses reorganisasi wilayah yang memungkinkan terbentuknya satuan-satuan baru berbasis keagamaan, ekonomi, dan pertahanan. Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan bahwa wilayah yang kelak dikenal sebagai Majalengka mulai mengalami konsolidasi administratif, meskipun belum menggunakan nomenklatur "Majalengka". Nama tersebut kemungkinan besar baru muncul dalam periode-periode berikutnya sebagai hasil dari proses evolutif penamaan, yang didorong oleh kebutuhan administratif dan identitas kolektif yang tumbuh secara gradual. Sayangnya, tidak terdapat catatan primer yang menyebutkan kapan dan dalam kondisi apa istilah "Majalengka" mulai digunakan secara resmi sebagai penanda wilayah.

Pembentukan struktur sosial baru di bawah kendali Cirebon turut mempercepat pembauran nilai-nilai Islam ke dalam tatanan masyarakat lokal yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha atau animistik. Penyebaran Islam secara masif pasca-penaklukan tersebut memperkuat asumsi bahwa selain sebagai proyek politik, integrasi wilayah ini juga merupakan bagian dari proyek kultural dan ideologis. Dinamika ini

menjelaskan bahwa perubahan besar yang terjadi pada rentang 1528–1530 tidak hanya menandai keruntuhan kerajaan-kerajaan lokal, tetapi juga menjadi momen krusial yang melandasi kemunculan satuan politik-budaya baru di kawasan Priangan Timur.

Realitas ini memperkuat argumen bahwa pembentukan wilayah yang kini dikenal sebagai Majalengka harus dipahami dalam konteks rekonstruksi pasca-penaklukan, bukan sebagai hasil dari pendirian formal pada satu tanggal tertentu. Proses pembentukan identitas wilayah berjalan secara gradual, dalam kerangka perubahan struktur kekuasaan, penetrasi agama baru, dan adaptasi terhadap sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh kekuatan regional dominan seperti Cirebon. Narasi historis tentang tahun 1490, dalam konteks ini, tampak lebih sebagai simbol identitas yang dikonstruksi belakangan ketimbang sebagai fakta sejarah yang dapat diverifikasi secara filologis dan arkeologis.

Majalengka pada masa pra-kolonial lebih tepat dipahami sebagai simpul dari perlintasan kekuasaan yang bersifat fluktuatif, bukan sebagai pusat administratif yang otonom dan terstruktur. Wilayah ini menjadi arena interaksi antara berbagai kekuatan lokal seperti Talaga Manggung, Rajagaluh, Sumedang Larang, serta Kesultanan Cirebon, yang masing-masing membawa pengaruh politik, kultural, dan spiritual dalam berbagai tingkatan. Identitas Majalengka pada fase ini tidak terdefiniskan secara tunggal, melainkan

terbentuk melalui proses historis yang kompleks, mencerminkan sifat teritorial yang cair dan dinamis.

Fluktuasi otoritas lokal pada masa tersebut bersifat temporer dan kontingen, tergantung pada konstelasi kekuasaan regional dan pertukaran pengaruh di antara kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Kondisi ini menjadikan upaya penetapan satu tanggal tunggal sebagai awal definitif dari keberadaan administratif Majalengka sebagai tindakan yang bermasalah secara epistemologis. Tidak adanya bukti otentik yang menyatakan berdirinya satu struktur pemerintahan mandiri bernama Majalengka sebelum abad ke-19 turut memperkuat pandangan bahwa narasi tahun 1490 lebih bersifat simbolik daripada faktual.

Proses penyatuan teritorial dan pembakuan struktur pemerintahan lokal di wilayah Priangan, termasuk wilayah yang kini disebut Majalengka, baru mencapai bentuk institusional yang sistematis ketika Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan reorganisasi administratif pada abad ke-19. Reorganisasi ini merupakan bagian dari strategi kolonial dalam mengkonsolidasikan kekuasaan melalui penerapan sistem regentschap, yaitu pembentukan satuan pemerintahan kabupaten sebagai unit administratif formal. Kebijakan tersebut tidak semata ditujukan untuk penguatan kendali pemerintahan, tetapi juga untuk memperlancar eksploitasi sumber daya dan memudahkan mobilisasi tenaga kerja serta pajak dari wilayah-wilayah yang sebelumnya

bersifat otonom atau berada dalam jaringan kekuasaan tradisional yang tidak seragam.

Tanggal 11 Februari 1840 menjadi penanda penting dalam sejarah birokrasi lokal Hindia Belanda, ketika sistem *regentschap* mulai diterapkan secara sistematis di berbagai wilayah termasuk Priangan Timur. Dalam konteks ini, Majalengka tidak lagi hanya dikenal sebagai kawasan yang dilewati oleh pengaruh kerajaan-kerajaan seperti Talaga Manggung atau Sumedang Larang, melainkan mulai dicatat secara administratif sebagai satuan kabupaten di bawah struktur pemerintahan kolonial. Pengakuan resmi terhadap Majalengka sebagai kabupaten bukanlah hasil dari warisan pemerintahan lokal pra-kolonial, melainkan konsekuensi dari penataan baru yang dirancang berdasarkan kalkulasi administratif kolonial.

Struktur birokrasi yang diterapkan Belanda menciptakan batas-batas wilayah yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan tradisional Nusantara. Proses ini sekaligus menandai pergeseran fundamental dari model kekuasaan berbasis patronase dan jaringan genealogis ke sistem pemerintahan rasional-legal yang terdokumentasi, terpusat, dan hierarkis. Dalam kerangka itulah Majalengka memperoleh status formal sebagai kabupaten, bukan karena kesinambungan historis dari sistem politik lokal, tetapi karena rekonstruksi administratif yang diinisiasi kekuasaan kolonial demi kepentingan kontrol dan efisiensi pemerintahan.

Berdasarkan catatan tersebut, penetapan tahun 1490 sebagai tahun berdirinya Kabupaten Majalengka memerlukan pembacaan kritis dan kontekstual. Sementara simbolisme tahun tersebut mungkin memiliki nilai kultural yang kuat di tingkat lokal, argumen historis yang sah justru mengarah pada periode abad ke-19 sebagai fase awal pengakuan resmi atas keberadaan Majalengka sebagai entitas administratif kabupaten. Oleh sebab itu, setiap klaim kesejarahan yang berkaitan dengan pembentukan kabupaten seyogianya bersandar pada dokumen primer dan logika historiografis yang dapat diverifikasi secara akademik, bukan semata pada narasi turun-temurun yang bersifat mitologis atau selebratif.

Dalam kerangka tersebut, pembentukan Kabupaten Majalengka bukanlah kelanjutan langsung dari pemerintahan lokal pra-kolonial, melainkan produk dari konstruksi kolonial yang membakukan batas-batas wilayah dan struktur otoritas sesuai kepentingan administrasi serta eksploitasi sumber daya. Artinya, kontinuitas antara masa pra-kolonial dan kolonial tidak bersifat linier, melainkan terputus oleh proses rekonstruksi politik dan administratif yang dilakukan secara sistemik oleh kekuasaan kolonial. Narasi kesejarahan tentang Majalengka semestinya disusun berdasarkan kesadaran historis ini agar tidak terjebak pada romantisme simbolik yang justru mengaburkan pembacaan kritis terhadap asal-usul institusional daerah tersebut.

Memahami dinamika ini menjadi kunci untuk menilai secara lebih proporsional penetapan tahun 1490 sebagai hari

jadi Kabupaten Majalengka. Penetapan tersebut, sejatinya, lebih mencerminkan upaya konstruksi simbolik yang berfungsi sebagai jangkar identitas kolektif masyarakat, daripada sebagai representasi akurat dari fakta-fakta historiografis. Penelusuran terhadap asal-usul tahun tersebut memperlihatkan bahwa narasi semacam ini umum dijumpai dalam pembentukan memori kolektif daerah, terutama ketika sumber-sumber primer yang autentik dan verifikatif tidak tersedia secara memadai. Dalam situasi seperti itu, legitimasi sejarah kerap dibentuk melalui narasi turunan, mitos politik, serta konsensus budaya yang bertujuan meneguhkan eksistensi kontemporer suatu wilayah administratif secara simbolik maupun emosional.

Simbolisasi tahun 1490 tetap memiliki nilai strategis, terutama dalam memperkuat imajinasi kebangsaan lokal dan menghidupkan kesadaran sejarah masyarakat. Namun, dari sudut pandang historiografi kritis, perlu dibedakan secara tegas antara sejarah sebagai konstruksi identitas dan sejarah sebagai disiplin akademik yang bertumpu pada bukti. Upaya membaca ulang akar kesejarahan Majalengka secara metodologis akan membantu membangun pemahaman yang lebih jujur dan reflektif mengenai masa lalu, sekaligus membuka ruang bagi perumusan identitas lokal yang lebih akurat, inklusif, dan bertanggung jawab.

Pendekatan sejarah kritis meniscayakan keberanian untuk memeriksa ulang narasi-narasi yang telah mengakar dan kerap kali dilegitimasi tanpa dasar yang kokoh.

Keberadaan sejarah sebagai disiplin akademik mensyaratkan validitas yang dapat diuji, bukan sekadar diturunkan secara turun-temurun atau diterima sebagai kebenaran kolektif tanpa verifikasi metodologis. Historisitas sebuah wilayah tidak dapat dilekatkan pada peristiwa atau angka simbolik semata, melainkan harus ditopang oleh bukti-bukti empiris yang dapat diverifikasi melalui perangkat ilmiah yang sah.

Pembentukan pengetahuan sejarah perlu dilakukan melalui triangulasi sumber: kombinasi antara dokumen tertulis, artefak arkeologis, serta memori kolektif yang dianalisis secara kritis dan kontekstual. Ketiganya tidak boleh berdiri sendiri atau saling meniadakan, tetapi harus dikawinkan dalam suatu kerangka metodologis yang koheren. Proses ini menjadi fondasi epistemologis agar sejarah tidak terjerumus ke dalam jebakan romantisme lokal atau sekadar menjadi alat legitimasi politik kontemporer yang jauh dari akurasi historis.

Penelusuran terhadap eksistensi administratif Majalengka harus merujuk pada sumber-sumber yang sah, seperti arsip kolonial Belanda, laporan-laporan resmi dari zaman Hindia Belanda, serta dokumen kerajaan lokal yang dapat dikaji secara kritis. Naskah-naskah seperti *Babad Talaga* perlu dibaca secara hermeneutik dan tidak diposisikan sebagai satu-satunya referensi, mengingat muatan simbolik dan kosmologisnya yang kuat. Kehadiran Majalengka dalam peta-peta resmi Belanda abad ke-18 dan ke-19 juga penting untuk menegaskan pergeseran statusnya dari kawasan politik

tradisional menuju struktur administratif kolonial yang lebih mapan.

Pembacaan ulang terhadap masa lalu Majalengka bukan bertujuan untuk membongkar identitas yang telah dibangun, tetapi untuk memurnikan pemahaman kita tentangnya. Dalam masyarakat modern yang berbasis pada rasionalitas publik dan akuntabilitas historis, kejujuran intelektual menjadi syarat penting bagi konstruksi identitas yang bertanggung jawab. Pemaknaan ulang terhadap tahun berdiri atau hari jadi bukan berarti menolak kebanggaan lokal, melainkan menempatkannya pada posisi yang lebih proporsional, teruji, dan berdasar.

Pernyataan bahwa Majalengka telah berusia 535 tahun pada 2025 tanpa dukungan evidensi historis yang terverifikasi secara akademik merupakan bentuk reduksi naratif yang berpotensi menyesatkan pemahaman kolektif masyarakat tentang jati diri sejarahnya. Reduksi semacam ini tidak hanya menyederhanakan kompleksitas proses historis, tetapi juga mengabaikan dinamika peradaban lokal yang tumbuh dalam jejak waktu yang tidak linier. Ketika sebuah wilayah dipaksakan untuk memiliki “tanggal lahir” tunggal, sementara narasi historisnya bersifat multifaset, maka yang terjadi bukanlah pelestarian ingatan, melainkan pengaburan terhadap akar-akar identitas yang lebih dalam dan otentik.

Sejarah Majalengka tidak dapat direduksi hanya pada satu angka simbolik seperti 1490, karena wilayah ini telah menjadi ruang interaksi berbagai kekuatan lokal, pusat

kekuasaan agraris, dan perlintasan budaya yang silih berganti dalam rentang waktu panjang. Majalengka tumbuh melalui dinamika sosial, politik, dan kultural yang tidak selalu terdokumentasi secara eksplisit, tetapi meninggalkan jejak-jejak yang dapat ditelusuri melalui sumber arkeologis, naskah tradisional, serta arsip kolonial yang terserak. Mengikat seluruh kompleksitas tersebut pada satu tahun tertentu justru dapat mengingkari kekayaan naratif yang semestinya menjadi kekuatan kultural daerah ini.

Yang lebih mendesak untuk dilakukan bukan sekadar merayakan sebuah tanggal secara seremonial, tetapi membangun tradisi kesadaran sejarah kritis yang mampu membedakan antara simbol dan fakta, antara mitos dan historiografi ilmiah. Kesadaran ini perlu dikembangkan melalui pendidikan sejarah yang mencerahkan, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian situs sejarah, serta penguatan institusi riset lokal yang mampu menggali dan menafsirkan warisan masa lalu secara objektif dan reflektif.

Identitas kultural sejatinya tidak selalu harus bertumpu pada satu titik waktu yang mutlak, melainkan dapat hadir secara utuh dalam pemahaman yang dinamis terhadap proses menjadi dan bertumbuhnya sebuah masyarakat. Dalam konteks ini, Majalengka bukan sekadar entitas administratif yang dideklarasikan pada tahun tertentu, melainkan ruang hidup yang dihuni oleh jejak-jejak peradaban yang terus bergerak, bertransformasi, dan membentuk kesadaran kolektif warganya secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penetapan 7 Juni 1490 sebagai Hari Jadi Kabupaten Majalengka merupakan konstruksi simbolik yang tidak sepenuhnya ditopang oleh bukti historiografis yang terverifikasi secara akademik. Absennya dokumen primer seperti arsip kolonial, prasasti, atau piagam otentik yang mencantumkan secara eksplisit tahun tersebut sebagai tonggak administratif menjadikan klaim ini lebih bersifat mentifaktual daripada faktual. Dalam perspektif sejarah kritis, hal ini mencerminkan praktik mitologisasi identitas yang dilembagakan demi kepentingan politis dan kultural, alih-alih sebagai representasi historis yang sah dan dapat diuji secara metodologis. Oleh sebab itu, narasi kelahiran Majalengka perlu dikaji ulang melalui pendekatan akademik yang berlandaskan triangulasi sumber, pembacaan hermeneutik, dan pemaknaan kontekstual atas dinamika kekuasaan lokal.

Sebagai wilayah yang tumbuh dari jejaring kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal seperti Talaga Manggung, Galuh, Sumedang Larang, dan Cirebon, Majalengka lebih tepat dipahami sebagai entitas kultural-politik yang terbentuk secara gradual melalui proses historis yang tidak selalu linier dan terdokumentasi secara eksplisit. Kesadaran akan kompleksitas ini mengharuskan masyarakat dan pemerintah untuk menempatkan sejarah bukan sebagai sekadar selebrasi simbolik tahunan, melainkan sebagai instrumen reflektif yang mendorong pemahaman mendalam terhadap identitas, akar

sosial, dan dinamika peradaban lokal. Sejarah yang dibangun melalui kejujuran intelektual dan metode ilmiah akan memperkuat legitimasi identitas kolektif yang tidak hanya membanggakan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi yang bijak dalam merumuskan arah masa depan.

Majalengka, 7 Juni 2025

Sejarah Majalengka: 7 Juni 1490, 11 Februari 1840, atau Tanggal Lain?

*Refleksi Historis dan Kultural atas Identitas, Memori Kolektif,
dan Kompromi Sosial di Tanah Majalengka*

Pengantar

Perbincangan mengenai tanggal kelahiran sebuah wilayah administratif sesungguhnya menyentuh titik terdalam dari hubungan antara sejarah dan identitas kolektif. Ia bukan sekadar persoalan teknis mengenai penetapan sebuah momen dalam kronologi, melainkan medan pertemuan antara fakta historis, imajinasi kultural, dan kebutuhan simbolik masyarakat untuk menambatkan eksistensinya pada suatu narasi asal-usul yang dapat diwariskan. Dalam hal ini, Majalengka menjadi contoh yang relevan untuk merefleksikan bagaimana memori kolektif, data historiografis, dan kepentingan kontemporer saling berkelindan dalam menentukan titik mula yang dianggap sah bagi eksistensi wilayah.

Ketiadaan satu dokumen tunggal yang secara definitif dan empiris menyebutkan momen kelahiran Majalengka sebagai kabupaten membuka ruang tafsir dan kontestasi makna. Situasi ini bukanlah kelemahan, melainkan peluang untuk merumuskan ulang narasi sejarah secara lebih adil dan partisipatif. Pertanyaan yang semestinya diajukan bukan hanya soal tahun berapa Majalengka “dilahirkan”, melainkan

bagaimana narasi kelahiran itu dikonstruksi, atas dasar apa ia dijadikan pijakan kolektif, dan bagaimana ia bisa merepresentasikan keberagaman memori, identitas sosial, serta jejak-jejak historis yang hidup dalam kesadaran masyarakat hari ini. Dari titik ini, refleksi atas tanggal 7 Juni 1490, 11 Februari 1840, atau kemungkinan tanggal alternatif, menjadi medan artikulasi baru bagi penulisan sejarah yang inklusif dan visioner.

Pembahasan

Menentukan tanggal kelahiran suatu daerah bukan sekadar soal administratif, melainkan proses dialogis antara nalar historis, sensitivitas kultural, dan kesadaran kolektif masyarakat yang membentuk ruang dan waktu dalam dimensi sosial. Dalam konteks Majalengka, diskursus tentang hari lahir kabupaten ini bergerak dalam tiga kutub utama: tanggal simbolik 7 Juni 1490 yang bersumber dari narasi lokal; tanggal legal-formal 11 Februari 1840 hasil *besluit* pemerintah kolonial Hindia Belanda; serta kemungkinan tanggal alternatif yang dapat merangkum keragaman sejarah, komposisi sosial, dan batin masyarakat Majalengka secara lebih utuh.

Tanggal 7 Juni 1490 kerap dihubungkan dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Pangeran Muhammad, Siti Armilah, dan Ratu Sindangkasih, serta dikaitkan secara etimologis dengan istilah "Majae-langka" sebagaimana muncul dalam dialog budaya Cirebon. Jalinan kisah ini tidak berdiri di atas

fondasi dokumentasi primer yang sah, tetapi justru tumbuh dalam ruang simbolik yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat. Keberadaannya bukan hasil pencatatan administratif, melainkan bagian dari narasi yang hidup dalam percakapan lisan, ritus kultural, dan cerita rakyat yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap asal-usul wilayah mereka.

Narasi tersebut tidak dapat dijustifikasi melalui pendekatan historiografi positivistik yang mengutamakan bukti tertulis dan verifikasi empiris. Namun, ia memiliki kekuatan simbolik yang berakar dalam struktur mental dan spiritual komunitas agraris yang selama berabad-abad membentuk lanskap budaya Majalengka. Di ruang inilah, sejarah tidak hanya dipahami sebagai kronologi peristiwa, tetapi juga sebagai ekspresi makna yang melibatkan emosi, keyakinan, dan kedekatan kosmis antara manusia, tanah, dan leluhur.

Ingatan kolektif tentang tanggal tersebut merepresentasikan apa yang disebut sebagai *internal memory*—sebuah bentuk memori yang tidak tercatat dalam arsip negara, tetapi hidup dalam kesadaran kultural masyarakat. Ia menjadi bagian dari proses pewarisan identitas yang melampaui batas-batas formal sejarah tertulis. Dalam konteks ini, tanggal 7 Juni 1490 tidak sekadar menjadi penanda waktu, melainkan lambang dari jalinan spiritual antara ruang, manusia, dan sejarah lokal yang terus berdenyut dalam batin warga Majalengka.

Penerimaan terhadap tanggal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan jangkar simbolik yang mampu mempertemukan mereka secara emosional dan spiritual pada suatu titik awal yang dirasa sakral. Meskipun tidak memenuhi standar verifikasi akademik modern, kekuatan narasi ini terletak pada kemampuannya menghidupkan rasa memiliki dan kontinuitas sejarah secara batiniah. Oleh karena itu, meski tidak sepenuhnya historis dalam makna formal, tanggal tersebut tetap bernilai dalam dimensi kultural dan spiritual sebagai ekspresi jati diri komunal.

Sebaliknya, tanggal 11 Februari 1840 merepresentasikan momen penting dalam sejarah administratif Majalengka – yakni saat wilayah ini secara resmi ditetapkan sebagai *regentschap* atau kabupaten oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penetapan ini bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan bagian dari proyek kolonial yang lebih luas dalam menstrukturisasi kekuasaan lokal melalui pendekatan birokratis yang terpusat dan terdokumentasi. Dalam sistem tersebut, wilayah-wilayah seperti Majalengka dilekatkan pada struktur pemerintahan kolonial demi tujuan kontrol politik, pengumpulan pajak, dan eksploitasi sumber daya alam.

Dari perspektif historiografi modern, tanggal ini memiliki keunggulan dalam hal legalitas dan verifikasi. Arsip-arsip kolonial, surat keputusan (*besluit*), dan peta administrasi yang dihasilkan pada masa itu menjadi bukti dokumenter yang dapat diuji dan ditelusuri secara

metodologis. Oleh karena itu, penetapan 11 Februari 1840 memenuhi kriteria sejarah faktual dalam tradisi sejarah akademik, yang mengedepankan keabsahan sumber primer dan ketepatan rekonstruksi kronologis.

Namun demikian, validitas formal ini tidak serta-merta menjamin resonansi kultural di tingkat masyarakat akar rumput. Tanggal yang sah secara hukum bisa saja terasa asing secara batiniah. Dalam kasus Majalengka, legitimasi administratif yang dibentuk kolonialisme kerap tidak memiliki akar dalam kesadaran sejarah masyarakat lokal, yang sejak lama hidup dalam dunia simbolik yang berbeda. Struktur kekuasaan kolonial adalah struktur yang diimpor – sering kali tidak dialogis – dan karena itu keterikatannya pada identitas kultural lokal sering bersifat dangkal atau bahkan terputus.

Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara narasi resmi negara dan narasi batin masyarakat. Tanggal 11 Februari 1840, meskipun penting dalam kerangka institusional, belum tentu dipersepsi sebagai momen awal yang bermakna oleh masyarakat Majalengka sendiri. Ia mungkin diakui dalam dokumen dan upacara kenegaraan, tetapi belum tentu hidup dalam cerita rakyat, ritus budaya, atau identitas lokal sehari-hari. Dalam hal ini, sejarah formal berdiri sejajar – dan terkadang bertentangan – dengan sejarah kultural.

Oleh sebab itu, dalam upaya merumuskan kembali kesadaran sejarah yang lebih utuh dan partisipatif, penting

untuk tidak hanya mengandalkan legalitas formal semata. Diperlukan pendekatan hermeneutik dan intersubjektif yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kultural, simbolik, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Sejarah, pada akhirnya, bukan hanya soal dokumen, tetapi juga soal makna yang dirasakan dan diwariskan secara kolektif.

Yang patut menjadi perhatian kritis adalah kemungkinan penetapan tanggal alternatif yang tidak semata-mata berpijak pada kepentingan administratif atau legitimasi seremonial, melainkan berfungsi sebagai titik temu antara dua kutub besar sejarah: makna simbolik yang hidup dalam ingatan kolektif dan akurasi historis yang diakui secara akademik. Tanggal alternatif ini bukan sekadar kompromi kronologis, melainkan bentuk artikulasi historis-kultural yang mampu mengafirmasi kompleksitas asal-usul Majalengka secara lebih utuh dan representatif.

Sejarah Majalengka, sebagaimana halnya banyak wilayah di Nusantara, tidak lahir dari garis tunggal yang linier, melainkan dari anyaman keragaman genealogis, kultural, dan politis. Wilayah ini sejak lama menjadi ruang hidup bagi komunitas-komunitas historis yang berbeda latar belakang dan afiliasi kekuasaan. Keluarga-keluarga yang mewarisi tradisi Kesultanan Cirebon hadir membawa warna Islam pesisir dan diplomasi budaya maritim. Di sisi lain, keturunan Tumenggung Talaga memperlihatkan jejak hubungan historis dengan Kerajaan Sumedanglarang yang

berorientasi pada struktur kekuasaan agraris-kerajaan khas pedalaman Jawa Barat.

Lebih dari itu, akar sosial Majalengka juga dibentuk oleh lapisan masyarakat agraris yang tidak memiliki relasi langsung dengan dinasti kekuasaan, tetapi justru menjadi fondasi sosial yang menghidupi praktik kebudayaan lokal secara turun-temurun. Mereka inilah yang menciptakan dan merawat sistem nilai berbasis kearifan lokal: dari ritus pertanian, narasi leluhur, hingga bentuk solidaritas komunal yang hidup dalam praksis keseharian. Narasi mereka kerap luput dari dokumen sejarah resmi, tetapi tetap hidup dalam bentuk cerita rakyat, toponimi desa, dan ritus tradisional yang mengandung nilai sejarah tersendiri.

Interaksi antara kelompok-kelompok ini tidak selalu tercatat dalam kronik formal atau arsip kolonial, namun jejaknya tetap bisa ditelusuri melalui dinamika sosial yang berlangsung secara intergenerasional. Ruang kompromi sosial yang mereka bangun mencerminkan model koeksistensi yang lentur, yang memungkinkan berbagai narasi historis hidup berdampingan tanpa meniadakan satu sama lain. Di sinilah pentingnya mengakui sejarah sebagai medan tafsir, bukan sebagai narasi tunggal yang memaksakan homogenitas memori.

Dalam konteks ini, penetapan tanggal kelahiran Majalengka yang baru tidak boleh dimaknai sebagai upaya negasi terhadap sejarah sebelumnya, melainkan sebagai afirmasi terhadap keberagaman sejarah lokal yang layak

diakui dan dirayakan secara setara. Tanggal alternatif berpotensi menjadi simbol kolektif yang lahir dari kesepahaman, bukan paksaan; dari kesadaran bersama, bukan monopoli penafsiran sejarah. Ia harus mewakili keseluruhan lanskap memori masyarakat Majalengka, yang tak pernah tunggal, tetapi selalu jamak, dinamis, dan berlapis.

Penetapan tanggal kelahiran Majalengka tidak sepatutnya disederhanakan menjadi pilihan antara dua kutub sejarah yang tampak saling berseberangan—yakni antara narasi lokal yang bersifat simbolik dan penetapan administratif warisan kolonial. Di balik persoalan penanggalan itu tersimpan problem yang lebih mendalam: bagaimana sejarah dipahami, dimaknai, dan diwariskan sebagai bagian dari konstruksi identitas kolektif. Menentukan hari jadi sebuah wilayah bukan sekadar tindakan legal-formal, melainkan proses negosiasi antara berbagai lapisan ingatan yang hidup dalam masyarakat—antara arsip dan afeksi, antara dokumen dan daya imajinasi kultural.

Dalam konteks ini, wacana tentang “kompromi kultural” perlu dimaknai sebagai bentuk kesepakatan yang melampaui legalitas administratif. Ia adalah hasil dari proses historis yang mempertimbangkan tidak hanya validitas dokumen, tetapi juga keabsahan batiniyah yang terhimpun dari suara-suara lokal, kepercayaan yang diwariskan, serta pengalaman kolektif yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Majalengka. Artikulasi semacam ini memungkinkan tanggal kelahiran tidak hanya menjadi

penanda birokratis, tetapi sekaligus menjadi medium representasi kultural yang menyatukan pengalaman historis yang beragam.

Tanggal kelahiran kabupaten, dalam kerangka tersebut, seharusnya mampu merekatkan sejarah formal yang didasarkan pada sistem dokumentasi kolonial dengan sejarah kultural yang hidup dalam kesadaran masyarakat lokal. Ia berperan sebagai titik temu simbolik – ruang di mana memori kolektif dan struktur legal saling mengafirmasi dalam semangat kebersamaan. Ketika masyarakat mampu merasa memiliki tanggal itu secara batiniah, maka sejarah tidak lagi menjadi milik segelintir elite atau produk administratif belaka, melainkan bagian dari identitas bersama yang hidup dan dirawat.

Majalengka sendiri tidak hadir sebagai entitas tunggal yang lahir dari satu momentum historis. Ia adalah hasil akumulasi dari beragam pengalaman kolektif yang tumbuh secara bertahap dalam bentang waktu yang panjang, melibatkan berbagai lapisan komunitas yang memiliki narasi dan simbol masing-masing. Sejarahnya tidak dapat dipahami hanya sebagai kronologi peristiwa, melainkan sebagai jaringan makna yang tersusun dari tafsir, emosi, dan simbol yang saling berkelindan.

Pendekatan hermeneutis menjadi kunci dalam membaca sejarah Majalengka secara lebih adil. Tafsir atas sejarah bukan semata soal ketepatan kronologis, tetapi juga tentang kepekaan terhadap nilai, makna, dan perasaan

keterhubungan masyarakat terhadap masa lalu mereka. Menyusun ulang narasi kelahiran Majalengka bukanlah tindakan dekonstruksi yang menghapus masa lalu, melainkan rekonstruksi yang memberi ruang bagi keberagaman jejak dan suara yang selama ini mungkin terpinggirkan.

Pilihan untuk merumuskan tanggal lahir yang lebih representatif adalah bentuk penghormatan terhadap pluralitas sejarah Majalengka. Proses ini bukan hanya relevan dalam konteks identitas, tetapi juga strategis dalam memperkuat fondasi kebudayaan dan pembangunan daerah ke depan. Sebab di tengah era di mana sejarah kerap dijadikan alat legitimasi sempit, kemampuan untuk membuka ruang dialog atas masa lalu justru menjadi penanda kematangan intelektual dan kultural suatu masyarakat.

Dalam upaya ini, yang dituju bukan sekadar keputusan administratif baru, melainkan kesadaran kolektif yang utuh: bahwa sejarah harus inklusif, bahwa ingatan harus dirawat bersama, dan bahwa Majalengka – sebagai ruang hidup yang bersejarah – patut diberi tempat oleh semua yang telah membentuk dan menghidupkannya. Tanggal lahir Majalengka, oleh karena itu, idealnya adalah refleksi dari simpul-simpul peradaban lokal yang disusun bukan hanya dari arsip, tetapi juga dari hati.

Identitas daerah dewasa ini tidak lagi semata-mata menjadi penanda administratif atau simbol geografis, melainkan telah berkembang menjadi fondasi penting bagi

keberlanjutan pembangunan dan pemajuan kebudayaan. Dalam konteks ini, diskursus mengenai tanggal kelahiran Majalengka tidak dapat direduksi menjadi wacana nostalgik atau perdebatan teknokratis semata. Ia menuntut keterlibatan emosi kolektif, kesadaran historis, dan kehendak kultural yang hidup dalam diri masyarakatnya.

Refleksi atas tanggal lahir Majalengka sejatinya merupakan refleksi atas arah kebudayaan dan identitas yang ingin dirumuskan bersama. Perdebatan ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun narasi yang tidak hanya sah secara historis, tetapi juga resonan secara batiniah. Ini adalah pertanyaan besar tentang bagaimana suatu daerah ingin dibaca: apakah sebagai kelanjutan dari ingatan yang hidup dalam masyarakat, atau sebagai hasil dari sistem formal yang dikukuhkan oleh negara?

Pilihan antara tanggal 7 Juni 1490, 11 Februari 1840, atau mungkin tanggal lain yang lahir dari konsensus lintas komunitas bukanlah semata perdebatan angka. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana sejarah Majalengka ingin dihayati, bagaimana warisan kulturalnya ditanamkan dalam kesadaran publik, dan bagaimana seluruh jejak historisnya dirawat secara inklusif untuk generasi mendatang.

Majalengka tidak hanya membutuhkan tanggal yang tepat, tetapi juga narasi yang menyatukan. Warisan sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dijiwai. Dalam semangat itulah, tanggal kelahiran kabupaten semestinya

bukan hanya menjadi titik awal administratif, melainkan juga sumber inspirasi kultural dan moral bagi perjalanan kolektif ke depan.

Penutup

Pada akhirnya, diskursus mengenai tanggal kelahiran Majalengka bukanlah sebatas upaya mengisi kekosongan administratif, melainkan sebuah panggilan untuk membaca ulang sejarah sebagai ruang tafsir kolektif yang hidup dan terus bergerak. Majalengka bukan sekadar wilayah geografis, melainkan medan memori yang dibentuk oleh berbagai generasi—dari kisah-kisah lisan yang diwariskan di dapur-dapur rakyat, hingga dokumen resmi yang disusun dalam sistem kolonial. Setiap tanggal yang diusulkan, entah 7 Juni 1490, 11 Februari 1840, atau tanggal baru hasil konsensus inklusif, adalah pintu masuk menuju refleksi yang lebih dalam tentang siapa kita sebagai masyarakat Majalengka, dan bagaimana kita ingin menghidupi warisan itu dalam semangat zaman yang berubah.

Karena itu, merumuskan tanggal kelahiran Majalengka semestinya menjadi momentum untuk membangun narasi sejarah yang tidak eksklusif, tidak fragmentaris, dan tidak terjebak pada dikotomi simbolik versus administratif. Sebaliknya, ia harus menjadi ruang kultural bersama—di mana jejak kerajaan lama, riwayat kolonial, ritus rakyat, serta memori spiritual saling menyapa dan saling merawat. Hanya dengan demikian, sejarah Majalengka tidak menjadi kisah

yang dibekukan dalam upacara seremonial semata, tetapi menjelma menjadi napas kolektif yang memberi arah, makna, dan daya hidup bagi generasi kini dan nanti.

Majalengka, 8 Juni 2025

Sejarah yang Tak Lagi Menuntut Kepastian

Sebuah Catatan.

A. Pendahuluan

Di antara lembar-lembar sejarah lokal yang ditulis dengan tergesa atau dibungkam oleh bahasa administratif, Majalengka berdiri sebagai sebuah gugus tanya yang belum selesai dijawab. Ia adalah nama yang hidup di antara ritus dan rindu, di antara keraguan dan keteguhan, di antara keinginan untuk dicatat dan kerelaan untuk dilupakan. Ketika masyarakatnya setiap tahun menengadahkan kepada waktu, memohon agar sebuah tanggal ditegaskan sebagai hari jadi, yang sesungguhnya sedang terjadi bukan sekadar perayaan identitas, tetapi pencarian makna eksistensial – bahwa sebuah tempat, agar dapat disebut “ada”, memerlukan titik awal yang bisa dirayakan. Tapi benarkah sejarah selalu butuh angka? Ataukah ia justru lebih tepat dibaca sebagai perjalanan makna yang berlapis dan cair?

Majalengka, dalam perspektif ini, tidak lahir dari satu momen tunggal yang bisa dikunci dalam kronik resmi. Ia adalah hasil pertemuan banyak arus sejarah: kerajaan yang datang dan pergi, migrasi nilai dan bahasa, ritus-ritus yang diam-diam menjadi tulang belakang kebudayaan, hingga perlawanan sunyi terhadap kolonialisme naratif. Dalam

konteks ini, upaya untuk menentukan satu tanggal sebagai “hari jadi” Majalengka seringkali lebih merefleksikan kebutuhan politik atau administratif, bukan kebenaran sejarah yang sesungguhnya bersifat polifonik dan fragmentaris. Maka, semakin kita mencari satu kepastian, semakin kita menjauh dari kesadaran bahwa Majalengka bukan untuk diputuskan, tetapi untuk dipahami—bukan untuk diberi label sejarah tunggal, melainkan untuk ditafsirkan terus-menerus dalam dinamika budaya dan kesadaran kolektifnya.

Dalam narasi besar sejarah nasional, daerah-daerah seperti Majalengka kerap menjadi pinggiran dari ingatan formal. Di sinilah pentingnya *ziarah intelektual*: suatu pendekatan reflektif yang tidak sekadar mengorek data, tetapi menyelami simbol, mengakrabi ingatan lokal, dan merawat relasi spiritual antara tanah dan narasi. Ziarah intelektual bukan bentuk penolakan terhadap fakta, melainkan pembebasan sejarah dari dominasi fakta yang dibekukan. Ia merayakan sejarah sebagai teks hidup—yang dibaca, dihidupi, ditafsirkan, dan diwariskan secara organik oleh masyarakat yang masih menari dalam denyut tanahnya. Dalam kerangka inilah, buku ini menawarkan pembacaan ulang terhadap Majalengka: sebagai entitas yang tidak meminta disahkan, tetapi dirasakan dan dimengerti.

Sejarah Majalengka, bila ditafsir secara kultural-filosofis, menyerupai sebuah *mandala* yang tak memiliki pusat tunggal. Setiap desa, setiap kisah tutur, setiap ritual yang diwariskan,

menyimpan serpihan narasi yang ingin diingat. Tari Kedempling bukan hanya seni pertunjukan, tetapi bahasa tubuh yang merawat memori kolektif. Topeng Beber bukan sekadar seni panggung, melainkan ruang simbolik yang menghidupkan kembali wajah-wajah leluhur yang telah terlupakan oleh kalender. Maka dari itu, menulis sejarah Majalengka berarti merangkai kembali seluruh serpihan itu, bukan untuk menyatukannya secara paksa, melainkan untuk menampilkannya dalam kejujurannya yang plural dan nyaris puitik.

Di sinilah muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah sejarah selalu harus diselesaikan? Ataukah justru ketidakselesaian itu adalah bentuk kejujuran tertinggi dari suatu wilayah yang ingin tetap hidup dalam denyut tafsir? Kita mungkin tidak akan pernah tahu secara pasti kapan Majalengka “dilahirkan” secara formal. Tetapi kita bisa, dengan kepekaan dan penghormatan yang mendalam, menapaki jejak-jejak waktu yang ditinggalkannya: dalam bentuk sawah yang terus ditanam, kesenian yang terus dibisikkan, dan doa-doa yang tetap ditanamkan pada setiap tanah yang digarap. Karena itu, tugas kita bukan mencari satu kebenaran sejarah, tetapi mengakrabi keragaman makna yang menjadikannya hidup.

Sejarah Majalengka tidak selesai karena ia memang tidak ingin selesai. Ia adalah ruang spiritual dan kebudayaan yang menolak dipakukan oleh dokumen. Ia memilih menjadi ingatan yang mengalir, bukan tanggal yang dibekukan.

Dalam kebijaksanaan Sunda yang halus dan dalam, Majalengka dapat dimaknai sebagai *“leuweung nu pinuh ku sora,”* hutan yang penuh dengan suara – berbagai suara yang berbisik dalam bahasa tanah, tubuh, dan batin. Maka, dalam buku ini, kita akan menyimak suara-suara itu bukan untuk mengadilinya, tetapi untuk merawatnya – agar sejarah tidak menjadi penjara, melainkan jalan pulang menuju keberadaan yang sejati.

B. Majalengka: Ziarah atas Sejarah yang Tak Pernah Usai

1. *Di Antara Tanggal dan Ingatan: Membaca Majalengka Sebagai Narasi yang Berlapis*

Majalengka bukan sekadar sebuah entitas administratif yang menunggu diresmikan oleh dokumen negara melalui satu tanggal yang dianggap sah. Ia adalah ruang historis yang dibangun melalui lapisan-lapisan makna yang tak selalu hadir dalam bentuk data arsip atau keputusan politik. Sejarahnya hidup dalam bentuk yang lebih rumit: dalam irama musim tanam, dalam jejak langkah kerajaan-kerajaan yang silih berganti, dalam nyanyian rakyat yang menua bersama bahasa Sunda Majalengka, dan dalam kesunyian desa yang menyimpan legenda-legenda tak tertulis. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mereduksi sejarah Majalengka menjadi satu titik waktu yang linier sejatinya adalah penyempitan makna dari sesuatu yang justru kaya karena keragamannya.

Narasi kelahiran Majalengka sejatinya adalah palimpsest: tulisan yang ditimpa berkali-kali namun jejak lamanya masih samar terlihat. Dalam metafora ini, sejarah Majalengka dapat dibaca sebagai teks berlapis yang tidak pernah benar-benar dihapus atau diganti, tetapi terus dinegosiasikan dan ditafsir ulang oleh generasi ke generasi. Kerajaan Talaga, jejak pengaruh Sumedanglarang, dan bayang-bayang Kesultanan Cirebon bukanlah fragmen yang saling meniadakan, melainkan fondasi-fondasi paralel yang menyusun mosaik identitas Majalengka secara simultan. Maka, menetapkan satu momen kelahiran seolah-olah seluruh narasi dapat dipaku pada satu tahun tertentu, justru menghilangkan kekayaan tafsir dan kejujuran historisitas yang dimilikinya.

Lebih dari itu, sejarah Majalengka bukan hanya soal memori, tetapi juga tentang kuasa. Siapa yang berhak menetapkan tanggal? Siapa yang menentukan versi sejarah mana yang dianggap "resmi"? Dalam banyak kasus di Indonesia, sejarah lokal telah menjadi arena kontestasi antara kuasa pusat dan ingatan warga. Dalam konteks ini, Majalengka menjadi contoh klasik bagaimana sebuah daerah bisa menjadi korban dari keinginan negara untuk menata narasi secara seragam, padahal akar-akar lokalnya tumbuh dalam arah yang beragam dan sering kali bertentangan dengan kehendak birokrasi modern. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai sejarah "resmi" sering kali lahir bukan dari kesepakatan kultural, melainkan dari keputusan sepihak yang mengabaikan dimensi memori dan simbol lokal.

Di balik kompleksitas itu, budaya lokal Majalengka menyimpan ingatan secara subtil dan penuh simbolisme. Tari Kedempling, misalnya, bukan hanya peristiwa estetika, tetapi peristiwa ingatan tubuh—di mana gerakan, irama, dan kostum merangkum sejarah yang tidak tertulis. Demikian pula Topeng Beber yang mengandung lapisan naratif tentang leluhur dan kesadaran ruang yang tak terucap dalam teks, tetapi hadir dalam gestur dan suasana. Seni tradisi, bahasa lisan, dan ritus komunal menjadi bentuk-bentuk sejarah yang hidup, yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh kronologi dan arsip. Mereka adalah cara masyarakat Majalengka mengingat tanpa harus mencatat, menghayati tanpa harus mengklaim.

Oleh karena itu, mendefinisikan Majalengka melalui satu tanggal administratif sejatinya adalah pemaksaan narasi tunggal terhadap ruang yang justru menolak disederhanakan. Sejarah Majalengka adalah medan tafsir, bukan diktum final; ia adalah ruang dialektika antara waktu, kuasa, dan budaya; antara yang tertulis dan yang terbisik; antara penanda formal dan penanda simbolik. Dalam ranah inilah kita perlu hadir bukan sebagai hakim atas masa lalu, tetapi sebagai peziarah yang sabar, yang dengan rendah hati mendengarkan kembali cerita-cerita yang selama ini tak terdengar.

Dengan demikian, menulis sejarah Majalengka bukan berarti mencari awal yang pasti, tetapi memahami bahwa yang menjadikannya "ada" bukan tanggal, melainkan jalinan makna yang hidup di tubuh warganya, di bahasa yang

mereka warisi, dan di tanah yang terus memberi. Itulah sebabnya sejarah Majalengka tidak perlu diselesaikan—ia cukup untuk dihidupi, ditafsirkan, dan diwariskan sebagai ziarah yang tak pernah benar-benar usai.

2. *Di Antara Rindu dan Ragu: Masyarakat, Identitas, dan Tanggal yang Dicari*

Setiap tahun, ketika pemerintah daerah dan masyarakat Majalengka memperingati hari jadi kotanya, sebuah pertanyaan senyap terus menyusup di balik rangkaian seremoni: *Benarkah ini tanggal kelahiran yang sesungguhnya?* Pertanyaan itu mungkin tidak selalu dikatakan secara lantang, tetapi berdenyut dalam percakapan warung kopi, dalam diskusi kultural, bahkan dalam sikap diam sebagian warga yang merasa tidak sepenuhnya terwakili oleh narasi resmi yang dirayakan. Di balik hasrat kolektif untuk mengetahui tanggal pasti hari jadi Majalengka, tersembunyi kerinduan yang lebih dalam—kerinduan untuk merasa *sah*, untuk merasa *berakar*, dan untuk meyakini bahwa keberadaan mereka sebagai komunitas telah diakui secara historis.

Namun kerinduan itu tidak hadir tanpa bayangan. Ia selalu berdampingan dengan keraguan. Tanggal yang dibakukan secara administratif oleh otoritas lokal memang memberikan kepastian secara birokratis, tetapi dalam kesadaran batin masyarakat, tanggal itu sering terasa jauh dari pengalaman historis yang mereka warisi dari leluhur. Di sinilah paradoks muncul: masyarakat merindukan kepastian untuk memperkuat identitasnya, tetapi dalam saat yang

sama, meragukan konstruksi formal yang tidak sepenuhnya dilahirkan dari akar budaya mereka sendiri. Keraguan ini bukan bentuk penolakan, tetapi ekspresi kultural yang menunjukkan kesadaran reflektif bahwa sejarah tidak bisa dimonopoli oleh satu suara tunggal.

Pada tataran simbolik, pencarian tanggal kelahiran Majalengka dapat dimaknai sebagai pencarian “titik mula” dari sebuah keberadaan yang ingin dirayakan. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal makna: kapan kita mulai disebut sebagai *kita*? Dalam konteks ini, tanggal kelahiran menjadi simbol upaya masyarakat untuk memahami dirinya sebagai komunitas yang memiliki asal-usul, bukan hanya berdasarkan batas administratif yang ditetapkan oleh negara, tetapi berdasarkan kedalaman waktu kultural yang mereka rasakan secara spiritual. Oleh karena itu, tanggal bukan sekadar waktu kronologis, melainkan representasi simbolik dari suatu keyakinan akan kebersamaan historis.

Lebih jauh, keinginan untuk mengetahui hari jadi juga mencerminkan dinamika antara identitas lokal dan narasi kekuasaan. Dalam banyak konteks di Indonesia, sejarah lokal kerap diseragamkan melalui kebijakan politik yang berupaya menyatukan beragam identitas ke dalam satu kerangka naratif nasional. Majalengka pun mengalami hal serupa – di mana memori lokal harus diringkas dalam format-format perayaan seremonial yang sering kali tidak memberi ruang pada perbedaan tafsir dan kedalaman lokalitas. Maka, ketika masyarakat bertanya ulang soal tanggal, mereka sejatinya

sedang berusaha membebaskan diri dari kungkungan narasi tunggal, dan mencari cara untuk menegaskan jati diri melalui bentuk-bentuk sejarah yang mereka rasakan lebih otentik.

Symbolisme dari keraguan ini pun mengandung nilai penting. Ia menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif menerima sejarah yang dibentuk dari luar, melainkan aktif dalam menegosiasikan makna. Dalam konteks Majalengka, keraguan menjadi bentuk kearifan: masyarakat tidak serta-merta menolak atau menerima, tetapi menimbang, meraba, dan menguji ulang kebenaran sejarah berdasarkan rasa kolektif yang hidup di tubuh kultural mereka. Ini adalah bentuk ziarah batin terhadap sejarah—ziarah yang tidak sekadar mencari jawaban, tetapi memelihara kesadaran bahwa keberadaan itu lebih luas daripada pengakuan administratif.

Oleh karena itu, keinginan masyarakat Majalengka untuk mengetahui tanggal pasti hari jadinya bukan sekadar ekspresi dari kebutuhan perayaan tahunan. Ia adalah upaya eksistensial untuk menghubungkan masa lalu yang tak seluruhnya terang dengan masa kini yang terus meminta legitimasi. Antara rindu dan ragu, antara ingin diyakini dan tetap bertanya, masyarakat Majalengka menunjukkan bahwa sejarah bukan soal jawaban akhir, tetapi ruang dialog yang harus terus dibuka.

3. *Kuasa yang Menuliskan Waktu: Antara Narasi Negara dan Ingatan Rakyat*

Sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia ditulis, disunting, dan sering kali ditentukan oleh siapa yang

memiliki kuasa untuk berbicara atas nama masa lalu. Di banyak wilayah Nusantara, termasuk Majalengka, penyusunan sejarah lokal kerap diserahkan pada mekanisme administratif yang tunduk pada logika formalistik negara. Narasi yang lahir dari arsip birokrasi, keputusan gubernur, atau peraturan daerah sering kali tampil sebagai “sejarah resmi” yang dibakukan – sementara narasi yang tumbuh dari tubuh masyarakat, dari lisan para sesepuh, dari mitos dan ritus adat, pelan-pelan digeser ke pinggiran.

Negara modern membutuhkan ketertiban dalam menata waktu dan peristiwa. Ia menuntut angka, tanggal, dan catatan tertulis yang bisa diverifikasi dan diarsipkan. Tetapi sejarah masyarakat adat tidak selalu tunduk pada logika itu. Ia berdiam dalam bentuk-bentuk yang lebih lentur: dalam kisah-kisah yang diwariskan lewat dongeng masa kecil, dalam tarian yang memuat jejak peristiwa purba, dalam batu-batu yang dikeramatkan tanpa tahu pasti tahunnya. Ketika negara berusaha menyederhanakan sejarah ke dalam satu versi tunggal, sesungguhnya ia sedang mereduksi keragaman memori yang diwariskan secara organik oleh masyarakat.

Pewaris kebudayaan lokal sejatinya menyimpan versi-versi sejarah yang tidak tertulis, tetapi tidak kalah sah. Para penjaga tradisi, seperti penari topeng, sinden tua, juru kunci makam leluhur, atau pawang ritual panen, menyimpan serpihan-serpihan sejarah yang hidup bukan dalam naskah, tetapi dalam praktik harian yang berulang. Majalengka, sebagai ruang yang sarat lapisan budaya, memiliki banyak

versi tentang asal-muasal, perpindahan kekuasaan, dan konflik masa lalu. Sayangnya, versi-versi ini jarang masuk ke dalam dokumen negara, karena tak dianggap memenuhi standar “ilmiah” yang telah ditetapkan secara sempit.

Ketimpangan narasi ini menandai pergeseran dari sejarah sebagai ruang partisipatif menuju sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. Narasi yang dibentuk oleh negara cenderung bersifat vertikal—menetapkan dari atas—sementara narasi rakyat tumbuh secara horisontal, dibentuk dalam percakapan dan kebersamaan. Ketika sejarah ditulis hanya oleh mereka yang punya akses ke sumber tertulis, yang tercatat hanyalah apa yang ingin diabadikan oleh penguasa. Sementara yang tak tercatat—meski hidup dalam batin masyarakat—perlahan dianggap tidak ada.

Kondisi semacam ini tidak hanya berdampak pada pemahaman kita tentang masa lalu, tetapi juga terhadap cara masyarakat memandang dirinya hari ini. Sejarah yang tidak mereka rasakan sebagai miliknya akan terasa asing dan kosong. Maka yang dibutuhkan bukan revisi atas tanggal, tetapi rekonstruksi atas pendekatan. Sejarah Majalengka perlu ditulis ulang tidak untuk mengganti satu versi dengan versi lainnya, melainkan untuk menyusun ruang dialog antara negara dan masyarakat, antara teks dan ritus, antara dokumen dan tubuh yang mengingat.

Simbolisme dari sejarah rakyat yang terpinggirkan bisa kita lihat pada keberadaan seni-seni tradisi yang nyaris padam. Mereka adalah artefak hidup dari ingatan alternatif—

ingatan yang tidak dimuliakan di panggung formal, tetapi tetap bertahan di perkampungan, di panggung kecil hajatan desa, di bisikan antara ibu dan anak. Jika negara serius ingin merawat sejarah Majalengka, ia mesti memulainya bukan dari perintah administratif, tetapi dari keberanian mendengar—mendengar suara yang selama ini diabaikan karena terlalu halus, terlalu cair, atau terlalu liar untuk dijadikan arsip.

Sejarah Majalengka yang ditulis dari bawah ke atas bukan hanya akan lebih utuh, tetapi juga lebih adil. Ia memberi tempat bagi yang tak pernah diajak bicara, memberi suara bagi yang hanya berbisik. Maka pertanyaannya bukan lagi “kapan Majalengka lahir?”, melainkan “siapa yang diizinkan untuk mengisahkan kelahirannya?”—dan di situlah sejarah menemukan kejujurannya.

4. *Ingatan yang Diabaikan: Ketika Sejarah Menjadi Medan Kuasa*

Sejarah acapkali dipandang sebagai narasi objektif, netral, dan berbasis bukti tertulis. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dan politis. Ia adalah arena tempat berbagai kepentingan bertarung memperebutkan legitimasi: siapa yang berhak berbicara, siapa yang diberi tempat untuk dicatat, dan siapa yang dilupakan secara sistematis. Di ruang-ruang seperti Majalengka, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan medan kontestasi yang berlangsung terus-menerus—antara kuasa yang mengarsip dan rakyat yang mengingat.

Otoritas untuk mencatat sejarah kerap kali berada di tangan mereka yang memiliki akses terhadap mekanisme

negara: birokrasi, akademisi, dan lembaga-lembaga arsip. Dalam posisi itu, yang ditulis adalah apa yang dapat diverifikasi secara prosedural, bukan yang dihayati secara spiritual. Narasi lisan, ritus adat, nyanyian rakyat, dan tari-tarian yang diwariskan secara turun-temurun sering kali dianggap tak cukup sah untuk dijadikan landasan sejarah. Padahal, justru di sanalah sejarah bersemayam secara paling otentik – dalam tubuh, dalam suara, dalam gerakan yang tak tercatat namun tetap diingat.

Ketika sejarah terlalu bergantung pada bukti tekstual, maka yang tidak pernah ditulis akan dianggap tidak pernah terjadi. Ini bukan saja menciptakan celah antara masa lalu dan masa kini, tetapi juga mengikis legitimasi identitas masyarakat lokal. Majalengka, yang menyimpan lapisan-lapisan narasi lewat seni-seni tradisional seperti Topeng Beber, Tari Sampyong, dan ritual adat panen, mengalami semacam "pengaburan kultural" – di mana bentuk-bentuk ingatan kolektifnya dipinggirkan oleh narasi dominan yang didikte oleh negara atau sejarah akademik yang terlalu formalis.

Kesenian rakyat bukan hanya sarana hiburan, melainkan cara komunitas menafsirkan dan merawat masa lalu. Di setiap gerakan, ada metafora tentang perjuangan. Di setiap syair, ada fragmen sejarah yang tidak ditemukan di dalam dokumen resmi. Maka ketika bentuk-bentuk ini diabaikan dari narasi sejarah formal, yang terjadi bukan hanya penghapusan, tetapi pemutusan kesinambungan batin antara masyarakat dan sejarahnya sendiri.

Mereka yang mewarisi sejarah melalui tubuh—penari tua, juru kunci makam, pawang hujan, atau pembuat pupujian—sejatinya adalah penjaga sejarah yang tidak tercatat. Mereka berbicara dalam bahasa simbol dan metafora, yang tak selalu dapat didekati oleh metodologi akademik yang kaku. Namun justru karena sifatnya yang subtil dan tak dibakukan, narasi mereka menyimpan kelenturan, kedalaman rasa, dan kontinuitas spiritual yang jauh lebih intim dibandingkan sejarah versi resmi.

Mengabaikan mereka berarti memutus satu sisi penting dari keberadaan kita sebagai komunitas historis. Karena itu, membangun kembali narasi sejarah Majalengka harus dimulai dari keberanian untuk mendengarkan ulang: bukan hanya suara yang keras, tetapi juga yang berbisik; bukan hanya tulisan yang tercetak, tetapi juga nyanyian yang hanya terdengar saat padi menguning; bukan hanya tanggal dan fakta, tetapi juga simbol, ritus, dan keheningan.

Sejarah, dalam makna paling dalamnya, bukanlah catatan atas apa yang telah terjadi, tetapi cara kita memilih untuk mengingat dan mewariskan makna. Maka tugas kita bukan hanya merekonstruksi kronologi, tetapi juga merehabilitasi ruang-ruang ingatan yang selama ini tidak diberi tempat. Dalam hal ini, Majalengka tak memerlukan sejarah yang selesai ditulis, melainkan sejarah yang terus disuarakan—lewat tubuh, lewat tradisi, dan lewat keberanian untuk tidak tunduk pada satu narasi tunggal.

5. *Ziarah Intelektual: Menyusuri Sejarah Sebagai Ruang Pencarian Makna*

Sejarah bukan hanya peristiwa yang terjadi, melainkan ruang batin yang terus dibentuk oleh cara kita mengingat, menafsir, dan mempercakapkan masa lalu. Maka, membaca sejarah Majalengka tidak cukup jika hanya mendasarkan diri pada kronologi dan arsip formal. Diperlukan pendekatan yang lebih reflektif, lebih menyentuh sisi eksistensial masyarakatnya. Di sinilah konsep *ziarah intelektual* menemukan relevansinya—sebagai cara berpikir dan merasakan sejarah bukan sebagai dokumen mati, tetapi sebagai perjalanan makna yang hidup dan terus berkembang.

Ziarah, secara kultural, bukan sekadar perjalanan fisik ke tempat-tempat keramat, melainkan juga perjalanan spiritual ke kedalaman makna. Dalam konteks sejarah Majalengka, ziarah intelektual menandai upaya mendekati masa lalu tidak secara linier dan legalistik, tetapi secara kontemplatif—dengan menyusuri jejak-jejak simbolik, narasi lisan, ritus adat, dan ekspresi kebudayaan yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Sejarah dibaca sebagai medan penziarahan batin, tempat manusia Majalengka mencari dirinya sendiri di antara fragmen-fragmen yang berserakan: antara Talaga dan Cirebon, antara cerita leluhur dan kertas kolonial, antara tubuh tari dan batu nisan tua.

Pendekatan ini menolak upaya reduktif yang menyederhanakan sejarah menjadi angka dan tanggal semata. Ia mengajak pembaca untuk hadir secara penuh: bukan hanya

menganalisis, tetapi juga merasakan. Bukan hanya mencatat, tetapi juga merenungi. Karena itu, ziarah intelektual mengandaikan kepekaan terhadap bahasa simbol, intuisi terhadap yang tak terucap, dan penghormatan terhadap bentuk-bentuk pengetahuan yang sering kali tidak masuk dalam kerangka akademik modern—pengetahuan yang hidup di tubuh seniman desa, di ingatan penjaga makam, di nyanyian panen, dan dalam sunyi malam di perbukitan.

Majalengka tidak berbicara melalui dokumen semata, tetapi melalui lanskapnya yang menyimpan jejak-jejak peradaban; melalui ruang desa yang menyatu dengan alam dan ritus; melalui nama-nama kampung yang mengandung sejarah spiritual dan etimologis yang mendalam. Ziarah intelektual menghendaki kehadiran yang utuh—kehadiran yang bukan hanya membaca teks, tetapi juga menyimak angin, mendengar bunyi gamelan yang samar, dan memahami bisikan nilai dalam kebiasaan sehari-hari.

Bukan fakta yang menjadi tujuan akhir dari ziarah ini, tetapi pemahaman yang lebih luas dan lebih manusiawi atas apa yang menjadikan Majalengka sebagai ruang yang hidup. Ziarah ini mengajarkan bahwa sejarah bukanlah warisan yang selesai, melainkan ruang dialog yang terus berlangsung. Maka, semakin seseorang menyelami Majalengka, semakin ia menyadari bahwa sejarah bukan benda untuk dimiliki, melainkan jalan yang harus ditapaki, perlahan dan penuh kesadaran.

Melalui kerangka ziarah intelektual, masyarakat Majalengka diajak untuk menulis ulang sejarahnya bukan

karena ingin menolak masa lalu, melainkan karena ingin memaknainya lebih jujur. Sebuah sejarah yang tidak hanya mengabdikan pada otoritas, tetapi menyuarakan kebenaran batin; sebuah sejarah yang tidak mengukuhkan ego politik, tetapi merawat ingatan kolektif sebagai kekuatan spiritual. Itulah sebabnya Majalengka perlu ditafsir, bukan disimpulkan; perlu diziarahi, bukan dirumuskan; perlu dihidupi, bukan dimuseumkan.

6. *Keberadaan yang Diwariskan: Ketika Budaya Menjadi Bukti Paling Jujur dari Ada*

Keberadaan suatu wilayah tidak selalu bergantung pada pengakuan administratif atau dokumentasi negara. Ada ruang-ruang yang hadir bukan karena ditetapkan, tetapi karena terus dihidupi oleh mereka yang menjadikan budaya sebagai napas harian. Majalengka termasuk dalam wilayah semacam ini. Ia tidak hanya hadir sebagai nama dalam peta, tetapi sebagai ritme hidup yang berpulang pada bunyi kacapi, gerak tari yang diwariskan secara lisan, dan bahasa Sunda lokal yang terus mengalir dari mulut ibu ke anak dalam percakapan sehari-hari. Di titik ini, keberadaan bukan ditentukan oleh akta, melainkan oleh keberlanjutan makna.

Tari Kedempling bukan sekadar pertunjukan panggung, melainkan peristiwa tubuh yang merawat ingatan kolektif. Setiap hentakan kaki dan denting instrumen mengandung narasi yang tidak tertulis—tentang kerja, tentang musim, tentang hubungan manusia dengan kosmos. Demikian pula Topeng Beber, yang dalam diamnya menyimpan wajah-wajah

leluhur yang ingin dikenang, tetapi tak sempat dicatat oleh sejarah formal. Topeng itu tidak hanya menutupi wajah, tetapi juga membuka ruang batin, tempat masyarakat Majalengka membaca ulang dirinya sendiri melalui simbol dan gerak.

Bahasa Sunda Majalengka memegang peranan sentral dalam merawat keberadaan yang subtil ini. Dialek yang khas, kosakata yang penuh nuansa lokal, serta idiom-idiom yang tumbuh dari laku hidup agraris menjadi penanda bahwa Majalengka bukan sekadar ruang fisik, tetapi habitat kultural yang membentuk identitas. Bahasa adalah arsip yang hidup. Ia mencatat tanpa tinta, mengingat tanpa dokumen, dan membentuk kesadaran tanpa harus disebut sejarah. Ketika bahasa lokal dipertahankan, sejatinya masyarakat sedang mempertahankan eksistensi dirinya yang paling dalam.

Keberadaan Majalengka tidak membutuhkan perayaan seremonial yang megah untuk merasa bermakna. Ia cukup untuk dirawat melalui praktik-praktik sederhana yang menyambung masa lalu dengan masa kini. Sebuah desa yang masih menjaga pertunjukan tari tradisi saat musim panen, atau sekelompok pemuda yang mempelajari kembali pupuh Sunda dari kakeknya, sejatinya sedang memperpanjang nyawa sejarah yang tidak diarsipkan. Mereka adalah penjaga kehadiran kultural yang tak tercatat, tetapi terus bernapas.

Keberadaan yang diwariskan melalui budaya ini jauh lebih tahan terhadap perubahan zaman dibandingkan keberadaan yang hanya diakui melalui dokumen. Ketika

dokumen bisa dibatalkan, diralat, atau diabaikan, budaya hidup tetap mengalir di tubuh masyarakat yang meyakini bahwa sejarah bukan soal tulisan, tetapi soal perasaan dan keterlibatan. Dalam konteks ini, Majalengka tidak harus sibuk membuktikan kelahirannya; cukup menunjukkan bahwa ia terus hidup, terus bergerak, dan terus bermakna di mata orang-orang yang mencintainya secara diam-diam.

Kita tidak akan menemukan Majalengka sejati dalam arsip yang tertutup rapat di lemari pemerintahan. Kita justru menemukannya pada lantunan sinden di malam pesta panen, pada cara orang tua menasihati anaknya dalam bahasa lokal yang lembut, atau pada kesetiaan penari tua yang tetap tampil meski tak lagi ada panggung. Di situlah Majalengka hadir – bukan sebagai peristiwa yang tercatat, tetapi sebagai kenyataan yang dihidupi.

7. Ketika Ketidakpastian Menjadi Cahaya: Sejarah Majalengka sebagai Ruang Tafsir yang Terbuka

Tidak semua sejarah harus dijelaskan secara tuntas untuk bisa dihayati secara mendalam. Justru di antara ketidaktuntasan itulah sejarah seringkali menjadi paling jujur: ia tidak memaksakan jawaban, tetapi mengundang penafsiran. Ketidakpastian sejarah Majalengka bukan tanda kegagalan dalam membangun identitas, melainkan penanda dari keluasan jejak dan keragaman suara yang menghidupi narasi daerah ini. Sejarahnya tidak berakhir di satu titik asal yang bisa diklaim secara final, melainkan terus mengalir sebagai proses tafsir yang hidup, lentur, dan terbuka.

Berbagai versi tentang asal-usul Majalengka tidak perlu dilihat sebagai konflik naratif, melainkan sebagai mozaik yang memperlihatkan warisan multikultural. Jejak kerajaan Talaga, pengaruh Sumedanglarang, relasi dengan Cirebon, dan kemudian struktur kolonial Belanda yang menetapkan batas administratif, semuanya merupakan lapisan-lapisan sejarah yang saling bersinggungan, bukan saling meniadakan. Dalam ketidakpastian itu, Majalengka justru menunjukkan wajahnya yang plural – bahwa identitas tidak harus tunggal untuk menjadi utuh.

Setiap upaya untuk menetapkan hanya satu versi sejarah sejatinya membatasi kemungkinan-kemungkinan makna yang lebih dalam. Ketika sejarah dibakukan menjadi satu narasi resmi, maka yang lain menjadi bisu. Padahal, sejarah yang hidup tumbuh dalam percakapan, bukan perintah. Masyarakat Majalengka menyimpan sejarahnya tidak hanya di kertas, tetapi di tubuh tradisi, dalam bisikan bahasa, dan pada ritme hidup yang dijalani sehari-hari. Ketidakpastian yang muncul bukanlah ruang kosong, melainkan ruang potensi: tempat imajinasi kolektif menemukan akar dan arah.

Keragaman tafsir sejarah Majalengka mencerminkan pula dinamika kultural yang kaya. Kesenian tradisi seperti Tari Kedempling atau Topeng Beber tidak pernah dimaksudkan untuk menjelaskan fakta sejarah secara literal, tetapi untuk menghidupkan rasa, nilai, dan pengetahuan kolektif yang tidak bisa dijangkau oleh angka tahun. Dalam simbolisme gerak dan topeng, masyarakat menyampaikan

hal-hal yang tidak dapat mereka tuliskan. Ketika sejarah tidak bisa diceritakan secara linier, seni menjadi bahasa yang menjembatani.

Ketidakpastian juga membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda untuk terus menafsir ulang sejarah yang diwarisi. Mereka tidak harus terkungkung oleh narasi lama, tetapi dapat menyambunginya melalui ekspresi baru, baik dalam bentuk seni, tulisan, maupun riset partisipatif. Sejarah Majalengka, oleh karenanya, tidak dibekukan oleh masa lalu, tetapi dihidupkan kembali oleh masa kini yang sadar akan pentingnya keterbukaan makna.

Masyarakat Majalengka tidak membutuhkan satu versi sejarah untuk merasa memiliki. Mereka membutuhkan ruang untuk mendengar semua versi yang ada, menyerapnya secara kritis, lalu menjahitnya menjadi narasi yang otentik dan membumi. Ketika sejarah dibuka sebagai medan tafsir, maka setiap individu menjadi peziarah yang aktif—bukan penerima narasi pasif.

Majalengka yang tidak selesai adalah Majalengka yang terus bergerak. Ia bukan entitas yang membeku dalam museum, melainkan wacana yang terus menumbuhkan makna baru. Dalam ketidakpastian itulah justru sejarah menjadi lebih manusiawi: bukan soal menghafal tanggal, tetapi soal memahami perjalanan diri—sebagai individu, sebagai komunitas, sebagai warisan yang terus membentuk dan dibentuk.

8. *Tanggal yang Dicari, Akar yang Dirindukan: Eksistensi Majalengka Sebagai Ruang Batin*

Setiap tahun, pertanyaan tentang kapan sesungguhnya Majalengka “lahir” kembali menggema, tak hanya di ruang formal pemerintahan, tetapi juga dalam perbincangan-perbincangan warga yang diam-diam menaruh harap pada satu titik pijakan bersama. Tanggal itu tak pernah benar-benar selesai ditentukan, justru karena masyarakat sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar angka—mereka sedang mencari tempat untuk menambatkan eksistensinya, akar untuk meneguhkan rasa menjadi bagian dari ruang bernama Majalengka. Perdebatan tentang tanggal lahir bukanlah soal administrasi sejarah semata, melainkan gejala dari pencarian identitas yang lebih dalam, yang menyentuh dimensi spiritual dan kultural.

Tidak ada satu hari yang mampu merangkum seluruh perjalanan sejarah Majalengka, sebagaimana tidak ada satu asal yang mampu mewakili kompleksitas warisan leluhurnya. Maka yang dicari bukanlah momen kelahiran dalam pengertian biologis atau politik, melainkan titik cahaya simbolik—hari yang bisa mewakili perasaan kolektif tentang "kita", tentang "dulu", tentang "asal yang ingin kita percaya dan hidupi." Kebutuhan akan tanggal bukan sekadar demi perayaan, tetapi sebagai bentuk afirmasi: bahwa masyarakat membutuhkan akar untuk merasa tumbuh, dan butuh narasi untuk merasa ada.

Pencarian ini bersifat spiritual karena menyangkut keyakinan terdalam tentang makna tempat, makna warisan,

dan makna hidup bersama. Ketika seseorang bertanya kapan Majalengka lahir, sesungguhnya ia sedang bertanya: *kapan kita mulai merasa saling memiliki?*—pertanyaan yang tak mungkin dijawab oleh dokumen atau prasasti, tetapi hanya bisa didekati melalui pengalaman kolektif yang mengendap dalam tubuh budaya. Di sini, sejarah menjadi cermin eksistensi, dan Majalengka menjadi ruang batin yang dimaknai melalui rasa, bukan hanya fakta.

Ritual, seni tradisi, dan bahasa lokal menjadi medium spiritual untuk menyuarakan pencarian tersebut. Tari Kedempling bukan sekadar produk budaya, melainkan nyanyian diam tentang keberadaan yang terus dicoba dirumuskan. Topeng Beber adalah wajah-wajah masa lalu yang diam-diam menatap masa kini, seolah bertanya balik: "Apa yang sedang kalian cari dari kami?" Sementara itu, bahasa Sunda Majalengka menjadi alat untuk merawat kebersamaan yang tidak selalu bisa dirumuskan, tetapi tetap dirasakan. Semua itu adalah upaya untuk menjawab pertanyaan besar secara halus, perlahan, dan simbolik.

Majalengka menjadi lebih dari sekadar kabupaten. Ia adalah medan resonansi spiritual tempat masyarakat mencoba memahami siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ke mana mereka hendak melangkah. Ketiadaan tanggal yang pasti bukanlah kehampaan, melainkan peluang bagi keterlibatan: masyarakat diajak untuk tidak menerima sejarah sebagai pemberian, tetapi mengolahnya sebagai ziarah makna. Proses ini bukan hanya membentuk pengetahuan

baru tentang masa lalu, tetapi juga memperkuat ikatan batin terhadap tanah yang mereka pijak.

Pencarian tanggal kelahiran Majalengka adalah cermin dari kerinduan manusia akan keterikatan—bukan pada waktu, tetapi pada makna. Maka, selama masyarakat terus bertanya dan menafsir, Majalengka tidak pernah kehilangan kelahirannya. Ia selalu lahir kembali, di setiap langkah yang menghidupi budaya, di setiap laku yang merawat ingatan, dan di setiap rindu yang menolak dilupakan oleh sejarah resmi.

9. *Membaca yang Belum Usai: Hermeneutika Sejarah Majalengka dan Tafsir Identitas*

Sejarah yang tidak selesai bukanlah celah yang harus ditambal, melainkan ruang yang layak dihuni oleh tafsir. Ketika Majalengka tidak dapat dipaku pada satu narasi tunggal, maka pendekatan hermeneutik menjadi niscaya: suatu jalan pemahaman yang membuka kemungkinan dialog antar versi, kesediaan untuk mendengar yang berbeda, dan keberanian untuk tidak buru-buru menutup makna. Hermeneutika di sini bukan metode teknis belaka, tetapi laku budaya—yakni bagaimana masyarakat membaca sejarah sebagai teks terbuka, yang terus berbicara dan menuntut keterlibatan.

Tidak semua yang tidak utuh harus disatukan secara paksa. Majalengka, dengan warisan historisnya yang plural—mulai dari Katumenggungan Talaga hingga bayang-bayang pengaruh Cirebon dan Sumedanglarang—adalah ladang

tafsir yang menuntut kerendahan hati untuk menyimak. Setiap versi sejarah, baik yang tertulis di arsip kolonial maupun yang hanya berbisik di antara para juru kunci dan penari tua, menyimpan serpihan identitas yang sah. Nilai bukan ditentukan oleh seberapa resmi sebuah versi, tetapi seberapa dalam ia berakar dalam kesadaran dan praktik hidup masyarakat.

Menempatkan sejarah sebagai teks yang hidup berarti membuka ruang untuk interpretasi yang bersifat partisipatif. Tafsir tidak dimonopoli oleh sejarawan, tetapi juga tumbuh di tangan seniman, budayawan lokal, petani yang masih mengulang ritual nenek moyangnya, dan anak-anak yang memanggil tanah ini sebagai rumah. Di sinilah hermeneutika menjadi bentuk keadilan epistemik – membuka peluang agar setiap bentuk pengetahuan, entah itu ilmiah, spiritual, simbolik, atau intuitif, diberi tempat untuk turut menyusun mozaik sejarah yang lebih utuh dan manusiawi.

Dialog antar narasi adalah inti dari pendekatan ini. Tidak ada satu suara yang menutup yang lain. Narasi resmi dari lembaga negara perlu berdialog dengan kisah rakyat, sebagaimana catatan sejarah kolonial perlu diimbangi oleh jejak-jejak budaya yang tertinggal di naskah Sunda kuno atau artefak lisan. Proses ini bukan untuk mencari kebenaran tunggal, melainkan untuk merajut keberagaman makna menjadi kesadaran kolektif yang lentur, berakar, dan berdaya hidup.

Masyarakat Majalengka tidak membutuhkan sejarah yang seragam, tetapi sejarah yang bisa mereka maknai dan

akui sebagai miliknya. Hermeneutika sejarah mengandaikan bahwa kita tidak sekadar mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami bagaimana kita memilih untuk mengingat, menafsir, dan mewariskannya. Oleh sebab itu, yang kita perlukan bukanlah kepastian, melainkan kedalaman pemahaman; bukan penyatuan narasi, melainkan pertemuan makna yang saling merawat.

Membaca sejarah Majalengka secara hermeneutik berarti memasuki medan spiritual yang tak sepenuhnya dapat dirumuskan, tetapi dapat dirasakan dan didekati. Setiap cerita, setiap ritus, setiap tarian, dan bahkan setiap kesunyian memiliki peran dalam membentuk kesadaran akan siapa kita, dari mana kita datang, dan bagaimana kita ingin melanjutkan hidup bersama sebagai masyarakat yang tidak memusuhi keragaman tafsir, tetapi menjadikannya sumber kekuatan identitas.

10. Menyimak dari Pinggiran: Ketika Ingatan yang Dibungkam Menjadi Arah Baru Sejarah

Tidak semua sejarah lahir dari pusat. Banyak yang justru tumbuh di tepi, di batas-batas suara yang pernah dibungkam, di celah antara yang diakui dan yang diabaikan. Sejarah Majalengka, ketika dibebaskan dari tuntutan kepastian tunggal, sesungguhnya sedang membuka ruang bagi mereka yang selama ini tak diberi suara. Inilah bentuk partisipasi yang sejati—ketika ingatan tak lagi dimonopoli oleh kekuasaan, melainkan ditulis ulang oleh masyarakat melalui jejak-jejak kecil yang dahulu dianggap tak penting, tetapi ternyata menyimpan inti kebudayaan yang paling jujur.

Kisah yang berasal dari pinggiran bukan berarti inferior. Justru dari situlah muncul narasi yang lebih manusiawi, lebih membumi, dan lebih dekat dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Para pelaku seni tradisi, tetua adat, perempuan penjaga rumah tangga budaya, hingga petani yang mewariskan cerita lewat sawah dan ladang, adalah penulis sejarah yang sah. Mereka tak membutuhkan lembar arsip untuk mengingat. Yang mereka miliki adalah tubuh yang terus bergerak mengikuti siklus alam dan jiwa yang tertambat pada tanah yang diwariskan dari leluhur.

Ketiadaan tuntutan akan kepastian membuka lanskap hermeneutik yang lebih demokratis. Ketika tidak ada satu narasi yang mendominasi, maka setiap narasi diberi ruang untuk hadir. Sejarah pun tak lagi menjadi milik birokrasi, tetapi menjadi ruang pertemuan antara banyak versi, banyak suara, dan banyak cara memahami masa lalu. Kebenaran tidak lagi dipatok dari apa yang tertulis, melainkan dari apa yang dirasakan bersama – sebuah kebenaran yang lahir dari keberanian untuk mendengar yang terlupakan.

Majalengka sebagai ruang budaya justru lebih kuat ketika mengakui bahwa sejarahnya tidak tunggal. Pengakuan ini menciptakan peluang untuk menggali kembali ingatan-ingatan lokal yang tersebar di luar pusat administratif. Dusun-dusun yang menyimpan legenda, surau-surau tua yang masih menanam nilai, dan panggung-panggung kecil tempat tari Kedempling masih ditampilkan – itulah sumber sejarah yang sejati. Ketika pusat kekuasaan berhenti menulis

atas nama rakyat, maka rakyat mulai menulis dari pengalaman mereka sendiri – sunyi, tapi mengakar.

Partisipasi masyarakat dalam menuliskan sejarahnya bukan bentuk perlawanan, melainkan bentuk perawatan. Mereka yang bicara dari pinggiran tidak sedang menolak narasi resmi, tetapi sedang memperkaya, melengkapi, dan membebaskan sejarah dari kesempitan tunggalitas. Di sini, sejarah menjadi kegiatan etis, spiritual, dan politis sekaligus – yakni kegiatan untuk menyatukan ingatan kolektif yang berserakan menjadi satu medan tafsir yang hidup, egaliter, dan membebaskan.

Menulis sejarah dari pinggiran berarti memulihkan yang terluka, merawat yang nyaris hilang, dan menghadirkan kembali suara-suara yang dulu dipinggirkan karena dianggap tak cukup penting untuk dicatat. Ketika Majalengka mengizinkan sejarahnya dibaca dari bawah, ia bukan sedang kehilangan pijakan, tetapi sedang menemukan dirinya yang paling otentik – yakni sebagai tanah tempat budaya tumbuh, bukan sebagai arsip yang dibekukan.

11. Merawat yang Tak Selesai: Sejarah Majalengka sebagai Perziarahan Batin dan Kultural

Merawat sejarah yang tidak tuntas adalah tindakan yang menuntut kedewasaan spiritual. Alih-alih terburu-buru menetapkan asal yang pasti, masyarakat Majalengka dihadapkan pada pilihan untuk menyelami ketidaktuntasan sebagai bagian dari proses memahami siapa mereka. Ketika sejarah tidak dibekukan menjadi satu versi tunggal, maka

yang terbuka adalah ruang ziarah—ruang untuk menyusuri jejak-jejak batin yang mengalir melalui cerita rakyat, ritual leluhur, kesenian tradisional, dan lanskap yang masih menyimpan bisikan masa silam.

Tidak setiap masa lalu dapat dijelaskan secara terang. Banyak yang justru hadir sebagai simbol, sebagai rasa, sebagai atmosfer yang mengendap dalam kehidupan sehari-hari. Majalengka tidak selalu hadir dalam bentuk tanggal dan catatan resmi, tetapi lebih sering hidup di antara sawah yang terus digarap, di atas panggung kecil pertunjukan rakyat, dan di lisan para tetua desa yang masih menuturkan asal-usul bukan sebagai fakta, melainkan sebagai kearifan. Ketidaktuntasan sejarah justru menjadi kekuatan spiritual karena ia menuntut keterlibatan hati, bukan hanya pengetahuan.

Melihat sejarah sebagai perziarahan batin berarti menggeser pusat pemaknaan dari kepala ke dada. Yang dicari bukan kepastian arsip, melainkan resonansi makna yang hidup dalam tubuh masyarakat. Di titik ini, sejarah tidak lagi menjadi tugas sejarawan semata, tetapi menjadi jalan kebudayaan yang harus dilalui oleh siapa pun yang ingin memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari tanah yang bernama Majalengka. Tradisi, ritus, dan ekspresi budaya bukan pelengkap sejarah, melainkan jantungnya—karena di situlah warisan tidak hanya dikenang, tetapi dihidupi.

Ketika sejarah disadari sebagai ruang spiritual, maka merawat ketidaktuntasannya menjadi bentuk penghormatan

terhadap waktu. Bukan semua hal harus segera dijawab. Beberapa hal cukup untuk direnungkan, dilestarikan, dan dirasakan kehadirannya melalui simbol dan gerak. Tari Kedempling misalnya, tidak sedang menceritakan sejarah secara linear, tetapi sedang membuka ruang batin tempat leluhur dan anak cucu dapat bertemu melalui irama yang tak pernah selesai didefinisikan. Sejarah semacam ini adalah sejarah yang hidup—karena tidak dibakukan, melainkan dirayakan.

Kita tidak kehilangan arah ketika sejarah tidak selesai. Justru dari ketidaktuntasan itu, kita belajar berjalan pelan-pelan, menapaki masa lalu sebagai tanah yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Setiap kebingungan tentang asal bukanlah kekosongan, tetapi undangan untuk mendekat, untuk menyimak, dan untuk menziarahi makna yang tersembunyi. Di sinilah Majalengka menjelma bukan hanya sebagai ruang administratif, tetapi sebagai medan spiritual tempat masyarakat mencari kembali jejak dirinya.

Menjadikan sejarah sebagai perziarahan batin mengubah cara kita memandang warisan: dari sekadar objek kebanggaan menjadi ladang kontemplasi. Ia bukan sekadar soal kebesaran masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita menyambung diri ke akar, tanpa harus mengurungnya dalam satu versi. Ketidaktuntasan itu sendiri adalah bagian dari jalan pulang—jalan yang tidak lurus, tidak cepat, tetapi penuh makna dan kedalaman.

12. *Menghidupkan, Bukan Menyelesaikan: Majalengka sebagai Ruang Pemaknaan yang Tak Pernah Usai*

Sejarah bukan sesuatu yang harus selalu dituntaskan. Tidak semua daerah membutuhkan titik akhir dalam narasinya untuk menjadi bermakna. Majalengka adalah contohnya: sebuah wilayah yang lebih layak untuk terus dihidupkan daripada diselesaikan. Keberadaannya tidak ditentukan oleh arsip yang dipaku pada satu tanggal, tetapi oleh aliran makna yang berpindah dari generasi ke generasi. Ia tidak sedang menunggu penegasan historis, tetapi terus mengajukan diri sebagai ruang yang bisa diisi, ditafsir, dan dimaknai bersama.

Tidak ada satu generasi pun yang bisa mengklaim selesai memahami Majalengka. Setiap anak yang tumbuh, setiap bahasa yang dilafalkan ulang, setiap kesenian yang ditampilkan kembali adalah bentuk partisipasi dalam merawat keberlanjutan makna. Proses ini bukan sekadar pelestarian tradisi, tetapi perjumpaan batin antara yang lama dan yang baru, antara akar dan ranting yang menjulang ke masa depan. Majalengka, dalam pengertian ini, bukan sekadar wilayah geografis, melainkan ladang ingatan yang terus ditanami oleh kesadaran kolektif masyarakatnya.

Ruang budaya seperti Majalengka tidak hidup dari pengakuan administratif, melainkan dari kepatuhan sunyi masyarakatnya terhadap warisan nilai. Ritual, bahasa, dan seni adalah media hidup yang terus menumbuhkan kembali makna asal-usul, bukan karena masa lalu harus diulang,

tetapi karena masa lalu harus diajak bicara. Ketika kesenian rakyat seperti Kedempling atau Sampyong terus digelar, ketika dongeng-dongeng tua diceritakan kembali kepada anak-anak, maka sesungguhnya sejarah sedang dihidupkan—bukan untuk dikenang secara beku, tetapi untuk diresapi dan dimaknai ulang.

Majalengka adalah medan eksistensial, tempat masyarakatnya tidak hanya hidup secara fisik, tetapi juga secara simbolik dan spiritual. Di sini, sejarah bukan menjadi museum, tetapi menjadi cermin. Apa yang ditampilkan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga apa yang sedang dirasakan. Maka, setiap upaya untuk memahami Majalengka sejatinya adalah upaya untuk memahami diri sendiri dalam cermin kebudayaan yang diwariskan.

Pencarian diri kolektif masyarakat Majalengka tidak akan pernah benar-benar selesai, dan memang tidak perlu diselesaikan. Proses pencarian itu sendiri adalah jalan yang menyatukan, mempertemukan ingatan dan harapan, tradisi dan tafsir baru. Sejarah yang dihidupkan melalui pemaknaan lintas generasi menjadikan Majalengka bukan sekadar kabupaten, tetapi ruang spiritual yang menampung denyut makna dari masa ke masa.

Majalengka tidak sedang menunggu siapa pun untuk meresmikannya, melainkan menunggu siapa saja yang bersedia hadir untuk menghidupkannya. Karena sejarah yang paling sejati bukan yang ditetapkan, melainkan yang dirawat. Bukan yang selesai ditulis, melainkan yang terus dibacakan dan dimaknai bersama.

C. Penutup

Tidak semua yang tidak pasti berarti lemah. Justru pada ketidaktuntasan itulah sejarah menjadi ruang yang hidup – ruang yang menampung suara yang tidak tunggal, makna yang tidak selesai, dan identitas yang terus bergerak. Majalengka tidak kehilangan dirinya hanya karena tanggal kelahiran yang terus diperdebatkan. Ia justru menemukan kekuatannya pada kemampuan untuk terus ditafsir, terus dihidupi, dan terus diperbincangkan lintas generasi. Keberadaannya bukanlah hasil dari penetapan, melainkan hasil dari kesetiaan masyarakatnya terhadap jejak, rasa, dan ingatan yang diwariskan.

Ruang sejarah bukan ranah milik negara semata. Ia adalah tanah bersama yang ditaburi benih oleh banyak tangan: petani yang menanam cerita di ladang, sinden yang menyuarakan kisah leluhur, anak muda yang menuliskan kembali dongeng neneknya, bahkan seorang juru kunci yang menjaga makam bukan hanya dari rumput liar, tetapi dari pelupaan. Sejarah Majalengka bukan untuk diputuskan, melainkan untuk dirawat – seperti taman yang tidak pernah selesai ditata, tetapi selalu indah dalam keragaman tumbuhannya.

Penolakan terhadap kepastian bukanlah bentuk kekacauan, tetapi justru bentuk kearifan. Di tengah zaman yang serba tergesa dan serba seragam, Majalengka menampilkan wajah sejarah yang bersahaja namun penuh

hikmah—sejarah yang tidak membekukan masa lalu menjadi angka, melainkan mengalirkannya ke masa kini sebagai kesadaran. Sejarah tidak lagi menuntut untuk dipaku pada kronologi, tetapi hadir sebagai nadi yang bergetar melalui bahasa, tubuh, tanah, dan waktu.

Majalengka bukan kisah yang selesai ditulis. Ia adalah kitab terbuka yang tiap halamannya ditulis ulang oleh kehidupan sehari-hari. Perdebatan tentang kelahirannya tidak perlu dihentikan, sebab justru di dalam pertanyaan-pertanyaan itulah kesadaran akan akar menjadi tumbuh. Apa yang terus ditanyakan belum tentu menyesatkan—ia justru menjadi jembatan antara sejarah dan harapan, antara yang diwarisi dan yang akan diwariskan.

Biarlah sejarah Majalengka tetap menjadi ziarah. Bukan sebagai destinasi yang menuntut kepastian, tetapi sebagai jalan yang mengajarkan bahwa menjadi bagian dari tanah ini bukan soal tahu tanggal, tetapi soal mampu menyimak denyutnya yang halus. Biarlah masyarakat tetap berbicara, tetap merayakan, dan tetap mengisahkan, meski tak pernah tiba pada satu titik. Karena mungkin, memang di situlah letak keindahan dan kebijaksanaannya: bahwa Majalengka tak perlu diselesaikan—ia cukup terus dihidupkan.

Ketika Sejarah Majalengka Digugat?

Pengantar

Ketika sebuah wilayah mengklaim akar sejarahnya, maka yang sedang ditegakkan bukan sekadar fakta masa lalu, melainkan juga legitimasi atas identitas dan makna keberadaan masa kini. Begitu pula dengan Majalengka. Sejak ditetapkannya tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi resmi melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982, masyarakat dan pemerintah lokal telah membangun narasi kesejarahan yang kokoh dalam ruang-ruang seremonial dan kebanggaan publik. Narasi ini, yang tampak telah membentuk kesadaran kolektif selama lebih dari empat dekade, menyematkan Majalengka ke dalam garis waktu sejarah nasional sebagai daerah yang "lebih tua" dari Jakarta atau Ciamis, sekaligus menautkannya dengan denyut Kerajaan Galuh dan Sunda-Pajajaran. Namun ketika dikaji dengan lensa historiografi kritis, muncul kegamangan yang menggugah: benarkah klaim tahun 1490 itu memiliki dasar faktual yang kokoh? Adakah dokumen primer atau artefak yang secara sah dapat memverifikasi klaim tersebut, ataukah ia sekadar mitos yang dinaturalisasi oleh kepentingan simbolik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang semakin kuat bergema di ruang akademik dan publik belakangan ini, membawa kita pada satu titik kontemplasi: mungkinkah selama ini sejarah Majalengka telah dibangun lebih karena

kebutuhan akan makna daripada karena kebenaran faktual? Dalam konteks ini, gugatan terhadap sejarah bukanlah tindakan destruktif, melainkan justru jalan menuju pemurnian makna kolektif yang lebih jujur dan reflektif. Ketika sejarah digugat, maka yang sebenarnya sedang diuji adalah keberanian untuk merevisi, menyempurnakan, dan mendewasakan narasi yang selama ini diterima begitu saja. Ini adalah momen penting untuk menjadikan sejarah bukan sekadar kisah kebanggaan, tetapi juga cermin kritis yang menuntun masyarakat pada pemahaman yang lebih berakar dan bertanggung jawab terhadap masa lalunya. Sebab dalam sejarah yang jujur, terkandung potensi paling mendasar bagi bangsa dan daerah: integritas, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk terus bertumbuh dalam terang kebenaran.

Sejarah sebagai Otoritas Simbolik

Konstruksi kultural suatu masyarakat tidak pernah bebas dari peran sejarah yang berfungsi bukan semata sebagai kumpulan fakta masa lalu, tetapi sebagai narasi yang membentuk, mengarahkan, dan memelihara identitas kolektif. Penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka bukan hanya mencerminkan keputusan administratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982, tetapi juga telah membentuk otoritas simbolik yang terinternalisasi dalam ritus peringatan, dokumen resmi, perayaan publik, hingga kurikulum pendidikan lokal. Selama lebih dari empat dekade,

tanggal tersebut dihidupi sebagai kebenaran kultural yang diterima luas oleh masyarakat, terlepas dari verifikasi historiografisnya.

Telaah historiografis yang lebih kritis menunjukkan bahwa fondasi otoritas simbolik tersebut berdiri di atas dasar yang rapuh. Tidak ditemukan bukti primer yang sahih – baik arsip administratif, prasasti, maupun dokumen kontemporer dari abad ke-15 – yang mendukung klaim bahwa Majalengka berdiri pada tanggal tersebut. Narasi yang mendasarinya sebagian besar berasal dari tradisi tutur dan mitos lokal, seperti kisah “enteng pasosore”, legenda “majae-langka”, dan cerita “ngahiangnya Ratu Ambet Kasih”. Meski sarat makna simbolik, semua itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam kerangka sejarah ilmiah, sehingga menimbulkan ketegangan antara penerimaan publik dan absennya pembuktian ilmiah.

Konsepsi sejarah tidak lagi sekadar menjadi representasi objektif masa lalu, melainkan tampil sebagai wacana kuasa yang menciptakan legitimasi sosial dan politik kontemporer. Penetapan hari jadi menjadi arena simbolik yang membentuk rasa memiliki, mengukuhkan horizon identitas, serta menanamkan loyalitas kultural. Ketika tanggal 7 Juni 1490 terus dirayakan tanpa adanya verifikasi kritis, yang terjadi bukanlah selebrasi terhadap kebenaran sejarah, melainkan reproduksi dari sejarah sebagai artefak ideologis yang dilembagakan demi kepentingan kohesi sosial.

Otoritas simbolik seperti ini memiliki daya ikat yang tinggi dalam membangun kebanggaan kolektif, namun

menyimpan potensi distorsi bila tidak diiringi dengan keterbukaan terhadap kritik. Ketika mitos dilembagakan sebagai fakta, maka sejarah berisiko menjadi doktrin, dan doktrin yang tak diuji akan menjelma menjadi narasi beku yang anti-kritik. Situasi ini membuka celah bagi manipulasi simbolik oleh kekuatan yang ingin mengontrol makna sejarah demi kepentingan tertentu. Apa yang seharusnya menjadi instrumen pencerdasan publik malah berbalik menjadi instrumen hegemonik yang membungkam nalar kritis masyarakat terhadap asal-usulnya sendiri.

Keberanian intelektual dan kedewasaan kultural dibutuhkan untuk merevisi narasi sejarah tanpa merusak akar emosional dan kultural yang telah terbangun. Sejarah tidak harus dihapus ketika ditemukan kekeliruan; ia justru harus direkonstruksi menjadi narasi yang lebih akurat, jujur, dan transformatif. Penetapan hari jadi berdasarkan mitos dapat diposisikan sebagai bagian dari warisan budaya simbolik, sementara dokumen administratif seperti *Staatsblad* 1840 atau jejak Islamisasi pada abad ke-16 dapat menjadi basis narasi historis yang lebih sah. Upaya ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan proses etik untuk merawat warisan masa lalu secara bertanggung jawab dan membimbing generasi kini menuju pemahaman sejarah yang reflektif, kontekstual, dan bermartabat.

Ketiadaan Bukti Historis Primer

Klaim bahwa Kabupaten Majalengka berdiri pada tahun 1490 hingga saat ini belum dapat didukung oleh bukti historis primer yang sah. Tidak satu pun dokumen tertulis, prasasti,

70

naskah administratif, maupun artefak konkret yang ditemukan mampu menjelaskan secara eksplisit tentang keberadaan struktur pemerintahan kabupaten pada akhir abad ke-15 di wilayah tersebut. Absennya sumber primer ini merupakan persoalan mendasar dalam metodologi sejarah, yang menuntut setiap pernyataan kronologis tentang masa lampau untuk didasarkan pada data yang dapat diverifikasi secara ilmiah.

Narasi yang sering digunakan sebagai pijakan untuk menjustifikasi tanggal tersebut justru bersumber pada legenda-legenda lokal seperti “majae-langka” dan kisah spiritual “ngahiangnya Ratu Ambet Kasih”. Dua cerita ini, sekalipun sarat makna simbolik dan kultural, lebih tepat dikategorikan sebagai *mentifact*, yakni produk mental kolektif masyarakat yang bersifat mitologis, bukan historiografis. Keberadaan kisah-kisah ini mengindikasikan bahwa masyarakat Majalengka memiliki ingatan kolektif yang kuat terhadap masa lalunya, tetapi tidak serta-merta dapat digunakan sebagai basis legitimasi kronologi pemerintahan administratif.

Penggunaan narasi folklor sebagai fondasi sejarah administratif tidak hanya menimbulkan ambiguitas epistemologis, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara memori budaya dan disiplin ilmu sejarah. Fakta bahwa mitos lokal lebih banyak dirayakan daripada ditelaah, memperlihatkan kecenderungan romantisasi masa lalu yang, jika dibiarkan tanpa kritik, akan berujung pada distorsi pemahaman sejarah. Tradisi tutur memiliki peran penting

dalam membentuk identitas lokal, namun tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa dukungan bukti material atau teks historis tertulis yang dapat diuji melalui kaidah ilmiah.

Ketika peringatan tanggal 7 Juni 1490 terus dilangsungkan berdasarkan narasi yang belum terverifikasi, sejarah mengalami pergeseran fungsi: dari disiplin akademik yang kritis menjadi konstruksi simbolik yang bersifat ideologis. Pada titik inilah dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa ketiadaan bukti bukanlah sekadar kekurangan dokumentasi, melainkan panggilan untuk menyusun ulang kerangka berpikir historis secara lebih bertanggung jawab. Reinterpretasi terhadap tanggal berdirinya Majalengka harus dilakukan bukan untuk meniadakan warisan budaya masyarakat, tetapi untuk menempatkan setiap narasi sesuai dengan karakter epistemologisnya—antara yang bersifat mitologis dan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Konsekuensi dari membiarkan narasi mitologis menggantikan historiografi akademik sangatlah besar. Tidak hanya berdampak pada pembelajaran sejarah yang kabur arah, tetapi juga memengaruhi kebijakan, perencanaan pembangunan, dan orientasi kebudayaan yang bergantung pada pemaknaan masa lalu. Tugas generasi hari ini bukanlah menghapus narasi lama, melainkan menyaring, mengklarifikasi, dan menyusunnya ulang menjadi kerangka sejarah yang bukan hanya mengakar dalam emosi kolektif, tetapi juga kokoh dalam fondasi metodologis. Tanpa keberanian untuk meninjau ulang, sejarah Majalengka akan

terus berada dalam bayang-bayang narasi yang lebih menenangkan daripada mencerdaskan.

Inkonsistensi Kronologi Islamisasi

Klaim bahwa wilayah Sindangkasih telah diislamkan pada tahun 1490 menimbulkan ketegangan kronologis yang signifikan ketika ditelaah melalui pendekatan historiografis yang kritis. Pernyataan ini menjadi problematik, terutama karena Islamisasi wilayah-wilayah lain yang berada secara geografis lebih strategis dan historis lebih dominan seperti Rajagaluh dan Katumenggungan Talaga baru terjadi pada rentang waktu 1528 hingga 1530. Fakta ini menunjukkan adanya jeda waktu hampir empat dekade yang tidak sejalan secara logis maupun politis, mengingat proses Islamisasi pada masa itu umumnya berlangsung secara gradual dan mengikuti pola-pola ekspansi spiritual serta militer yang sistematis.

Kesaksian dari Babad Cirebon dan Naskah Wangsakerta menegaskan bahwa tokoh utama penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya adalah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), yang baru diangkat sebagai Raja Cirebon pada 1479 dan dikukuhkan menjadi wali pada 1482. Dari titik ini, penyebaran Islam mulai menancapkan pengaruhnya, tetapi butuh waktu beberapa dekade untuk menjangkau daerah-daerah lebih jauh di pedalaman seperti Talaga dan Rajagaluh. Menyatakan bahwa Sindangkasih telah lebih dahulu menerima dakwah Islam pada 1490 berarti

menempatkannya lebih progresif secara spiritual dibandingkan dua kerajaan besar yang memiliki struktur politik dan militer yang jauh lebih mapan—sebuah klaim yang sulit diterima akal sejarah.

Argumentasi kronologis ini menjadi semakin lemah ketika diperbandingkan dengan dinamika geopolitik dan jaringan kekuasaan pada akhir abad ke-15. Majalengka pada masa itu masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran), yang bercorak Hindu-Buddha, dan menunjukkan resistensi terhadap pengaruh Islam dari wilayah pesisir seperti Cirebon. Seandainya dakwah Islam telah mencapai Sindangkasih pada 1490, tentu terdapat jejak keberlanjutan dalam bentuk struktur keislaman yang lebih awal, baik dalam artefak, catatan keagamaan, maupun sumber lokal. Namun hingga kini, tidak ditemukan indikasi kuat yang mampu memperkuat klaim tersebut secara empiris maupun naratif yang kredibel.

Penempatan tahun 1490 sebagai momen Islamisasi Sindangkasih juga melahirkan kerancuan teologis dan kultural. Narasi tentang Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah yang diutus Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan wilayah tersebut, jika benar terjadi pada tahun itu, justru bertabrakan dengan catatan resmi bahwa Sunan Gunung Jati sendiri baru mengukuhkan pengaruhnya secara luas setelah dekade 1520-an. Ini bukan semata soal perbedaan angka, tetapi soal keberlangsungan alur sejarah yang memiliki implikasi pada legitimasi narasi budaya. Ketika

logika kronologis tidak dijaga secara ketat, sejarah mudah tergelincir menjadi fiksi kolektif yang tak lagi bisa dipertanggungjawabkan.

Menjadikan tahun 1490 sebagai simbol awal Islamisasi di Sindangkasih tanpa pembuktian historis yang sah bukan hanya merupakan kekeliruan metodologis, tetapi juga melemahkan kredibilitas tradisi sejarah lokal secara keseluruhan. Narasi yang tidak sinkron secara kronologi akan mudah digugat oleh pendekatan akademik modern yang menuntut bukti, koherensi, dan konsistensi dalam merekonstruksi masa lampau. Proses penyusunan ulang sejarah Majalengka, khususnya dalam konteks Islamisasi, seharusnya tidak didasarkan pada narasi populer yang tidak teruji, tetapi pada pembacaan kritis terhadap sumber-sumber resmi yang tersedia.

Kejujuran dalam menyusun kronologi Islamisasi bukanlah tindakan dekonstruksi yang merusak kehormatan tradisi, melainkan langkah penyucian makna sejarah dari lapisan-lapisan simbolik yang menyesatkan. Ketika sejarah dibersihkan dari inkonsistensi kronologis, ia bukan menjadi lemah, tetapi justru menjadi lebih kuat—sebab kebenaran tidak lahir dari pengulangan mitos, melainkan dari keberanian untuk merevisi dan merekonstruksi narasi secara ilmiah. Dalam terang kesadaran ini, gugatan terhadap klaim Islamisasi tahun 1490 tidak seharusnya dimaknai sebagai penolakan terhadap jati diri lokal, melainkan sebagai upaya pematangan cara pandang masyarakat terhadap sejarahnya sendiri.

Posisi Akademik yang Menggugat

Sejarawan terkemuka Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra secara konsisten dan argumentatif menyuarakan kritik akademik terhadap penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka. Menurutnya, pada penghujung abad ke-15, entitas pemerintahan kabupaten belum dikenal dalam sistem pemerintahan tradisional Nusantara, termasuk di wilayah tatar Sunda yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam struktur kekuasaan tradisional tersebut, unit-unit administratif seperti kabupaten adalah konstruksi kolonial yang baru diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Dengan demikian, klaim bahwa Kabupaten Majalengka telah berdiri sejak tahun 1490 tidak memiliki dasar historis yang dapat dibenarkan dari sudut pandang sistem politik dan administrasi yang berlaku pada masa itu.

Penegasan Prof. Sobana memperlihatkan urgensi untuk membedakan antara konstruksi identitas kultural yang bersifat simbolik dan rekonstruksi sejarah yang bersandar pada validitas sumber primer. Seringkali, masyarakat mengafirmasi identitas kolektif melalui narasi historis yang bersifat romantik dan mitologis, namun dalam disiplin ilmu sejarah, kebenaran harus ditopang oleh verifikasi terhadap dokumen, artefak, dan konteks yang dapat diuji secara metodologis. Ketika suatu narasi sejarah publik tidak memiliki jejak empiris yang kuat, maka ia lebih tepat disebut sebagai ingatan kultural atau *mentifact* daripada sejarah

akademik yang sah. Pandangan inilah yang menjadi dasar kritik akademik terhadap legitimasi tanggal 7 Juni 1490, karena tidak ditemukan bukti tertulis, struktur birokrasi, atau artefak administratif yang menegaskan eksistensi Kabupaten Majalengka pada masa tersebut.

Dalam pandangan kritis Prof. Sobana, Majalengka sejatinya merupakan kelanjutan administratif dari Kabupaten Maja, yang ditetapkan berdasarkan dokumen resmi pemerintah kolonial, khususnya Staatsblad No. 7 dan Besluit Gubernur Jenderal D.J. de Eerens pada 11 Februari 1840. Perubahan nama dari Kabupaten Maja menjadi Majalengka serta pemindahan pusat pemerintahan dari Maja ke Sindangkasih (Majalengka) merupakan keputusan administratif yang terdokumentasi dan memiliki kekuatan legal-historis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memberikan pijakan yang jauh lebih kokoh bagi penetapan hari jadi Majalengka ketimbang narasi-narasi yang bersumber dari mitos lokal atau cerita tutur yang tidak dapat diverifikasi. Penolakan terhadap basis kolonial sebagai sumber sejarah, jika tidak disertai oleh alternatif bukti yang lebih sah, justru akan mengaburkan objektivitas historiografi itu sendiri.

Pernyataan akademik ini bukan berarti menafikan pentingnya dimensi simbolik dan kultural yang terkandung dalam narasi lokal. Identitas kultural tetap memiliki tempat dan fungsi vital dalam membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan. Namun, ketika narasi simbolik

diinstitusionalisasi dalam kebijakan publik dan pendidikan tanpa verifikasi ilmiah yang memadai, maka ia berpotensi menyesatkan generasi berikutnya. Dalam konteks inilah, kritik Prof. Sobana perlu dilihat bukan sebagai upaya untuk meruntuhkan jati diri lokal, tetapi justru sebagai panggilan intelektual untuk membangun narasi sejarah yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan bermartabat secara akademik.

Ketika sejarah dijadikan fondasi dalam penataan identitas lokal, maka transparansi sumber, ketepatan metode, dan integritas ilmiah menjadi keniscayaan yang tidak boleh dikompromikan. Memelihara narasi yang lemah dari sisi historiografis hanya akan memperlebar jurang antara kenyataan dan klaim identitas. Dalam terang ini, posisi akademik yang digagas oleh Prof. Sobana membuka ruang refleksi yang lebih luas: bahwa kebanggaan terhadap daerah tidak harus dibangun di atas mitos yang goyah, tetapi bisa dibangun di atas pijakan historis yang kokoh dan terbuka terhadap kritik ilmiah. Justru di sanalah letak kematangan sejarah—yakni pada keberaniannya untuk direvisi demi kebenaran, bukan demi kenyamanan simbolik belaka.

Staatsblad dan Besluit 1840 sebagai Titik Historis Legal

Dokumen Staatsblad No. 7 dan Besluit Gubernur Jenderal D.J. de Eerens yang dikeluarkan pada 11 Februari 1840 menyimpan bobot historis yang tidak dapat direduksi hanya sebagai produk dari rezim kolonial. Keduanya secara administratif menetapkan perubahan nama Kabupaten Maja

menjadi Kabupaten Majalengka serta memindahkan pusat pemerintahannya dari Maja ke Sindangkasih (Majalengka). Dalam teks keputusan tersebut bahkan secara eksplisit tercantum ketetapan bahwa: *“het regentschap Madja (residentie Cheribon) alsmede de zetel van dit Regentschap, thans genaamd Sindang-Kassie, voortaan den naam zullen voeren van: MADJALENGKA”*. Kejelasan redaksional ini memberikan bentuk legal pertama terhadap eksistensi Majalengka sebagai entitas administratif yang dapat diverifikasi dan ditelusuri secara historis.

Keberadaan dokumen resmi dari pemerintah Hindia Belanda tersebut memberikan titik pijak yang jelas dan terdokumentasi atas lahirnya Majalengka sebagai satuan administratif modern. Berbeda dengan narasi-narasi yang bersumber dari legenda dan mentifact lokal, Staatsblad dan Besluit memiliki validitas epistemik yang dapat diuji menurut standar ilmiah dalam historiografi. Ia bukan sekadar catatan birokrasi, melainkan sumber primer yang mencerminkan konstruksi institusional suatu wilayah. Penetapan tahun 1840 sebagai tonggak sejarah administratif Majalengka tidak hanya membawa kejelasan kronologi, tetapi juga menghadirkan legitimasi struktural terhadap keberadaan pemerintahan lokal yang berbadan hukum.

Resistensi terhadap penggunaan sumber kolonial dalam narasi sejarah daerah acapkali didasarkan pada sentimen ideologis yang menganggap produk kolonial sebagai instrumen hegemonik dan eksploitatif. Namun, dalam

kerangka historiografi kritis, sumber sejarah tidak dapat dinilai semata dari muatan ideologis penghasilnya, melainkan dari nilai informatif, keberlanjutan struktural, dan koherensi dokumenternya. Mengabaikan dokumen kolonial yang valid atas dasar romantisme identitas lokal justru dapat menjauhkan sejarah dari prinsip-prinsip obyektivitas dan keterbukaan ilmiah. Dalam kasus Majalengka, sumber-sumber kolonial tersebut tidak hanya memuat keputusan administratif, tetapi juga merekam transisi dari struktur kerajaan tradisional menuju sistem pemerintahan modern yang lebih terorganisasi.

Penerimaan terhadap dokumen kolonial sebagai sumber sejarah bukan berarti merayakan kolonialisme, melainkan bentuk kedewasaan intelektual dalam membedakan antara sumber dan kekuasaan yang melahirkannya. Majalengka, sebagaimana banyak daerah lain di Nusantara, mengalami transformasi signifikan dalam masa kolonial, dan proses itu terekam secara sah dalam dokumen resmi seperti *Staatsblad*. Justru karena dokumentasi semacam ini sangat jarang ditemukan dalam narasi lokal yang didominasi oleh cerita tutur, maka penting bagi para akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku budaya untuk menempatkannya sebagai referensi historis utama dalam penentuan titik asal administratif.

Mewujudkan kejujuran historis bukanlah tugas yang ringan, terlebih ketika harus berhadapan dengan identitas yang telah dilembagakan dalam simbol-simbol peringatan

dan ritus kultural yang berlangsung lama. Namun jika sejarah ingin dijadikan alat pembebasan dan pencerahan, maka fondasinya harus kokoh. Ketika dokumen seperti Staatsblad dan Besluit 1840 memberikan dasar legal-formal yang teruji, mengabaikannya demi mempertahankan narasi yang lemah secara historis justru merupakan bentuk pemiskinan memori kolektif. Dalam terang ini, 1840 bukan sekadar angka, tetapi representasi legalitas yang menghadirkan Majalengka ke dalam panggung sejarah modern secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dikotomi antara Legalitas dan Simbolisme Sosial

Tanggal 7 Juni 1490 telah menjelma menjadi simbol kultural yang meresap ke dalam kesadaran kolektif masyarakat Majalengka. Ia tidak sekadar dirayakan sebagai hari jadi, melainkan juga diperlakukan sebagai penanda historis yang mempersatukan identitas komunal. Momentum ini hidup melalui perayaan tahunan, pidato resmi, narasi media, hingga ruang-ruang pendidikan lokal yang mengukuhkannya sebagai fakta historis, walaupun belum didukung oleh verifikasi ilmiah yang kokoh. Resonansi kulturalnya mengakar kuat karena mengisi kebutuhan masyarakat akan asal-usul yang membanggakan, mengikat, dan bersifat simbolik. Dalam titik ini, sejarah tidak lagi dipahami sebagai hasil verifikasi arsip, tetapi sebagai fondasi imajinasi kolektif yang menautkan masa lalu dengan identitas masa kini.

Ketegangan muncul ketika narasi yang telah melembaga secara sosial itu diperhadapkan pada legalitas historiografis yang menuntut keberadaan sumber primer, bukti tekstual, dan koherensi kronologis. Sejarah akademik menolak pengakuan tanpa dasar verifikasi; ia berpijak pada prinsip metodologis yang menjadikan bukti sebagai penentu nilai kebenaran. Sebaliknya, sejarah sosial sering kali lebih lentur, memberi tempat pada simbolisme dan tafsir kolektif yang tidak sepenuhnya rasional, namun efektif membangun solidaritas. Dalam kasus Majalengka, ketegangan antara dua pendekatan ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga ideologis. Ketika akademisi mempertanyakan keabsahan tanggal 7 Juni 1490, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai pelecehan terhadap warisan kultural yang telah lama diinternalisasi.

Dikotomi antara legalitas dan simbolisme sosial membuka ruang diskusi tentang apa yang sejatinya dimaksud dengan sejarah publik. Apakah sejarah harus setia pada fakta, ataukah ia harus adaptif terhadap nilai-nilai simbolik yang menghidupi kolektivitas? Ataukah keduanya dapat berjalan seiring, saling melengkapi dalam ranah yang berbeda? Dalam konteks ini, peran negara, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam menjembatani ketegangan tersebut. Ketika simbol sosial dibiarkan tanpa klarifikasi historis, ia berisiko menjadi dogma. Sebaliknya, ketika fakta historis dipaksakan tanpa sensitivitas kultural, ia dapat memicu resistensi yang kontraproduktif. Maka yang dibutuhkan

bukanlah eliminasi satu sisi atas sisi lainnya, melainkan dialektika terbuka antara disiplin ilmiah dan makna kultural.

Sejarah Majalengka yang ideal bukanlah sejarah yang hanya hidup di arsip, melainkan sejarah yang mampu menjalin kejujuran akademik dengan kedalaman simbolik. Tanggal 7 Juni 1490 mungkin tidak dapat dibuktikan secara pasti, namun ia dapat tetap dikenang sebagai bagian dari mitos kultural yang dimaknai secara terbuka. Sementara itu, titik sejarah yang terverifikasi—seperti Staatsblad 1840—dapat difungsikan sebagai pilar faktual dalam membangun narasi sejarah yang lebih akurat. Dalam horizon yang demikian, sejarah bukan lagi medan tarik-menarik antara akademisi dan masyarakat, tetapi ruang kolaboratif untuk membangun memori kolektif yang jujur, kritis, dan bermartabat.

Pentingnya Dialog Historis yang Reflektif

Kontroversi mengenai hari jadi Kabupaten Majalengka menyimpan peluang besar bagi tumbuhnya praktik sejarah yang lebih dewasa dan reflektif. Ketegangan antara narasi folklor, keputusan administratif, dan historiografi akademik tidak sepatutnya dilihat sebagai pertentangan yang harus diselesaikan secara binaris—antara yang benar dan yang salah, antara yang sah dan yang fiktif—melainkan sebagai ruang dialog yang mempertemukan dimensi simbolik dan verifikatif sejarah secara kritis. Tradisi lisan, mitologi lokal, dan memori kolektif memiliki daya hidup yang tak kalah

kuatnya dibanding dokumen tertulis, selama diinterpretasikan secara proporsional dan tidak diklaim sebagai fakta historis. Sementara itu, disiplin historiografi yang didasarkan pada prinsip verifikasi metodologis memiliki tanggung jawab untuk menjernihkan batas antara yang mungkin terjadi dan yang telah terbukti terjadi.

Penting untuk mengakui bahwa sejarah tidak pernah netral; ia selalu hadir dalam ruang nilai, kekuasaan, dan makna. Ketika masyarakat Majalengka terus merayakan tanggal 7 Juni 1490, yang dirayakan bukan hanya narasi kronologis, melainkan rasa keterikatan terhadap suatu identitas lokal yang telah dilembagakan selama lebih dari empat dekade. Namun, legitimasi simbolik ini menjadi rapuh apabila dijadikan dasar tunggal tanpa membuka ruang dialog dengan evidensi ilmiah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Peninjauan ulang bukanlah upaya untuk menghapus simbol atau melecehkan memori kolektif, melainkan langkah kritis untuk merestorasi sejarah agar lebih selaras antara yang dirasakan, yang diketahui, dan yang dibuktikan.

Kesadaran sejarah yang sehat adalah kesadaran yang bersedia merefleksikan asal-usulnya, meninjau ulang narasinya, dan menerima bahwa ketidaksempurnaan masa lalu bukanlah aib, tetapi medan tumbuhnya kebijaksanaan kolektif. Majalengka memiliki modal kultural yang kuat untuk menjalani proses ini—modal yang terbentuk dari kearifan lokal, kedewasaan sosial, dan dinamika intelektual

yang mulai tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Bila kontroversi ini disikapi secara terbuka, tanpa prasangka dan tanpa ketakutan akan kehilangan identitas, maka Majalengka justru akan menjadi contoh daerah yang mampu berdialog secara dewasa antara masa lalu dan masa kini, antara memori dan metodologi, antara simbol dan substansi.

Rekontekstualisasi sejarah Majalengka bukan hanya soal penanggalan administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah masyarakat memaknai dirinya dalam arus waktu. Keberanian untuk meninjau ulang bukan berarti memutus akar, tetapi memperkuatnya dengan kesadaran baru yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Sejarah yang dikritisi secara reflektif akan memberi tempat bagi generasi mendatang untuk tidak sekadar mengenang, tetapi juga memahami—bahwa kebenaran sejarah bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari atas, melainkan dirawat bersama melalui dialog yang terbuka, metodologis, dan bermartabat.

Model Alternatif Penetapan Hari Jadi

Penetapan hari jadi sebuah daerah sepatutnya tidak dilakukan secara serampangan atau semata berdasarkan dorongan romantisme lokal. Ia menuntut kehati-hatian metodologis sekaligus kepekaan kultural agar narasi sejarah yang dibangun mampu berdiri tegak sebagai refleksi identitas yang kredibel dan inspiratif. Dalam konteks ini, lima pendekatan konseptual dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan ulang hari jadi Kabupaten Majalengka. Kelima

pendekatan tersebut meliputi: nilai kekunoan yang bertumpu pada prasasti kuno; nilai perjuangan yang menekankan momentum heroisme pembebasan; pendekatan spiritual-historis yang merujuk pada transformasi keagamaan atau nilai-nilai adiluhung lokal; pendekatan administratif kerajaan yang berdasarkan pengangkatan atau pengesahan pemimpin oleh otoritas tradisional; serta pendekatan sosio-historis yang mengeksplorasi dinamika pertumbuhan masyarakat dalam konteks tertentu.

Model nilai kekunoan dan nilai perjuangan memiliki kelemahan serius untuk diterapkan di Majalengka karena keterbatasan bukti arkeologis serta absennya catatan monumental yang mengabadikan peristiwa heroik dalam konteks anti-kolonialisme atau nasionalisme awal. Tidak terdapat prasasti maupun artefak sejarah yang dapat dijadikan fondasi kuat untuk mengklaim eksistensi pemerintahan Majalengka sejak abad ke-9 sebagaimana Kota Kediri, atau peristiwa militer yang sejajar dengan pengusiran Portugis oleh Fatahillah sebagaimana terjadi di Jakarta tahun 1527. Dua pendekatan ini, sekalipun bernilai simbolik tinggi, akan sangat rentan jika tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara arkeologis maupun historiografis.

Sebaliknya, pendekatan spiritual-historis, administratif kerajaan, dan sosio-historis menghadirkan relevansi yang lebih kuat serta fleksibilitas interpretatif yang lebih luas bagi Majalengka. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan

Gunung Jati terhadap Rajagaluh dan Talaga pada dekade 1520-an dan 1530-an, misalnya, tidak hanya tercatat dalam sejumlah naskah lokal seperti *Babad Cirebon* dan *Wangsakerta*, tetapi juga menyimpan kedalaman spiritual dan transformasi nilai yang sangat signifikan. Islamisasi bukan sekadar peristiwa religius, tetapi juga pemaknaan ulang terhadap kekuasaan dan tatanan sosial. Pendekatan administratif kerajaan juga memungkinkan untuk menelusuri momen-momen pengangkatan tokoh lokal sebagai pemimpin dalam struktur kerajaan sebelumnya, sebagai penanda institusionalisasi awal pemerintahan lokal. Hal ini dapat dijadikan acuan asal-mula Majalengka sebagai unit pemerintahan sebelum memperoleh status kabupaten dalam sistem kolonial.

Pendekatan sosio-historis, sebagai model yang paling dinamis, membuka ruang bagi penelusuran sejarah dari bawah – yakni melalui studi tentang dinamika sosial, jaringan perdagangan, perubahan pola permukiman, dan struktur kekuasaan informal dalam masyarakat Majalengka sebelum pengakuan formal dari pemerintah kolonial. Ia tidak memerlukan satu titik monumental, melainkan memaknai sejarah sebagai proses bertahap yang membentuk struktur sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Ketiga pendekatan ini, jika diintegrasikan secara metodologis, mampu menyusun narasi hari jadi yang tidak hanya kuat secara historis, tetapi juga kaya secara simbolik dan inklusif secara kultural.

Penetapan hari jadi Majalengka tidak cukup hanya mengacu pada satu versi atau satu peristiwa tunggal. Ia seharusnya merupakan hasil dari konsensus ilmiah dan kultural yang dibangun melalui penelitian, dialog antarpemangku kepentingan, dan pemaknaan ulang terhadap peristiwa sejarah lokal yang telah membentuk wajah Majalengka hari ini. Kesadaran bahwa setiap pilihan tanggal membawa beban ideologis sekaligus potensi pemersatu perlu menjadi bagian dari pertimbangan kolektif. Sejarah yang sehat adalah sejarah yang terus diperiksa, dikaji, dan disusun ulang secara bertanggung jawab – bukan untuk melemahkan identitas, tetapi untuk mengukuhkannya atas dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual.

Sejarah sebagai Cermin, Bukan Ornamen

Sejarah tidak pernah sekadar berhenti pada peran dokumentatif yang membekukan masa lalu ke dalam lembaran arsip, prasasti, atau tanggal-tanggal monumental. Lebih dari itu, sejarah adalah medium artikulatif yang menghidupkan dan membingkai identitas kolektif sebuah masyarakat, sekaligus menjadi ruang refleksi atas nilai-nilai yang diwariskan. Dalam kasus Majalengka, sejarah tidak cukup hanya dimaknai sebagai catatan administratif atau mitologis yang diulang setiap tahun melalui upacara dan seremoni. Ia harus menjadi cermin yang jernih – yang bukan saja memantulkan masa lalu, tetapi juga mengundang

masyarakatnya untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri secara jujur dan kritis. Ketika sejarah dijadikan alat legitimasi tanpa basis keilmuan yang kuat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran faktual, tetapi juga integritas kultural.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap simbol tanpa verifikasi historis yang memadai berisiko mengurangi sejarah menjadi sekadar hiasan retorik. Perayaan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Majalengka, misalnya, meskipun sarat makna simbolik dan emosi kolektif, belum ditopang oleh sumber primer yang dapat diuji secara metodologis. Ketika narasi tersebut terus dipertahankan tanpa ruang dialog akademik yang sehat, sejarah menjelma menjadi mitos yang membekukan nalar. Ketimbang memperkuat jati diri, kondisi ini justru menciptakan narasi tunggal yang resisten terhadap kritik dan cenderung mempersempit cakrawala interpretasi sejarah yang lebih luas dan terbuka. Akibatnya, Majalengka bukan hanya kehilangan peluang untuk merekonstruksi sejarahnya secara berdaulat, tetapi juga terjebak dalam glorifikasi yang bersifat semu dan simbolik belaka.

Identitas sejati suatu daerah tidak akan tercerabut hanya karena fakta-fakta sejarah direvisi atau dikoreksi. Justru keberanian untuk mengakui bahwa sejarah bisa keliru, parsial, bahkan manipulatif—adalah fondasi kedewasaan kolektif yang sesungguhnya. Revisi terhadap sejarah Majalengka bukanlah pembongkaran terhadap harga diri masyarakatnya, melainkan upaya menyusun kembali fondasi

identitas secara lebih autentik. Ketika masyarakat Majalengka berani mempertanyakan legitimasi tanggal kelahiran wilayahnya, mereka sedang menjalani proses transformasi kesadaran historis. Mereka sedang membebaskan diri dari dogma yang membelenggu interpretasi dan membuka kemungkinan lahirnya narasi sejarah yang tidak hanya lebih faktual, tetapi juga lebih memanusiaikan.

Tindakan pemurnian sejarah tidak pernah berhenti pada urusan metodologi ilmiah semata. Ia menyentuh ranah moral dan spiritual—yakni kesediaan suatu masyarakat untuk merawat ingatan masa lalunya secara kritis dan bertanggung jawab. Memurnikan sejarah berarti menghindarkan diri dari kecenderungan menjadikan kebohongan sebagai fondasi kebanggaan, dan sebaliknya menumbuhkan kebudayaan yang bersandar pada kejujuran, keterbukaan, dan kematangan intelektual. Sebab tidak ada peradaban besar yang tumbuh dari kebohongan yang dikultuskan; semua peradaban yang bertahan adalah mereka yang memiliki keberanian untuk melihat masa lalunya secara utuh, lengkap dengan luka, dilema, dan kebesaran yang sejati.

Ketika Majalengka memilih untuk menempatkan sejarahnya sebagai cermin dan bukan sekadar ornamen kebanggaan, maka masyarakatnya sedang membentuk ekosistem kesadaran yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sejarah tidak lagi dimaknai sebagai kepemilikan birokrasi, tetapi sebagai hak warga untuk memahami akar dan arah hidupnya. Kesadaran seperti ini akan memungkinkan

Majalengka untuk menata masa depannya secara lebih bijaksana, dengan bersandar pada warisan yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga mencerdaskan. Dalam terang ini, sejarah menjadi fondasi moral dan kultural yang tidak sekadar mengingat, tetapi juga menghidupkan: menghidupkan nilai, menghidupkan nalar, dan menghidupkan harapan.

Ajakan Merawat Sejarah Secara Kritis

Merawat sejarah sejatinya adalah praktik kesadaran budaya yang menuntut keberanian untuk menempatkan masa lalu tidak sebagai doktrin beku, tetapi sebagai medan terbuka bagi pencarian makna yang dinamis dan terus berkembang. Narasi yang dianggap mapan sering kali mendapatkan status nyaris sakral, padahal sejatinya ia lahir dari konteks sosial, politik, dan ideologis tertentu yang bisa berubah atau bahkan bias. Ketika narasi sejarah dibekukan atas nama stabilitas atau kebanggaan kolektif, maka yang terjadi bukanlah perawatan terhadap ingatan, melainkan pembekuan nalar yang menjauhkan masyarakat dari akurasi dan integritas historis. Dalam hal ini, mempertanyakan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka tidaklah berarti meruntuhkan kebanggaan lokal, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan etis untuk memastikan bahwa narasi yang dihidupi benar-benar memiliki dasar yang sahih secara metodologis dan kredibel secara epistemologis.

Sejarah yang kuat bukan sejarah yang tak tergugat, melainkan sejarah yang sanggup menanggapi gugatan dengan kerendahan hati ilmiah dan kelapangan berpikir. Justru narasi yang mampu bertahan setelah melalui berbagai kritik dan telaah ulang adalah narasi yang akan memiliki ketahanan makna dalam jangka panjang. Dalam kasus Majalengka, gugatan terhadap legitimasi tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi membuka ruang diskursif yang subur untuk mempertemukan antara narasi resmi, folklor lokal, dan kajian akademik secara dialogis. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses klarifikasi sejarah, maka yang terbentuk bukan hanya ketepatan kronologis, tetapi juga peningkatan kapasitas budaya untuk menyikapi masa lalu secara dewasa dan terbuka.

Majalengka sebagai entitas sosial-budaya membutuhkan keberanian untuk bersikap reflektif terhadap warisan naratif yang selama ini dipegang erat. Dalam konteks ini, identitas kolektif bukanlah sesuatu yang akan goyah hanya karena satu tanggal ditinjau ulang, justru akan semakin kokoh ketika masyarakatnya bersedia membuka ruang bagi transparansi historis dan pemurnian narasi. Sebuah peradaban yang besar tidak diukur dari seberapa teguh ia mempertahankan cerita lama, melainkan seberapa bersedia ia merevisi cerita tersebut ketika ditemukan ketidaktepatan atau kekeliruan. Revisi sejarah tidak identik dengan penghinaan terhadap leluhur, melainkan penghormatan tertinggi atas kebenaran yang lebih utuh dan adil bagi generasi kini dan nanti.

Menyikapi sejarah sebagai medan refleksi dan bukan sekadar ornamen kebanggaan seremoni tahunan, berarti memosisikannya sebagai instrumen pedagogis yang membentuk nalar publik. Ketika sejarah diposisikan demikian, maka makna “hari jadi” bukan lagi terkurung dalam ritus seremonial dan ritual administratif, tetapi melebur menjadi energi kultural yang mampu memantik pembaruan cara berpikir, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong keberanian masyarakat untuk membaca diri mereka secara lebih mendalam. Dalam kerangka ini, Majalengka tidak hanya sedang menata narasi tentang “kapan ia lahir”, tetapi juga sedang membangun ulang cara berpikir tentang apa artinya menjadi Majalengka hari ini—yakni komunitas yang tidak takut terhadap sejarah, tidak silau oleh mitos, dan tidak menolak kebenaran hanya karena tidak nyaman.

Proses ini tentu tidak mudah. Ia menuntut ruang publik yang inklusif, literasi sejarah yang memadai, dan ketulusan dari semua pihak untuk menempatkan sejarah sebagai alat pencerdasan, bukan pembenaran. Sejarah Majalengka yang selama ini mengambang di antara mitos dan fakta, jika tidak dirawat secara kritis, berpotensi kehilangan kekuatannya sebagai penopang identitas. Namun jika dialektika ini dijalankan dengan jujur dan mendalam, maka Majalengka tidak hanya akan memiliki sejarah yang lebih valid secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif yang matang—kesadaran yang menjadikan sejarah sebagai cermin

pembebas, bukan bingkai simbolik yang membatasi daya tafsir. Di sinilah sejarah menemukan kemuliaannya: bukan karena ia dihormati tanpa tanya, melainkan karena ia dicintai dalam terang kebenaran.

Simpulan

Sejarah Majalengka yang hingga kini dilekatkan pada tanggal 7 Juni 1490 merupakan konstruksi simbolik yang telah lama melekat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ia tidak sekadar dijadikan instrumen administratif, tetapi juga telah menjelma menjadi ritus budaya yang mengikat identitas lokal secara emosional. Namun ketika narasi tersebut diuji melalui lensa historiografi akademik, tampak jelas bahwa fondasinya lebih berdiri pada tradisi tutur dan mitos lokal dibanding pada verifikasi ilmiah yang sah. Ketiadaan bukti historis primer, ketidaksesuaian kronologis dengan proses Islamisasi wilayah sekitarnya, serta keraguan dari posisi akademik yang otoritatif, menegaskan bahwa sejarah Majalengka masih menyisakan ruang kontestasi yang perlu dijernihkan.

Legitimasi simbolik yang terbangun selama puluhan tahun tentu tidak serta-merta harus dihapus. Sebaliknya, ia dapat dirawat sebagai bagian dari memori budaya sepanjang tidak diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran historis. Dalam konteks ini, kejujuran untuk meninjau ulang narasi sejarah justru merupakan ekspresi dari kedewasaan kultural dan keberanian intelektual. Dokumen legal seperti Staatsblad 1840 dan proses Islamisasi abad ke-16 menawarkan landasan

yang lebih kokoh untuk membangun narasi alternatif yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, tetapi juga tetap menghargai kedalaman simbolik dan spiritual yang selama ini menghidupi imajinasi kolektif masyarakat Majalengka.

Sejarah tidaklah berhenti sebagai arsip masa lalu, melainkan terus bergerak sebagai medan refleksi yang menuntut pembacaan ulang dari waktu ke waktu. Ketika Majalengka bersedia membuka ruang dialog yang mempertemukan antara simbolisme sosial, pendekatan akademik, dan warisan kultural, maka yang dibangun bukan hanya narasi yang lebih akurat, tetapi juga ekosistem kesadaran sejarah yang sehat. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk tidak sekadar merayakan masa lalu, tetapi juga memaknainya secara kritis dan transformatif—sehingga sejarah menjadi cermin yang memandu langkah, bukan ornamen yang membekukan makna.

Sejarah Majalengka atau Sejarah Kabupaten Majalengka?

Pengantar

Penelusuran terhadap jejak historis Majalengka kerap kali dihadapkan pada satu persoalan mendasar namun jarang dibicarakan secara serius: apakah yang dimaksud selama ini adalah sejarah *Majalengka* sebagai sebuah wilayah kultural yang tumbuh dari simpul-simpul kerajaan lama dan praktik sosial yang berlapis, atautkah *sejarah Kabupaten Majalengka* sebagai entitas administratif modern yang dibentuk oleh struktur kolonial? Pertanyaan ini bukan sekadar permainan istilah, melainkan menggugah kesadaran kita tentang bagaimana sebuah entitas ruang dan identitas dilegitimasi melalui bahasa sejarah. Ketika narasi kesejarahan bercampur antara yang mitologis dan yang administratif tanpa penyekatan kritis, maka yang terbentuk bukan pemahaman yang utuh, melainkan kabut makna yang membingungkan. Apalagi ketika tanggal 7 Juni 1490 dijadikan dasar penetapan hari jadi Kabupaten Majalengka—tanpa bukti primer dan cenderung bersandar pada mentifact—kita menghadapi situasi di mana sejarah dan simbol bercampur menjadi satu tanpa kerangka epistemologis yang tegas.

Distingsi antara sejarah Majalengka dan sejarah Kabupaten Majalengka amat penting tidak hanya sebagai diskursus akademik, tetapi juga sebagai pijakan untuk

menata ulang cara pandang masyarakat terhadap asal-usulnya. Majalengka sebagai ruang geografis dan budaya telah eksis jauh sebelum nomenklatur kabupaten dilekatkan padanya oleh Staatsblad tahun 1840. Namun eksistensi tersebut tidak serta-merta identik dengan struktur pemerintahan kabupaten yang baru terbentuk pada masa kolonial. Ketika masyarakat dan pemerintah menyatukan dua entitas tersebut dalam satu narasi sejarah yang tunggal, sesungguhnya sedang berlangsung proses simplifikasi identitas yang berpotensi mengaburkan garis perbedaan antara memori kultural dan sistem legal-politik. Maka penting bagi kita untuk melakukan peninjauan ulang secara kritis, bukan untuk menghapus sejarah yang telah mapan, tetapi untuk menyusun ulang jalinan naratifnya agar lebih jujur, akurat, dan bertanggung jawab secara akademik maupun moral.

1. Perbedaan Konseptual: Wilayah Budaya vs Entitas Administratif

Sejarah Majalengka sebagai ruang budaya tidak bisa direduksi semata pada narasi administratif yang dimulai dari struktur kekuasaan formal. Sebelum konsep kabupaten dikenal, wilayah ini telah membentuk dirinya melalui dialektika antara manusia, alam, dan simbol. Tradisi lisan, ritus agraris, kesenian rakyat, serta sistem nilai lokal telah membangun lanskap kebudayaan yang hidup dan dinamis, bahkan jauh sebelum pengakuan resmi secara negara-bangsa.

Majalengka sebagai wilayah budaya memuat lapisan-lapisan sejarah yang tidak tersusun secara linier, melainkan terbentuk melalui akumulasi pengalaman kolektif, migrasi nilai, dan konstruksi makna yang berlangsung secara intergenerasional.

Wilayah yang kini disebut Majalengka dahulu merupakan bagian dari jalinan geografis dan politik yang lebih luas, mencakup Kerajaan Sunda, Rajagaluh, dan Talaga. Identitas kultural masyarakatnya tumbuh tidak dari dokumen resmi, tetapi dari praktik sehari-hari yang menyatu dengan tanah, musim, dan bahasa. Pada titik ini, sejarah Majalengka lebih tepat disebut sebagai *sejarah kebudayaan* – yakni narasi yang dibentuk oleh cara hidup, kesadaran kolektif, dan simbol-simbol lokal yang diwariskan secara non-dokumentatif, tetapi memiliki kekuatan internal yang mempersatukan.

Berbeda dari itu, sejarah Kabupaten Majalengka sebagai entitas administratif baru dapat dirunut secara valid sejak keluarnya *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 11 Februari 1840. Keputusan tersebut tidak hanya mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, tetapi juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Maja ke Sindangkasih (Majalengka). Teks hukum kolonial ini menjadi batas permulaan yang paling sah secara dokumentatif mengenai keberadaan Majalengka sebagai unit pemerintahan yang memiliki struktur birokrasi modern. Konsepsi kabupaten lahir dari sistem kolonial yang mengorganisasi

wilayah berdasarkan kepentingan pengendalian administratif, bukan berdasarkan kesatuan budaya yang telah lebih dulu hidup di masyarakat.

Ketika dua jenis narasi ini—narasi kebudayaan dan narasi administratif—disamakan atau dileburkan tanpa distingsi konseptual yang tepat, maka kebingungan epistemologis akan mudah terjadi. Sejarah Majalengka yang berbasis memori dan warisan kultural seharusnya diberi ruang untuk tetap berkembang sebagai ekspresi identitas, tanpa harus dipaksakan menjadi legitimasi legalitas administratif. Sebaliknya, sejarah Kabupaten Majalengka yang berdasar pada dokumen kolonial tidak seharusnya dianggap sebagai penghinaan terhadap budaya lokal, tetapi sebagai titik awal yang dapat diverifikasi dalam narasi historiografi formal.

Penegasan perbedaan ini bukan untuk membenturkan dua sudut pandang, melainkan untuk menjernihkan ruang sejarah dari kabut ambiguitas. Sejarah budaya dan sejarah administratif dapat berjalan beriringan, saling melengkapi, tetapi harus tetap disusun dalam kerangka yang berbeda. Keduanya memiliki nilai dan fungsinya masing-masing—satu sebagai cermin identitas batin masyarakat, satu lagi sebagai penanda legalitas dan jejak institusional dalam kerangka negara modern. Ketika perbedaan ini diabaikan, maka sejarah yang semestinya mencerdaskan justru berisiko menjadi alat reproduksi mitos yang membekukan kesadaran kritis kolektif.

2. Majalengka Sebagai Ruang Simbolik dan Historis

Nama “Majalengka” bukan sekadar penanda geografis atau administratif, tetapi memuat resonansi simbolik yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakatnya. Ia hadir sebagai medan makna yang dibentuk oleh lintasan cerita rakyat, ritus agraris, dan kesenian tradisional seperti Topeng Beber, Sampyong, hingga narasi mistis “majae-langka” dan “ngahiangnya Ratu Ambet Kasih.” Nama ini hidup bukan di arsip resmi, tetapi di ruang imajinasi dan spiritualitas masyarakat—sebuah ruang budaya yang berlapis, yang ditenun oleh bahasa, musim panen, irama gamelan, dan jejak langkah para leluhur. Keberadaan Majalengka sebagai nama yang “dihayati” secara kolektif membuktikan bahwa masyarakatnya telah lama membangun relasi historis dan kultural dengan tanah yang mereka diami, jauh sebelum nama itu dilembagakan secara hukum.

Simbolisme ini memperlihatkan kekuatan budaya yang mampu bertahan tanpa perlu pengakuan administratif. Nama Majalengka menjadi titik temu antara alam dan makna, antara ingatan lokal dan kontinuitas sosial. Bahkan sebelum terbitnya *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1840 yang menetapkan Majalengka sebagai kabupaten, wilayah ini telah menjadi lanskap eksistensial yang membentuk rasa memiliki dan kesadaran identitas masyarakatnya. Namun, makna simbolik yang mendalam ini tidak dapat secara serta-merta dijadikan dasar historis untuk

menegaskan keberadaan sistem pemerintahan kabupaten dalam pengertian struktural dan administratif modern.

Historiografi sebagai disiplin akademik menuntut kejelasan sumber, kerangka kronologis yang koheren, dan validitas dokumen. Dalam konteks ini, tidak cukup hanya menghadirkan narasi simbolik tanpa penopang data faktual yang dapat diverifikasi. Tradisi lisan dan ritus simbolik memang bernilai tinggi sebagai unsur kebudayaan, tetapi mereka tidak dapat menggantikan kedudukan bukti primer dalam konstruksi sejarah institusional. Ketika simbolisme dijadikan dasar legalitas administratif, yang terjadi bukan perayaan kebudayaan, melainkan potensi mistifikasi sejarah yang menyulitkan generasi berikutnya untuk memahami garis asal-usulnya secara metodologis dan bertanggung jawab.

Tindakan yang bijaksana adalah memberi ruang terhormat bagi nama Majalengka sebagai simbol ruang budaya yang hidup, tanpa harus menjadikannya sebagai pijakan klaim administratif yang belum tervalidasi. Sebuah wilayah bisa memiliki jejak budaya yang panjang tanpa harus memaksakan legitimasi administratif dari masa yang belum mengenal konsep kabupaten. Perbedaan antara simbolisme dan historiografi justru akan memperkaya cara pandang terhadap sejarah Majalengka—yakni sebagai daerah yang memiliki warisan budaya yang kuat, sekaligus mampu membaca ulang dirinya secara kritis dalam kerangka sejarah formal yang lebih akurat. Pada titik inilah, Majalengka bukan

hanya dihargai karena apa yang dipercaya masyarakat tentang masa lalunya, tetapi juga karena keberaniannya menempatkan makna dan fakta secara proporsional dalam ruang kesadaran sejarah kolektif.

3. **Kabupaten Majalengka dan Dasar Hukum Kolonial**

Pembentukan Kabupaten Majalengka sebagai entitas administratif secara legal memperoleh legitimasi paling kuat melalui *Staatsblad* No. 7 dan *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 11 Februari 1840. Dalam dokumen resmi tersebut secara eksplisit tercantum perubahan nama dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, sekaligus penetapan pemindahan pusat pemerintahan dari Maja ke wilayah Sindangkasih yang kini dikenal sebagai Majalengka. Redaksi keputusan itu tidak hanya mencerminkan kehendak kolonial, tetapi juga menandai munculnya struktur administratif modern yang didokumentasikan secara hukum dan berlaku dalam sistem birokrasi kolonial Hindia Belanda.

Keberadaan *Besluit* dan *Staatsblad* sebagai dokumen resmi menjadikannya sebagai sumber historiografis yang memiliki validitas tinggi. Di tengah langkanya bukti primer mengenai struktur pemerintahan lokal di masa pra-kolonial, dua dokumen ini menyediakan titik pijak yang konkret bagi sejarawan dalam menelusuri asal-usul Kabupaten Majalengka secara sistematis dan terukur. Tidak seperti narasi folkloristik atau mentifact lokal yang tidak bisa diverifikasi secara empiris, bukti administratif ini memiliki karakter

arsitektural dalam historiografi: ia tidak hanya mencatat sebuah peristiwa, tetapi juga menyusun kerangka institusional yang mengatur relasi kuasa, birokrasi, dan teritori.

Mengabaikan dokumen kolonial seperti *Staatsblad* 1840 hanya karena sumbernya berasal dari rezim penjajahan adalah bentuk kekeliruan metodologis. Sejarah sebagai ilmu tidak mengenal sentimen ideologis terhadap sumber; yang dinilai adalah konsistensi informasi, keabsahan redaksional, dan kemungkinan verifikasi. Justru dalam konteks sejarah lokal yang kerap diliputi oleh mitos dan simbolisme kultural, kehadiran arsip resmi seperti *Staatsblad* memberikan kejelasan yang dibutuhkan untuk membedakan antara klaim historis dan konstruksi kultural. Tidak berarti menolak nilai budaya lokal, tetapi memberikan landasan epistemologis agar sejarah dapat dijelaskan bukan hanya dari sisi imajinasi kolektif, tetapi juga dari logika dokumentasi.

Ketika penetapan 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Majalengka tidak dapat ditopang oleh dokumen primer, maka merujuk pada *Staatsblad* dan *Besluit* tahun 1840 menjadi pilihan yang lebih sah dan bertanggung jawab. Tahun tersebut bukan hanya menandai nomenklatur administratif baru, tetapi juga menjadi penanda awal dari sejarah Majalengka sebagai unit pemerintahan yang diakui secara legal. Dalam horizon historiografi, keputusan tersebut adalah arsip hidup yang menjembatani masa lalu dan masa kini, serta

memungkinkan narasi sejarah Majalengka tumbuh bukan hanya sebagai kebanggaan kultural, tetapi juga sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah yang dapat diuji dan diwariskan.

4. Kesalahan Epistemologis dalam Menyamakan Keduanya

Menyamakan secara langsung antara sejarah kultural Majalengka sebagai ruang budaya yang telah tumbuh secara organik selama berabad-abad, dan sejarah administratif Kabupaten Majalengka yang lahir melalui struktur kolonial abad ke-19, adalah kesalahan epistemologis yang serius. Dua hal ini beroperasi dalam medan epistemik yang berbeda: yang pertama bersandar pada narasi kolektif, ritus sosial, ingatan masyarakat, serta konfigurasi simbolik; yang kedua berdiri di atas dokumentasi hukum, sistem birokrasi, dan konstruksi negara modern. Ketika keduanya disamakan secara simplistik, maka batas metodologis antara yang bersifat mitologis dan yang bersifat historis menjadi kabur—suatu kekaburan yang dapat berujung pada distorsi pengetahuan.

Glorifikasi atas tanggal 7 Juni 1490 sebagai momen lahirnya Kabupaten Majalengka, tanpa adanya verifikasi bukti primer yang sah, mencerminkan kekeliruan dalam membangun narasi sejarah berdasarkan keinginan identitas, bukan pada fondasi empiris. Masyarakat yang mengadopsi narasi ini sebagai fakta sejarah, bukan lagi sedang merawat sejarah, melainkan mereproduksi mitos yang disakralkan.

Ketika sejarah difungsikan sebagai penyangga kebanggaan kolektif tanpa uji validitas ilmiah, maka yang dihasilkan bukan pemahaman, melainkan dogma yang membekukan akal sehat.

Penyederhanaan antara dua ranah yang berbeda ini juga menghambat upaya rekonstruksi sejarah yang lebih cermat dan kontekstual. Sejarah budaya Majalengka, yang kaya akan nilai simbolik dan artikulasi sosial, tetap penting untuk dimaknai sebagai warisan kolektif. Namun sejarah administratif Kabupaten Majalengka memerlukan disiplin dokumentasi dan prinsip-prinsip historiografi yang ketat agar tidak terjebak dalam euforia kultural yang bersifat selektif. Ketika keduanya diposisikan secara proporsional, maka akan tercipta keseimbangan antara pengakuan atas kekayaan lokal dan penegakan integritas historis.

Penyamaan tanpa distingsi ini tidak hanya menyesatkan publik dalam memahami asal-usul pemerintahan daerahnya, tetapi juga merusak basis pendidikan sejarah lokal. Sekolah-sekolah yang mengajarkan sejarah daerah tanpa membedakan antara wilayah budaya dan kabupaten administratif, turut memperkuat reproduksi kesalahan epistemik ini. Apa yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan pembelajaran kritis, justru berubah menjadi ruang pembekuan makna yang hanya mengulang-ulang simbolisme tanpa fondasi faktual. Maka dari itu, pemisahan antara sejarah Majalengka sebagai wilayah budaya dan Kabupaten

Majalengka sebagai entitas administratif harus terus ditegaskan, tidak untuk menceraikan keduanya, melainkan untuk memahami posisi masing-masing secara jernih, adil, dan bertanggung jawab.

5. **Kebutuhan Akan Distingsi Historis**

Pembacaan ulang terhadap sejarah lokal menuntut kehati-hatian epistemologis agar tidak mencampuradukkan antara memori kolektif yang bersifat kultural dan struktur kekuasaan yang bersifat administratif serta terdokumentasi secara legal. Memori kolektif tumbuh dari cerita rakyat, ritus agraris, simbol-simbol lokal, dan praktik sosial yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Sementara itu, sejarah administratif menuntut bukti tertulis, arsip negara, serta kejelasan kronologi dan struktur. Ketika keduanya tidak dipisahkan secara metodologis, maka narasi sejarah yang tercipta cenderung bersifat amalgamatif—menggabungkan mitos dan fakta, keyakinan dan data, romantisme dan legalitas—tanpa pembatasan konseptual yang jelas.

Kesalahan dalam membedakan dua ranah ini tidak hanya membingungkan persepsi publik, tetapi juga melemahkan fondasi historiografi lokal. Narasi simbolik yang seharusnya memperkaya imajinasi kolektif justru diberi legitimasi sebagai kebenaran faktual. Sebaliknya, dokumen resmi dan fakta historis yang seharusnya menjadi acuan akademik justru dipinggirkan atas nama loyalitas kultural. Distingsi historis dibutuhkan agar keduanya dapat berdialog tanpa saling menegasi. Memori lokal dapat dijaga sebagai

warisan imaterial yang membentuk karakter dan rasa memiliki, tetapi tidak seharusnya menjadi landasan kronologis untuk penetapan administrasi sejarah pemerintahan.

Penegasan terhadap batas antara simbolisme budaya dan legalitas sejarah menjadi penting ketika masyarakat membangun kesadaran historis yang sehat. Dalam kasus Majalengka, misalnya, penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi kabupaten lebih tepat dibaca sebagai kristalisasi memori budaya daripada sebagai titik awal administratif yang sah. Tindakan memisahkan kedua kutub ini tidak mengurangi makna dari salah satunya, justru memberikan ruang bagi keduanya untuk tumbuh secara berimbang: simbolisme memperkuat identitas, legalitas memperkuat struktur.

Distingsi historis juga berfungsi sebagai filter etis dalam penyusunan narasi sejarah. Ketika masyarakat mampu memilah antara apa yang mereka rasakan sebagai “kebenaran” dan apa yang dapat dibuktikan secara empiris, maka sejarah tidak lagi berfungsi sebagai ruang afirmasi ideologis belaka, melainkan sebagai medan kritis tempat refleksi, koreksi, dan klarifikasi terus berlangsung. Dalam terang kesadaran ini, sejarah lokal tidak dibangun untuk mengukuhkan romantisme semata, tetapi sebagai arena pencarian jati diri yang berpijak pada kejujuran dan tanggung jawab intelektual. Tanpa distingsi tersebut, sejarah akan terperangkap dalam kebingungan antara nostalgia dan pengetahuan, antara ingatan dan rekaman.

6. **Implikasi terhadap Pendidikan dan Kesadaran Publik**

Ketidakjelasan batas antara sejarah kultural dan sejarah administratif berdampak langsung terhadap pembentukan narasi sejarah yang diajarkan di ruang-ruang pendidikan formal. Buku teks, modul pembelajaran, dan kurikulum lokal sering kali mereproduksi klaim historis tanpa verifikasi, menjadikan tanggal-tanggal simbolik sebagai fakta tak tergugat. Siswa tidak hanya diajarkan apa yang harus diingat, tetapi juga bagaimana mereka harus merasa terhadap narasi tersebut—membanggakan sesuatu yang belum tentu sah secara historiografis. Proses internalisasi ini membentuk imajinasi kolektif yang tidak kritis, menjadikan sejarah sebagai dogma alih-alih sebagai objek refleksi. Ketika narasi yang belum teruji diletakkan dalam ruang pendidikan, maka generasi muda dibentuk bukan dalam semangat pencarian kebenaran, melainkan dalam pengulangan simbolik yang stagnan.

Dampak lain yang mengemuka ialah penguatan wacana seremonial negara dan institusi lokal atas dasar sejarah yang masih diperdebatkan secara akademik. Pemerintah daerah cenderung menginstitutionalisasi narasi tertentu demi kepentingan representasi identitas dan stabilitas sosial, meskipun pijakan narasi tersebut masih bersifat lemah secara metodologis. Perayaan tahunan, pencitraan media, hingga penulisan slogan-slogan publik menjadikan sejarah sebagai elemen propaganda budaya yang dilembagakan. Ketika

narasi ini masuk ke ranah kebijakan, maka ruang untuk koreksi dan revisi akademik menjadi makin sempit, bahkan sering kali ditolak atas nama “kebanggaan daerah” atau “harga diri masyarakat”.

Ketika sejarah yang diajarkan dan dirayakan berakar pada narasi yang tidak diverifikasi, maka masyarakat akan terperangkap dalam euforia simbolik terhadap masa lalu yang keliru secara epistemik. Ini bukan hanya masalah akademik, tetapi masalah sosial dan kultural. Masyarakat yang dibentuk dari narasi yang kabur cenderung membangun identitas berdasarkan glorifikasi, bukan refleksi. Akibatnya, sejarah tidak menjadi sumber pencerahan, melainkan menjadi selubung romantik yang menutup kemungkinan berpikir kritis. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi kompleksitas sejarahnya sendiri, dan lebih memilih mengulang kisah lama ketimbang membaca ulang secara jujur dan kontekstual.

Membenahi narasi sejarah dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik tidak berarti menghapus warisan budaya, tetapi menata ulang peta kesadaran kolektif agar lebih sejajar antara simbolisme dan keilmuan. Ketika sejarah ditempatkan sebagai ruang dialektika, bukan sebagai perintah ideologis, maka pendidikan tidak hanya menjadi wahana pewarisan memori, tetapi juga menjadi laboratorium intelektual yang membentuk warga kritis, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap warisan yang mereka sandang. Inilah urgensi utama

dari distingsi historis dalam konteks Majalengka: bukan semata-mata memilih satu tanggal, melainkan memilih cara memahami diri dan masa lalu secara lebih utuh dan bertanggung jawab.

7. Urgensi Klarifikasi dalam Kerangka Historiografi

Klarifikasi sejarah Majalengka bukan sekadar keperluan akademik, melainkan urgensi kultural yang menyentuh inti dari bagaimana sebuah masyarakat memahami dirinya di tengah pusaran memori dan tafsir. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: sejarah yang mana yang sedang dipelihara dan dirayakan selama ini? Apakah yang dimaksud adalah sejarah kultural Majalengka sebagai ruang kehidupan yang kaya tradisi dan nilai, atau sejarah administratif Kabupaten Majalengka sebagai entitas politik yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19? Ketidakjelasan membedakan dua ranah itu berisiko mencampuradukkan simbolisme dengan fakta, yang pada akhirnya bisa mereduksi keabsahan sejarah menjadi sekadar instrumen seremoni tahunan.

Ketika sebuah narasi sejarah dibangun tanpa pemisahan epistemologis yang tegas antara mitos, legenda, dan fakta yang terdokumentasi, maka narasi itu lebih rentan untuk direduksi menjadi alat hegemoni kultural daripada menjadi sarana pembebasan intelektual. Tidak semua yang diwarisi harus dirayakan tanpa kritik, dan tidak semua yang dikritik berarti harus ditinggalkan. Masyarakat Majalengka memiliki hak untuk merasa bangga terhadap warisan budayanya,

namun kebanggaan itu harus didampingi oleh kesadaran kritis yang bersedia menempatkan fakta pada posisinya, dan mitos pada kedudukannya yang pantas. Ini bukan upaya menghapus sejarah, melainkan menata ulang narasi agar selaras dengan etika keilmuan dan integritas kolektif.

Langkah awal dalam proses klarifikasi historiografis ini adalah menetapkan kerangka sumber yang sah dan metodologi yang dapat diuji. Penulisan ulang sejarah lokal tidak dapat disandarkan pada narasi lisan yang telah mengalami pelapisan tafsir selama ratusan tahun, tanpa verifikasi terhadap sumber tekstual, bukti artefaktual, atau kesaksian struktural yang mendukung. Sejarah bukan sekadar narasi yang ingin didengar, melainkan representasi dari upaya memahami apa yang benar-benar terjadi. Ketika narasi dibangun hanya untuk memperkuat identitas lokal tanpa sandaran metodologis, maka yang dihasilkan bukan kejujuran historis, melainkan glorifikasi yang menjebak dalam romantisme palsu.

Majalengka membutuhkan keberanian kolektif untuk membuka ruang peninjauan sejarahnya secara jernih, sistematis, dan jujur. Klarifikasi ini harus dilihat sebagai proses intelektual yang sehat, bukan ancaman terhadap warisan. Ketika masyarakat diajak berdialog antara narasi resmi, sumber kolonial, dokumen administratif, dan ingatan kolektif, maka lahirlah narasi sejarah yang tidak hanya akurat, tetapi juga bijaksana. Sejarah seperti inilah yang akan mampu berdiri tegak di hadapan waktu—bukan karena ia tak tergugat, melainkan karena ia terus diuji, diperbaiki, dan

disucikan dari bias dan kepentingan. Di titik itulah, sejarah Majalengka tidak hanya dirayakan sebagai warisan, tetapi dipahami sebagai tanggung jawab.

8. Sejarah sebagai Proses Dialogis, Bukan Monolog Institusional

Sejarah sejatinya bukan produk tunggal dari institusi atau lembaga, melainkan hasil dari proses dialogis yang terbuka, kritis, dan melibatkan berbagai lapisan pemangku kepentingan. Ketika narasi historis hanya disusun oleh segelintir otoritas birokratis, maka yang terjadi bukan penciptaan sejarah, melainkan penetapan versi institusional yang cenderung membekukan ruang interpretasi. Peninjauan ulang terhadap sejarah Majalengka harus melibatkan akademisi, budayawan, sejarawan lokal, jurnalis kebudayaan, hingga masyarakat akar rumput yang selama ini menjadi pelaku, penjaga, sekaligus saksi hidup kebudayaan lokal. Keterlibatan banyak pihak akan memastikan bahwa sejarah yang ditulis tidak hanya akurat, tetapi juga inklusif dan merepresentasikan kompleksitas pengalaman kolektif.

Menempatkan sejarah sebagai proses dialogis berarti memberikan ruang pada dinamika pemikiran dan tafsir yang beragam. Mitos, legenda, dokumen kolonial, dan catatan rakyat tidak harus dipertentangkan secara dikotomis, tetapi dapat dikaji dalam bingkai hermeneutik yang menimbang makna, konteks, dan nilai historisnya masing-masing. Kesadaran seperti ini akan membebaskan sejarah dari monopoli narasi tunggal dan membuka jalan menuju

pembacaan ulang yang lebih sehat. Sejarah yang baik tidak datang dari repetisi seremonial, melainkan dari keberanian untuk bertanya ulang, merevisi bila perlu, dan menyusun kembali narasi yang lebih dekat pada fakta dan jujur terhadap ketidaksempurnaan masa lalu.

Proses revisi sejarah bukan sekadar upaya administratif untuk mengganti tanggal atau memperbaharui nomenklatur. Ia merupakan usaha kultural dan intelektual yang mendalam untuk menjernihkan apa yang selama ini dibiarkan kabur, baik karena keterbatasan sumber maupun dominasi tafsir lama yang tak pernah dikaji ulang. Ketika sejarah didekati sebagai proyek kebenaran kolektif, maka masyarakat bukan hanya menjadi objek penerima narasi, tetapi juga subjek aktif yang ikut membentuk dan menyaring makna. Di titik inilah, sejarah tidak lagi menjadi milik negara atau birokrasi, melainkan milik bersama yang hidup, bergerak, dan bertumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akar dan arah mereka sendiri.

Menjadikan sejarah sebagai proses dialogis merupakan perwujudan dari praktik demokrasi kultural yang sejati. Sejarah bukan lagi instrumen yang digunakan untuk membenarkan yang sudah ada, melainkan ruang pencarian untuk menjernihkan apa yang selama ini diterima secara *taken for granted*. Ketika Majalengka berani meninjau ulang narasi sejarahnya secara kolektif, maka yang dibangun bukan sekadar ingatan baru, tetapi fondasi kultural yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih mampu menghadapi tantangan zaman secara bermartabat. Di sinilah sejarah menemukan

maknanya— bukan sebagai monolog institusional, melainkan sebagai dialog yang terus diperbarui dalam cahaya nalar, etika, dan kejujuran.

Simpulan

Menelusuri narasi sejarah Majalengka berarti memasuki ruang dialektika antara yang simbolik dan yang struktural, antara memori kolektif yang hidup dalam kesadaran kultural masyarakat dan konstruksi administratif yang dibangun berdasarkan dokumen legal kolonial. Ketika sejarah Majalengka sebagai wilayah budaya disamakan secara epistemologis dengan sejarah Kabupaten Majalengka sebagai entitas administratif, yang terjadi bukanlah integrasi makna, melainkan tumpang tindih tafsir yang justru mengaburkan asal-usul dan mereduksi kompleksitasnya. Keduanya berada dalam ranah yang berbeda dan harus diposisikan secara proporsional: yang satu sebagai ekspresi historis masyarakat terhadap ruang hidupnya, yang lain sebagai jejak institusional yang dapat diverifikasi dalam kerangka historiografi modern.

Distingsi antara dua bentuk sejarah ini bukan upaya pemisahan yang bersifat fragmentatif, tetapi tindakan klarifikasi metodologis yang justru memperkuat posisi masing-masing dalam arsitektur kesadaran kolektif. Sejarah kultural Majalengka mengandung nilai-nilai simbolik yang membentuk identitas lokal, tetapi ia tidak dapat menggantikan pentingnya fakta dokumentatif dalam penulisan sejarah administratif. Sebaliknya, sejarah Kabupaten Majalengka yang lahir dari Staatsblad 1840 tidak

meniadakan eksistensi kultural masyarakat sebelumnya, tetapi menjadi penanda awal dari proses formalisasi kekuasaan yang bersifat legal dan politis. Ketika keduanya dipahami secara jernih, maka sejarah Majalengka menjadi lebih lengkap – bukan sebagai satu narasi tunggal, melainkan sebagai kolaborasi antara makna dan fakta, antara ritus dan arsip.

Langkah ke depan menuntut kesediaan semua pihak – akademisi, pemerintah daerah, pendidik, dan masyarakat sipil – untuk merumuskan narasi sejarah Majalengka yang lebih reflektif, inklusif, dan bertanggung jawab. Klarifikasi ini tidak akan melemahkan identitas, melainkan memperkuatnya pada fondasi yang dapat diuji oleh waktu dan ilmu pengetahuan. Dalam horizon tersebut, Majalengka tidak hanya akan dikenang sebagai entitas yang tua, tetapi sebagai wilayah yang matang secara kultural dan historis – yang berani menatap masa lalunya secara jujur, merevisi narasinya secara ilmiah, dan membangun masa depannya secara bermartabat. Sejarah yang demikian bukan sekadar kebanggaan seremonial, melainkan cermin kolektif yang menuntun arah berpikir, bertindak, dan bertumbuh sebagai masyarakat yang sadar akan akar dan arah sejarahnya sendiri.

Bagian I:
Sejarah Yang Tersembunyi Dalam Senyap

Narasi Resmi dan Yang Tersisih

A. Pengantar

Sejarah bukan hanya kumpulan data kronologis yang dikumpulkan dan dikukuhkan melalui dokumen resmi, melainkan juga ruang batin yang dihuni oleh ingatan kolektif, dituturkan dari mulut ke mulut, dan diwariskan dari tubuh ke tubuh. Dalam lanskap kultural seperti Majalengka, sejarah tidak hidup semata pada naskah-naskah yang disahkan negara, melainkan juga pada nyanyian sunyi sinden tua, dalam gerak lambat penari Topeng Beber, atau dalam kisah yang disampaikan ayah kepada anak di antara sisa api tungku. Di titik inilah muncul benturan halus namun mendasar antara dua poros naratif: sejarah formal dan sejarah tutur; antara kepentingan administratif dan kebutuhan kultural.

Narasi resmi hadir sebagai produk negara modern yang membutuhkan kejelasan, ketertiban, dan validasi institusional. Ia menuntut bukti tertulis, tanggal, tempat, dan figur yang dapat dikonfirmasi secara prosedural. Sebaliknya, sejarah tutur hidup dalam kelenturan bahasa, dalam makna yang dibangun secara komunal dan spiritual. Ia tidak menginginkan pengesahan, melainkan penghayatan. Di

Majalengka, kedua poros ini berjalan berdampingan namun jarang saling bersua dalam harmoni. Yang satu mencatat, yang lain menghidupi. Yang satu menetapkan, yang lain menafsir.

Relasi ini seringkali tak seimbang. Sejarah formal cenderung menduduki posisi dominan karena ditopang oleh instrumen negara—ia dapat dicetak, dikutip, disahkan. Sementara sejarah tutur nyaris tidak pernah tampil di forum resmi, meskipun ia justru lebih dekat dengan kesadaran masyarakat sehari-hari. Ketika negara menetapkan satu versi sejarah Majalengka melalui penentuan Hari Jadi, narasi yang tidak tertulis—yang hidup di desa-desa, di gending-gending tua, di situs yang tak tercatat di peta modern—perlahan dipinggirkan. Mereka tidak disangkal, tetapi dilupakan. Tidak ditolak, tetapi tidak diundang untuk berbicara.

Kepentingan administratif negara memerlukan fondasi sejarah yang dapat menjadi legitimasi birokrasi. Penetapan tanggal kelahiran kabupaten, misalnya, sangat penting bagi identitas hukum dan perencanaan pembangunan. Namun di balik kebutuhan itu, ada kebutuhan lain yang tak kalah penting—yakni kebutuhan kultural masyarakat untuk merasa berakar, untuk merasa hadir dalam sejarah yang mereka pahami dan warisi. Ketika narasi resmi menolak memasukkan sejarah tutur karena dianggap tidak sah, yang hilang bukan hanya fakta, melainkan rasa memiliki.

Majalengka adalah salah satu contoh penting bagaimana sejarah resmi dapat bertumbuh tanpa menyerap sepenuhnya

kekayaan narasi yang hidup di masyarakat. Narasi resmi sering hanya menyentuh permukaan sejarah: tanggal, nama, dokumen. Sementara narasi tutur menyentuh kedalaman sejarah: makna, rasa, dan keberadaan. Ketika sejarah resmi berbicara tentang kapan kabupaten ini diresmikan, sejarah tutur berbicara tentang bagaimana masyarakat membentuk ruang budaya itu sebelum ada surat keputusan. Satu bicara soal awal institusional, yang lain bicara soal awal spiritual.

Lahirnya narasi resmi tidak salah, tetapi kerap mengabaikan suara yang tak terdengar. Misalnya, dalam upaya menentukan Hari Jadi Majalengka, versi yang dipilih sering kali adalah versi yang paling mudah diverifikasi secara hukum, bukan yang paling mendalam secara kultural. Maka, ketika perayaan dilakukan, sebagian masyarakat merasakan kehampaan—karena sejarah yang dirayakan bukan sejarah yang mereka kenal. Mereka hadir, tetapi tidak terlibat. Mereka menyaksikan, tetapi tidak merasa memiliki. Di sinilah sejarah tidak lagi menjadi rumah bersama, melainkan panggung simbolik yang terasa asing.

Jika narasi resmi dibentuk oleh kebutuhan negara untuk menetapkan, narasi tutur dibentuk oleh kebutuhan komunitas untuk mengingat. Negara butuh tanggal agar bisa mencetak kalender. Komunitas butuh makna agar bisa mencintai tempatnya. Di Majalengka, kisah-kisah tentang Talaga, Sumedanglarang, atau masa-masa pra-kolonial tidak hanya hidup dalam arsip akademik, tetapi juga dalam nyanyian anak-anak, dalam larangan adat yang diwariskan,

dalam nama-nama kampung yang menyimpan jejak linguistik sejarah panjang yang tidak pernah dibakukan.

Seni tradisi adalah salah satu bentuk tertua dan terkuat dari sejarah tutur. Tari Kedempling, misalnya, tidak akan kita temukan dalam dokumen kenegaraan, tetapi ia hidup sebagai narasi tubuh – yang menggerakkan sejarah lewat langkah dan hentakan, bukan lewat kalimat dan paragraf. Topeng Beber menyimpan wajah leluhur yang tak dikenal oleh sejarah formal, tetapi dikenali oleh masyarakat sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Di sinilah kita menemukan bahwa sejarah tidak hanya soal peristiwa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa itu dihidupi dan diwariskan.

Masyarakat Majalengka memiliki hak atas sejarahnya – bukan hanya sebagai objek dari catatan negara, tetapi sebagai subjek dari ingatan kultural. Ketika narasi resmi dan narasi tutur dapat saling berdialog, maka sejarah menjadi lebih utuh, lebih inklusif, dan lebih jujur. Yang dibutuhkan bukan penghapusan salah satu, tetapi keberanian untuk membuka ruang bersama. Bukan untuk mencari versi terbaik, melainkan untuk mengakui bahwa semua versi memiliki tempat dalam menyusun identitas bersama.

Menulis ulang sejarah Majalengka bukan berarti menolak sejarah resmi, tetapi melengkapinya. Kita tidak perlu membatalkan arsip untuk mendengar dongeng. Kita tidak perlu menyangkal dokumen untuk menghargai tarian. Kita hanya perlu menyadari bahwa sejarah adalah rumah yang besar, dan suara-suara yang berbeda bukan ancaman, tetapi

jendela untuk melihat dari arah lain. Dalam konteks ini, Majalengka bukan saja ruang administratif, tetapi juga ruang simbolik yang perlu didekati dengan hati dan telinga yang terbuka.

Narasi resmi dan yang tersisih tidak harus menjadi dua kutub yang saling menegasikan. Mereka bisa menjadi dua sungai yang bertemu dan memperkaya. Asalkan ada kesediaan untuk mendengarkan, untuk menafsir ulang, dan untuk memberi ruang pada yang pernah dibungkam, maka sejarah Majalengka bisa menjadi bukan hanya milik birokrasi, tetapi juga milik batin masyarakatnya. Sejarah yang bukan hanya ditulis, tetapi juga dihidupi.

B. Relasi antara Sejarah Formal dan Sejarah Tutur

Sejarah, sebagaimana dipahami dalam tradisi akademik modern, telah lama dibingkai sebagai kumpulan peristiwa masa lalu yang disusun berdasarkan kaidah metodologis tertentu—berbasis bukti, tertulis, dan dapat diverifikasi. Namun, jika kita menilik lebih dalam, sejarah bukan semata hasil dari upaya pencatatan masa lalu, melainkan konstruksi makna yang dilahirkan oleh cara manusia mengingat dan mewariskan keberadaannya. Di sinilah kita menjumpai perbedaan fundamental antara apa yang disebut sebagai *sejarah formal* dan *sejarah tutur*. Keduanya bukan sekadar dua bentuk narasi, melainkan dua paradigma yang berakar pada sistem epistemologis, relasi kuasa, dan imajinasi kultural yang berbeda.

Sejarah formal mendapatkan kekuatannya dari institusi – baik negara, universitas, maupun lembaga arsip – yang menetapkan nilai kebenaran berdasarkan standar metodologis dan dokumentasi tertulis. Ia hadir sebagai narasi yang dipilih, disusun, dan disahkan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk menulis sejarah atas nama publik. Dalam sejarah formal, yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi; yang tidak terdokumentasi seringkali tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, sejarah formal bersifat selektif dan hierarkis: memilih siapa yang dicatat, peristiwa mana yang dianggap penting, dan versi mana yang dianggap sah untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebaliknya, sejarah tutur hidup dalam napas masyarakat. Ia tidak membutuhkan pengesahan dari lembaga atau institusi, karena keberadaannya dijaga oleh tubuh komunitas yang menuturkan, mengingat, dan melakoni masa lalu sebagai bagian dari keberlangsungan spiritual dan kultural mereka. Sejarah tutur tidak tertulis, tetapi tidak berarti tidak sah. Ia diwariskan melalui lisan, nyanyian, tarian, ritus, serta simbol-simbol budaya yang menyimpan ingatan kolektif dalam bentuk yang tidak selalu dapat diakses oleh instrumen akademik. Justru karena sifatnya yang cair dan lentur, sejarah tutur dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan akar esensialnya.

Relasi antara keduanya, dalam banyak konteks, adalah relasi yang timpang. Sejarah formal, dengan legitimasi yang

diakui negara, cenderung mendominasi narasi yang dianggap *resmi*. Dalam relasi ini, sejarah tutur seringkali termarginalkan, bahkan dicurigai sebagai mitos atau cerita rakyat yang kurang kredibel. Padahal, sejarah tutur menyimpan banyak lapisan kebenaran yang tidak bisa disentuh oleh angka dan dokumen—kebenaran yang berbentuk rasa, makna, dan nilai yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Di titik inilah sejarah formal dan sejarah tutur saling bersilang: bukan dalam ranah metodologi, melainkan dalam ranah makna.

Majalengka, sebagai ruang kultural yang kaya dengan warisan tradisi dan narasi lokal, memberikan medan yang sangat khas untuk membaca ketegangan dan kemungkinan rekonsiliasi antara sejarah formal dan sejarah tutur. Ketika negara menetapkan Hari Jadi Majalengka berdasarkan arsip kolonial atau dokumen administratif, masyarakat adat atau komunitas budaya setempat mungkin memiliki versi lain tentang asal-usul, leluhur, atau peristiwa penting yang tidak pernah masuk dalam dokumen resmi. Versi tersebut hidup dalam nyanyian pupuh Sunda, dalam kisah-kisah tentang Talaga dan Sumedanglarang, serta dalam ritus yang dijalankan tanpa pamflet atau protokol, melainkan dari kepercayaan yang diwariskan secara spiritual.

Sejarah formal membutuhkan legitimasi rasional. Ia menuntut tanggal, lokasi, nama tokoh, dan struktur peristiwa. Sementara sejarah tutur tumbuh dalam lanskap simbolik. Ia tidak bertanya "kapan?", tetapi "mengapa ini berarti?". Di

sinilah muncul dualitas sekaligus kekayaan dalam memandang masa lalu. Sejarah formal membekukan waktu, menetapkannya dalam bentuk angka dan dokumen. Sejarah tutur melarutkan waktu ke dalam tubuh, irama, dan bahasa – membuat masa lalu tetap hidup, bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai denyut batin yang mengalir dalam generasi.

Dari sisi politik pengetahuan, sejarah formal sering kali berperan dalam membentuk narasi nasional dan identitas resmi. Ia menjadi dasar kurikulum pendidikan, peringatan kenegaraan, dan pengarsipan institusional. Sementara sejarah tutur lebih dekat dengan identitas lokal, nilai-nilai komunal, dan penguatan akar budaya. Ketika negara menulis sejarahnya sendiri dan mengabaikan sejarah yang hidup di masyarakat, yang terjadi bukan hanya penghapusan versi, tetapi pemutusan kesinambungan identitas dan perasaan *berasal dari* yang dimiliki oleh masyarakat.

Namun, bukan berarti keduanya tidak bisa bersua. Justru dalam keterbatasan masing-masing, keduanya dapat saling mengisi. Sejarah formal memberi struktur yang penting untuk pengarsipan dan pembelajaran, tetapi ia perlu dibasahi oleh jiwa yang disediakan sejarah tutur agar tidak menjadi kering dan mekanistik. Sementara sejarah tutur, yang mengalir dalam bentuk simbolik dan naratif, dapat diberi pijakan dan penguatan melalui pendekatan akademik yang menghargai keberagaman bentuk pengetahuan. Relasi ideal antara keduanya bukanlah subordinasi, tetapi koeksistensi reflektif: sejarah yang dicatat dan sejarah yang dihayati harus berjalan beriringan.

Dalam konteks Majalengka, ini berarti bahwa upaya untuk menetapkan tanggal resmi hari jadi kabupaten, misalnya, perlu disertai dengan pengakuan yang tulus terhadap versi-versi sejarah lokal yang tidak tertulis. Tari Kedempling, Topeng Beber, pupuh Sunda, dan ritus-ritus adat bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan arsip hidup yang mencatat sejarah dalam bahasa mereka sendiri. Jika sejarah formal berbicara melalui teks, sejarah tutur berbicara melalui tubuh. Jika sejarah formal mengajarkan, sejarah tutur menghidupkan.

Ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir ketika kita berhenti menganggap sejarah sebagai peristiwa yang harus dipatenkan, dan mulai menerimanya sebagai medan tafsir yang terus bergerak. Sejarah tidak selalu perlu diselesaikan. Ia cukup untuk ditafsirkan, dijaga, dan dihidupi – baik melalui dokumen maupun melalui tarian yang diwariskan secara diam-diam. Dalam logika simbolik masyarakat tradisional, makna lebih penting daripada fakta, karena makna memungkinkan sebuah komunitas untuk merasa berakar, beridentitas, dan memiliki arah.

Ketika kita membuka ruang dialog antara sejarah formal dan sejarah tutur, yang kita lakukan bukan sekadar memperluas wawasan historis, tetapi juga menyembuhkan luka epistemik yang telah terlalu lama dibiarkan: luka karena suara yang dibungkam, narasi yang disingkirkan, dan ingatan yang dipaksa untuk diam. Di sinilah sejarah menjadi tindakan

kultural yang etis—tindakan untuk mendengarkan ulang, untuk mengakui yang pernah disingkirkan, dan untuk memberi tempat bagi narasi yang berjalan tanpa tapak.

Relasi ini juga memanggil kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap apa itu "pengetahuan sejarah". Ia bukan hanya milik para sejarawan, tetapi juga milik masyarakat yang menari, menyanyi, bertani, dan berdoa. Di ladang, di langgar, di panggung kecil pertunjukan rakyat, sejarah sedang dituturkan—bukan untuk ditetapkan, tetapi untuk diingat. Dan di sanalah sejarah menemukan wajahnya yang paling manusiawi: bukan sebagai peta masa lalu, tetapi sebagai nyala kecil yang terus menyala di dalam diri orang-orang yang percaya bahwa tanah tempat mereka berpijak adalah rumah dari ingatan yang hidup.

Maka tugas kita bukanlah menuntaskan sejarah, melainkan menyertainya. Kita tidak perlu mengganti satu versi dengan versi lain, melainkan membuka ruang agar semua versi dapat bersuara. Di antara teks dan tubuh, di antara dokumen dan nyanyian, di antara arsip dan pupuh, sejarah sedang menunggu untuk ditulis ulang—bukan untuk menghapus yang lama, tetapi untuk merawat yang telah lama diabaikan. Dan di sinilah, Majalengka dapat menjadi contoh bukan hanya tentang perbedaan versi sejarah, tetapi tentang keberanian kultural untuk merangkul pluralitas makna dan menulis sejarah dengan cara yang lebih jujur, lebih bijak, dan lebih manusiawi.

C. Kepentingan Administratif vs. Kebutuhan Kultural: Antara Penataan Negara dan Nafas Masyarakat

Dalam konstruksi kebijakan publik, sejarah sering kali dijadikan sebagai fondasi administratif yang menetapkan titik awal suatu wilayah, legitimasi pemerintahan, serta identitas kelembagaan. Sejarah dalam konteks ini bukan lagi sekadar narasi kolektif, melainkan basis legal-formal yang mengatur batas kewenangan dan struktur birokrasi. Inilah yang disebut sebagai kepentingan administratif: sebuah kebutuhan negara untuk menata masa lalu demi ketertiban masa kini dan masa depan. Namun, ketika sejarah direduksi menjadi instrumen administratif semata, sering kali ia kehilangan roh kebudayaannya. Di titik inilah muncul tegangan antara kepentingan administratif dan kebutuhan kultural: antara apa yang ingin dicatat oleh negara dan apa yang ingin diingat oleh masyarakat.

Kepentingan administratif bersifat rasional dan institusional. Ia lahir dari logika negara modern yang menuntut keteraturan melalui sistem penanggalan, peringatan resmi, dokumen legal, serta struktur kebijakan yang dapat ditelusuri asal-usulnya secara formal. Maka penetapan Hari Jadi suatu daerah, misalnya, bukan semata-mata soal merayakan sejarah, melainkan soal pengesahan identitas yang dapat digunakan dalam pengelolaan wilayah, penganggaran, atau pembangunan citra daerah. Negara membutuhkan tanggal yang pasti, tahun yang jelas, dan bukti tertulis yang dapat disahkan. Kepastian ini menjadi tulang punggung legitimasi birokrasi.

Namun di sisi lain, masyarakat tidak hidup semata dari tanggal dan dokumen. Mereka hidup dari makna yang diwariskan turun-temurun, dari memori yang kadang kabur namun sangat mereka rasakan kebenarannya. Kebutuhan kultural adalah kebutuhan untuk merasa berakar—untuk merasa bahwa keberadaan mereka hari ini bersambung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sistem administratif. Ia bersumber dari bahasa lokal, ritus, tarian, kisah lisan, dan simbol-simbol yang tidak pernah masuk arsip negara tetapi hidup dalam batin kolektif masyarakat. Di sinilah muncul paradoks: negara membutuhkan sejarah yang dapat diverifikasi, sedangkan masyarakat membutuhkan sejarah yang dapat mereka hayati.

Majalengka menjadi studi kasus yang sangat relevan dalam konteks ini. Ketika pemerintah daerah berusaha menentukan tanggal resmi Hari Jadi Majalengka, yang dirujuk adalah dokumen-dokumen kolonial dan arsip pemerintahan Hindia Belanda yang menyebut tahun pengesahan kabupaten secara administratif. Tanggal tersebut sah secara hukum, tetapi belum tentu menyentuh relung batin masyarakat yang memiliki versi-versi lokal tentang asal-usul Majalengka. Mereka tidak merujuk arsip, tetapi merujuk laku hidup: dari kisah tentang Talaga Manggung, pengaruh Sumedanglarang, sampai cerita lisan tentang leluhur yang datang dari gunung, dari danau, dari langit spiritual yang tidak tercatat tetapi diyakini secara turun-temurun.

Kepentingan administratif bekerja melalui struktur vertikal: dari atas ke bawah. Ia ditentukan oleh lembaga, dikodifikasi oleh regulasi, dan disosialisasikan melalui instrumen pemerintahan. Sementara kebutuhan kultural bekerja secara horizontal: menyebar di antara warga, tumbuh dari bawah, dan diwariskan melalui praktik kultural sehari-hari. Ketika sejarah hanya ditata dari atas, maka ada yang hilang dari bawah. Ketika yang dirayakan hanyalah tanggal resmi, maka bisa jadi perayaan itu hampa makna karena tidak menyentuh rasa kolektif. Di sinilah pentingnya kepekaan kultural dalam proses administratif.

Negara modern tidak salah ketika ingin menetapkan tanggal sejarah. Itu adalah bagian dari logika pembangunan dan penataan kewenangan. Tetapi negara perlu menyadari bahwa sejarah bukan hanya produk rasionalitas, melainkan juga produk spiritualitas. Ketika tanggal resmi Hari Jadi Majalengka diumumkan tanpa menyertakan dialog dengan masyarakat adat, budayawan, dan pemangku tradisi lokal, maka yang lahir bukan sejarah bersama, tetapi sejarah versi penguasa. Dan sejarah yang demikian tidak akan hidup lama dalam kesadaran kolektif. Ia akan diperingati secara seremonial, tetapi tidak akan menyentuh batin warga.

Kebutuhan kultural mensyaratkan partisipasi dan pengakuan. Masyarakat ingin diajak bicara, didengarkan, dan dihargai. Mereka tidak ingin sekadar menjadi objek dari sejarah yang ditentukan oleh orang lain. Mereka ingin menjadi subjek yang menyuarakan narasi mereka sendiri—

narasi yang mungkin tidak presisi secara kronologis, tetapi sangat kaya secara simbolik. Dalam masyarakat tradisional, waktu tidak dilihat secara linier, tetapi secara siklikal dan kosmologis. Oleh karena itu, asal-usul bukan hanya dilacak melalui tahun, tetapi melalui tanda-tanda alam, perubahan musim, atau ritus leluhur. Negara perlu belajar memahami logika ini jika ingin menyusun sejarah yang benar-benar mengakar.

Konflik antara kepentingan administratif dan kebutuhan kultural tidak harus diselesaikan melalui dominasi salah satu. Yang dibutuhkan adalah ruang dialog. Penetapan Hari Jadi, misalnya, bisa saja menetapkan satu tanggal administratif, tetapi menyertakan catatan kaki sejarah kultural yang mencerminkan keberagaman narasi yang hidup. Pemerintah bisa membuat dua jenis narasi: narasi legal-formal dan narasi kultural-simbolik. Yang satu untuk urusan birokrasi, yang lain untuk perayaan rasa. Keduanya bisa berdampingan tanpa saling meniadakan. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mengakui bahwa sejarah tidak tunggal, dan bahwa pluralitas adalah kekayaan, bukan ancaman.

Dalam konteks ini, simbolisme budaya menjadi jembatan penting antara negara dan masyarakat. Seni tradisi seperti Tari Kedempling, Topeng Beber, dan pupuh Sunda bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi juga narasi sejarah yang hidup. Mereka adalah teks tubuh yang mencatat peristiwa, bukan melalui kata, tetapi melalui gerak, irama,

dan suasana. Ketika seni-seni ini dihidupkan dalam perayaan Hari Jadi, maka tanggal administratif yang dingin itu menjadi hangat oleh partisipasi batin. Sejarah tidak hanya dibaca, tetapi juga ditarikan. Tidak hanya diingat, tetapi juga dirasakan.

Kepentingan administratif cenderung menyukai keseragaman. Ia ingin satu tanggal, satu versi, satu narasi. Kebutuhan kultural, sebaliknya, merayakan keragaman. Ia membuka diri terhadap berbagai versi, berbagai sumber, dan berbagai bentuk penuturan. Ketika negara berusaha menyederhanakan sejarah demi efektivitas birokrasi, ia perlu mengingat bahwa masyarakat tidak hidup dalam kerangka tunggal. Mereka adalah mosaik narasi yang saling menumpuk, saling melengkapi, dan kadang saling bertentangan. Tetapi justru di situlah letak keindahan dan keotentikannya.

Menyeimbangkan keduanya adalah pekerjaan yang tidak mudah, tetapi sangat penting. Diperlukan pendekatan lintas disiplin: sejarah, antropologi, sosiologi, bahkan estetika budaya. Para birokrat tidak cukup hanya membaca arsip, mereka juga perlu duduk bersama juru kunci, seniman tradisi, tokoh adat, dan warga desa. Mereka perlu mendengarkan cerita yang tidak tertulis, mencatat isyarat yang tidak berbentuk dokumen. Karena di sanalah hidup sejarah yang sesungguhnya: bukan di rak-rak arsip, tetapi di hati masyarakat.

Majalengka, dan daerah-daerah lain di Indonesia, memerlukan pendekatan sejarah yang inklusif. Pendekatan

yang tidak hanya mencari kepastian administratif, tetapi juga merawat kedalaman makna kultural. Sejarah bukan hanya soal asal mula administratif, tetapi soal akar eksistensial. Dan akar tidak tumbuh dari kertas, melainkan dari tanah. Dari tubuh yang menari, dari bahasa yang diwarisi, dari doa-doa yang dilafalkan pelan di sudut-sudut kampung.

Kepentingan administratif memang perlu, tetapi ia harus tunduk pada prinsip kemanusiaan dan kebudayaan. Karena sejarah, pada akhirnya, bukan sekadar catatan tentang apa yang terjadi, melainkan cermin tentang siapa kita. Dan jika kita ingin melihat diri kita secara utuh, kita perlu lebih dari sekadar tanggal. Kita perlu makna. Kita perlu jiwa. Kita perlu sejarah yang bukan hanya disahkan, tetapi juga disayangi.

D. Penutup

Narasi resmi, sebagaimana diproduksi oleh institusi negara dan kuasa akademik, memang penting untuk menata sejarah dalam format yang terukur dan terdokumentasi. Ia menciptakan kerangka formal bagi kebijakan, pendidikan, serta simbol administratif yang memayungi keberadaan kolektif suatu wilayah. Namun di balik kekukuhannya, narasi ini kerap mengabaikan denyut-denyut halus yang hidup dalam tubuh masyarakat: bisikan lisan para sesepuh, tarian yang diturunkan tanpa teks, dan nyanyian lokal yang tak pernah ditulis tetapi selalu diingat. Ketika sejarah hanya dikonstruksi dari atas, yang tercipta bukanlah rumah

bersama, melainkan bangunan monolog yang membisukan suara-suara dari tepi. Maka menjadi penting untuk membuka kembali ruang tafsir sejarah sebagai dialektika, bukan dogma.

Yang tersisih bukanlah yang lemah, melainkan yang tak memiliki akses untuk ditulis. Sejarah tutur, seni tradisi, ritus kampung, dan memori kolektif yang tidak tercetak dalam arsip negara bukanlah serpihan yang patut dilupakan, tetapi justru akar paling jujur dari identitas kultural yang tak pernah selesai dituliskan. Keberadaannya adalah perlawanan diam terhadap dominasi satu suara, satu versi, satu narasi. Dalam tubuh masyarakat, sejarah tidak hanya tinggal sebagai catatan, tetapi sebagai napas. Ia hidup dalam laku: dalam bahasa ibu yang diwariskan, dalam langkah kaki yang mengikuti irama tua, dalam puasa leluhur yang tak tercatat tetapi terus dijalani. Di sinilah sejarah tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana manusia memilih untuk mengingat – bukan dengan pena, tetapi dengan jiwa.

Penutupan terhadap sejarah yang tersisih adalah penutupan terhadap kemungkinan masa depan yang inklusif. Sebaliknya, membuka ruang untuk narasi-narasi kecil yang dulu dibungkam adalah bentuk keberanian intelektual sekaligus spiritual. Bukan untuk mengaburkan sejarah resmi, melainkan untuk menyeimbangkannya. Karena sejarah sejati bukan soal mengukuhkan versi tertentu, tetapi soal merawat keberagaman tafsir sebagai bagian dari kemanusiaan yang saling melengkapi. Ketika narasi resmi belajar mendengar yang tersisih, dan yang tersisih diberi tempat untuk turut

menarasikan, maka sejarah bukan lagi sekadar cermin kekuasaan, melainkan jendela kesadaran kolektif—yang menatap masa lalu bukan untuk membeku, tetapi untuk mengalir lebih bijak ke masa depan.

Majalengka Dalam Peta Kerajaan: Antara Talaga, Sumedanglarang dan Cirebon

A. Pengantar

Majalengka, dalam lanskap sejarah Nusantara, bukan sekadar entitas administratif yang dibentuk oleh logika kolonial atau pembagian wilayah pascakemerdekaan. Ia adalah ruang perlintasan kuasa, ladang genealogis yang menyimpan lapisan-lapisan peradaban yang saling bertaut dan bertarung. Dari reruntuhan Katumenggungan Talaga yang tua, warisan Sumedanglarang yang mengakar, hingga bayang-bayang hegemoni Kesultanan Cirebon yang membentang – Majalengka menjadi medan simbolik di mana sejarah bukan hanya dicatat, tetapi juga dipertarungkan. Ia bukan ruang kosong yang tiba-tiba diberi nama, melainkan medan berjejak, tempat legitimasi dibangun melalui narasi, aliansi, dan kadang-kadang – penghapusan.

Jejak-jejak kerajaan yang melintasi Majalengka hari ini mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk artefak monumental, tetapi hadir dalam cara masyarakat menyebut ruang, dalam nama kampung, dalam legenda yang tak pernah masuk dalam buku pelajaran, dan dalam ritual adat yang menolak dilenyapkan oleh waktu. Talaga, dengan kisah para

adipati dan maklumat-maklumat spiritualnya, pernah menjadi pusat kuasa yang tidak kecil. Sumedanglarang, sebagai kekuatan yang memegang keseimbangan antara tradisi Sunda dan pengaruh Islam, turut membentuk lanskap genealogis di bagian timur tatar Sunda. Sementara Cirebon, dengan kekuatan simbolik kesultannya, tidak hanya menanamkan agama dan seni, tetapi juga menghadirkan arsitektur kekuasaan yang bersifat suprastruktural—membayangi hingga kini dalam bentuk budaya resmi dan struktur kewilayahan.

Namun sejarah tidak berjalan dalam garis lurus. Ketika kolonialisme Belanda masuk dengan perangkat kartografi dan logika administratifnya, sejarah yang tadinya bersifat cair dan dialogis mulai dibekukan menjadi peta. Kolonialisme menempatkan Majalengka bukan sebagai ruang budaya yang hidup dan saling terhubung, tetapi sebagai wilayah yang harus dimasukkan ke dalam sistem distrik, residensi, dan karesidenan. Apa yang sebelumnya merupakan ruang negosiasi antarkerajaan kini dipaku dalam koordinat koordinatif—dan dari situlah sejarah lokal perlahan dipisahkan dari akar genealogisnya. Jejak kekuasaan sebelumnya diredam, dan narasi yang dipilih adalah yang mendukung stabilitas kolonial.

Pengantar ini tidak dimaksudkan untuk mencari “asal-usul” yang tunggal, tetapi justru mengajak pembaca untuk menyadari bahwa sejarah Majalengka adalah sejarah interseksi—tempat tiga kekuatan budaya dan politik bertemu,

berbenturan, bersekutu, dan membentuk entitas yang kompleks. Ketika kita membaca ulang posisi Majalengka dalam peta kerajaan Talaga, Sumedanglarang, dan Cirebon, kita bukan sekadar menyusun peta baru, melainkan menziarahi sebuah proses yang menunjukkan bahwa identitas bukan produk garis batas, melainkan hasil pergulatan antara ingatan dan kekuasaan, antara tubuh masyarakat dan skema negara, antara yang diceritakan dan yang dilupakan.

Dan barangkali, melalui telaah ini, kita bisa memahami bahwa Majalengka bukan hanya “pernah menjadi bagian dari” kerajaan-kerajaan besar itu, melainkan merupakan ruang yang turut menghidupkan, menyaring, dan meneruskan kekuatan simbolik mereka. Maka tugas kita bukan hanya menulis ulang peta kekuasaan, tetapi juga menyimak ulang bisikan-bisikan yang selama ini tertinggal di sela-sela dokumen resmi: bisikan yang mungkin membawa kita kembali kepada narasi yang lebih jujur, lebih majemuk, dan lebih membumi.

B. Jejak-Jejak Kerajaan dan Pertarungan Legitimasi: Membaca Majalengka sebagai Medan Ingatan dan Simbol Kuasa

Majalengka tidak pernah lahir dari kekosongan. Ia bukan ruang netral yang menunggu nama atau wilayah administratif untuk mengukuhkannya. Justru sebaliknya, ia adalah medan yang telah lama dihuni oleh kekuasaan, ritual,

bahasa, dan ingatan yang saling bertumpuk. Di tanah inilah berbagai kerajaan pernah menanamkan kekuatan simbolik dan politiknya, saling berinteraksi, dan tidak jarang saling menghapus atau menegasikan. Dari Katumenggungan Talaga yang lebih tua dan bercorak Sunda-Buddhis, hingga Sumedanglarang yang beralih pada Islamisasi kekuasaan, sampai pada Kesultanan Cirebon yang membawa corak sufistik dan perniagaan lintas pelabuhan, semuanya meninggalkan bekas yang tidak bisa dibekukan dalam satu versi sejarah. Justru dalam jejak-jejak yang berserakan itulah, Majalengka harus dibaca: bukan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai ruang yang sedang dan terus dinegosiasikan.

Pertarungan legitimasi dalam sejarah bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang berhasil menarasikan kuasanya sebagai kebenaran. Jejak Talaga, misalnya, dalam banyak narasi lokal hadir sebagai kerajaan tua yang hilang bukan karena kekalahan total, melainkan karena penyapuan narasi oleh kuasa yang datang kemudian. Kisah-kisah tentang Prabu Talaga Manggung atau jejak ratu-ratu dari Talaga sering kali tidak hadir dalam dokumen resmi kolonial, namun tetap hidup dalam nama-nama kampung, dalam ritus panen, atau dalam narasi rakyat yang beredar di antara generasi. Ini bukan sekadar jejak sejarah, melainkan jejak spiritual dan kultural yang menolak dilupakan.

Ketika Sumedanglarang muncul dengan kekuatan genealogi yang mengaitkan garis darahnya pada Pajajaran

dan Islam sekaligus, ia membawa serta strategi legitimasi yang lebih kompleks: mempertemukan warisan Sunda klasik dengan kekuasaan baru yang Islami. Dalam konteks Majalengka, pengaruh ini terasa dalam penyebaran pesantren awal, perubahan struktur kepemimpinan lokal, serta dalam pemaknaan ulang terhadap figur-figur leluhur. Legitimasi tidak lagi hanya berasal dari darah dan wilayah, tetapi juga dari afiliasi spiritual dan kesetiaan pada pusat-pusat kekuasaan baru di Tatar Sunda.

Kesultanan Cirebon menambahkan lapisan baru pada mosaik ini. Tidak hanya membawa otoritas keagamaan yang kuat, Cirebon juga memperkenalkan dimensi kosmologis yang lebih luas – menyambungkan kekuasaan lokal dengan wacana keislaman transregional dan jaringan perdagangan Jawa-Pasundan-Banten. Di beberapa desa di Majalengka, hingga kini ditemukan tradisi yang merujuk pada tokoh-tokoh Wali Songo, atau sistem nilai yang mencerminkan ajaran tarekat-tarekat awal. Ini bukan sekadar jejak dakwah, tetapi bentuk hegemoni simbolik yang melekat pada tubuh sosial masyarakat.

Namun sejarah tidak hanya soal warisan, tetapi juga penghapusan. Ketika kolonialisme datang, logika kekuasaan berubah drastis. Kerajaan-kerajaan tidak lagi dipandang sebagai entitas spiritual dan politis, melainkan sebagai entitas administratif yang perlu dipetakan, diklasifikasi, dan – jika perlu – dibubarkan. Dalam logika ini, kerajaan-kerajaan yang tidak memiliki "bukti tertulis" atau "struktur yang sesuai

dengan tata kolonial" perlahan-lahan disingkirkan dari catatan resmi. Maka Talaga, Sumedanglarang, dan bahkan sebagian pengaruh Cirebon di Majalengka mengalami penyusutan historis: dari kekuatan yang hidup menjadi catatan kaki yang nyaris tak terbaca.

Pertarungan legitimasi berlanjut dalam bentuk yang lebih halus, yakni melalui pendidikan dan dokumen negara. Ketika buku pelajaran sejarah hanya mencantumkan Majalengka sebagai bagian dari wilayah administratif tanpa menyebut kompleksitas kerajaan-kerajaan yang pernah hadir di dalamnya, maka generasi baru akan tumbuh dengan pemahaman yang seolah-olah Majalengka lahir dari negara, bukan mendahului negara. Di sinilah sejarah menjadi alat kekuasaan yang paling tajam: bukan hanya menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang layak dikenang.

Namun ingatan masyarakat tidak semudah itu dipadamkan. Di banyak tempat di Majalengka, cerita tentang kerajaan Talaga, hubungan dengan Sumedanglarang, dan sisa pengaruh Cirebon masih dijaga oleh juru kunci, tokoh adat, atau bahkan oleh para seniman tradisi. Seni pertunjukan seperti Topeng Beber atau Tari Kedempling adalah contoh dari bentuk resistensi simbolik terhadap narasi tunggal negara. Di dalam tubuh penari, dalam motif kostum, dalam lantunan nyanyian, tersimpan ingatan yang lebih tua dari negara – ingatan yang tidak dituliskan, tetapi ditarikan. Dan justru karena itu, ia hidup.

Pertarungan legitimasi hari ini tidak lagi hanya antara kerajaan dan negara, tetapi antara versi sejarah yang ingin disederhanakan dengan kesadaran kolektif masyarakat yang menolak dilupakan. Setiap kali masyarakat Majalengka mempertanyakan ulang Hari Jadi-nya, yang sedang dipersoalkan bukan hanya tanggal, tetapi cara sejarah dimaknai. Siapa yang memiliki hak untuk menentukan asal-usul? Apakah arsip kolonial lebih sahih daripada narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa ibu dan ritus lokal? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang menandai bahwa sejarah bukan hanya arsip, tetapi medan ideologis yang penuh ketegangan.

Dalam konteks simbolisme kultural, jejak kerajaan tidak hanya mewariskan struktur kekuasaan, tetapi juga sistem kosmologi. Talaga mewariskan hubungan ekologis dan spiritual dengan gunung dan danau; Sumedanglarang dengan relasi genealogis dan sistem keulamaan; Cirebon dengan keterbukaan maritim dan laku sufistik. Semua ini masih terasa di Majalengka hari ini—di nama-nama desa, dalam sistem penanggalan tradisional, dalam relasi sosial yang masih menempatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai penopang keseimbangan komunitas. Jejak ini adalah ingatan hidup.

Pertarungan legitimasi pada akhirnya bukan hanya milik masa lalu. Ia berlangsung hari ini dalam bentuk kontestasi narasi, kebijakan pelestarian, kurikulum pendidikan, hingga cara masyarakat merayakan identitasnya.

Ketika sejarah dijadikan komoditas atau dibekukan dalam bentuk seremonial, maka maknanya kehilangan roh. Maka menjadi penting untuk membongkar ulang narasi-narasi yang selama ini mendominasi, dan memberi ruang bagi versi lain yang selama ini dianggap pinggiran. Karena bisa jadi, yang pinggiran itulah yang justru menjadi pusat makna sejati.

Membaca jejak kerajaan dan pertarungan legitimasi di Majalengka adalah membaca perjalanan manusia dalam merumuskan dirinya di tengah arus kuasa yang berubah. Dari Talaga yang sunyi, Sumedanglarang yang religius, hingga Cirebon yang kosmopolit, semua memberi warna dalam jalinan identitas yang tidak pernah tunggal. Dan di tengah semua itu, Majalengka hadir bukan sebagai hasil, tetapi sebagai proses—sebagai ruang spiritual dan kultural yang terus ditulis, ditafsirkan, dan dihidupi. Maka, sejarah bukan soal menutup masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita terus membuka diri untuk mendengarnya kembali, dengan cara yang lebih jujur, lebih majemuk, dan lebih membumi.

C. Genealogi Kekuasaan dan Peran Kolonialisme dalam Penentuan Narasi Sejarah Majalengka

Sejarah tidak pernah hadir secara netral. Ia selalu diproduksi dalam ruang yang diwarnai oleh kuasa, oleh kehendak untuk mengingat dan, tak jarang, kehendak untuk melupakan. Di Majalengka, narasi tentang asal-usul, kekuasaan, dan identitas wilayah tidak dapat dilepaskan dari pertarungan panjang antara memori lokal, legitimasi

kerajaan, dan intervensi kolonial. Genealogi kekuasaan Majalengka adalah kisah yang berlapis, tidak linear, dan sarat makna simbolik. Setiap rezim—kerajaan, kesultanan, kolonialisme, hingga republik—telah berusaha menancapkan narasinya masing-masing sebagai satu-satunya kebenaran historis. Namun di antara garis-garis dominan itu, mengalir narasi-narasi yang lebih sunyi: narasi rakyat, narasi tubuh, narasi spiritual, yang sering kali tidak tercatat dalam dokumen resmi.

Jejak Talaga sebagai pusat kekuasaan tua mengalami reduksi dalam narasi sejarah pascakolonial. Padahal, catatan lisan dan simbol-simbol ritual masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Karena sistem dokumentasi modern menuntut bukti tertulis, legitimasi Talaga sebagai fondasi kekuasaan Majalengka dipinggirkan. Ini bukan sekadar kehilangan fakta, melainkan kehilangan arah spiritual yang selama berabad-abad menjadi penopang identitas masyarakat.

Kedatangan kekuasaan kolonial Belanda menjadi titik balik. Melalui struktur administrasi Hindia Belanda, sejarah tidak lagi dipahami sebagai ingatan kolektif, melainkan kronologi tertulis guna penataan wilayah dan kontrol politik. Kolonialisme membekukan sejarah dalam bentuk peta dan arsip; sejarah yang hidup dalam tubuh masyarakat digantikan oleh catatan di lemari-lemari pemerintah. Kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah, tapi juga menaklukkan cara masyarakat memahami masa lalu.

Melalui politik pencatatan, Belanda memaksakan model tunggal dalam memahami genealogi kekuasaan. Kerajaan-kerajaan yang tak cocok dengan pola birokrasi kolonial dianggap tak sah. Maka dimulailah “pengarsipan selektif”: hanya kerajaan-kerajaan yang berelasi langsung dengan kolonial yang dicatat. Talaga diabaikan. Sebaliknya, entitas seperti Cirebon dan Sumedanglarang—yang lebih mudah dinegosiasikan secara politik—mendapat pengakuan formal. Hal ini menandai permulaan apa yang oleh para sejarawan disebut “kekosongan naratif”.

Situasi ini menciptakan ketimpangan: ruang sejarah lokal kehilangan suaranya karena tidak sesuai dengan parameter kolonial. Pendidikan sejarah di sekolah mengajarkan Majalengka sebagai hasil keputusan administratif kolonial, bukan kelanjutan dari jejak kekuasaan tradisional. Sejarah pun menjadi alat kekuasaan, bukan cermin pengalaman batin komunitas.

Genealogi kekuasaan Majalengka adalah kisah tentang perubahan otoritas dari spiritual ke struktural. Di masa kerajaan, kekuasaan dilegitimasi oleh kosmologi; pemimpin adalah perpanjangan langit. Kolonialisme menggantinya dengan sistem rasional-birokratis. Kepala wilayah diangkat bukan karena spiritualitas, tapi loyalitas terhadap Belanda. Maka birokrasi adat pun berubah menjadi alat kontrol kuasa luar.

Intervensi kolonial juga mengubah representasi ruang. Gunung, sungai, dan hutan yang dulu punya makna sakral,

menjadi titik peta administratif. Kosmologi yang menghubungkan manusia dan alam digantikan oleh kalkulasi. Dalam peta kolonial, tak ada lagi leluhur atau ritus—hanya angka, batas, dan komoditas. Inilah kolonisasi cara pandang.

Setelah Indonesia merdeka, warisan kolonial dalam penulisan sejarah tidak otomatis dihapus. Penetapan Hari Jadi Majalengka, misalnya, masih merujuk pada arsip kolonial, bukan pada narasi lokal. Dekolonisasi sejarah belum terjadi: sejarah masih ditulis berdasarkan logika arsip, bukan pengalaman. Yang ditulis dianggap sah, yang dituturkan dianggap mitos, meski justru menyimpan makna kultural yang dalam.

Oleh karena itu, kita perlu pendekatan hermeneutik. Hermeneutika membuka kemungkinan untuk membaca simbol, memahami ritus, dan menghargai pengetahuan yang hidup di luar teks. Genealogi kekuasaan tidak bisa hanya ditelusuri melalui arsip, tapi juga lewat pertunjukan, bahasa, dan ingatan tubuh. Dekolonisasi sejarah bukan soal mengganti nama jalan, tapi mengubah cara berpikir tentang sejarah dan siapa yang berhak menulisnya.

Jejak kekuasaan Majalengka juga harus dibaca sebagai peristiwa batin masyarakat. Ketika versi sejarah resmi menyebut tanggal dan nama yang asing, yang lahir adalah keterputusan eksistensial. Sejarah bukan hanya pengetahuan masa lalu, tapi fondasi makna tentang siapa kita hari ini. Maka ketika sejarah ditentukan oleh kuasa luar, bukan oleh

pengalaman batin komunitas, sejarah itu kehilangan daya hidup.

Genealogi kekuasaan bukan hanya soal daftar raja. Ia adalah cara untuk memahami bagaimana simbol, kuasa, dan nilai bekerja dalam masyarakat. Dalam konteks Majalengka, artinya menelusuri bagaimana perubahan dari struktur spiritual menuju birokrasi kolonial masih terasa dalam sistem sosial dan ekspresi budaya yang hidup hingga kini.

Maka membangun pendekatan yang reflektif tidak hanya memberi ruang bagi narasi yang tersisih, tapi juga memulihkan relasi batin masyarakat dengan sejarahnya. Karena yang hilang bukan sekadar data, melainkan rasa: rasa memiliki, rasa percaya, rasa terhubung dengan tanah dan leluhur. Tugas kita bukan hanya mencatat ulang, tapi menyambung ulang.

Majalengka bukan objek sejarah. Ia adalah subjek yang memiliki kehendak untuk mengingat. Ia adalah ruang hidup yang narasinya harus terus dibuka, bukan dibekukan. Genealogi kekuasaan di dalamnya adalah kisah manusia yang terus mencari tempat dalam arus waktu. Dan kolonialisme, jika tak dikritisi, akan terus menyelinap dalam cara kita menulis sejarah. Maka sejarah Majalengka bukan soal masa lalu, tapi soal keberanian kita menulis ulang secara lebih adil, lebih jujur, dan lebih manusiawi.

D. Penutup

Majalengka, bila dibaca bukan sebagai produk birokrasi modern, melainkan sebagai medan historis yang dilintasi oleh

kekuasaan simbolik dan spiritual dari Talaga, Sumedanglarang, hingga Cirebon, akan menampakkan dirinya bukan sebagai hasil, melainkan sebagai proses yang terus bergolak. Setiap kerajaan yang pernah menjejak di tanah ini bukan sekadar meninggalkan bangunan kekuasaan, tetapi juga menyemaikan kosmologi, nilai, dan memori yang tak selalu dapat ditangkap oleh nalar dokumentatif negara. Dalam relasi yang rumit ini, Talaga menandai lapisan kesunyian leluhur yang dirawat dalam ritus dan toponimi; Sumedanglarang menghadirkan sistem warisan genealogis yang membentang dari Pajajaran ke Islam; dan Cirebon memperluas cakrawala Majalengka ke arah sufisme kosmopolit dan kuasa pelabuhan. Pertarungan legitimasi yang terjadi di antara mereka bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dalam ingatan dan tubuh masyarakat.

Namun di balik lapisan-lapisan sejarah yang kaya itu, kolonialisme datang seperti penghapus yang halus sekaligus tegas. Dengan peta, arsip, dan sistem pemerintahan yang menundukkan logika spiritual kepada logika administratif, kolonialisme menjadikan narasi sejarah sebagai alat kuasa yang menetapkan siapa yang patut diingat dan siapa yang layak dilupakan. Majalengka pun dijinakkan—bukan dengan peluru, melainkan dengan garis batas, catatan distrik, dan penetapan tanggal administratif yang tidak pernah bertanya kepada para juru kunci, sinden tua, atau penari Kedempling. Genealogi kekuasaan yang semula merupakan mozaik

spiritual dipaksa menjadi linearitas yang steril. Di situlah Majalengka kehilangan sebagian jiwanya—bukan karena kekalahan dalam pertempuran, melainkan karena keterputusan antara naskah negara dan napas masyarakat.

Kini, tantangan kita bukanlah mengulang kembali sejarah masa lalu dengan cara yang sama, tetapi merawat kehadirannya sebagai medan tafsir yang hidup. Menyatukan jejak kerajaan dengan narasi kolonial bukan berarti memilih satu dan menyingkirkan yang lain, tetapi menyusun ulang harmoni antara yang formal dan yang simbolik, antara arsip dan intuisi, antara sejarah dan spiritualitas. Majalengka tidak akan pernah selesai didefinisikan selama masyarakatnya masih mengingat, menari, dan menyebut nama-nama lama di bawah pohon tua. Dan justru dalam ketidakselesaiannya itulah Majalengka menemukan kekuatannya—sebagai ruang yang tidak dikurung oleh satu narasi, tetapi dibuka oleh banyak makna, sebagai warisan yang bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dizarahi.

Tanggal yang Diperdebatkan, Ingatan yang Terlupakan

A. Pengantar

Ada sesuatu yang tampaknya sederhana namun menyimpan kegelisahan eksistensial ketika sebuah daerah menanyakan: “*Kapan kita dilahirkan?*” Pertanyaan tentang Hari Jadi Majalengka, yang terus diperdebatkan dari tahun ke tahun, sesungguhnya bukan sekadar upaya menetapkan tanggal perayaan seremonial. Ia adalah percikan dari pergulatan yang jauh lebih dalam—pergulatan antara kebutuhan akan legitimasi administratif dan kerinduan akan akar kultural yang tak sempat dituliskan. Ketika sebuah tanah dipaksa untuk memiliki satu tanggal kelahiran yang pasti, maka ia berhadapan dengan kemungkinan pengingkaran terhadap warisan naratif yang plural, lisan, dan penuh makna simbolik yang telah hidup jauh sebelum sistem kronologi modern diperkenalkan.

Di titik inilah Majalengka berada—di antara kerinduan untuk memiliki titik pangkal yang bisa dirayakan bersama, dan keraguan atas versi tunggal yang mungkin tak mewakili seluruh fragmen sejarahnya. Tanggal yang diperdebatkan

bukanlah sekadar soal angka, tetapi cerminan dari kompleksitas ingatan kolektif yang terlupakan atau sengaja disisihkan. Siapa yang berhak menentukan kapan Majalengka dilahirkan? Apakah arsip kolonial yang didasarkan pada logika penguasaan administratif lebih berkuasa daripada kisah rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa ibu, upacara adat, dan jejak geografis yang penuh kesakralan?

Pertanyaan ini membawa kita ke ranah etis dan filosofis: apakah kelahiran sebuah tanah dapat ditentukan oleh satu naskah, satu keputusan, satu narasi dominan? Atau justru kelahiran adalah peristiwa yang terus-menerus berlangsung – dihidupkan dalam tubuh masyarakat yang menari, menyebut nama-nama tua, dan memelihara ingatan yang tak tersurat? Dalam konteks inilah, perdebatan tentang Hari Jadi bukan semata upaya merumuskan sejarah, melainkan juga usaha untuk menegosiasikan kembali relasi antara negara dan rakyat, antara arsip dan laku hidup, antara tanggal dan makna.

Uraian ini tidak berangkat dari ambisi untuk menyelesaikan persoalan tanggal, melainkan untuk menggali lebih dalam bagaimana narasi-narasi resmi dapat menyisihkan memori-memori yang hidup. Ia mengajak kita membaca ulang sejarah Majalengka bukan sebagai garis lurus yang berpuncak pada satu tahun tertentu, tetapi sebagai jalinan makna yang tumbuh dari bawah: dari suara petani, dari keheningan makam tua, dari ritus yang bertahan meski

tanpa pengakuan negara. Sebab, barangkali, tanah tidak dilahirkan pada tanggal tertentu—ia hadir dalam ingatan, dan ingatan itu terlalu luas untuk diringkas dalam satu angka.

B. Pergulatan Naratif atas Hari Jadi Majalengka: Antara Angka, Ingatan, dan Makna

Tanggal lahir sebuah daerah bukan sekadar penanda administratif. Ia adalah simpul kesadaran kolektif, perayaan identitas, sekaligus medan pergulatan antara kuasa yang ingin menertibkan sejarah dan rakyat yang ingin menghidupkannya. Di Majalengka, perdebatan mengenai Hari Jadi tidak hanya berlangsung di meja birokrasi, tetapi merambat ke dalam percakapan warung, forum budaya, dan tubuh-tubuh seni tradisi yang menggugat sunyi narasi yang dipaksa tunggal. Apa yang tampak sebagai soal tanggal, sesungguhnya adalah soal hak untuk mengingat: siapa yang diizinkan bicara tentang masa lalu, dan siapa yang dijadikan pendengar.

Pergulatan ini lahir dari upaya negara—dan kemudian pemerintah daerah—untuk menertibkan sejarah ke dalam sistem yang dapat dirayakan secara seremonial. Negara, dalam logika rasionalnya, membutuhkan tanggal, tahun, dan bukti tertulis yang dapat dicantumkan dalam dokumen resmi. Maka dimulailah penelusuran ke arsip-arsip kolonial, catatan Hindia Belanda, dan sumber administratif lain untuk mencari momen yang bisa dijadikan titik kelahiran Majalengka. Namun pencarian ini luput dari kesadaran bahwa arsip-arsip

tersebut dibentuk oleh logika kolonial: logika kekuasaan, bukan logika kebudayaan.

Sementara itu, masyarakat Majalengka memiliki ingatan lain – ingatan yang tidak dibingkai oleh dokumen, tetapi oleh tubuh, ritus, dan kisah. Bagi sebagian, Majalengka lahir dari Kerajaan Talaga yang arkais dan spiritual; bagi yang lain, dari pengaruh Sumedanglarang atau Cirebon. Ada pula yang mengingat masa kabupaten sebagai penanda lahirnya wilayah administratif modern. Tapi dalam semua versi itu, kelahiran tidak selalu berupa tanggal. Ia adalah gelombang makna yang terus mengalir: dalam upacara panen, dalam tarian Kedempling, dalam nama-nama kampung yang menyimpan kosmologi leluhur.

Di sinilah perbedaan antara narasi formal dan narasi batin menjadi mencolok. Sejarah resmi mengandaikan linearitas dan verifikasi. Sementara sejarah yang hidup bersifat intuitif, majemuk, dan simbolik. Ketika pemerintah menetapkan satu tanggal sebagai Hari Jadi Majalengka, tanpa melibatkan dialog yang bermakna dengan narasi-narasi lokal, maka yang terjadi bukan perayaan, melainkan pemutusan. Sebagian warga merayakan peristiwa yang tak mereka kenali – mereka hadir, tetapi tak merasa hadir.

Ujung dari penyeragaman ini adalah kekosongan simbolik. Hari Jadi menjadi ajang seremonial: ada panggung, pidato, dan pertunjukan, tetapi tanpa resonansi batin. Sejarah yang diperingati adalah sejarah yang asing. Di sinilah muncul apa yang oleh para pemikir poskolonial disebut “sejarah yang

diam” –bukan karena tidak ada yang ingin bicara, tetapi karena yang berhak bicara hanya yang punya akses ke narasi resmi.

Namun ingatan rakyat tidak bisa dibungkam begitu saja. Dalam seni tradisi seperti Topeng Beber, dalam pupuh Sunda, dalam tata ruang desa dan irama sawah, masyarakat menyimpan narasi-narasi alternatif. Seni menjadi medium ingatan yang menyampaikan sejarah tanpa harus mencatatnya. Ia melawan dengan halus, menyimpan sejarah di tubuh: tubuh penari, tubuh sinden, tubuh juru kunci. Mereka mengingat tanpa menulis, tetapi menghidupkan sejarah lebih kuat dari yang tercetak.

Dari sini kita memahami: perdebatan Hari Jadi bukan sekadar perkara sejarah, tetapi perkara epistemologi. Apakah hanya yang tertulis yang dianggap sah? Atau kita berani membuka ruang bagi pengetahuan yang lahir dari rasa, ritus, dan laku hidup? Jika tidak, maka sejarah akan terus dikuasai oleh suara-suara dominan yang mengabaikan suara pinggir.

Tentu kebutuhan administratif tidak bisa diabaikan. Negara membutuhkan satu tanggal untuk kalender seremonial. Namun seharusnya tanggal itu tidak menutup, tetapi membuka: menjadi pintu masuk untuk menyuarakan kembali narasi-narasi yang terlupakan. Hari Jadi bukan titik akhir, tetapi simpul dialog. Ia bukan monolog kenegaraan, tetapi harus menjadi ruang tafsir bersama.

Dekolonisasi sejarah berarti juga dekolonisasi waktu. Waktu Majalengka bukan hanya kronologi. Ia adalah rasa. Ia mengalir dalam pertanian, dalam kisah-kisah malam, dalam nama yang dilafalkan dengan lembut. Dalam waktu seperti itu, Majalengka tidak lahir sekali, tapi terus dilahirkan—di tubuh masyarakatnya yang terus memanggilnya pulang, setiap hari, melalui cinta yang sunyi.

Sejarah Majalengka bukan proyek penyelesaian. Ia adalah proses mendengarkan. Maka perdebatan tentang Hari Jadi harus dirawat, bukan ditakuti. Di dalamnya tersimpan dinamika pencarian identitas: siapa kita, dari mana kita datang, dan ke mana kita hendak bertumbuh. Ketidaktuntasan bukan kekurangan, melainkan ruang kontemplasi.

Yang perlu kita rayakan bukan hanya angka tahun, tetapi keberanian untuk menafsir ulang. Karena tanah tidak lahir dari angka. Ia lahir dari doa leluhur, dari nyanyian ibu, dari jejak kaki yang menyebut bumi ini rumah. Selama doa masih dipanjatkan, selama tarian masih dilangsungkan, selama narasi masih dibisikkan dari mulut ke mulut, maka Majalengka akan terus lahir—tidak dalam satu hari, tetapi dalam setiap ingatan yang menolak dilupakan.

C. Pertanyaan Siapa yang Berhak Menentukan Kelahiran Sebuah Tanah

Apakah tanah memiliki satu tanggal kelahiran? Dan jika iya, siapa yang berhak menetapkannya? Pertanyaan ini, yang

sekilas tampak administratif, sesungguhnya menyimpan kegelisahan filosofis dan politis yang sangat dalam. Ia menyentuh wilayah-wilayah sensitif tentang kuasa atas sejarah, siapa yang diizinkan menyusun asal-usul, dan bagaimana masyarakat merasakan dirinya lahir sebagai bagian dari ruang yang disebut tanah air. Di Majalengka, pertanyaan ini menjadi medan pertarungan narasi yang melibatkan kerajaan Talaga, pengaruh Sumedanglarang dan Cirebon, memori kolonial, serta ritus kultural yang tak terarsipkan—semuanya memiliki hak bicara, namun tidak semua diberi tempat.

Penetapan “hari jadi” oleh negara dan pemerintah daerah kerap didorong oleh keperluan administratif dan simbolik. Tanggal dibutuhkan untuk legitimasi hukum, perencanaan pembangunan, hingga perayaan seremonial. Namun dalam praktiknya, keputusan tentang hari jadi sering diambil dari atas—dari dokumen kolonial, keputusan elit birokrasi, atau tafsir tunggal terhadap sejarah. Yang jarang diikutsertakan adalah suara komunitas: para juru kunci, tetua adat, seniman rakyat, dan masyarakat awam yang justru paling lama menghidupi tanah itu. Maka lahirlah tanggal-tanggal yang sah di kertas, tetapi asing dalam kesadaran batin masyarakat.

Kelahiran, dalam pemahaman masyarakat tradisional, bukan peristiwa tunggal yang diringkas dalam angka. Ia merupakan proses kosmologis yang diikat oleh relasi antara manusia, alam, leluhur, dan waktu yang siklikal. Majalengka

tidak lahir hanya karena dinyatakan sebagai kabupaten dalam satu dekrit kolonial, tetapi karena ia telah hidup dalam bahasa, ritus, dan kesadaran kolektif jauh sebelum itu. Maka saat negara menetapkan tanggal berdasarkan arsip, dan mengabaikan memori-memori kultural yang hidup dalam masyarakat, yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai “penghapusan halus” –ingatan yang tidak sesuai dengan logika formal perlahan dipinggirkan.

Pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan kelahiran tanah juga menyentuh ranah etika sejarah. Apakah kebenaran sejarah hanya milik mereka yang punya akses terhadap tulisan, arsip, dan lembaga formal? Ataupun masyarakat yang mewarisi sejarah secara lisan, simbolik, dan spiritual juga memiliki hak setara? Jika hanya satu sumber yang dianggap sah, maka kita sedang membangun sejarah yang monologal –bisu terhadap keragaman suara. Maka yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya keakuratan sejarah, tetapi keadilan sejarah.

Majalengka menjadi contoh nyata dari ketimpangan ini. Jejak Kerajaan Talaga –yang hidup dalam tutur, toponimi, dan seni tradisi –tidak banyak mendapat tempat dalam kerangka narasi resmi, karena tidak terbungkus dalam bentuk yang dianggap ‘ilmiah’. Padahal jejak ini bukan sekadar cerita rakyat; ia adalah fondasi kultural dan spiritual dari eksistensi masyarakat. Ketika jejak-jejak ini diabaikan, yang hilang bukan hanya sejarah, tetapi makna –makna tentang dari mana kita berasal, dan bagaimana kita ingin dikenang.

Tanah, bagi masyarakat adat, bukan wilayah administratif. Ia adalah tubuh hidup, tempat roh-roh leluhur bermukim, tempat bahasa dan doa bersenyawa. Maka ketika negara menentukan “kelahiran” hanya dari perspektif administratif, dan bukan dari rasa yang hidup dalam masyarakat, maka yang terjadi adalah desakralisasi: tanah dijadikan objek, bukan subjek. Majalengka tidak lagi dibaca sebagai entitas yang tumbuh, tetapi sebagai titik yang ditetapkan.

Lalu siapa yang sesungguhnya berhak menentukan kelahiran tanah? Mungkin tidak ada satu suara pun yang berhak secara absolut. Mungkin jawabannya ada dalam keberanian untuk membuka ruang tafsir, mendengarkan semua versi, dan merajutnya dalam narasi bersama. Bukan hanya sejarawan atau pejabat, tetapi juga penari Kedempling, penggubah pupuh, petani yang menamai sawahnya dari cerita leluhur, dan anak-anak yang menyanyikan lagu rakyat tanpa tahu asal muasalnya.

Dalam tradisi Sunda dikenal ungkapan, “*ngamumulé karuhun*” –merawat warisan leluhur. Merawat artinya menjaga keberagaman cara berpikir dan cara merasa. Maka dalam menentukan kelahiran sebuah tanah, kita tidak sedang mencari satu tanggal yang pasti, tetapi sedang menziarahi jejak-jejak yang menuntun kita memahami hakikat tempat itu. Bukan soal tahun berapa, tetapi tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh bersama tanah itu.

Pada akhirnya, Majalengka tidak perlu disimpulkan lahir pada satu momen tertentu. Justru ia terus dilahirkan dalam ingatan, dalam ritual, dalam cinta sunyi warganya yang menyebut nama-namanya dengan penuh hormat. Maka pertanyaan yang lebih penting dari “siapa yang berhak menentukan” adalah: apakah kita cukup rendah hati untuk mendengarkan semua yang belum sempat bicara?

D. Penutup

Dalam pergulatan naratif mengenai Hari Jadi Majalengka, kita dihadapkan pada sebuah paradoks historis: di satu sisi, ada kebutuhan administratif untuk menetapkan titik awal yang dapat dirayakan bersama sebagai tonggak identitas; di sisi lain, ada ingatan yang tak terhimpun dalam angka—ingatan yang hidup dalam tubuh masyarakat, dalam ritus yang tak tercatat, dalam bahasa ibu yang menyebut nama-nama kampung dengan penuh makna. Tanggal yang terus diperdebatkan bukanlah pertanda kelemahan sejarah lokal, melainkan cermin dari kekayaan tafsir yang belum selesai. Di sinilah kita belajar bahwa sejarah bukanlah daftar kronologi, tetapi percakapan antara masa lalu yang hidup dan masa kini yang ingin memahami akar.

Pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan “kelahiran” sebuah tanah membawa kita ke wilayah kontemplatif yang jauh lebih dalam dari sekadar pengambilan keputusan politik. Ia memaksa kita bertanya: apakah kita sedang membangun sejarah untuk dirayakan,

atau sekadar menertibkannya dalam kerangka kekuasaan? Di Majalengka, sejarah tidak lahir di atas kertas, tetapi dalam setiap jejak langkah petani di pematang sawah, dalam senandung pupuh di tengah malam, dan dalam gerak lambat seorang penari Kedempling yang tubuhnya telah menjadi kitab waktu. Maka, menetapkan kelahiran Majalengka bukanlah tindakan legalistik belaka, melainkan ziarah batin menuju asal yang didekap oleh rasa, bukan hanya ditunjuk oleh arsip.

Kita perlu meneguhkan sikap bahwa sejarah daerah seperti Majalengka tidak harus diselesaikan secara tunggal dan final. Justru dalam keterbukaannya terhadap dialog, dalam keberaniannya memberi ruang bagi narasi yang terlupakan, di situlah ia menjadi sejarah yang hidup. Hari Jadi tidak perlu menjadi monumen kebekuan, melainkan jembatan penghubung antara versi yang tertulis dan versi yang terhidupkan. Jika Majalengka ingin dikenang dengan jujur, maka ia harus diingat secara kolektif—bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyatnya, yang setiap hari telah melahirkan Majalengka dalam diam: melalui kerja, doa, dan cinta yang tak membutuhkan pengakuan, hanya penghayatan. Karena tanah yang benar-benar lahir, adalah tanah yang terus dihidupkan.

Bagian II:
Simbol, Mitos, dan Bahasa yang Merawat Diri

Toponimi dan Makna: “Majalengka” sebagai Simbol Diri

A. Pengantar

Sebuah nama tak pernah lahir dari kebetulan. Ia adalah pintu masuk ke dalam kesadaran kolektif, tempat di mana ingatan, mitos, dan identitas bertemu dalam satu frasa yang kerap diucapkan namun jarang direnungi. Demikian pula dengan *Majalengka*. Ia bukan hanya nama kabupaten di ujung barat Cirebon atau di timur Bandung; ia adalah simbol diri, metafora eksistensial yang mengandung denyut sejarah dan lapisan makna yang melampaui fungsi penunjuk lokasi. Dalam nama itu, tersembunyi kisah-kisah leluhur, pertalian lintas budaya, dan kemungkinan takdir kultural yang terus berulang dalam cara masyarakatnya memaknai tanah, hidup, dan keberadaan.

Etimologi *Majalengka* menyimpan percakapan panjang antara bahasa, legenda, dan tafsir. Versi yang umum dikenal menyebutkan bahwa nama ini berasal dari ungkapan dalam bahasa Cirebon: “*Maja-e Langka*” – buah maja yang langka atau tak ditemukan. Konon, Pangeran Muhammad dan Siti Armilah, dalam lakon dakwah Sunan Gunung Jati, ditugaskan mencari buah Maja di wilayah ini, namun

hasilnya nihil. Maka tempat ini pun diberi nama berdasarkan ketidakhadiran itu: pada sesuatu yang dicari, namun tak ditemukan. Versi lain menyebut pohon Maja ditebang oleh Nyi Rambut Kasih, membuatnya menjadi langka—sebuah tindakan simbolik yang mungkin menyimpan tafsir tentang hilangnya kesuburan, atau perpindahan nilai-nilai dari era lama ke era baru.

Lebih jauh, tafsir lain yang lebih spekulatif namun penuh resonansi budaya mengaitkan *Majalengka* dengan *Majapahit*—di mana kata “*Lengka*” diposisikan sebagai varian atau simbol dari *pahit*. Maka *Majalengka* bukan sekadar tempat yang kehilangan buah, tetapi tempat yang mewarisi pahitnya sejarah, kompleksitas kekuasaan, atau bahkan kenangan-kenangan purba yang tak lagi disebutkan dalam teks resmi. Di titik ini, nama bukan lagi sekadar kata. Ia menjelma lanskap perasaan kolektif—tentang pencarian, kehilangan, transformasi, dan barangkali, kerinduan yang tak pernah selesai.

Pertanyaannya kemudian: apakah nama mengandung takdir kultural? Apakah dengan menyebut tempat ini sebagai *Majalengka*, masyarakat secara tak sadar telah mewarisi narasi kehilangan, kerendahan hati dalam pencarian, atau bahkan kearifan dalam menerima kepahitan hidup? Dalam banyak budaya, nama adalah doa sekaligus arah. Ia tak hanya menunjuk, tapi juga membentuk. Maka bisa jadi, dalam pengulangan nama *Majalengka*, masyarakatnya tengah mengafirmasi diri sebagai komunitas yang dibentuk oleh

sejarah pencarian dan kehilangan, tetapi juga oleh ketabahan, kesabaran, dan keterbukaan terhadap makna yang tak pernah utuh.

Uraian ini tidak bertujuan untuk menemukan satu makna final dari nama *Majalengka*, melainkan untuk membuka kembali medan simbolik yang selama ini terpendam di balik penyebutan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin cenderung mereduksi nama menjadi data administratif, kita diajak untuk mengingat bahwa nama adalah jendela jiwa sebuah tempat. Ia adalah simpul waktu, ruang, dan jiwa kolektif. Dan *Majalengka*, dalam segala versinya, adalah panggilan yang mengandung lebih dari sekadar lokasi—ia mengandung kemungkinan takdir, yang senyap namun membentuk. Maka mengenal Majalengka, sejatinya adalah mengenal cara suatu tempat menyebut dan menanggung dirinya sendiri.

B. Etimologi dan Filosofi Nama Majalengka: Menelusuri Simbolisme di Balik Sebuah Toponimi

Sebuah nama tidak pernah hadir secara kebetulan. Ia adalah bentuk awal dari penandaan makna—cara manusia menghubungkan ruang dengan sejarah, identitas, dan rasa. Dalam lanskap kultural Nusantara, toponimi menjadi warisan tak hanya linguistik, tetapi juga spiritual. Demikian pula dengan *Majalengka*, sebuah nama yang tak sekadar menunjuk tempat, tetapi menjadi pintu masuk menuju dimensi eksistensial dan historis masyarakatnya.

Secara etimologis, versi paling umum menyebut bahwa *Majalengka* berasal dari frasa dalam bahasa Cirebon: “**Maja-e Langka**” – buah Maja yang langka atau tidak ditemukan. Kisahnya berkisar pada perintah Sunan Gunung Jati kepada Pangeran Muhammad dan Siti Armilah untuk mencari buah maja. Namun pencarian itu berakhir dengan nihil. Dari ketiadaan itulah nama ini lahir. Dalam narasi ini, nama menjadi jejak dari pencarian yang tak berbuah, suatu kehilangan yang justru diabadikan. Filosofinya sederhana namun dalam: bahwa dalam yang hilang, ada yang harus dikenang; bahwa ketidakhadiran juga adalah pengingat eksistensial.

Versi lain menyebutkan kisah pembabatan pohon-pohon maja oleh Nyi Rambut Kasih, sosok perempuan yang sarat makna dalam sejarah lokal. Karena tindakan itu, pohon maja menjadi langka dan masyarakat mulai menyebut wilayah tersebut sebagai “*Maja-e Langka*”. Ini adalah versi yang sarat simbol kekuasaan, kehendak, dan transformasi. Pembabatan pohon bukan sekadar tindakan ekologis, tetapi peristiwa simbolik yang menandai perubahan zaman – dari masa rimba menuju masa sosial, dari mitos menuju sejarah.

Interpretasi lain bahkan lebih bersifat spekulatif-filosofis. Kata “maja” tetap dianggap sebagai nama buah yang pahit, dan “langka” dikaitkan dengan makna pahit atau hilang dalam pengaruh bahasa Jawa Kuno atau Sanskerta. Dari sini muncul hubungan antara *Majalengka* dan *Majapahit*, entah sebagai penamaan ulang, atau bentuk lokal dari

kekuasaan yang telah berlalu. Dalam tafsir ini, nama *Majalengka* menjadi representasi dari sisa-sisa kejayaan yang menyisakan rasa getir, identitas yang diwarisi dalam diam, dan sejarah besar yang menyusut dalam ruang-ruang kecil.

Dalam semua versi tersebut, *Majalengka* adalah nama yang lahir dari narasi kehilangan dan pencarian. Namun dari kehilangan itu lahir makna. Dalam kerangka kultural Sunda yang menjunjung keseimbangan batin, kesadaran akan keterbatasan menjadi kebijaksanaan. Nama yang berasal dari sesuatu yang hilang, bukan menyedihkan, melainkan mengajarkan kerendahan hati dan penerimaan. Di balik toponimi ini, tersimpan ajaran spiritual tentang makna hidup: bahwa tak semua yang dicari harus ditemukan, dan tidak semua yang tidak ditemukan adalah kekosongan.

Lebih dari itu, nama *Majalengka* menjadi penanda cara masyarakatnya memaknai eksistensi. Orang Majalengka dikenal sebagai masyarakat yang hidup tenang, bersahaja, dan sabar. Mungkin ini bukan sekadar kebetulan sosiologis, tetapi manifestasi dari filosofi nama itu sendiri. Dalam hidup yang tak selalu manis, seperti buah maja yang pahit, masyarakat menemukan kekuatan bukan dalam kelimpahan, tapi dalam kebijaksanaan untuk merawat yang ada, dan menerima yang tak kembali.

Nama juga mengandung kekuatan performatif. Ia bukan hanya mencerminkan identitas, tetapi membentuknya. Maka ketika masyarakat menyebut Majalengka, mereka tidak hanya menyebut tempat, tetapi mengafirmasi diri mereka sebagai

bagian dari narasi yang tak selesai – narasi kehilangan, ziarah, dan penerimaan. *Majalengka* bukan perayaan akan kejayaan, melainkan pengakuan akan keterbatasan yang dirayakan dengan rasa hormat. Dan dalam dunia yang serba memburu kemenangan, sikap ini menjadi kekuatan yang langka.

Bila kita membandingkan dengan toponimi lain yang penuh afirmasi – seperti *Yogyakarta* (kota yang cocok dijalankan dengan tata), atau *Surakarta* (kota damai) – *Majalengka* menempuh jalur yang lebih kontemplatif. Ia tidak menyebut diri sebagai agung, damai, atau penuh berkat. Ia menyebutkan kekurangannya. Namun justru dari penyebutan itulah, ia menjadi penuh makna. Ia bukan kota kemenangan, tapi kota kebijaksanaan. Bukan kota yang memiliki segalanya, tapi kota yang menerima segala yang mungkin hilang.

Dari sudut pandang hermeneutika, *Majalengka* adalah teks terbuka yang hidup. Ia dapat dibaca ulang oleh setiap generasi. Tidak ada versi final tentang maknanya. Ia tumbuh bersama tafsir, berkembang dalam perenungan, dan mengundang masyarakatnya untuk terus menziarahi akar maknanya. Setiap penyebutan menjadi bagian dari pemaknaan, dan setiap pemaknaan adalah bagian dari ziarah spiritual.

Maka, *Majalengka* adalah nama yang tidak menunjuk pada kejayaan, tetapi pada kesadaran. Ia mengandung pelajaran hidup tentang kehilangan, tentang batas, dan tentang kekuatan dalam kepahitan yang dirawat dengan

sabar. Sebuah nama yang ditunen dari cerita, mitos, dan tafsir, lalu dijadikan cermin untuk mengenali diri sebagai komunitas yang tumbuh bukan karena kelimpahan materi, melainkan karena kedalaman rasa.

Pada akhirnya, kita tidak sekadar menelusuri etimologi, tetapi menyelami filosofi. Dalam kata *Majalengka*, kita membaca perjalanan panjang masyarakatnya yang menyebut, menghidupi, dan memaknai tanah mereka bukan sebagai tempat yang selesai, tetapi sebagai medan tafsir yang terus terbuka. Sebuah ruang yang lahir dari pencarian dan akan terus melahirkan makna baru, selama nama itu terus diucapkan – dengan hormat, dan dengan jiwa.

C. Apakah Nama Mengandung Takdir Kultural?

Nama bukan sekadar penanda. Ia adalah narasi awal keberadaan, simpul antara bahasa dan jiwa yang sering kali menautkan individu atau komunitas pada alam semesta. Dalam banyak kebudayaan, nama bukanlah suara yang arbitrer. Ia adalah doa, harapan, dan kadang, takdir. Maka muncullah pertanyaan reflektif: apakah nama mengandung takdir kultural? Apakah nama dapat menentukan arah batin kolektif suatu masyarakat? Atau, sebaliknya, apakah ia hanya hiasan bunyi belaka, tanpa kekuatan simbolik?

Dalam khazanah budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa dan Sunda, penamaan tidak pernah dianggap sepele. Nama anak dipilih dengan perenungan, sering kali melalui tirakat dan musyawarah keluarga atau tokoh adat. Nama

tempat pun memiliki jejak spiritual dan historis yang dalam. Kita tahu bahwa “Gunung Kidul” tidak hanya menunjuk arah geografis selatan, tetapi menyiratkan relasi dengan kosmologi. Demikian pula, nama *Majalengka* yang konon berasal dari “Maja-e Langka” (buah maja yang langka), menyimpan bukan hanya cerita tentang ketidakhadiran, tetapi juga simbol tentang pencarian, kekosongan yang bermakna, dan kemungkinan tentang takdir yang dijalani melalui kehilangan.

Nama, dengan demikian, adalah medan makna. Ia bukan hanya merujuk pada sesuatu, tetapi juga membentuk cara kita memahami dan mengalami sesuatu itu. Dalam kerangka ini, nama dapat mengandung “takdir kultural” bukan dalam arti deterministik, melainkan dalam makna simbolik: bahwa nama membentuk horizon nilai, membentuk rasa diri, dan arah tindakan kolektif. Nama menjadi lanskap batin.

Jika suatu komunitas meyakini bahwa nama mereka adalah pantulan dari suatu makna luhur—misalnya “sejahtera”, “penuh cahaya”, “diberkahi”—maka komunitas itu bisa jadi akan merawat nilai-nilai yang sesuai dengan makna tersebut. Sebaliknya, bila nama mengandung narasi kehilangan atau kepahitan seperti dalam kasus *Majalengka*, maka komunitas itu mungkin tumbuh dengan kesadaran akan keterbatasan, ketenangan, dan penerimaan atas hal-hal yang tak sempurna. Dalam hal ini, nama membentuk cara

berada di dunia. Ia adalah *ekspresi eksistensial* yang menjelma menjadi sikap hidup.

Takdir kultural yang terkandung dalam nama bisa terbaca dalam etos kolektif masyarakat. Di Majalengka, kita menemukan karakter masyarakat yang cenderung bersahaja, tidak meledak-ledak, sabar, dan lambat namun dalam. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada resonansi antara nama yang berarti “buah yang langka”, dan karakter masyarakat yang tidak tergesa-gesa, tidak rakus, dan justru hidup dalam ritme agraris yang tenang? Mungkin kita tak bisa menjawabnya secara empiris, tetapi secara simbolik, narasi itu saling mengikat. Nama menjadi narasi bersama yang diinternalisasi secara sunyi.

Dalam psikologi budaya, dikenal istilah *self-fulfilling prophecy*—keyakinan terhadap sesuatu dapat menjadi kenyataan karena diyakini dan dihidupi. Jika masyarakat meyakini bahwa nama mereka menyimpan filosofi tertentu, maka pola hidup, pendidikan, bahkan ekspresi kesenian dan spiritualitas akan dibentuk oleh keyakinan itu. Dalam kerangka ini, nama bekerja bukan sebagai label, tetapi sebagai teks hidup. Ia menciptakan ruang tafsir, arah perilaku, bahkan membentuk batas kesadaran kultural.

Pertanyaannya kemudian: apakah nama mengekang atau membebaskan? Di sinilah kita perlu menafsir secara hermeneutik. Nama bukan nasib. Ia adalah medan kemungkinan. Ia memberi arah, tapi tidak menetapkan. Nama adalah pintu, bukan dinding. Kita bisa menafsir ulang,

membaca ulang, bahkan membebaskan diri dari beban simbolik yang tidak lagi relevan. Namun jika dimaknai dengan sadar dan arif, nama justru menjadi titik tolak untuk membangun jati diri yang kokoh. Nama menjadi akar, bukan beban.

Dalam dunia yang semakin cepat dan homogen, banyak masyarakat kehilangan kesadaran akan kekuatan nama. Toponimi dianggap sekadar kebutuhan administratif. Padahal di sanalah terkandung arsip simbolik dan spiritual. Ketika kita mengucapkan “Majalengka”, kita tak hanya menyebut sebuah tempat. Kita sedang menghidupkan jejak batin. Kita sedang menyentuh lapisan eksistensial tentang siapa kita, dan bagaimana kita hidup bersama tanah itu.

Maka, menjawab pertanyaan awal: **ya**, nama mengandung takdir kultural. Bukan karena ia membawa nasib yang tak bisa dielakkan, tetapi karena ia adalah *kisah awal* yang mengundang kita untuk memahami arah. Nama mengandung makna, dan makna—jika dihidupi secara kolektif—menjadi nilai. Nilai menjadi laku, dan laku menjadi jalan. Di titik itulah nama, secara simbolik, menjelma menjadi takdir.

Dan Majalengka, yang berasal dari buah yang tak ditemukan, justru menjadi ladang tempat makna ditanam: makna tentang kesabaran, tentang kerendahan hati, tentang pencarian yang tidak selalu menemukan, tetapi selalu memanusiasiakan. Sebuah nama yang mengandung pahit, namun menumbuhkan arif. Sebuah nama yang mungkin

sunyi, tapi tak pernah hampa. Sebuah nama yang menjadi takdir, karena terus kita maknai.

D. Penutup

Memahami nama *Majalengka* bukanlah sekadar usaha linguistik, melainkan perjalanan menyelami resonansi batin dari sebuah komunitas yang hidup dalam sejarah, simbol, dan kesadaran kultural yang berlapis. Etimologinya yang berpaut pada frasa "*Maja-e Langka*" – buah maja yang langka atau tak ditemukan – bukan sekadar cerita asal-usul, tetapi sebuah penanda eksistensial tentang kehilangan, pencarian, dan makna yang tumbuh dari kekosongan. Di balik nama yang mungkin terdengar sederhana itu, tersimpan lapisan filosofi yang merefleksikan relasi masyarakatnya dengan waktu, alam, dan spiritualitas yang mengakar dalam diam.

Nama *Majalengka* tidak menunjuk pada kejayaan yang terang atau kemenangan yang gemilang. Ia justru mengajarkan bahwa dalam sesuatu yang tidak ditemukan, dalam buah yang hilang, terdapat ruang untuk membangun makna baru – sebuah jalan yang sunyi namun dalam, untuk merenungi hakikat keberadaan. Nama ini bukan deklarasi kemegahan, melainkan bisikan batin yang mengajak masyarakatnya hidup dalam ritme yang sabar, dalam nilai-nilai yang tidak silau oleh kejayaan sesaat, tetapi berakar pada kearifan yang menyerap dari tanah, dari langit yang teduh, dan dari kebudayaan yang tumbuh perlahan.

Jika kita mengakui bahwa nama mengandung takdir kultural, maka *Majalengka* adalah simbol dari takdir yang tidak dibentuk oleh dominasi, tetapi oleh kontemplasi. Ia bukan takdir yang mengikat, melainkan arah yang membimbing. Nama itu bukan sekadar sebutan administratif; ia adalah ladang makna yang terus ditanami oleh generasi demi generasi. Ia membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup. Maka, ketika kita menyebut *Majalengka*, sejatinya kita sedang menyebut kembali diri kita sendiri – diri yang bersahaja, penuh rasa, dan tidak tergesa-gesa meraih dunia, tetapi selalu rindu menyelami makna.

Di akhir refleksi ini, kita menyadari bahwa toponimi bukan sekadar warisan kata, tetapi warisan jiwa. Nama adalah teks yang hidup dalam ingatan kolektif. Dan *Majalengka*, sebagai simbol diri, tidak perlu diteriakkan untuk bermakna. Ia cukup untuk dihidupi. Sebab kekuatan sejatinya bukan pada kehadiran yang keras, tetapi pada keheningan yang mengakar. Maka biarlah nama ini tetap seperti asalnya – *langka*, bukan karena hampa, melainkan karena tak tergantikan.

Objek Pemajuan Kebudayaan: Cermin Ingatan dan Jalan Pulang Majalengka

A. Pengantar

Tidak semua warisan dapat ditakar dengan ukuran material, dan tidak semua sejarah bisa disimpan dalam kotak arsip. Di antara serpihan-serpihan waktu dan diamnya generasi yang lewat, tersembunyi simpul-simpul makna yang membentuk siapa kita sebagai masyarakat. Simpul-simpul itulah yang dalam kerangka kebijakan budaya dikenal sebagai **Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)**—entitas-entitas hidup yang tidak sekadar menjadi milik masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa kini dan suluh bagi masa depan. Di Majalengka, OPK bukan hanya catatan kultural; ia adalah denyut tak kasatmata yang mengalir dari akar pohon tua, dari nyanyian nenek di ladang, dari tapak kaki di tanah yang telah ribuan kali dibajak dan didoakan.

Majalengka adalah ruang yang tak bisa direduksi menjadi garis administratif semata. Ia adalah palimpsest kebudayaan yang terus ditimpa dan ditafsir ulang: dari jejak Katumenggungan Talaga yang penuh narasi lokal, pengaruh Sumedanglarang yang bercorak aristokratik, hingga hembusan Islamisasi Cirebon yang membawa kosmologi

baru. Dalam ruang historis yang berlapis inilah OPK tumbuh sebagai hasil dari dialektika memori dan makna – baik dalam bentuk seni pertunjukan seperti Tari Kedempling dan Topeng Beber, maupun dalam tradisi tutur, bahasa Sunda Majalengka, dan sistem pengetahuan pertanian yang tak tercatat tetapi terus diwariskan.

Toponimi, ritus, manuskrip, bahkan sistem nilai yang terkandung dalam permainan rakyat dan adat istiadat menjadi reservoir makna yang tak ternilai. Mereka adalah tubuh-tubuh simbolik yang merekam lebih banyak daripada yang mampu diungkapkan oleh teks sejarah resmi. Maka OPK bukan hanya pelengkap narasi kebangsaan; ia adalah fondasi spiritual lokalitas, yang jika dirawat dengan kesadaran, bisa menjadi sumber revitalisasi karakter dan identitas daerah. Di tengah gelombang globalisasi yang mengikis batas dan membentuk dunia dalam citra seragam, OPK menjadi penanda keberbedaan yang tak perlu defensif – ia adalah tanda bahwa kita masih memiliki akar, dan masih bisa kembali pulang secara kultural.

Uraian ini tidak hanya akan mengulas OPK sebagai kategori kebijakan, tetapi juga sebagai medan tafsir kebudayaan – di mana Majalengka dipanggil untuk membaca ulang tubuh sejarahnya, tidak sekadar melalui data statistik atau perayaan seremonial, tetapi melalui kesediaan untuk mendengarkan suara-suara sunyi dari masa lalu yang masih bergema di tubuh masyarakat hari ini. Sebab barangkali, yang disebut kemajuan bukanlah berlari ke depan tanpa arah,

melainkan keberanian untuk kembali, membaca ulang akar, dan menyusun masa depan dari yang paling kita pahami: identitas yang jujur, lokalitas yang arif, dan kebudayaan yang tidak pernah mati—hanya sedang menunggu untuk disapa kembali.

B. Objek Pemajuan Kebudayaan: Simpul Memori, Tubuh Sejarah, dan Cermin Diri Majalengka

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) bukan sekadar daftar administratif dalam sistem pencatatan warisan budaya, melainkan jalinan makna yang merepresentasikan tubuh historis dan kultural suatu masyarakat. Di Majalengka—tanah yang dalam alur waktunya pernah menjadi persimpangan kuasa antara Kerajaan Talaga, Sumedanglarang, dan Cirebon—OPK menjadi napas panjang dari ingatan kolektif yang tak pernah benar-benar padam, meski kerap diredam oleh logika dokumentasi negara. Bahasa, ritus, manuskrip, seni pertunjukan, hingga sistem pengetahuan agraris adalah penanda eksistensial yang menjelaskan bagaimana orang Majalengka memaknai ruang, waktu, dan keber-adaannya.

Bahasa Sunda dialek Tengah-Timur, yang dipergunakan sebagian besar masyarakat Majalengka, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan penopang identitas kultural. Setiap lekuk logat, setiap idiom lokal, mengandung warisan nilai dan perspektif hidup yang tidak ditemukan dalam struktur formal bahasa Indonesia. Ketika seseorang mengucap

"kabogoh" alih-alih "pacar", atau memilih "ngabagea" ketimbang "menyambut", di situlah makna tidak hanya hadir sebagai isi, tetapi sebagai bentuk spiritual dan sosial yang menyatu dengan jati diri.

Demikian pula manuskrip Al-Qur'an tulisan tangan yang disimpan di rumah Juru Kunci di Desa Pagaraji bukan semata-mata artefak religius. Ia adalah representasi dari penghayatan tekstual dan spiritual yang terhubung langsung dengan ruang kepercayaan lokal. Kerusakan fisiknya justru menjadi metafora dari ketidaktahanan pengetahuan jika tercerabut dari ekosistem perawatan budaya yang aktif. Manuskrip ini adalah simbol kontinuitas – dari pena yang dahulu menggores tinta, ke lidah yang kini menghidupkan nilai-nilai lewat hafalan dan petuah.

Tradisi lisan seperti kisah Nyi Rambut Kasih, pantun Gaok, atau aturan pamali menyimpan struktur simbolik yang kompleks. Ia bukan dongeng kosong, tetapi "teks terbuka" yang menyampaikan larangan, nilai, dan kritik sosial melalui estetika tutur. Ironisnya, tradisi lisan ini kini digeser ke pinggir, dituturkan hanya oleh generasi lanjut usia. Maka, OPK bukan hanya daftar pelestarian, tetapi juga alarm kultural bahwa memori kolektif sedang kehilangan perantara.

Adat istiadat seperti Mapag Sri, Guar Bumi, hingga Ekahan dan Puput Puseur adalah perwujudan praksis kearifan lokal yang mengikat komunitas. Ia adalah ritus siklus hidup – dari kelahiran hingga kematian – yang mempertemukan nilai spiritual, kebersamaan sosial, dan

hubungan ekologis. Dalam ritus itu terkandung etika kolektif, spiritualitas komunal, serta narasi tentang kosmos. Ketika Guar Bumi dirayakan, bukan sekadar panen yang dirayakan, melainkan dialog antara manusia, tanah, dan langit.

Sistem pengetahuan tradisional seperti pembuatan gula cakar, genteng tanah liat, dan gamelan adalah perwujudan teknologi lokal yang diciptakan bukan atas nama efisiensi, tetapi keharmonisan antara manusia dan alam. Pengetahuan ini adalah simbol dari adaptasi kreatif dan kecerdasan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika orang membuat genteng atau kecap Majalengka, mereka tak hanya sedang bekerja, tetapi juga sedang menghidupkan pengetahuan kolektif yang telah diasah oleh waktu.

Teknologi tradisional, permainan rakyat seperti galah burulu, egrang, atau ucing-ucingan, hingga seni pertunjukan seperti Tari Kedempling, Topeng Beber, dan Ujungan, semua menyimpan lapisan semiotik yang kaya. Mereka adalah pentas simbol yang menghidupkan kembali fragmen sejarah dan ingatan leluhur dalam bentuk yang bisa dirasa oleh tubuh. Dalam setiap gerak tari dan suara gamelan, terdapat pesan-pesan tersirat yang menghubungkan masa kini dengan kosmos batin masa lalu.

Objek Pemajuan Kebudayaan di Majalengka sejatinya bukan sekadar warisan, tetapi tubuh memori yang terus bertumbuh. Ia adalah ruang tafsir yang memungkinkan kita membaca diri sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. OPK adalah bentuk sejarah yang tidak linier, melainkan

spiral—yang berputar, berlapis, dan saling menghidupi antara satu bentuk budaya dengan lainnya. Ketika tari, bahasa, ritus, dan kerajinan dibaca bersama, kita tidak hanya menemukan akar budaya, tetapi juga menemukan jalan pulang batin yang selama ini tergerus oleh modernitas yang seragam.

Pada titik ini, OPK menjadi medan simbolik yang tak hanya perlu dilindungi, tetapi juga ditafsir ulang. Bukan untuk disakralkan secara beku, tetapi untuk dihidupkan sebagai ruang penciptaan makna baru yang tetap berpijak pada nilai lama. Sejarah Majalengka tidak akan pernah utuh tanpa membaca OPK-nya sebagai kitab terbuka yang terus ditulis oleh generasi demi generasi. Majalengka tidak sedang mencari tanggal lahir administratif; ia sedang mencari cermin untuk mengenali wajahnya sendiri.

C. Keberadaan OPK di Majalengka: Tubuh Batin yang Menjaga Ingatan

Keberadaan **Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)** di Majalengka bukanlah fragmen sejarah yang berdiri sendiri, melainkan serpihan-serpihan batin yang masih bernapas dalam tubuh masyarakatnya. Ia bukan bangkai masa lalu yang dibekukan dalam formalitas arsip, melainkan arus halus yang terus mengalir dalam gerak, suara, dan laku harian warga. OPK di Majalengka adalah hidup yang menyaru dalam diam. Ia hadir dalam irama Tari Kedempling, dalam sorot mata penari Topeng Beber, dalam logat khas bahasa

Sunda Majalengka yang menolak menyerah pada homogenisasi, dan dalam cerita lisan yang mungkin tak terdengar di ruang rapat, tetapi terus dihidupkan di dapur, di sawah, dan di mimpi kolektif sebuah masyarakat yang masih ingat dari mana mereka berasal.

Tari Kedempling bukan sekadar seni pertunjukan; ia adalah peristiwa ingatan. Setiap hentakan kakinya adalah denting waktu yang membangkitkan kembali ritme leluhur. Dalam ruang sunyi tempat tari itu digelar, tubuh penari menjadi naskah hidup – menuliskan kembali sejarah yang tak pernah diarsipkan. **Topeng Beber** pun demikian: wajah kayu yang dibentuk bukan untuk menutupi, tapi untuk mengungkapkan. Ia menyimpan narasi kerakyatan, spiritualitas lokal, serta kritik halus terhadap zaman. Kedua seni ini bukan sekadar hiburan; mereka adalah ritual pembacaan ulang atas makna hidup, makna desa, dan makna Majalengka itu sendiri.

Bahasa Sunda Majalengka adalah penanda batin yang tak bisa ditranskripsikan sepenuhnya. Ia hidup dalam irama suara ibu, dalam sapaan tetangga, dan dalam umpatan yang tetap lembut. Bahasa ini adalah benteng simbolik terhadap derasnya bahasa pasar dan bahasa kekuasaan. Ia tidak menolak zaman, tapi menolak dilucuti dari akar. Dalam tiap kata yang terucap, terdapat filosofi hidup yang dijalankan secara turun-temurun: bahwa hidup adalah kesantunan, bahwa relasi harus dilingkupi rasa, dan bahwa bicara bukan sekadar menyampaikan, tetapi menghidupi.

Tradisi lisan adalah tubuh narasi yang melampaui linearitas sejarah formal. Ia tidak hadir sebagai kronologi, tetapi sebagai resonansi. Kisah Nyi Rambut Kasih, legenda Gunung Ciremai, dan berbagai cerita rakyat lain adalah reservoir simbolik yang mengikat masa lalu dengan masa kini dalam bentuk yang lentur. Mereka adalah sejarah dalam bentuk puisi, spiritualitas dalam bentuk cerita. Ketika anak-anak mendengarnya dari kakek-nenek mereka, mereka tidak hanya diwarisi cerita, tetapi juga cara memaknai dunia.

Keberadaan OPK ini merepresentasikan sebuah **tubuh budaya** yang menyimpan luka dan harapan. Luka kolonialisme yang pernah memisahkan masyarakat dari akar tanah dan dari nilai-nilai lokalnya, masih terpantul dalam hilangnya banyak OPK yang dahulu hidup subur. Namun harapan tetap menyala dalam mereka yang masih menari, masih bertutur, dan masih merawat logat. Majalengka menyimpan kerendahan hati agraris yang khas—sebuah keutamaan yang tidak banyak bersuara, tapi terus bekerja. Dalam tubuh budaya ini, nilai-nilai tidak diteriakkan, tetapi dijalani dalam cara mencangkul, dalam cara menyambut tamu, dan dalam cara menghargai sunyi.

Keindahan OPK Majalengka adalah keindahan yang **tidak gemerlap**. Ia tidak dibingkai dalam lampu sorot, tapi menyala dari dalam. Ia adalah estetika yang hidup dalam ritme, dalam tekstur tanah, dan dalam warna-warna yang tidak diciptakan untuk media sosial, tetapi untuk keseimbangan batin. Ketika OPK ini tak tercatat dalam arsip

formal, itu bukan karena ia tidak penting, tetapi karena logika arsip tak mampu menangkap yang tidak linier, yang tidak bersuara keras, dan yang tidak bisa dibakukan. OPK Majalengka adalah bentuk sejarah yang cair – ia hidup dari sentuhan, dari tarikan nafas, dan dari kerinduan untuk tetap menjadi diri sendiri.

Maka pelestarian OPK di Majalengka tidak cukup hanya dengan katalogisasi. Ia membutuhkan pendekatan yang menyentuh batin, bukan hanya program kerja. Ia memerlukan ruang yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar objek. Ia harus hadir dalam kebijakan yang mendengarkan bisikan tanah dan bahasa, bukan hanya target dan angka. Pemajuan kebudayaan melalui OPK haruslah menjelma menjadi gerakan spiritual: yakni gerakan yang menghidupkan kembali nilai, menguatkan akar, dan menenun ulang makna Majalengka sebagai ruang hidup yang penuh rasa.

Dalam konteks ini, OPK menjadi bukan sekadar warisan, tetapi **panggilan**. Panggilan untuk membaca ulang Majalengka, bukan dari tanggal administratif kelahirannya, tetapi dari denyut rasa yang telah lama hidup dalam tubuh masyarakatnya. Panggilan untuk tidak melupakan tari-tari yang tak sempat dipanggungkan, lagu-lagu yang tak sempat direkam, dan cerita-cerita yang tak sempat ditulis. OPK adalah rumah – dan setiap rumah, seberapa pun kecil dan sederhana, adalah tempat pulang yang paling jujur.

Keberadaan OPK di Majalengka adalah sebuah **kehadiran yang meminta untuk didengar**, bukan dipamerkan. Ia tidak menuntut megah, cukup untuk diakui dan dihidupi. Karena dalam tubuh budaya yang mereka jaga, Majalengka sedang berbicara pada dirinya sendiri: bahwa ia belum usai, bahwa ia masih punya sesuatu untuk dikisahkan, dan bahwa ia tidak akan pernah selesai didefinisikan oleh yang di luar, selama yang di dalam masih merawat ingatan dan menyemai makna.

Dan dari sanalah, masa depan dapat tumbuh—**bukan dari lupa**, tetapi dari kenangan yang dibenahi; bukan dari peniruan, tetapi dari kepercayaan terhadap jati diri; bukan dari penghapusan, tetapi dari penemuan kembali apa yang selama ini diam di sudut-sudut desa, di panggung-panggung kecil, dan di jiwa-jiwa yang belum berhenti menari meski dunia seakan telah lupa bagaimana cara mendengar.

D. **OPK sebagai Panggilan Pulang: Menafsir Ulang Masa Depan Majalengka dari Akar Budaya**

Dalam konteks pemajuan kebudayaan, **Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)** bukanlah sekadar daftar entitas yang perlu dilindungi demi masa lalu. Ia adalah medan tafsir—sebuah panggilan untuk kembali ke akar, bukan dalam pengertian romantisme statis, tetapi dalam semangat revitalisasi nilai. Kembali ke akar berarti menyentuh ulang sumber makna: bahasa, ritus, narasi, laku, dan seni yang telah membentuk cara hidup masyarakat. Akar

tidak dimuliakan untuk ditinggikan di altar museum, melainkan untuk dijadikan dasar berpijak dalam melangkah ke masa depan yang lebih manusiawi, berkarakter, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, **Majalengka** tidak sekadar diajak mengenang masa lalu, tetapi membaca ulang dirinya sendiri dari apa yang telah tertanam dalam tubuh budayanya.

Majalengka, seperti banyak daerah lainnya, selama bertahun-tahun lebih dikenal melalui konstruksi administratif yang melekat padanya: batas kabupaten, angka-angka kelahiran, dan tanggal resmi yang menjadi peringatan tahunan. Namun, pemajuan kebudayaan menuntut pembacaan yang lebih dalam daripada sekadar data birokratis. Ia menuntut penyelaman ke dalam denyut simbolik yang hidup di tubuh masyarakat. Dalam konteks ini, OPK menjadi pintu masuk: ia menghadirkan jejak-jejak yang selama ini mungkin sunyi, tetapi tak pernah mati. Tari Kedempling, Topeng Beber, dan tradisi lisan tentang Nyi Rambut Kasih adalah bagian dari cara Majalengka mengenal dan menyebut dirinya sendiri. Dalam setiap gerakan dan kisah, terdapat "*tanda tangan*" dari waktu yang lebih tua daripada arsip resmi.

Jika OPK dipahami hanya sebagai instrumen pelestarian, maka kita akan gagal menangkap potensi kreatif dan transformatifnya. OPK bukan untuk diselamatkan sebagai fosil budaya, melainkan untuk dihidupi kembali, diaktualisasi dalam laku sosial, dan ditafsir ulang dalam konteks kekinian. Ia adalah ruang percakapan antara leluhur

dan generasi kini. Dalam tari tradisi, tubuh menjadi media yang merawat ingatan. Dalam bahasa daerah, logat menjadi pelindung rasa. Dalam ritus panen, tanah dan langit disatukan oleh kesadaran akan harmoni. Maka, membicarakan OPK dalam konteks Majalengka adalah membicarakan bagaimana masyarakatnya memahami dirinya sebagai subjek sejarah, bukan objek pembangunan.

Lebih dari itu, OPK di Majalengka merupakan ekspresi dari nilai-nilai kosmologis yang khas: keseimbangan, kerendahan hati, ketekunan, dan keterikatan dengan alam. Nilai-nilai ini hari ini terancam oleh logika pasar yang mendewakan kecepatan, efisiensi, dan pertumbuhan. Maka OPK menjadi titik resistensi: bukan sebagai bentuk konservatisme budaya, tetapi sebagai bentuk kebijaksanaan alternatif. Ketika anak muda kembali belajar memainkan gamelan, bukan hanya seni yang diwariskan, tetapi juga cara berada di dunia yang lebih pelan, lebih mendengar, dan lebih terhubung. Ketika masyarakat kembali merayakan *Guar Bumi*, bukan hanya panen yang diperingati, tetapi juga hubungan spiritual yang terjalin antara manusia dan alam.

Pemajuan kebudayaan melalui OPK juga berarti membuka ruang bagi masyarakat untuk menulis ulang narasi sejarahnya sendiri. Tidak melulu bergantung pada institusi pusat, tetapi memberdayakan komunitas sebagai agen makna. Dalam konteks ini, Majalengka tidak harus terus-menerus bertanya pada tanggal kelahirannya secara administratif. Ia bisa memaknai kelahirannya dari saat

pertama kali tanah itu diberi nama, dari saat pertama sebuah bahasa diucapkan di sana, atau dari saat pertama sebuah ritus dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada alam. Tanggal administratif mungkin dibutuhkan negara, tetapi denyut memori dibutuhkan oleh jiwa kolektif.

Di titik inilah, OPK menjadi instrumen rekonstruksi jati diri. Ia menawarkan Majalengka kesempatan untuk melihat dirinya bukan sebagai entitas pasif yang dibentuk dari luar, tetapi sebagai tubuh budaya yang aktif membentuk narasi. Identitas budaya bukan barang jadi, melainkan proses. Dan OPK adalah simpul-simpul dari proses itu: simpul bahasa, simpul seni, simpul ritus, dan simpul spiritualitas yang bisa dirajut ulang untuk menjawab tantangan zaman. Ketika dunia semakin mengikis lokalitas dalam nama kemajuan, Majalengka bisa berkata: *kami tidak menolak masa depan, tetapi kami ingin menjangkaunya dari akar yang kami pahami.*

Sebagai simpul memori, OPK juga memiliki fungsi terapeutik. Ia bisa menyembuhkan luka-luka sejarah yang lama dibungkam oleh versi resmi. Ia bisa mengangkat suara-suara perempuan, petani, seniman desa, dan pelaku budaya yang selama ini tak diberi tempat di forum kebijakan. Dalam konteks ini, OPK bukan hanya alat pelestarian, tetapi juga alat keadilan kultural. Ia memberi ruang bagi narasi-narasi alternatif untuk membentuk mosaik sejarah yang lebih jujur, lebih inklusif, dan lebih manusiawi.

Majalengka melalui OPK-nya sedang dipanggil untuk tidak sekadar mempertahankan budaya, tetapi

memperbaharainya. Memperbaharui bukan berarti mengubah nilai dasarnya, tetapi menemukan bentuk-bentuk baru yang tetap menyuarakan inti makna lama. Gamelan bisa hidup berdampingan dengan digitalisasi. Ritus bisa dijalankan tanpa kehilangan nilai hanya karena formatnya berubah. Bahasa lokal bisa menginspirasi sastra baru yang memadukan tradisi dan inovasi. OPK adalah bahan mentah yang bisa diramu ulang menjadi ekspresi masa kini yang tetap membawa cahaya masa lalu.

Dengan demikian, OPK dalam konteks Majalengka tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga strategis secara sosial-politik. Ia bisa menjadi dasar bagi pembangunan yang berbasis nilai, bukan sekadar angka. Ia bisa menjadi pijakan bagi pendidikan karakter yang tidak mengawang-awang, tetapi bersumber dari kehidupan konkret masyarakat. Ia bisa menjadi sandaran dalam menghadapi krisis identitas global yang membuat manusia kehilangan rasa ke-kita-an.

Majalengka tidak perlu tergesa-gesa menjadi seperti kota lain. Yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk menjadi dirinya sendiri secara lebih utuh. Dan OPK adalah salah satu jalur untuk mencapai keutuhan itu. Ia adalah naskah lama yang menunggu dibaca ulang, bukan untuk dikuduskan, tetapi untuk dijadikan bahan perenungan dan pergerakan.

Penutup dari refleksi ini bukanlah akhir, tetapi justru pembuka: pembuka bagi tafsir-tafsir baru yang akan lahir ketika Majalengka kembali melihat ke dalam dirinya, membaca denyut ritme dari tanah, bahasa, dan tarian yang

diwariskan, dan menjadikannya dasar untuk berjalan ke depan. Dalam gerak Tari Kedempling, dalam gema Topeng Beber, dan dalam tutur lisan yang nyaris padam, Majalengka tidak sedang mencari jawaban di luar, tetapi sedang mendengarkan ulang suara asalnya sendiri. Dan di situlah, pemajuan kebudayaan menemukan maknanya yang sejati.

E. **Simbolisme Tubuh, Tanah, dan Roh Komunitas: Tafsir Filosofis atas Keberadaan Budaya**

Tubuh manusia dalam kebudayaan tradisional tidak pernah dipandang sebagai sekadar entitas biologis, melainkan sebagai ruang makna yang menampung sejarah, spiritualitas, dan simbolisme yang hidup secara laten. Di Majalengka, tubuh tidak pernah berdiri sendiri; ia terhubung erat dengan **tanah** tempat ia berpijak dan **roh komunitas** yang menghidupinya. Tiga unsur ini membentuk kesatuan simbolik yang saling menghidupi: tubuh sebagai penguat, tanah sebagai penyimpan, dan roh komunitas sebagai penggerak. Di antara ketiganya, hidup kebudayaan berlangsung bukan sebagai wacana, melainkan sebagai laku yang dijalani.

Tubuh dalam tradisi Majalengka, seperti terlihat dalam Tari Kedempling atau Topeng Beber, merupakan teks hidup yang mencatat sejarah lewat gerak. Setiap gerakan bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi juga narasi historis yang menyuarakan doa panen, musim tanam, hingga peralihan kekuasaan. Tubuh penari adalah arsip yang fleksibel, lentur,

dan terus diperbarui melalui pengalaman kolektif. Ia menyimpan nilai-nilai tanpa memerlukan buku; ia menjadi jalur transmisi makna tanpa bergantung pada institusi formal.

Lebih dari itu, **tubuh menjadi medium spiritual** dalam ritus-ritus lokal. Ia menjadi jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak. Dalam kesadaran lokal, tubuh yang menari bukan hanya bergerak, tetapi juga berdoa; ia tidak sekadar menghibur, tetapi menghidupkan kembali ikatan dengan leluhur dan kosmos. Tubuh menjadi tempat roh komunitas mengambil bentuk konkret. Maka dalam setiap OPK yang hidup, tubuh bukan hanya instrumen budaya, tetapi tempat di mana nilai dan keyakinan diwujudkan.

Tanah, dalam simbolisme budaya lokal, bukan benda mati atau sekadar aset ekonomi. Ia adalah *ibu*, asal mula dan perawat kehidupan. Tanah menyimpan jejak nenek moyang, suara perjuangan, dan doa-doa yang ditanam bersama benih. Ia adalah memori yang diam, tetapi menyeluruh. Dalam upacara seperti *Guar Bumi*, masyarakat Majalengka tidak sekadar merayakan panen, tetapi juga memperbaharui kontrak spiritual dengan tanah sebagai entitas yang hidup. Tanah tidak dimiliki—ia dihormati, dirawat, dan diajak bicara.

Relasi antara **tubuh dan tanah** melahirkan kesadaran agraris yang dalam. Ketika petani mencangkul sawah, ia tidak sedang sekadar bekerja, tetapi sedang menyambung warisan. Ketika ibu-ibu menumbuk padi dalam irama ritmis, mereka tengah memperpanjang nyawa budaya yang tak bisa dikopi

oleh mesin. Tubuh dan tanah bekerja dalam tempo lambat yang menolak diseragamkan oleh industri. Mereka membangun *ekologi makna*, di mana keharmonisan lebih penting daripada efisiensi.

Namun, tubuh dan tanah hanya menjadi utuh ketika dihidupkan oleh sesuatu yang lebih halus: **roh komunitas**. Roh ini bukan hantu, bukan pula sesuatu yang mistis dalam pengertian sempit. Ia adalah etos bersama, semangat hidup kolektif, dan kebijaksanaan yang menuntun cara masyarakat memahami waktu, relasi, dan perubahan. Roh komunitas terlihat dalam cara masyarakat menyapa, dalam pantun panen, dalam laku hormat terhadap tetua dan ruang sakral. Ia tidak tampak, tapi terasa. Ia tidak berbicara keras, tetapi berbisik dalam adat dan kepercayaan.

Ketika roh komunitas memudar, tubuh kehilangan arah dan tanah kehilangan kesuciannya. Oleh karena itu, menjaga OPK berarti menjaga roh ini tetap bernapas. **Topeng Beber** bukan sekadar kesenian, tetapi cermin dari roh yang sedang menatap wajahnya sendiri. **Tari Kedempling** bukan sekadar pertunjukan, melainkan upaya menyeimbangkan tubuh dengan ritme kosmis yang diwariskan. **Bahasa Sunda Majalengka** bukan hanya alat komunikasi, tetapi wadah nilai yang menjaga roh agar tidak hilang dalam pusaran modernitas.

Ketiga unsur ini – **tubuh, tanah, dan roh** – harus dibaca sebagai satu trinitas eksistensial. Tubuh mengingat, tanah menyimpan, roh menggerakkan. Ketika salah satunya

dikoyak—misalnya ketika tanah dikomodifikasi, tubuh disubordinasikan, atau roh dipinggirkan—maka keseimbangan budaya akan terguncang. Ini bukan sekadar kehilangan bentuk, tetapi kehilangan makna. Maka tantangan utama dari pemajuan kebudayaan adalah **memulihkan relasi simbolik** ini, bukan hanya melestarikan bentuk luarnya.

Pemajuan kebudayaan tidak akan bermakna jika tidak menyentuh dimensi spiritual dari kehidupan masyarakat. Kita tidak cukup hanya membuat regulasi dan katalogisasi. Kita harus mendengarkan tanah, menghormati tubuh, dan membuka ruang agar roh komunitas bisa berbicara. Ini adalah kerja spiritual, kerja cinta, dan kerja kesadaran. Ketika kebijakan kebudayaan menjelma menjadi ruang ritual kolektif, barulah kita bisa bicara tentang keberlanjutan yang sejati—yang bukan sekadar lestari dalam wacana, tetapi hidup dalam rasa.

Majalengka, dengan segala keragaman OPK-nya, memiliki peluang untuk menjadi contoh bagaimana tubuh, tanah, dan roh dapat dijaga dalam kesatuan simbolik. Selama masih ada petani yang menyapa bumi, penari yang menggali ingatan, dan bahasa yang memanggil rasa, selama itu pula kebudayaan belum padam. Maka simbolisme ini bukan sekadar filosofi, tetapi arah pulang: ke sebuah masyarakat yang utuh karena ia mampu merawat dirinya dari dalam. Dan mungkin, hanya dengan cara inilah kita benar-benar bisa menjadi manusia—yakni tubuh yang sadar akan tanahnya, dan roh yang mengerti akar komunitasnya.

E. Penutup

Menatap Majalengka melalui lensa Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) bukan sekadar menengok warisan, melainkan menyelami cara hidup yang telah mengakar dalam tubuh kolektif masyarakatnya. Di setiap ritus yang dijalani, dalam setiap gerak tarian, dan pada setiap kata yang dilafalkan dalam bahasa Sunda Majalengka, tersimpan ingatan-ingatan halus yang telah lama membentuk horizon kesadaran lokal. OPK bukanlah pelengkap sejarah formal, melainkan jantung dari sejarah itu sendiri – ia adalah bentuk kehidupan yang melampaui dokumentasi, yang hidup dalam ruang simbol, spiritualitas, dan kerja keseharian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain dalam keheningan yang penuh makna.

Majalengka tidak mungkin sepenuhnya dimengerti hanya dari peta administratif atau tanggal kelahirannya yang diperdebatkan. Justru dalam simpul-simpul memori yang dikandung oleh OPK-lah, wajah Majalengka yang paling jujur menemukan artikulasinya. Ketika kita mengakui OPK sebagai penanda eksistensial, kita sejatinya sedang mendekati Majalengka bukan sebagai ruang geografis, tetapi sebagai ruang batin yang menyimpan lapisan-lapisan makna yang tidak mudah diselesaikan oleh satu versi sejarah. OPK membawa kita tidak hanya ke masa lalu, tetapi juga menawarkan arah – bahwa masa depan yang berkarakter tidak dibangun dari melupakan, melainkan dari menyapa kembali yang telah lama kita tinggalkan.

Penutup ini bukan akhir dari pembacaan, melainkan permulaan dari sebuah panggilan. Sebab OPK bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk dihidupi. Bukan untuk disakralkan secara beku, tapi untuk ditafsir ulang dengan kesadaran baru. Di tengah dunia yang terus berubah dan merayakan kecepatan, OPK justru mengajak kita untuk berhenti sejenak, menunduk, dan mencium tanah budaya tempat kita berpijak. Majalengka, melalui OPK-nya, memiliki kesempatan langka: bukan hanya merawat warisan, tetapi merakit arah baru yang tetap setia pada akar. Sebuah arah yang membuat kita tidak kehilangan diri di tengah arus zaman, karena kita tahu dari mana kita berasal, dan ke mana kita pulang.

Upacara yang (Tak) Kita Ingat: Menyigi Ritus, Merawat Ingatan, Menimbang Makna

A. Pengantar

Tidak ada masyarakat tanpa ritus. Dalam peradaban manapun, manusia selalu menciptakan bentuk-bentuk simbolik untuk menandai waktu, menjejak makna, dan menyambung diri dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Namun dalam lanskap kebudayaan yang kian dipercepat oleh tuntutan administratif dan logika tontonan, ritus yang semula sakral perlahan tergelincir menjadi sebetuk seremonialisme: sebuah pengulangan tanpa jiwa, perayaan tanpa makna. Di titik inilah penting untuk bertanya ulang—apa arti upacara? Apakah ia masih menjadi jembatan memori, atau sekadar menjadi rutinitas yang melupakan makna asalnya?

Hari jadi sebuah daerah, termasuk Majalengka, semestinya menjadi momen kolektif untuk menyapa kembali akar. Ia bukan sekadar tanggal, melainkan ruang waktu yang mengandung lapisan-lapisan spiritual, historis, dan kultural. Namun ketika hari jadi direduksi hanya menjadi perayaan administratif—lengkap dengan panggung, baliho, dan pidato seremonial—kita dihadapkan pada kekosongan simbolik. Upacara yang seharusnya menghidupkan ingatan bersama

justru dapat menjadi selubung yang menutupi kompleksitas sejarah dan luka-luka yang belum selesai ditafsirkan.

Setiap upacara sejatinya adalah bahasa simbolik. Dalam setiap gerakan tangan yang menabur bunga, dalam setiap alunan gamelan, dan dalam setiap doa yang disampaikan dalam bahasa ibu, terkandung resonansi zaman yang tak bisa dibaca oleh mata yang hanya mencari atraksi. Jika ritus dikelola hanya sebagai agenda acara tahunan, maka ia kehilangan sifat kontemplatifnya – kehilangan peluang untuk menjadi ruang tafsir ulang atas siapa kita dan dari mana kita berasal. Pertanyaannya kemudian: apakah kita merayakan karena kita ingat, atau karena kita tidak tahu harus bagaimana lagi selain mengulang yang telah disusun sebelumnya?

Dalam konteks Majalengka, di mana narasi kesejarahan belum benar-benar disepakati dan tanggal kelahiran daerah masih diperdebatkan, perayaan hari jadi menjadi medan yang sangat simbolik. Di satu sisi ia menyatukan; di sisi lain ia bisa menghapus. Ia bisa menjadi peristiwa integratif yang menghidupkan kembali relasi antara tubuh-tanah-roh komunitas. Tapi ia juga bisa berubah menjadi ruang politik simbolik yang menegaskan satu versi sambil menyingkirkan yang lain. Maka kritik atas seremonialisme bukanlah bentuk penolakan terhadap tradisi, tetapi usaha untuk menyelamatkan inti batiniah dari ritual itu sendiri.

Tulisan ini hadir untuk menelisik lebih jauh: bagaimana kita memahami ulang makna upacara? Apa yang sebenarnya dirayakan saat hari jadi diperingati? Dan lebih dari itu,

apakah upacara telah menjadi cermin ingatan, atau malah topeng yang menutupi luka-luka narasi yang belum sempat didekati secara jujur? Di sinilah kita akan mengurai simpul antara ritus dan politik, antara perayaan dan pengingatan, antara simbol dan substansi—sebagai bagian dari usaha pulang ke makna terdalam dari keberadaan kolektif kita sebagai masyarakat yang tak hanya ingin bangga, tetapi juga ingin sadar.

B. Upacara dan Ingatan Simbolik: Menyelami Ritus sebagai Bahasa Waktu

Upacara, dalam keberadaannya yang paling purba dan mendalam, tidak sekadar menghadirkan manusia di hadapan momen tertentu, tetapi menghadirkan waktu itu sendiri ke dalam kesadaran kolektif manusia. Ia adalah jembatan simbolik antara masa lalu dan masa kini, antara dunia yang kasatmata dan yang tak tersentuh oleh logika sehari-hari. Dalam tradisi budaya Majalengka, sebagaimana pada banyak komunitas tradisional lain di Nusantara, upacara adalah alat untuk mengingat—bukan hanya mengingat secara kognitif, tetapi menghidupkan kembali nilai, kepercayaan, dan relasi yang dahulu membentuk fondasi eksistensial komunitas. Melalui tubuh, bunyi, warna, dan gerak, ingatan diwariskan, ditata ulang, dan dibagikan.

Ingatan simbolik dalam konteks upacara berbeda dari sekadar dokumentasi historis. Ia tidak memerlukan arsip formal, karena tubuh dan ruang menjadi wadahnya. Ketika

masyarakat Majalengka menyelenggarakan upacara *Guar Bumi*, misalnya, yang sedang dibangkitkan bukan hanya kenangan tentang panen atau penghormatan kepada tanah, melainkan struktur nilai yang menyatukan manusia dengan kosmos. Di titik inilah upacara menjelma menjadi ritual kosmologis: sebuah pengakuan diam-diam bahwa kehidupan manusia bergantung pada harmoni yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam setiap tabuhan gamelan, dalam setiap langkah kaki penari, dan dalam setiap untaian mantra, waktu seolah menekuk dan menghadirkan kembali mereka yang telah tiada ke dalam kebersamaan kini.

Simbol dalam upacara tidak pernah hadir sendirian. Ia muncul sebagai jaringan makna yang saling terhubung, menciptakan medan semiotik yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang turut serta secara batiniah. Simbol bukanlah lambang yang dimaknai secara harfiah, melainkan bahasa yang mengundang kontemplasi. Bendera, bunga, air, api, atau bahkan bentuk panggung, semua memiliki dimensi metaforis yang tidak selesai dibaca dalam sekali tatap. Upacara, oleh karenanya, bukan tontonan, melainkan pelibatan spiritual. Mereka yang hadir tidak hanya menonton, tetapi masuk ke dalam ruang perenungan yang disusun secara kultural agar makna yang dilupakan bisa perlahan-lahan kembali bergema.

Dalam konteks ini, kritik terhadap seremonialisme menjadi relevan. Ketika upacara kehilangan dimensi simboliknya dan terjebak dalam pengulangan prosedural, ia menjadi hampa. Upacara berubah menjadi sekadar acara, di

mana naskah ditulis dari atas, gerakan ditentukan oleh birokrasi, dan makna dikalahkan oleh protokoler. Ini adalah saat ketika tubuh masyarakat hadir secara fisik tetapi tidak secara spiritual. Tidak ada ingatan yang dibangkitkan, tidak ada nilai yang diresapi, hanya rutinitas tahunan yang dijalankan demi memenuhi kalender kultural yang telah distandardisasi. Ingatan simbolik yang seharusnya menyambung kesadaran kolektif dengan sejarah dan leluhur, pelan-pelan tergantikan oleh kesadaran formal yang mencari legitimasi melalui jumlah peserta dan dokumentasi media.

Namun demikian, kita tidak dapat serta merta menghapus seluruh bentuk upacara modern. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menempatkan ulang makna dalam ruang ritual. Alih-alih mempertahankan bentuk demi kontinuitas administratif, upacara harus menjadi ruang di mana masyarakat kembali menyentuh inti dirinya. Hal ini membutuhkan kerja interpretatif dan partisipatif: interpretatif untuk membaca ulang simbol-simbol yang ada dalam terang kesadaran kontemporer, dan partisipatif agar masyarakat tidak menjadi objek penonton, melainkan subjek penafsir.

Ingatan simbolik tidak bekerja dalam garis lurus waktu. Ia bekerja secara spiral: berputar dan kembali ke titik semula, tapi dengan makna yang terus bertumbuh. Inilah mengapa upacara tidak pernah usang, selama ia tidak kehilangan pusat batiniahnya. Sebuah upacara hari jadi Majalengka, misalnya, bisa menjadi titik pulang bagi banyak warga yang selama ini merasa terputus dari akar sejarahnya. Jika dirancang sebagai

peristiwa reflektif—bukan hanya seremoni formal—maka hari jadi dapat menjadi medan ziarah batin, tempat warga Majalengka mengenang leluhur, merefleksikan arah pembangunan, dan menyelaraskan kembali dirinya dengan roh komunitas.

Di dalam upacara yang sungguh-sungguh, waktu tidak berjalan; ia berkumpul. Masa lalu tidak menjadi beban sejarah, tetapi kekayaan untuk dicerna. Masa kini tidak menjadi rutinitas administratif, tetapi momen eksistensial. Masa depan tidak hadir sebagai ketakutan, tetapi sebagai kemungkinan yang diwariskan melalui simbol. Maka upacara menjadi ruang liminal: ruang ambang di mana dunia profan bertemu dengan yang sakral, di mana warga bertemu dengan dirinya yang terdalam.

Majalengka yang memiliki banyak warisan budaya dalam bentuk tari, bahasa, dan ritus lokal, berpotensi menjadikan upacara sebagai tulang punggung pemulihan spiritual komunitas. Upacara bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan cara merawat jiwa bersama. Ia adalah tubuh ingatan yang hidup dan bergerak, mengajarkan bahwa menjadi masyarakat bukan hanya tentang tinggal bersama dalam ruang fisik, tetapi tentang berbagi makna dan menenun kembali relasi dengan yang tak tampak. Maka, pertanyaan mendasarnya bukan lagi: “Apa yang kita rayakan?”, melainkan “Apa yang kita ingat?” dan “Untuk siapa kita mengingat?”

Upacara yang hidup adalah upacara yang mendengarkan. Ia tidak didikte oleh kebijakan, tetapi ditumbuhkan oleh kehendak masyarakat untuk mengenali dirinya dalam simbol. Upacara seperti ini tidak memerlukan panggung megah, tidak tergantung pada kehadiran tamu-tamu istimewa. Ia cukup dihelat dalam keheningan sawah, dalam doa di batas desa, atau dalam nyanyian tua yang dihidupkan kembali oleh suara cucu. Di sanalah, ingatan simbolik menemukan rumahnya—bukan di panggung politik, tetapi di tubuh yang menari, di tanah yang diolah, dan di roh komunitas yang tetap menyala, meski redup oleh zaman.

Akhirnya, upacara adalah jalan pulang. Jalan bagi masyarakat untuk tidak tersesat dalam kebisingan modernitas. Jalan untuk kembali mengingat bahwa hidup bukan hanya soal produktivitas dan pertumbuhan, tetapi juga soal ketepatan arah dan keutuhan makna. Dan dalam setiap langkah yang dituntun oleh simbol, kita diajak untuk menyadari bahwa mengingat bukan pekerjaan intelektual, melainkan tindakan spiritual. Dalam terang kesadaran itu, upacara menjadi bukan sekadar bagian dari kalender, tetapi bagian dari cara kita menjadi manusia—yakni manusia yang tidak lupa, dan karena itu, tidak kehilangan jati dirinya.

C. Perayaan yang Menyambungkan, atau Melupakan?

Perayaan, sebagaimana ritus lainnya dalam kebudayaan, memiliki dua wajah: ia bisa menjadi jembatan

menuju kedalaman diri kolektif, namun juga bisa menjadi kabut yang menutupi luka sejarah yang belum selesai ditafsirkan. Dalam konteks kesejarahan Majalengka – sebuah wilayah yang narasi lahirnya masih dipertanyakan, dan akar-akar historisnya bersilang antara Talaga, Cirebon, dan Sumedanglarang – perayaan hari jadi menjadi ruang simbolik yang penting untuk direnungi. Apakah kita sedang merayakan untuk menyambungkan diri dengan akar dan ingatan leluhur? Atau kita sedang membangun panggung ingar-bingar yang perlahan menjauhkan kita dari substansi sejarah itu sendiri?

Dalam banyak komunitas tradisional, perayaan adalah penanda waktu sakral, tempat komunitas berhenti dari rutinitas sehari-hari untuk menyapa yang tak tampak, mengenang yang telah lalu, dan merayakan keberlanjutan hidup yang penuh syukur. Namun ketika perayaan dikonstruksi oleh logika administratif modern – di mana parameter keberhasilan adalah seberapa besar anggaran, seberapa banyak tamu, dan seberapa viral publikasi – makna spiritual yang mestinya menjadi inti mulai tergantikan oleh kemasam. Kita tidak lagi berbicara tentang masa lalu sebagai cahaya pemaknaan, melainkan sebagai dekorasi.

Perayaan yang menyambungkan adalah perayaan yang membuka ruang kontemplasi. Ia tidak terburu-buru untuk menghibur, tapi memberi jeda untuk mendengarkan. Dalam versi semacam ini, perayaan menjadi seperti doa: lembut, mendalam, dan menyentuh dimensi tak kasatmata dari

eksistensi kolektif. Ketika Tari Kedempling ditampilkan bukan untuk audiens luar, tapi sebagai bagian dari ritus masyarakat kepada leluhur dan tanah, maka tari itu sedang menghidupkan ingatan. Tapi ketika ia hanya menjadi bagian dari parade yang dilihat tapi tak dipahami, tubuh yang menari kehilangan gema sejarahnya—yang tertinggal hanyalah estetika kosong yang tak menyentuh.

Majalengka, dengan segala keagungan budaya yang dimilikinya, justru tengah berada di persimpangan ini. Setiap kali hari jadi kabupaten diperingati, kita menghadapi pertanyaan yang kian penting: untuk siapa perayaan ini digelar? Untuk ingatan, atau untuk pengakuan? Untuk merayakan tanah dan leluhur, atau untuk mengukuhkan kuasa simbolik yang terlepas dari masyarakatnya sendiri? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan upaya untuk menjaga agar perayaan tetap bernapas bersama denyut batin masyarakat yang menjadikannya bermakna.

Simbolisme dalam setiap perayaan sejatinya mengandung potensi transformasi spiritual. Warna bendera, suara gamelan, bentuk panggung, dan urutan acara bukanlah elemen netral; mereka menyampaikan nilai, membentuk kesadaran, dan menciptakan narasi. Ketika simbol itu dirancang tanpa memahami ruh-nya, maka ia menjadi artefak yang dipamerkan, bukan tubuh yang dihidupi. Perayaan yang demikian bukan menyambung, tetapi memutus. Ia menjadikan budaya sebagai tontonan, bukan pengalaman. Ia

menghasilkan kehadiran yang ramai, tetapi bukan keterlibatan yang mendalam.

Sebaliknya, perayaan yang menghidupkan adalah perayaan yang lahir dari tubuh masyarakat. Ia tidak selalu spektakuler, tapi ia jujur. Ia mungkin hanya berlangsung di alun-alun kecil, tapi di dalamnya tersimpan getar ingatan yang diturunkan dari kakek kepada cucu. Ia mungkin tidak tercetak dalam berita besar, tapi membekas dalam hati yang hadir. Perayaan semacam ini mengandung spiritualitas keseharian—yakni bentuk rasa hormat yang tidak dipaksakan, tetapi mengalir dalam irama hidup masyarakat itu sendiri.

Kita hidup di zaman di mana kehadiran simbolik sering disalahartikan sebagai kehadiran substansial. Kita menyamakan bendera yang dikibarkan dengan semangat yang dihayati. Kita merasa cukup dengan mengenakan pakaian adat tanpa mengenali nilai-nilai yang dikandungnya. Perayaan yang melupakan adalah perayaan yang penuh dengan lambang, tapi kehilangan bahasa untuk menghubungkan lambang itu dengan makna. Di sanalah budaya dikurung dalam formalitas; ia kehilangan vitalitasnya sebagai medan tafsir, sebagai ladang makna.

Dalam konteks ini, kritik atas seremonialisme bukan berarti menolak bentuk perayaan. Ia justru hendak mengingatkan bahwa bentuk harus menjadi cermin dari isi. Ketika tanggal hari jadi masih diperdebatkan, seharusnya perayaan menjadi ruang dialog, bukan penegasan satu versi

sejarah. Ketika seni tradisi mulai ditinggalkan generasi muda, perayaan seharusnya menjadi ruang pewarisan makna, bukan sekadar panggung hiburan. Ketika tanah mulai kehilangan kesakralannya karena alih fungsi, perayaan seharusnya menjadi ruang doa kolektif yang mengingatkan bahwa tanah bukan hanya ruang, tapi ibu dari seluruh keberadaan.

Perayaan yang menyambungkan akan selalu memberi ruang pada keterlibatan spiritual. Ia mengundang masyarakat bukan hanya untuk hadir, tapi untuk mengenali dirinya. Ia menyadarkan bahwa menjadi bagian dari sejarah bukan berarti hafal tanggal dan nama tokoh, tapi merasa menjadi simpul dalam jaring narasi yang lebih besar. Ia mendorong lahirnya kesadaran bahwa tanah tempat kita berpijak tidak netral; ia menyimpan tangis, tawa, dan harapan yang tak terucap oleh buku sejarah.

Maka tugas kita bukan sekadar mempercantik perayaan, tetapi memperdalam maknanya. Bukan hanya memperbanyak kegiatan, tetapi memperhalus tafsirnya. Perayaan adalah ruang tafsir kolektif—ruang di mana masyarakat bisa berbicara dengan sejarahnya sendiri. Dan dalam ruang itu, tugas pemimpin, seniman, budayawan, dan rakyat adalah sama: menjaga agar nyala makna tidak padam di balik panggung-panggung megah. Karena ketika perayaan kehilangan jiwanya, maka ia tak lebih dari gema tanpa suara, panggung tanpa cerita, tubuh tanpa roh.

Akhirnya, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan hanya “apa yang kita rayakan,” tetapi “mengapa dan untuk

siapa?" Jika jawabannya selalu merujuk kembali pada ruang batin, pada akar sejarah, dan pada niat menyambungkan kembali yang terpisah, maka perayaan telah menjadi ritual pemulihan. Tapi jika jawabannya hanya berhenti pada rutinitas administratif, maka mungkin kita sedang mengulang upacara yang melupakan.

Perayaan, bila ditafsir secara filosofis, adalah bentuk upaya manusia untuk menata waktu dan menjadikannya bermakna. Ia adalah ingatan yang dibingkai, bukan untuk dibekukan, tetapi untuk terus disegarkan. Maka setiap kali Majalengka merayakan hari jadinya, kita diundang bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk mengingat. Bukan hanya untuk memeriahkan, tetapi untuk mendengarkan. Dan bukan hanya untuk melihat ke belakang, tetapi untuk menapaki masa depan dengan kesadaran yang lebih dalam—bahwa yang dilestarikan bukan hanya budaya, tetapi jati diri yang terus ingin mengakar di tengah arus zaman yang mudah menghapus ingatan.

D. Penutup

Majalengka, seperti banyak wilayah lain yang menyimpan kekayaan kultural dan sejarah yang tak selesai ditafsir, sejatinya sedang berdiri di ambang batas antara makna dan formalitas. Di satu sisi, ritus dan perayaan adalah ruang sakral yang memiliki daya hidup untuk menyatukan ingatan kolektif, menyambung tubuh komunitas dengan tanah leluhur dan roh sejarah yang pernah membentuknya.

Di sisi lain, mereka juga mudah tergelincir menjadi seremoni kosong—sebuah estetika tanpa etika, sebuah kehadiran simbolik tanpa denyut spiritual.

Ketika hari jadi dirayakan tanpa kepekaan akan keragaman narasi sejarahnya, dan ketika tubuh budaya hanya ditampilkan sebagai dekorasi tanpa ruang tafsir, maka yang berlangsung bukanlah penghormatan, melainkan pelupaan yang disamarkan dengan kemeriahan. Kritik atas seremonialisme dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menolak bentuk dan tradisi, tetapi sebagai panggilan untuk kembali menyentuh inti batiniah dari setiap upacara: bahwa yang dirayakan bukan sekadar tanggal, tetapi keberadaan yang berakar; bukan sekadar kebanggaan, tetapi kesadaran; bukan sekadar pencitraan, tetapi pencerminan diri.

Ritual dan perayaan hanya akan berfungsi sebagai cermin peradaban jika ia mampu membangkitkan ingatan simbolik yang hidup, bukan yang dibakukan. Maka yang dibutuhkan bukan lebih banyak acara, tetapi lebih banyak permenungan. Bukan lebih besar panggung, tetapi lebih dalam keheningan. Di tengah modernitas yang rakus akan visual, Majalengka ditantang untuk membangun perayaan yang tidak hanya dirancang untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Tidak untuk meneguhkan versi tunggal sejarah, tetapi untuk membuka percakapan lintas waktu, lintas suara, dan lintas generasi.

Dalam keheningan yang melandasi setiap simbol, kita mungkin akan kembali menemukan bahwa perayaan sejati

bukan terletak pada gegap gempita peristiwa, melainkan pada kemampuan kita untuk hadir – secara utuh, rendah hati, dan penuh cinta – di hadapan sejarah kita sendiri. Dan mungkin hanya dari situ, dari kesediaan untuk menyelami ulang makna-makna yang telah lama dibungkam oleh rutinitas, kita bisa menghidupkan kembali roh komunitas yang sesungguhnya: roh yang tidak haus tepuk tangan, tapi rindu untuk dikenali dan dihayati.

Bahasa sebagai Penjaga Waktu

A. Pengantar

Setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk mencatat waktu. Namun tidak semua mencatatnya dalam angka atau lembar arsip. Di banyak peradaban yang mengakar pada kebijaksanaan lisan, waktu disimpan dalam bentuk yang lebih halus—yakni bahasa. Di Majalengka, bahasa Sunda bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medan spiritual tempat nilai, sejarah, dan keintiman komunal ditanamkan secara turun-temurun. Ia adalah napas yang menyambungkan generasi, sekaligus jaring halus yang menangkap makna sebelum ia terlepas dari ingatan kolektif. Bahasa, dalam kerangka ini, tidak hanya menjelaskan dunia, tapi juga menjaganya agar tetap bermakna.

Bahasa Sunda Majalengka bukan sekadar dialek; ia adalah dialektika antara manusia dan tanahnya. Lewat idiom, metafora, dan intonasinya yang khas, masyarakat menyuarakan hubungan dengan alam, leluhur, dan sesama. Ia bukan hanya berkata, tetapi berdoa. Ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga kesadaran akan batas, kesopanan, serta rasa. Dalam sapaan, dalam gurauan, dalam petuah—bahasa ini menyimpan roh komunitas yang

tak pernah benar-benar padam. Setiap ungkapan adalah peristiwa kebudayaan; setiap lelucon adalah laku filsafat yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan dan harapan.

Lebih dari itu, bahasa Sunda Majalengka menampung bentuk-bentuk sastra lisan yang sarat dengan makna simbolik: dari mantra-mantra penyembuhan dan perlindungan, hingga pantun dan pupujian yang menjadi pengiring dalam berbagai ritus kehidupan. Di sanalah bahasa tidak hanya hidup di kepala, tapi juga di tubuh dan ruang. Mantra bukan sekadar rangkaian kata magis; ia adalah tafsir spiritual atas hidup dan penderitaan. Pantun bukan sekadar hiburan rakyat; ia adalah zikir kultural, tempat nilai-nilai lokal diajarkan melalui irama dan keindahan. Dari pasar hingga panggung hajatan, dari ladang hingga langgar – puisi menjadi cara masyarakat Majalengka merayakan hidup, menanggung luka, dan meneguhkan harapan.

Ketika bahasa mulai tergerus oleh tekanan modernitas dan digantikan oleh idiom-idiom luar yang kering akar, yang hilang bukan sekadar kosakata, melainkan cara kita memahami diri dan dunia. Maka menjaga bahasa Sunda Majalengka bukan sekadar proyek linguistik, tetapi bagian dari ziarah kebudayaan – sebuah ikhtiar untuk tetap hadir dalam sejarah yang hidup, bukan yang dibekukan. Bahasa adalah penjaga waktu karena ia tidak hanya merekam masa lalu, tetapi juga memelihara kemungkinan masa depan yang masih berakar pada jati diri. Dan selama masih ada yang berbicara, berpantun, dan berdoa dalam bahasa ini, maka

sejarah Majalengka tidak akan pernah menjadi halaman kosong. Ia akan terus berbicara, pelan, dalam nada yang diwariskan: bahasa yang mengingat, bahasa yang merawat, bahasa yang pulang.

B. Peran Bahasa Sunda Majalengka dalam Menjaga Memori Lokal

Bahasa bukan sekadar sarana komunikasi. Ia adalah rumah dari cara pandang, penyimpanan nilai, dan penjaga ritus kolektif yang hidup dalam denyut waktu komunitas. Dalam konteks Majalengka, bahasa Sunda – dengan segala kekhasan dialektal dan idiomatikanya – bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga wahana untuk mengingat, menegaskan identitas, serta merawat relasi spiritual dengan tanah, leluhur, dan sejarah. Bahasa Sunda Majalengka adalah tubuh dari kebudayaan lokal itu sendiri. Ia hadir bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam cara merasa, menyapa, bercanda, menegur, dan mendoakan. Dalam setiap pilihan katanya, tersimpan sisa-sisa dunia yang sedang berusaha diingat agar tidak musnah.

Bahasa Sunda Majalengka memuat sistem pengetahuan lokal yang tak terhitung nilainya. Sebagai contoh, sebutan-sebutan untuk berbagai jenis angin, hujan, musim tanam, hingga kategori tumbuhan dan hewan lokal bukan hanya memperlihatkan kekayaan kosakata, melainkan juga menunjukkan cara komunitas menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Ungkapan seperti *angin muru beulah*

wetan atau *hujan nyisig ngagedur* bukan sekadar deskripsi cuaca, melainkan ekspresi puitik yang menunjukkan relasi yang intim antara manusia dan alam. Dalam hal ini, bahasa tidak hanya menggambarkan dunia, tapi menjadikannya lebih dekat, lebih bermakna, lebih manusiawi.

Lebih jauh, dalam tradisi tutur, bahasa Sunda Majalengka memegang peranan penting sebagai kendaraan ingatan. Melalui dongeng, pupujian, babasan, paribasa, dan pantun, masyarakat mentransmisikan nilai-nilai etika, sejarah lokal, serta hikmah hidup dari generasi ke generasi. Seorang nini-nini yang menuturkan dongeng Ciung Wanara atau kisah Nyi Rambut Kasih tidak hanya sedang menghibur cucunya; ia sedang menyampaikan fragmen-fragmen identitas yang tak tertulis dalam buku sejarah. Ia sedang memperkuat rasa keterhubungan antara cucunya dengan tanah tempat mereka berpijak dan dengan cerita yang membentuk imajinasi kolektif komunitasnya.

Bahasa juga berfungsi sebagai penanda relasi sosial dan spiritual. Dalam bahasa Sunda terdapat tingkat tutur yang membedakan antara bicara kepada teman sebaya, orang tua, tokoh adat, atau dengan yang lebih muda. Sistem ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi mencerminkan pandangan hidup yang menjunjung tinggi keseimbangan, harmoni, dan penghormatan terhadap tatanan. Di Majalengka, panggilan seperti *Aa*, *Teteh*, *Aki*, atau *Nini* bukan sekadar sapaan, tetapi juga mengandung makna relasional dan psikologis yang mendalam. Ia meneguhkan peran sosial

seseorang, menumbuhkan rasa hormat, dan memperkuat jaringan nilai di antara anggota komunitas.

Ketika bahasa ini mulai tergerus oleh dominasi bahasa luar, terutama di ruang-ruang formal dan media digital, maka yang hilang bukan hanya keragaman fonetik atau idiomatik, tetapi juga cara hidup yang telah terbentuk secara bertahap selama berabad-abad. Hilangnya satu ungkapan bisa berarti hilangnya cara melihat dunia. Misalnya, idiom seperti *hirup kudu sarua legu sarua beurat* bukan hanya pepatah bijak, tapi juga pengingat akan nilai gotong royong dan keadilan dalam komunitas. Jika bahasa ini tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, nilai-nilai itu pun perlahan akan mengabur dan digantikan oleh logika individualisme dan kompetisi yang datang dari luar.

Oleh karena itu, pelestarian bahasa Sunda Majalengka tidak dapat direduksi menjadi sekadar kurikulum di sekolah atau proyek dokumentasi linguistik. Ia adalah pekerjaan kultural yang harus dimulai dari kesadaran masyarakat bahwa bahasa adalah warisan batin yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan masa depan sekaligus. Upaya revitalisasi harus melibatkan keluarga, komunitas adat, seniman lokal, hingga pelaku kebijakan. Bahasa harus dihidupkan kembali di rumah-rumah, di pasar, di pertunjukan seni, dalam lagu, dalam doa, dan dalam upacara-upacara lokal. Hanya dengan cara itu bahasa Sunda Majalengka dapat kembali menjadi medium hidup yang menyimpan dan memancarkan memori lokal.

Dalam banyak tradisi Majalengka, bahasa bukan hanya diucapkan, tetapi juga dilagukan. Pujian dalam nada-nada Sunda yang dilantunkan sebelum khotbah Jumat, pantun-pantun pada hajatan pernikahan, dan syair-syair kawih klasik menjadi ekspresi kolektif yang menyatukan suara, rasa, dan iman. Di sini, bahasa menjelma menjadi zikir budaya—sebuah cara menyebut yang sakral dengan nada lembut, dalam bentuk yang artistik. Bahkan ketika makna literalnya tidak lagi dimengerti sepenuhnya oleh generasi muda, musikalitas dan keindahan estetikanya tetap menyampaikan aura yang menyentuh. Ini adalah ruang simbolik tempat bahasa tidak hanya menjadi sarana informasi, tapi juga menjadi perwujudan spiritualitas bersama.

Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa bahasa Sunda Majalengka adalah denyut yang menyambung masa. Ia membawa suara masa lalu ke telinga masa kini, dan menyiapkan ruang makna bagi masa depan. Setiap usaha untuk mempertahankan dan menghidupkannya adalah bagian dari ziarah batin kita sebagai komunitas. Karena bahasa bukan sekadar alat ekspresi; ia adalah jantung dari cara kita menjadi manusia, menjadi bagian dari tanah, dan menjadi warisan yang tak bisa digantikan oleh teknologi atau modernitas manapun.

Dalam menjaga bahasa, kita sedang menjaga waktu. Waktu bukan hanya deretan kronologi, tapi juga ruang resonansi di mana ingatan, harapan, dan relasi tertanam. Maka siapa yang berbicara dalam bahasa Sunda Majalengka

sesungguhnya sedang merawat keutuhan dirinya sendiri sebagai bagian dari lanskap budaya yang luas. Ia sedang menjaga agar sejarah tidak membeku dalam buku, tetapi mengalir dalam percakapan. Ia sedang menjaga agar makna tidak mati dalam sistem, tetapi tetap hidup dalam tutur dan rasa.

Dan mungkin, di antara derasnya modernisasi dan kekacauan identitas di banyak tempat, suara lembut dalam bahasa Sunda Majalengka yang menyapa, bertanya, atau mendoakan, adalah satu dari sedikit hal yang masih bisa membuat kita percaya bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Karena selama bahasa itu masih digunakan, masih dilagukan, dan masih didoakan—kita tahu bahwa ingatan belum sepenuhnya hilang. Kita tahu bahwa kita masih memiliki rumah dalam kata. Dan kita tahu, bahwa waktu belum sepenuhnya ditelan sunyi.

C. Dari Mantra hingga Pantun: Puisi sebagai Zikir Budaya

Dalam tubuh kebudayaan tradisional, puisi bukanlah sekadar karya sastra yang dibaca untuk dinikmati keindahannya. Ia adalah napas yang bergetar di antara kata dan makna, tubuh simbolik yang menghidupkan ingatan kolektif, dan medan spiritual di mana masyarakat menyuarakan keterhubungannya dengan alam, leluhur, dan yang Ilahi. Di Majalengka, warisan sastra lisan seperti mantra, pantun, pupujian, dan kawih tidak hanya menjadi dokumen

estetis, melainkan *zikir budaya*—suara batin kolektif yang melantunkan makna hidup dalam irama yang lembut dan kontemplatif.

Mantra, sebagai bentuk puisi paling awal, lahir dari ruang liminal antara doa dan perintah. Dalam masyarakat Sunda Majalengka, mantra bukanlah sembarang susunan kata; ia adalah susunan harmoni metafisik yang dipercaya memiliki daya. Dalam berbagai upacara pertanian, pengobatan tradisional, atau perlindungan diri, mantra dilafalkan sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang mengandalkan kekuatan bahasa. Kata-kata dalam mantra disusun bukan untuk dipahami secara rasional, tetapi untuk dirasakan secara intuitif. Irama, pengulangan, dan simbol-simbol yang digunakan menghubungkan manusia dengan alam dan roh-roh leluhur. Mantra adalah puisi yang memanggil kesadaran, puisi yang menggetarkan waktu.

Pantun dan pupujian, sementara itu, merupakan bentuk ekspresi kolektif yang muncul dalam ranah sosial dan religius. Dalam pesta pernikahan, syukuran panen, atau momen-momen perjumpaan adat, pantun menjadi wahana untuk menyampaikan nasihat, guyonan, kritik sosial, hingga ungkapan cinta. Namun di balik kelakar dan rimanya yang ringan, pantun menyimpan nilai-nilai kebijaksanaan hidup. Misalnya, pantun dalam bahasa Sunda Majalengka:

*Lamun ulin ka Talaga,
Balikna sok barang bawa,
Lamun urang hayang surga,
Jalana nyaeta takwa.*

Puisi seperti ini adalah bentuk *zikir* tak langsung: ia tidak menyebut Tuhan secara eksplisit, tetapi mengandung kesadaran spiritual yang dalam. Ia mengingatkan tentang tanggung jawab, etika, dan pentingnya relasi dengan keluarga dan komunitas.

Zikir, dalam pengertian sufistik, adalah pengulangan nama Tuhan, bentuk ingatan berulang yang memurnikan hati. Dalam konteks kebudayaan lokal, puisi tradisional adalah zikir yang lebih luas – ia tidak hanya menyebut Tuhan, tetapi menyebut kehidupan itu sendiri sebagai medan kontemplasi. Ketika masyarakat Majalengka melantunkan pupujian di surau sebelum khotbah Jumat, mereka sedang menciptakan ruang batin yang sunyi dan khusyuk. Kata-kata dalam pupujian bukan sekadar dikumandangkan, tetapi diresapi sebagai jalan menuju kesadaran kolektif akan nilai hidup yang transenden.

Keunikan dari puisi tradisional Majalengka adalah bahwa ia tidak pernah tercerabut dari konteks kehidupan nyata. Ia lahir dari tanah, dari tubuh, dari musim, dari hubungan sosial yang konkret. Seorang petani yang menyanyikan *kawih* saat mencangkul bukan sedang bersenandung untuk mengisi waktu, tetapi sedang menciptakan dunia batin yang menautkan kerja dengan rasa syukur. Kata-kata menjadi pengikat antara jasmani dan ruhani. Puisi tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke tangan dan kaki. Ia bukan sekadar sastra, melainkan laku hidup.

Pada titik inilah kita perlu membedakan puisi dalam kerangka budaya dengan puisi dalam kerangka industri.

Puisi budaya tidak ditulis untuk dipublikasikan, melainkan untuk diwariskan. Ia bukan karya individual, tetapi ingatan bersama. Ia tidak menuntut hak cipta, karena ia milik semua orang. Maka ketika puisi tradisional mulai menghilang dari kehidupan sehari-hari, yang hilang bukan hanya bentuk seni, tetapi juga cara masyarakat memahami dirinya dan dunia. Yang redup bukan hanya estetika, tetapi juga etika dan spiritualitas yang melekat pada kata.

Melalui puisi, masyarakat Majalengka membangun jembatan dengan yang tak tampak. Dalam pantun-pantun duka, doa-doa kematian, atau kawih kerinduan, hadir kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal yang kini dan yang kasat mata. Misalnya, dalam pupujian:

*Eling-eling dulur kabeh,
ibadah ulah campoleh,
beurang peuting ulah weleh,
bisina kaburu paeh.*

Dalam untaian seperti ini, kita menemukan simpul-simpul spiritualitas yang tidak berteologi rumit, tetapi memiliki kedalaman teologis yang menyentuh. Zikir budaya ini tidak memisahkan antara kesenian dan ibadah, antara puisi dan pertobatan. Segalanya menyatu dalam bahasa yang lembut, yang lahir dari tubuh masyarakat yang masih mengingat.

Ketika modernitas datang dengan bahasanya yang teknokratis, puisi tradisional tersingkir bukan karena kalah makna, tetapi karena kalah daya bunyi. Di sekolah-sekolah,

anak-anak lebih didorong menulis esai dan laporan daripada pantun dan mantra. Di media, lagu-lagu pop menggantikan *kawih* yang menyimpan kearifan lokal. Maka puisi pun kehilangan medan bunyinya. Ia tidak lagi terdengar di ruang publik, tidak lagi dilantunkan di ruang keluarga. Ia dikurung sebagai arsip, bukan lagi sebagai ruang hidup.

Namun, harapan belum padam. Di beberapa sudut Majalengka, masih ada generasi tua yang terus melantunkan pupujian, masih ada panggung-panggung kecil tempat pantun dipertukarkan dalam tawa dan petuah. Masih ada ruang-ruang spiritual yang terbuka bagi mantra untuk dihidupkan kembali. Yang dibutuhkan adalah keberanian generasi muda untuk menyelami kembali akar-akar ini. Bukan untuk menjadi tradisional dalam cara berpakaian, tetapi untuk menemukan kembali makna hidup melalui bahasa yang berakar.

Puisi sebagai zikir budaya menuntut kita untuk membaca kembali kata-kata sebagai jendela batin. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar soal efisiensi dan produktivitas, tetapi juga soal kehalusan rasa dan kekayaan jiwa. Dalam dunia yang semakin kehilangan keheningan, puisi bisa menjadi tempat pulang – tempat di mana manusia bisa berhenti, menyimak, dan mendengarkan kembali dirinya sendiri.

Maka menjaga puisi bukan pekerjaan seniman semata. Ia adalah tugas semua orang yang masih ingin hidup dalam kebudayaan yang memiliki kedalaman. Dan di Majalengka,

menjaga puisi berarti menjaga tanah, menjaga tubuh komunitas, dan menjaga hubungan dengan Yang Maha Tak Terdefinisi. Karena dari mantra hingga pantun, dari *kawih* hingga pupujian, suara-suara itu sesungguhnya sedang berzikir untuk kita semua – agar tidak lupa, agar tetap hidup, dan agar selalu pulang ke jati diri yang hakiki.

D. Penutup

Ketika dunia bergerak cepat menuju masa depan yang serba visual dan digital, bahasa—khususnya bahasa Sunda Majalengka—menjadi oasis yang mengendapkan makna dalam keheningan. Ia bukan hanya medium ujaran, tetapi juga jalan sunyi untuk mendengarkan kembali denyut sejarah yang tak tercatat dalam arsip negara, melainkan hidup di tubuh warga dan ritus-ritus harian. Di situlah bahasa menjadi penjaga waktu: ia tidak hanya merekam masa lalu, tetapi menghidupkan kembali resonansi yang membentuk jati diri kolektif. Bahasa tidak menyimpan waktu sebagai angka, melainkan sebagai rasa; bukan sebagai kronologi, tetapi sebagai kesadaran.

Bahasa Sunda Majalengka, dalam bentuknya yang paling intim—mantra, pantun, pupujian, *kawih*—bukan sekadar warisan linguistik, tetapi zikir budaya yang mengandung nyawa komunitas. Dari lisan para nini yang bercerita hingga suara sinden yang melagukan pantun tentang cinta, sedih, dan harapan, bahasa menjelma menjadi tubuh spiritual yang menghidupkan relasi antara manusia,

alam, dan Yang Mahasuci. Setiap kata yang dilafalkan dalam bahasa ini adalah sebutan sunyi yang melestarikan kebijaksanaan, menyuburkan nilai, dan memelihara rasa hormat terhadap kehidupan sebagai anugerah.

Maka menjaga bahasa bukan sekadar menjaga kosakata, tetapi menjaga arah—arah pulang ke akar, ke sejarah, ke tubuh sendiri, dan ke ruang bersama yang tak bisa dibangun dengan teknologi semata. Dalam setiap pengucapan “punten”, “hapunten”, “kumaha damang?”, atau bait pantun yang bergema di ruang hajat desa, kita sesungguhnya sedang menolak lupa. Kita sedang berzikir melalui kata. Dan dalam zikir itulah kita menyadari, bahwa waktu tidak pernah mati—selama masih ada bahasa yang menghidupkannya. Majalengka tidak hanya dikenang lewat tanggal, tetapi melalui bunyi, puisi, dan tutur yang tak henti mencari jalan pulang.

Bagian III:
Eksistensi yang Menolak Dibekukan

Ketika Sejarah Menjadi Doa, Bukan Dokumen

A. Pengantar

Sejarah, dalam kerangka kebudayaan yang hidup, tidak selalu hadir dalam bentuk yang tercetak, terdokumentasi, atau dibakukan dalam tanggal resmi. Ia sering kali menjelma sebagai doa—bisikan batin yang terus dipanjatkan oleh komunitas kepada tanah yang mereka pijak, kepada leluhur yang mereka hormati, dan kepada kehidupan yang ingin mereka pahami. Di Majalengka, sejarah bukan semata soal kapan dan siapa, melainkan tentang bagaimana rasa memiliki itu ditanam, dirawat, dan diwariskan dalam kesadaran yang hening namun dalam. Historisitas, dalam konteks ini, bukan sekadar pengetahuan tentang masa lalu, tetapi kesadaran batin yang menjiwai cara suatu komunitas menafsir dirinya sendiri di tengah perubahan zaman.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya “kapan Majalengka lahir?”, tetapi “bagaimana Majalengka dihayati?”. Apakah kita sedang mencari tanggal untuk menandai permulaan, atau sedang menggali rasa memiliki yang lebih esensial dan tak terikat oleh hitungan waktu? Ketika masyarakat mempertanyakan atau memperdebatkan tanggal hari jadi, mungkin yang sedang mereka upayakan

bukan sekadar kejelasan sejarah administratif, melainkan pemulihan makna eksistensial: keinginan untuk merasa menyatu, untuk merasa memiliki sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka dan arsip.

Dalam dunia yang semakin menuntut kejelasan, kepastian, dan keseragaman, sejarah yang hidup justru menuntut ruang kontemplasi dan kejujuran emosional. Ia mengajak kita untuk tidak tergesa-gesa menetapkan, tetapi untuk menyimak. Untuk mendengarkan sunyi yang tersembunyi di balik legenda, irama yang terpatri dalam ritual, dan bahasa yang mengendap dalam pantun dan mantra. Di sinilah sejarah tidak lagi menjadi daftar peristiwa, melainkan ladang doa – ruang di mana memori dan makna terus dinegosiasikan oleh jiwa-jiwa yang mencintai tanahnya.

Majalengka, sebagaimana tanah-tanah lain yang tumbuh dari lapisan peradaban, layak dibaca bukan hanya melalui prasasti atau piagam, melainkan melalui air mata ibu yang menyuapi anaknya, melalui langkah kaki para petani yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi, melalui tembang yang mengiringi musim panen. Maka, ketika sejarah menjadi doa, ia tidak kehilangan kekuatan; justru di sanalah ia paling hidup – karena ia lahir dari batin, dan karena ia tidak menuntut untuk disahkan, hanya untuk dihayati.

B. Historisitas sebagai Kesadaran Batin

Sejarah bukanlah sekadar tumpukan kronologi yang dipaku dalam naskah resmi atau prasasti marmer. Ia adalah getar halus yang tinggal dalam batin kolektif, membentuk

cara suatu komunitas merasa, memahami, dan memaknai keberadaannya di dunia. *Historisitas*, dalam pengertian yang lebih dalam, bukan hanya kesadaran tentang apa yang telah terjadi, melainkan kesadaran tentang bagaimana masa lalu hidup dan hadir dalam cara kita menghayati waktu kini. Ia bukan hanya catatan, tetapi napas. Bukan hanya dokumen, tetapi doa. Di Majalengka, seperti di banyak tempat lain yang sarat warisan simbolik, sejarah hidup dalam tubuh masyarakat sebagai ziarah batin, bukan sekadar daftar peristiwa.

Kesadaran historis semacam ini tidak dibangun dari ruang kuliah atau seminar ilmiah semata, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari yang diresapi secara reflektif. Ketika seorang nenek mengajarkan cucunya sebuah pantun tua, ketika seorang petani menabur benih sambil melafalkan mantra panen, atau ketika komunitas adat menggelar upacara sedekah bumi, mereka sesungguhnya sedang menjalani sejarah—bukan membacanya, bukan membahasnya. Mereka sedang menghidupi masa lalu dalam tindakan yang penuh makna, membiarkan waktu lampau mengalir lembut ke dalam waktu kini tanpa perlu disahkan oleh negara atau akademika.

Dalam perspektif ini, historisitas menjadi bagian dari laku spiritual. Ia hadir bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai resonansi batin yang menyambungkan manusia dengan akar-akarnya. Kesadaran ini tumbuh bukan dari kepastian, melainkan dari penghayatan. Maka ketika masyarakat

Majalengka bertanya tentang kapan daerah mereka lahir, sesungguhnya yang mereka cari bukan hanya tanggal administratif, melainkan ruang untuk merasa pulang. Pulang kepada asal yang tak selalu jelas dalam bentuk tahun, tetapi sangat terasa dalam bentuk rasa.

Sejarah sebagai kesadaran batin juga berarti membuka diri pada kemungkinan bahwa kebenaran historis bisa berbentuk jamak dan berlapis. Di banyak komunitas tradisional, sejarah hadir dalam legenda, mitos, dan simbol-simbol yang hidup. Kita mungkin tidak menemukan kesepakatan tentang siapa pendiri pertama atau tahun pasti berdirinya suatu tempat, tetapi kita menemukan konsensus emosional tentang nilai, kepercayaan, dan semangat hidup yang diwariskan. Di sini, sejarah tidak hadir dalam bentuk argumen, tetapi dalam bentuk harmoni. Ia tidak dibuktikan dengan data, tetapi dengan daya.

Majalengka, dengan jejak Talaga, Sumedanglarang, dan pengaruh Cirebon, adalah contoh klasik dari wilayah yang lahir dari simpul-simpul historis yang tidak pernah tunggal. Pengetahuan tentang masa lalu di daerah ini tidak selalu berbasis dokumen kolonial atau arsip negara, tetapi disimpan dalam ritus, dalam bahasa, dalam seni pertunjukan seperti tari Kedempling atau Topeng Beber. Di situlah historisitas hidup dalam bentuk tubuh, gerak, suara, dan simbol. Dan justru karena tidak dibakukan, maka ia menjadi lebih cair, lebih lentur, lebih siap untuk ditafsir ulang dari generasi ke generasi.

Kesadaran batin terhadap sejarah juga memungkinkan kita bersikap lebih inklusif terhadap narasi-narasi kecil yang sering diabaikan oleh sejarah resmi. Anak-anak muda yang menyimpan cerita dari kakeknya, para seniman lokal yang melestarikan lagu-lagu daerah, atau ibu-ibu yang masih menyisipkan ungkapan Sunda halus dalam percakapan keluarga—mereka semua adalah pelaku sejarah yang sah. Historisitas sebagai kesadaran batin mengangkat nilai pengalaman pribadi dan komunitas sebagai sumber makna yang setara pentingnya dengan fakta-fakta monumental.

Di tengah dunia yang semakin tergesa dan visual, kesadaran batin terhadap sejarah adalah bentuk perlawanan lembut terhadap pelupaan. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua yang penting harus tercetak; bahwa tidak semua yang sakral harus disahkan oleh otoritas luar. Ia menuntut kehadiran jiwa, bukan sekadar intelek. Dan karena itu, sejarah yang hadir dari batin lebih tahan terhadap gelombang disrupsi. Ia tidak mudah terhapus oleh narasi dominan karena ia hidup dalam laku, dalam bahasa, dalam gestur sehari-hari.

Ketika kita menafsir sejarah sebagai doa, kita sedang mengembalikannya kepada akar spiritualnya. Doa bukan hanya permohonan, melainkan bentuk komunikasi dengan yang tak terlihat namun dirasakan. Sejarah dalam bentuk ini bukan alat legitimasi politik, melainkan medan kontemplasi. Ia bukan proyek untuk mengukuhkan identitas, melainkan proses untuk menemukan makna keberadaan. Maka, tidaklah

mengherankan jika dalam komunitas seperti Majalengka, pertanyaan tentang sejarah selalu dibarengi dengan puisi, doa, dan ritual. Karena sejarah yang tidak berakar pada batin hanya akan menjadi dokumen mati.

Dalam dunia yang terus mencari kecepatan dan kepastian, kita justru membutuhkan pelambatan dan kedalaman. Historisitas sebagai kesadaran batin mengajarkan bahwa masa lalu tidak untuk ditaklukkan, tetapi untuk didengarkan. Tidak untuk dikuasai, tetapi untuk diresapi. Dan ketika kita mampu menjadikan sejarah sebagai bagian dari perenungan batin, maka kita tidak hanya menjadi pewaris yang baik, tetapi juga penyambung makna yang layak.

Sejarah bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana manusia belajar menjadi lebih bijak dari jejaknya sendiri. Historisitas bukan hanya milik sejarawan, tetapi milik semua jiwa yang ingin hidup dengan kepekaan terhadap waktu. Di Majalengka, dan di mana pun tanah diingat lebih dengan hati ketimbang dengan arsip, sejarah akan tetap hidup—sebagai bisikan batin, sebagai cahaya kecil yang menuntun, dan sebagai jalan sunyi yang mengajak manusia untuk pulang ke dirinya yang paling dalam.

C. Apakah Kita Butuh Tanggal, atau Rasa Memiliki?

Dalam dunia yang semakin didominasi oleh presisi dan kepastian, tanggal telah menjadi simbol dominan atas

validitas dan legitimasi. Ia mengikat segala hal menjadi terstruktur: dari kelahiran manusia, pengesahan negara, hingga hari jadi sebuah kota atau kabupaten. Namun, apakah dengan memiliki tanggal, kita sungguh merasa memiliki sesuatu? Ataukah tanggal justru hanya menciptakan ilusi kepemilikan atas sesuatu yang sejatinya lebih bersifat batin dan simbolik? Pertanyaan ini mengemuka dengan kuat dalam konteks perdebatan tentang hari jadi Majalengka. Di sinilah benturan antara kebutuhan administratif dan kerinduan eksistensial menampilkan tarik-ulur makna: apakah kita butuh angka, atau ingatan?

Tanggal adalah alat teknokratis. Ia adalah kebutuhan sistemik untuk mendokumentasikan, mengarsip, dan merayakan sesuatu secara seremonial. Dalam ranah birokrasi, tanggal memiliki bobot legitimatif: ia menjadi dasar kebijakan, peringatan, hingga penganggaran. Namun dalam ranah kultural, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata dan dihitung oleh kalender justru sering kali lebih bermakna dan lebih lama bertahan. **Rasa memiliki tidak tumbuh dari tanggal; ia tumbuh dari keterhubungan emosional dan spiritual yang mendalam.** Ia tidak lahir dari penetapan, tetapi dari penghayatan.

Majalengka, dalam konteks ini, menjadi ruang simbolik tempat dua narasi ini saling bersilang. Masyarakat yang bertanya tentang kapan tepatnya Majalengka lahir, sesungguhnya sedang mencari akar. Tetapi yang mereka rindukan bukan akar yang berbentuk dokumen, melainkan

akar yang berbentuk rasa: rasa menjadi bagian dari tanah ini, dari bahasa ini, dari memori yang tak pernah habis disuarakan oleh nenek-nenek yang menenun kisah sambil menanak nasi. Mereka ingin merasa punya rumah sejarah. Bukan sekadar tahu kapan rumah itu dibangun, tapi merasa bahwa mereka tinggal di dalamnya.

Rasa memiliki adalah bentuk historisitas yang paling intim. Ia tidak memerlukan akta, tetapi memerlukan kehadiran. Seorang anak yang tumbuh mendengar cerita tentang leluhur, tentang pertempuran Talaga, tentang legenda Nyi Rambut Kasih, jauh lebih merasa memiliki Majalengka ketimbang seseorang yang hanya mengetahui tanggal pendiriannya. Karena sejarah yang dihafal tidak sama dengan sejarah yang dihayati. Dan penghayatan itu menuntut kedekatan, bukan kepastian. Ia menuntut pengulangan simbolik dalam bentuk ritual, bahasa, puisi, dan perjumpaan antargenerasi yang tak selalu tercatat.

Tanggal, dalam banyak kasus, menyederhanakan sejarah menjadi satu titik. Padahal sejarah adalah jaringan. Menetapkan tanggal kelahiran sebuah tempat sering kali mengabaikan proses panjang yang membentuk tempat itu. Majalengka tidak lahir dalam satu malam. Ia dibentuk oleh ratusan tahun perpindahan kuasa, relasi antar-kerajaan, migrasi spiritualitas, serta pertarungan wacana antara pusat dan pinggiran. Apa yang kita sebut sebagai Majalengka hari ini adalah hasil dari sedimentasi narasi-narasi yang tak selalu satu suara. Maka mencari satu tanggal sebagai representasi

keseluruhan sejarahnya adalah tindakan yang bisa mengingkari kompleksitas yang justru menjadi kekuatannya.

Sebaliknya, rasa memiliki memungkinkan kita merayakan keragaman jejak dan lapisan sejarah itu. Ia tidak menuntut kepastian, tetapi kesetiaan pada proses. Dalam rasa memiliki, tidak ada kebutuhan untuk menghapus yang lain demi menonjolkan satu versi. Yang ada adalah pengakuan bahwa identitas adalah hasil dialog antar waktu dan antar pengetahuan. Maka daripada menetapkan satu tanggal dan menganggapnya mutlak, bukankah lebih bijak membuka ruang agar semua versi sejarah bisa didengar, dimaknai, dan dihayati bersama?

Dalam masyarakat tradisional, rasa memiliki terhadap tanah lahir dari relasi afektif yang ditanam sejak dini. Bahasa lokal, makanan khas, irama kesenian, hingga nama-nama kampung dan sungai, semuanya adalah medium yang menyampaikan rasa memiliki itu. Seorang anak yang tahu bahwa di seberang bukit ada batu yang dikeramatkan leluhurnya, akan merasa terhubung dengan tanah itu lebih dalam daripada anak yang tahu bahwa tanah itu didirikan pada tahun sekian oleh bupati pertama. **Rasa memiliki adalah soal keterlibatan batin, bukan sekadar pengetahuan kognitif.**

Tentu, ini bukan berarti bahwa tanggal tidak penting. Dalam dunia modern, kita memang memerlukan alat-alat dokumentasi yang terstandarisasi. Tetapi persoalannya menjadi pelik ketika tanggal diperlakukan sebagai satu-

satunya sumber legitimasi kultural. Ketika tanggal dijadikan ukuran utama sejarah, maka semua yang tak bisa dijelaskan dalam hitungan waktu akan dianggap tidak sah. Ini adalah bentuk kekerasan epistemik: menghapus sejarah tutur, mitos lokal, dan spiritualitas rakyat hanya karena tidak sesuai dengan logika kronologi linear.

Majalengka, sebagai ruang budaya yang kaya simbolisme, layak memiliki pendekatan sejarah yang lebih lentur dan reflektif. Daripada sibuk mencari tanggal yang tepat, mungkin lebih bermakna jika kita sibuk mencari cara agar masyarakatnya merasa lebih memiliki. Bukan sekadar menghadiri upacara peringatan hari jadi, tapi juga menyalakan kembali pantun yang nyaris padam, menyemai kembali bahasa yang mulai dilupakan, dan membangun ruang dialog di mana anak muda bisa mendengarkan kembali kisah-kisah tentang asal-usul mereka dari suara yang paling mereka percaya: suara ibu, suara kakek, suara tanah.

Rasa memiliki adalah fondasi dari keberlanjutan. Jika masyarakat tidak merasa memiliki sejarahnya, maka tanggal yang megah sekalipun hanya akan menjadi seremoni kosong. Tetapi jika masyarakat merasa menjadi bagian dari sejarah itu, maka meskipun tanpa tanggal yang pasti, mereka akan terus merawatnya. Mereka akan menjaganya dalam doa, dalam tarian, dalam bahasa sehari-hari. Dan bukankah itu makna paling hakiki dari sejarah—bahwa ia bukan untuk dikenang sesaat, tetapi untuk dihidupi terus-menerus?

Maka mari kita renungkan kembali: **apakah kita benar-benar butuh tanggal, atau yang kita butuhkan adalah rasa**

memiliki yang hidup? Tanggal bisa ditulis ulang. Tapi rasa, sekali hilang, tidak mudah dikembalikan. Karena itu, mungkin sejarah Majalengka tidak perlu diselesaikan dengan satu penetapan. Ia perlu dibuka sebagai ruang kontemplasi. Bukan untuk mencari awal, tetapi untuk memperkuat ikatan. Bukan untuk membakukan makna, tetapi untuk menghidupkan makna.

Dan di sana, di tengah sunyi antara suara gong Kedempling yang nyaris tak terdengar dan mantra yang dilafalkan oleh nenek di dapur, sejarah Majalengka sedang menunggu untuk didekap kembali. **Bukan sebagai tanggal. Tapi sebagai rasa.**

D. Penutup

Sejarah yang tumbuh dari doa bukanlah sejarah yang meminta dibuktikan, melainkan yang mengajarkan untuk dihormati. Di Majalengka—dan di banyak ruang budaya yang mengendapkan makna dalam diam—sejarah tak selalu hadir lewat arsip atau dokumen, tetapi lewat napas yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Ia hidup dalam bisikan, dalam ritus, dalam pantun yang dinyanyikan di dapur atau dalam gerak tubuh penari Kedempling yang tak pernah didikte oleh skrip. Ketika sejarah menjadi doa, ia menjelma menjadi kesadaran batin yang mengakar, bukan konstruksi naratif yang menuntut kepastian.

Pertanyaan tentang tanggal sejatinya bukanlah pertanyaan kronologis, melainkan pertanyaan eksistensial:

siapa kita, dari mana kita merasa berasal, dan untuk apa kita memperingati? Maka menjawabnya tidak cukup dengan menunjuk angka, tetapi dengan mendengarkan bunyi yang nyaris hilang dari tanah – bunyi kenangan, bunyi nilai, bunyi spiritualitas yang tak sempat dituliskan. Di titik inilah rasa memiliki menjadi lebih penting dari sekadar pengetahuan administratif. Sebab tanpa rasa itu, tanggal hanyalah angka, dan peringatan hanyalah panggung kosong.

Majalengka tidak sedang menunggu tanggal yang disepakati, tetapi menunggu keberanian kita untuk menyelami ulang apa arti menjadi bagian darinya. Sejarah, ketika dibuka sebagai doa, adalah jalan pulang: bukan ke sebuah masa lampau yang beku, melainkan ke kesadaran hari ini yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih terbuka pada kompleksitas. Maka marilah kita rawat sejarah tidak sebagai dokumen yang harus ditandatangani, tetapi sebagai ziarah batin yang harus dihayati. Karena dari sana, dari keheningan yang penuh makna itu, kita akan tahu bahwa yang sejati tidak lahir dari tanggal – tetapi dari cinta yang tak pernah lelah mengingat.

Tanah, Ingatan, dan Identitas

A. Pengantar

Tidak semua tanah menjadi tempat tinggal, dan tidak semua tempat tinggal menjelma menjadi ruang makna. Ada tanah yang hanya dipijak, tetapi ada pula tanah yang dihayati. Di antara keduanya, hadir perbedaan mendasar antara tempat sebagai titik koordinat administratif dan tanah sebagai ruang eksistensial yang membentuk siapa kita, bagaimana kita merasa ada, dan ke mana arah jiwa kita berpulang. Majalengka, dalam pembacaan reflektif ini, bukan hanya kabupaten dalam struktur negara – ia adalah medan simbolik yang menyimpan riwayat batin kolektif, tempat manusia dan budaya saling menghidupi dalam resonansi spiritual yang panjang dan berlapis.

Ruang dalam pandangan fenomenologis bukanlah entitas yang statis, melainkan dialektika antara kehadiran tubuh, ingatan, dan makna. Ketika seseorang menyebut kata “Majalengka,” yang terbit bukan hanya peta atau batas wilayah, melainkan juga aroma tanah selepas hujan, bunyi gamelan yang samar dari panggung rakyat, dan desah bahasa Sunda yang mengendap di hati para perantau. Ruang menjadi identitas karena ia dialami, dirasa, dan dirawat. Maka, tanah bukan hanya menjadi tempat hidup, tetapi tempat di mana

hidup mendapatkan maknanya. Tanah menjadi narasi yang tak tertulis, puisi yang tak pernah selesai dilafalkan.

Majalengka adalah contoh ruang yang lahir bukan dari garis-garis yang ditarik penguasa kolonial, melainkan dari ritme kehidupan yang tumbuh secara organik di antara lembah, gunung, dan kebun. Ia hadir dalam ritual yang terus dilestarikan meski tak tercatat dalam kalender, dalam pupuh yang dilagukan meski tak dimasukkan dalam kurikulum. Di sinilah relasi antara manusia dan tanah menjelma menjadi relasi eksistensial. Bukan sekadar siapa yang memiliki, tetapi siapa yang merasa dimiliki. Identitas bukan terbentuk dari label luar, tetapi dari kesetiaan pada yang sehari-hari: bahasa ibu, nama kampung, mata air yang dikeramatkan, dan cara menanam padi yang diwariskan tanpa perlu dicatat.

Melalui penghayatan ini, menjadi warga Majalengka bukan berarti terdaftar dalam kartu keluarga atau catatan sipil, melainkan merasa bahwa setiap jengkal tanah, setiap nama kampung, dan setiap ritus adalah bagian dari tubuh dan jiwanya. Tanah tidak perlu didefinisikan oleh tanggal lahir kabupaten, tetapi dirasakan sebagai ruang pulang yang memberi makna pada keberadaan. Maka, dalam konteks ini, Majalengka harus dibaca bukan sekadar sebagai unit administratif, melainkan sebagai ruang batin: tempat ingatan dipelihara, tempat identitas dijalin, dan tempat sejarah tidak hanya dikenang, tetapi dihidupi.

Narasi ini mengajak kita untuk menimbang ulang bagaimana cara kita memahami tanah—bukan sebagai data,

tetapi sebagai drama keberadaan. Dalam dunia yang terus bergerak cepat dan cenderung memisahkan manusia dari ruang historisnya, Majalengka menjadi pengingat sunyi bahwa makna tidak ditemukan di kantor-kantor, tetapi di ladang yang masih menyimpan nyanyian tua. Di sinilah, ketika tanah diresapi sebagai ingatan, ia menjadi identitas. Dan identitas, pada akhirnya, bukan soal asal usul, melainkan soal kesetiaan terhadap makna yang terus hidup dalam tubuh komunitas.

B. Relasi Fenomenologis antara Ruang dan Makna

Ruang, dalam pandangan fenomenologis, bukan sekadar wadah atau latar tempat peristiwa terjadi. Ia adalah pengalaman yang meruang—sebuah kehadiran yang mengandung makna karena dialami oleh subjek yang sadar, merasa, dan menghayati. Fenomenologi membuka kemungkinan untuk memahami ruang bukan dari definisi kartografis atau batas administratif, melainkan dari pengalaman eksistensial manusia yang bersentuhan dengannya. Dalam dimensi ini, ruang menjelma sebagai tubuh simbolik, sebagai tanah yang mengendapkan ingatan, dan sebagai wadah batin tempat identitas tumbuh secara tak kasatmata namun terasa dengan sangat nyata.

Setiap ruang memiliki resonansi batinnya sendiri. Sebuah gang sempit di kampung bisa menjadi ruang yang tak terlupakan bagi seorang anak karena di sanalah ia pertama kali mengenal pertemanan atau mendengar cerita tentang

leluhurnya. Sebuah bukit bisa menjadi tempat ziarah karena menyimpan jejak nenek moyang yang dikeramatkan, bukan karena ia tinggi atau indah secara visual. Maka ruang tidak netral. Ia selalu menyimpan tumpukan makna yang dibentuk oleh tubuh, oleh pengalaman, dan oleh bahasa. Fenomenologi ruang menolak netralitas spasial: setiap jengkal tanah adalah narasi, dan setiap narasi adalah cermin relasi manusia dengan waktu dan identitas.

Ketika kita menapaki tanah Majalengka, misalnya, kita tidak sedang melintasi garis-garis administratif yang ditetapkan pemerintah. Kita sedang memasuki medan simbolik yang dipenuhi oleh narasi-narasi laten: dari kerajaan Talaga yang telah hilang namun masih terasa dalam cerita, hingga nama-nama kampung yang menyimpan metafora kehidupan. Kata "Majalengka" sendiri tidak hanya menjadi penanda tempat, melainkan jendela menuju imajinasi kultural yang lebih luas. Ia memanggil kita untuk mendengarkan tidak hanya sejarah, tetapi gema spiritual dari tanah yang disebut-sebut sebagai tempat langka, tempat buah maja hilang, tempat memori menggantung di antara realitas dan mitos.

Relasi fenomenologis antara ruang dan makna juga dapat dipahami melalui laku harian masyarakat. Seorang ibu yang mencuci beras di sungai bukan sekadar melakukan pekerjaan domestik, ia sedang menghidupi sejarah tubuh yang diwariskan oleh ibunya, neneknya, dan para perempuan terdahulu yang menjadikan sungai bukan sekadar tempat air mengalir, tetapi ruang spiritual tempat kesunyian,

percakapan, dan kebersamaan mengendap. Sungai itu menjadi sakral bukan karena airnya, tetapi karena aliran pengalaman yang berlangsung di dalam dan sekitarnya. Demikian pula sawah, bukan sekadar ladang ekonomi, tetapi ruang dialog antara manusia dan alam, antara tanah dan langit, antara panen dan doa.

Fenomenologi ruang memandang bahwa makna bukan berasal dari luar ruang itu, melainkan lahir dari pertemuan antara subjek yang mengalami dan objek yang diresapi. Oleh karena itu, sebuah desa kecil bisa memiliki makna jauh lebih besar dari ibu kota negara, karena ia menyimpan kedalaman perasaan dan keakraban spiritual yang tidak dimiliki oleh ruang yang megah namun asing. Ruang yang kecil, namun dialami secara mendalam, menjadi pusat dunia bagi seseorang. Ruang menjadi rumah bukan karena dinding dan atapnya, tetapi karena rasa yang tinggal di dalamnya. Maka tanah leluhur, meski tandus dan sepi, seringkali lebih menggetarkan batin daripada kota modern yang hiruk-pikuk namun kosong makna.

Ruang juga adalah medan politis makna. Ketika suatu rezim menentukan ulang batas wilayah, mengganti nama tempat, atau merombak struktur spasial, sesungguhnya yang terjadi bukan hanya perombakan geografis, tetapi pembongkaran ingatan. Penghapusan nama-nama lokal dan penggantian dengan istilah-istilah baru yang netral atau seragam adalah upaya untuk menghapus lapisan makna yang telah berakar dalam masyarakat. Dalam konteks ini,

Majalengka bukan hanya tempat yang berlokasi di antara Cirebon dan Bandung, tetapi ruang yang menyimpan konflik pengetahuan antara yang dilestarikan secara simbolik dan yang dibakukan secara formal.

Relasi ruang dan makna juga bisa dilihat dari cara masyarakat memberi nama pada ruang. Nama adalah bentuk simbolik pertama dari relasi batin manusia terhadap ruang. Nama-nama seperti “Gunung Bitung”, “Ciborelang”, “Rajagaluh”, bukan sekadar sebutan geografis, tetapi adalah simbol dari pengetahuan ekologis, narasi leluhur, atau bahkan zikir tersembunyi yang menjadi doa yang terus diucapkan tanpa sadar. Dalam fenomenologi, penamaan adalah proses spiritual: manusia tidak hanya mengidentifikasi ruang, tetapi menjadikannya bagian dari dirinya. Ia melekatkan dirinya dalam ruang, dan menjadikan ruang itu bagian dari tubuh sosialnya.

Dalam dimensi yang lebih dalam, ruang tidak hanya menyimpan makna, tetapi juga membentuk cara berpikir. Struktur rumah, pola kampung, arah sawah, bahkan susunan batu di pemakaman leluhur—semuanya membentuk kosmologi, cara manusia melihat dirinya dalam semesta. Ruang membentuk pandangan hidup. Maka ketika ruang berubah secara drastis, identitas pun terguncang. Ketika kampung digusur, bukan hanya tempat tinggal yang hilang, tetapi sistem makna yang telah diwariskan secara diam-diam selama generasi turut tercerabut. Dalam pengalaman ini, penggusuran bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi trauma spiritual.

Majalengka sebagai ruang harus dibaca melalui pendekatan fenomenologis agar tidak jatuh dalam penyeragaman administratif yang menghilangkan keunikan kulturalnya. Kita perlu mendengarkan bagaimana masyarakat mengalami Majalengka bukan hanya sebagai kabupaten, tetapi sebagai rumah batin. Bagaimana mereka berbicara tentang gunung, tentang air, tentang makam keramat, tentang pasar tradisional yang dianggap tempat *ngabagea waktu*—menyambut waktu bukan sekadar bertransaksi. Semua ini adalah bentuk pengalaman ruang yang tidak bisa ditangkap oleh data statistik, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang hadir.

Akhirnya, relasi fenomenologis antara ruang dan makna adalah panggilan untuk merawat keheningan. Ia mengajak kita untuk tidak terburu-buru membakukan makna, tetapi membuka telinga untuk mendengar yang berbisik. Ruang bukan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi diresapi. Dalam konteks ini, Majalengka bukan hanya tempat yang ingin ditentukan tanggal lahirnya, tetapi ruang yang sedang meminta untuk didengarkan—bukan sebagai data, tetapi sebagai puisi yang mengalir pelan dalam tubuh para petani, seniman, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang terus mencari identitasnya di antara sunyi dan simbol. Di situlah ruang menjadi tempat pulang—karena ia bukan sekadar tempat berada, tetapi tempat di mana makna kembali menemukan rumahnya.

C. Majalengka sebagai Ruang Eksistensial, Bukan Administratif

Majalengka, dalam narasi kulturalnya yang panjang dan berlapis, bukanlah entitas yang sepenuhnya dapat diringkus dalam batas-batas administratif. Ia bukan semata-mata satuan kabupaten dalam struktur negara, melainkan ruang eksistensial yang membentuk, menyimpan, dan menyuarakan makna tentang keberadaan manusia dan komunitasnya. Pembacaan Majalengka sebagai ruang eksistensial menggeser fokus dari sekadar pengukuran geografis menuju pengalaman batin yang diresapi secara kolektif. Majalengka adalah medan spiritual, tempat makna hidup, bukan sekadar tempat tinggal.

Dalam filsafat eksistensialisme, ruang bukanlah sesuatu yang bersifat netral. Ia adalah kondisi tempat manusia menemukan dirinya dan menjalani hidup secara otentik. Ketika diterapkan dalam konteks Majalengka, kita melihat bahwa tempat ini bukan hanya latar sejarah, tetapi juga subjek sejarah itu sendiri. Setiap jengkal tanah, dari pegunungan Argapura hingga ladang-ladang di Kadipaten, menyimpan jejak dialog antara manusia dan waktu. Di sana, orang-orang tidak hanya hidup—mereka menghidupi tanahnya. Maka Majalengka bukan sekadar titik dalam peta administratif; ia adalah tubuh yang bernapas bersama rakyatnya.

Kita dapat merasakan eksistensialitas Majalengka dalam hal-hal kecil namun penuh makna: dalam cara masyarakat menyebut nama tempat dengan afeksi; dalam bagaimana

mereka menanam padi dengan mantra dan doa; dalam bagaimana seni Topeng Beber, yang tidak pernah ditulis dalam buku sejarah nasional, tetap diwariskan dari tubuh ke tubuh, dari batin ke batin. Semua ini adalah penanda bahwa Majalengka adalah ruang yang tidak hanya dihuni, tetapi dialami – secara spiritual, sosial, dan simbolik.

Pendekatan administratif pada akhirnya mereduksi ruang menjadi angka: luas wilayah, jumlah penduduk, indeks ekonomi. Ia berguna, tetapi tidak cukup. Sebab, di balik angka-angka itu, ada air mata seorang petani yang kehilangan sawahnya karena alih fungsi lahan. Ada kegelisahan batin seorang pemuda yang merasa asing di tanahnya sendiri karena perubahan terlalu cepat tanpa narasi yang dia pahami. Majalengka sebagai ruang eksistensial justru menghadirkan dimensi terdalam dari sejarah yang tidak bisa dilacak lewat arsip, tetapi hanya bisa didengarkan lewat cerita, ritus, dan bahasa yang masih bertahan meski nyaris ditinggalkan.

Sejarah administratif bisa menunjuk bahwa Majalengka berdiri sebagai kabupaten sejak tahun tertentu berdasarkan keputusan resmi. Namun, sejarah eksistensial mengajarkan bahwa Majalengka sudah hidup jauh sebelum itu – dalam narasi kerajaan Talaga, dalam jejak Sumedanglarang, dalam pengaruh Cirebon yang mengalir dalam bahasa dan seni. Sejarah semacam ini tidak linear, melainkan spiral. Ia bukan perjalanan dari A ke B, melainkan gerak bolak-balik antara yang hadir dan yang dikenang, antara yang nyata dan yang dirasakan.

Ruang administratif cenderung homogen dan seragam. Tetapi ruang eksistensial merayakan keragaman tafsir. Di Majalengka, sebuah batu bisa lebih berarti daripada tugu peresmian. Sebuah mata air yang dipercaya sebagai tempat leluhur bersemadi bisa lebih sakral daripada kantor kabupaten. Ini karena dalam ruang eksistensial, makna lahir dari keterlibatan batin, bukan dari otoritas legal. Orang-orang menghormati tempat bukan karena perintah, tetapi karena pengalaman transenden yang diwariskan.

Ketika masyarakat Majalengka memperingati hari jadi kotanya, sesungguhnya yang mereka cari bukan hanya angka, tetapi rasa: rasa keterhubungan, rasa memiliki, rasa bahwa mereka adalah bagian dari tanah ini, dan tanah ini pun bagian dari jiwa mereka. Di titik ini, penetapan tanggal menjadi simbol semata. Yang sejati adalah ziarah batin: bagaimana hari itu menjadi pengingat tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ke mana mereka hendak menuju. Majalengka sebagai ruang eksistensial menjadikan tanggal bukan tujuan, tetapi pemicu perenungan.

Majalengka juga menunjukkan eksistensialitasnya dalam bagaimana masyarakatnya menjaga bahasa. Dialek Sunda Majalengka bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ladang nilai, tempat puisi-puisi kehidupan ditanam. Di dalamnya terdapat filosofi hidup, ketertundukan pada alam, dan kesetiaan terhadap keseimbangan. Bahasa menjadi medium utama eksistensi. Ia lebih dari sekadar alat; ia adalah rumah batin yang menjaga agar manusia tidak tercerabut dari akarnya.

Ketika kita mengabaikan ruang eksistensial, kita berisiko menjadikan Majalengka sebagai objek pembangunan semata—tanpa jiwa, tanpa arah. Jalan raya bisa diperlebar, gedung-gedung bisa didirikan, tetapi bila tidak disertai kesadaran batin, maka yang dibangun adalah kekosongan yang memekakkan. Maka penting untuk memahami Majalengka sebagai ruang eksistensial agar setiap pembangunan yang dilakukan tetap terikat dengan akar kebudayaan, dengan kesunyian sejarah, dan dengan nilai-nilai yang telah lama hidup meski tak selalu terlihat.

Majalengka eksistensial adalah Majalengka yang hadir dalam lagu rakyat, dalam hening makam leluhur, dalam perayaan kecil di pelosok desa, dan dalam puisi yang tidak dicetak namun diingat. Ia tidak bisa dikurung dalam satu definisi. Ia adalah jaringan makna yang terus tumbuh dan bergeser bersama pengalaman warganya. Oleh karena itu, membicarakan Majalengka harus lebih dari sekadar evaluasi kinerja pemerintahan. Ia harus menjadi percakapan tentang bagaimana kita merawat makna, menghidupi warisan, dan mempersiapkan masa depan yang berakar.

Sebagai ruang eksistensial, Majalengka juga menyimpan luka. Luka akibat pengingkaran sejarah, penggusuran nilai-nilai lokal, dan pengabaian terhadap simbol-simbol keramat yang dianggap tidak relevan. Namun luka itu juga adalah kekuatan. Karena dari luka-luka itulah tumbuh kesadaran baru untuk kembali membaca Majalengka bukan sebagai kabupaten, tetapi sebagai tubuh kolektif yang mengandung harapan, kenangan, dan doa.

Pengetahuan tentang Majalengka tidak cukup jika hanya bersumber dari buku-buku kebijakan. Ia harus juga bersumber dari tanah itu sendiri—dari orang-orang yang menanam, menembang, dan menunggu hujan sambil berdoa. Hanya dengan cara itu, kita bisa benar-benar mengerti bahwa Majalengka adalah rumah, bukan kantor. Ia adalah tubuh yang merindukan sentuhan, bukan berkas yang menunggu tandatangan. Ia adalah ruang eksistensial: hidup, hadir, dan mengajak kita pulang, bukan ke masa lalu, tetapi ke makna yang terus diperbarui oleh cinta.

Majalengka tidak sedang menunggu untuk didefinisikan secara final. Ia menunggu untuk terus dibacakan, dihayati, dan diperbincangkan—bukan dalam bahasa statistik, tetapi dalam bahasa batin. Maka tugas kita adalah menjaga agar suara-suara sunyi yang selama ini hanya bergema di ruang-ruang kecil tetap bisa terdengar. Agar Majalengka tetap menjadi tempat yang bukan hanya ada di peta, tetapi juga di dada.

D. Penutup

Pada akhirnya, hubungan antara tanah, ingatan, dan identitas bukanlah relasi yang bersifat teknokratis, melainkan jalinan batin yang hanya bisa dipahami melalui kehadiran penuh dan kesetiaan akan makna. Dalam perspektif fenomenologis, ruang tidak netral. Ia tidak hanya dihuni—ia menghidupi. Ia menyimpan getar jiwa kolektif, dan melalui tubuh-tubuh manusia yang menghayatinya, ruang menjelma

menjadi medan makna yang terus diperbarui. Tanah tidak hanya menjadi tempat berpijak, tetapi cermin tempat manusia melihat siapa dirinya, apa yang ia warisi, dan bagaimana ia ingin dikenang.

Majalengka, jika dibaca dengan mata yang bening dan batin yang terbuka, lebih dari sekadar batas administratif atau unit birokrasi. Ia adalah ruang eksistensial tempat narasi-narasi diam, ingatan yang tidak tertulis, dan ritus-ritus yang nyaris hilang terus bergema dalam senyap. Di antara batu tua yang dikeramatkan, dalam bunyi gamelan yang hanya terdengar saat panen raya, dan dalam sebutan kampung yang mengandung puisi kosmologis, Majalengka menemukan jati dirinya. Bukan dari tanggal pendiriannya, tetapi dari bagaimana ia terus dihayati oleh rakyatnya.

Kita tidak sedang menyeru untuk menolak sejarah administratif, melainkan mengajaknya berdialog dengan sejarah batin. Kita tidak sedang meminta penghapusan struktur, melainkan menuntut pembacaan yang lebih dalam terhadap struktur itu. Ketika tanah dipahami hanya sebagai properti, maka yang lahir adalah kehilangan. Tapi ketika tanah dimaknai sebagai tubuh yang mengingat dan merawat, maka yang tumbuh adalah identitas yang berakar. Dan identitas sejati bukan yang didikte dari luar, tetapi yang tumbuh dari dalam: dari bisikan leluhur, dari ritme alam, dan dari puisi-puisi kecil yang ditanam dalam kehidupan sehari-hari.

Maka, jika Majalengka hendak dikenang, hendak dirayakan, hendak diberi makna baru – biarlah itu berangkat bukan hanya dari keinginan administratif untuk menandai, tetapi dari keberanian spiritual untuk mendengar ulang. Tanah ini tidak meminta untuk diberi label. Ia meminta untuk dihormati. Karena di dalam dirinya, terbaring lapisan-lapisan ingatan yang membentuk siapa kita hari ini: manusia yang mencari jalan pulang, bukan ke masa lalu, tetapi ke akar yang telah lama bersuara lewat sunyi.

Menulis Sejarah sebagai Tindakan Etis

A. Pengantar

Sejarah, dalam pemahaman yang terlalu lama dikekang oleh kronologi dan kekuasaan, sering kali menjelma sebagai ruang penghakiman: siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang layak dikenang, dan siapa yang disingkirkan dari ingatan kolektif. Ia berubah menjadi instrumen pembenaran, bukan perenungan; menjadi alat legitimasi, bukan cermin kemanusiaan. Dalam struktur semacam itu, sejarah tidak hadir sebagai sahabat, tetapi sebagai hakim yang dingin, dan sering kali bisu terhadap luka-luka sunyi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, adakah cara lain untuk menulis sejarah—cara yang tidak menghakimi, tetapi justru menyembuhkan? Sejarah yang tidak hanya mencatat, tetapi juga merawat; yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memeluk. Menulis sejarah sebagai tindakan etis adalah sebuah panggilan untuk keluar dari logika kekuasaan dan memasuki ruang spiritual, di mana ingatan kolektif tidak lagi menjadi medan pertempuran narasi, melainkan ladang tempat benih makna ditanam, dirawat, dan dituai bersama.

Dalam lanskap budaya seperti Majalengka, sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi soal luka dan harapan yang terus bergema di tubuh komunitas. Ada cerita-cerita yang tak tertulis namun hidup dalam ritus, dalam nyanyian rakyat, dan dalam kesetiaan diam pada nilai-nilai lokal. Sejarah semacam ini tidak menuntut untuk dibuktikan, melainkan untuk disimak. Ia hadir sebagai ruang kontemplatif, tempat kita tidak mencari pemenang, melainkan mencari pemahaman; tempat kita tidak menuntut kepastian, melainkan menerima keberagaman sebagai mozaik eksistensial.

Memori kolektif, jika ditulis dengan kepekaan etis, adalah jalan pulang bagi masyarakat yang tercerabut dari akar. Ia adalah jembatan spiritual yang menghubungkan generasi masa kini dengan kebijaksanaan leluhur, bukan untuk memenjarakan masa kini dalam romantisme masa lalu, tetapi untuk menjadikan sejarah sebagai cahaya batin, sebagai sumber kultural yang membimbing arah masa depan. Sejarah semacam ini tidak membutuhkan menara gading; ia cukup hadir di sawah, di padepokan seni, di warung kopi tempat cerita diwariskan.

Maka menulis sejarah bukanlah sekadar tugas akademik, tetapi laku moral. Ia menuntut kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua yang benar harus menang, dan tidak semua yang kalah adalah salah. Dalam terang ini, sejarah menjadi tindakan etis – bukan untuk menguasai waktu, tetapi untuk

menghidupkan kembali jiwa zaman yang nyaris terlupakan. Karena pada akhirnya, yang paling perlu kita wariskan bukanlah fakta-fakta mati, tetapi kebijaksanaan hidup yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia di antara ingatan, luka, dan harapan.

B. Sejarah yang Tidak Menghakimi, Tapi Menyembuhkan

Sejarah, dalam bentuknya yang paling otoritatif, sering kali tampil sebagai narasi yang memihak: memilih mana yang patut dikenang dan mana yang sebaiknya dilupakan. Ia hadir dengan suara yang mantap, seolah-olah tahu segalanya, dan dengan bahasa yang kadang menyerupai vonis. Sejarah yang seperti ini menjelma sebagai pengadilan masa lalu – mencatat pemenang, mengabaikan yang tertindas, dan mengabadikan versi tunggal dari kenyataan yang sebenarnya berlapis. Dalam logika tersebut, sejarah kehilangan ruh penyembuhannya. Ia menjauh dari hakikatnya sebagai ruang perjumpaan dan menjadi benteng penjara makna. Di sinilah pentingnya menulis sejarah sebagai tindakan penyembuhan, bukan penghakiman.

Sejarah yang menyembuhkan bukan berarti sejarah yang mengaburkan kebenaran atau berdamai dengan kezaliman. Sebaliknya, ia justru mengakui luka dengan jujur, menghadirkannya secara utuh, namun tidak untuk menuduh atau memenjarakan, melainkan untuk menyadarkan dan memulihkan. Ia adalah sejarah yang menampung air mata,

bukan sekadar menulis data. Sejarah ini tidak lahir dari menara-menara akademik semata, tetapi dari bumi tempat luka-luka kolektif digenang dan ditaburi benih makna. Dalam konteks ini, sejarah menjadi tindakan spiritual – suatu bentuk ziarah terhadap masa lalu yang tidak mengulangi trauma, tetapi memeluknya agar bisa dilepaskan.

Dalam masyarakat tradisional seperti Majalengka, bentuk-bentuk sejarah semacam ini sesungguhnya sudah lama hidup dalam ingatan lisan, dalam mitos dan ritus, dalam tari dan syair. Tidak ada pengadilan dalam cerita rakyat. Tidak ada hitam putih dalam tembang Sunda. Yang ada adalah pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang rapuh dan mulia sekaligus. Sejarah menyembuhkan karena ia mengajarkan bahwa setiap penderitaan memiliki makna, bahwa setiap peristiwa adalah pesan. Dalam topeng yang dikenakan para penari Kedempling, kita tidak hanya melihat karakter, tapi juga luka-luka kolektif yang dipanggungkan agar bisa dimaknai ulang.

Sejarah penyembuh adalah sejarah yang membuka ruang perenungan, bukan perlawanan. Ia tidak serta-merta menghapus kesalahan, tetapi mengajak kita untuk menyimak konteks, memahami ketidaksempurnaan, dan memaafkan tanpa harus melupakan. Ini adalah sejarah yang ditulis dengan air mata, bukan dengan tinta kering dari lembaga negara. Ia adalah sejarah yang mengenal duka secara personal, yang tidak hanya bertanya siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang diam, siapa yang disingkirkan, siapa yang memelihara makna meski terlupakan.

Penulisan sejarah yang menyembuhkan juga melibatkan dimensi etis yang mendalam. Ia menuntut kehadiran batin, bukan sekadar kecerdasan intelektual. Menulis sejarah berarti hadir di tengah peristiwa yang tidak kita alami, namun kita rasakan. Ini adalah bentuk empati radikal, di mana penulis sejarah tidak mengambil jarak seperti hakim, tetapi mendekat seperti peziarah. Ia berjalan perlahan di antara fragmen-fragmen masa lalu, menyentuh serpihan yang pernah luka, dan merangkainya menjadi narasi yang bukan sekadar informatif, tetapi juga transformasional.

Dalam sejarah yang menyembuhkan, narasi bukanlah milik negara atau sejarawan resmi semata. Ia juga tumbuh dari rakyat yang mewariskan kisahnya dalam sunyi. Di Majalengka, misalnya, sejarah hidup di warung kopi, di makam-makam tua, di kisah nenek kepada cucunya tentang gunung yang tidak boleh didaki sembarangan karena menyimpan 'jiwa'. Semua itu adalah bagian dari narasi kultural yang tidak terdokumentasi dalam buku sejarah, tetapi hidup dalam ingatan yang menyelamatkan. Di sanalah kita menemukan jejak sejarah sebagai praktik penyembuhan – karena ia membuat masyarakat tetap merasa utuh, meski tidak tercatat secara formal.

Sejarah yang menyembuhkan juga bersifat kolektif. Ia menghindari pengkultusan satu tokoh dan lebih memilih mengangkat nilai-nilai yang menyatukan. Ia tidak sekadar merayakan kemenangan, tetapi juga mengenali keperihan. Ketika sejarah hanya berisi pahlawan dan perayaan, maka

yang ditinggalkan adalah luka-luka yang tidak diberi ruang untuk bicara. Padahal luka yang dipendam akan tumbuh menjadi pengingkaran, dan pengingkaran adalah awal dari kekosongan makna. Sejarah yang menyembuhkan memberi ruang bagi luka untuk bernapas, memberi ruang bagi tangisan untuk menjadi bagian dari narasi.

Kita hidup di zaman ketika kecepatan informasi sering mengalahkan kedalaman makna. Sejarah pun dikejar untuk diringkas, dirapikan, dan diarsipkan—seolah-olah masa lalu harus segera dibereskan. Padahal, penyembuhan tidak bekerja seperti itu. Penyembuhan adalah proses pelan. Ia memerlukan jeda, memerlukan perenungan. Sejarah yang menyembuhkan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru memberi kesimpulan. Ia justru mengajak kita untuk berdiam dalam ketidakpastian, untuk memahami bahwa tidak semua harus dijelaskan, tetapi bisa dirasakan.

Di tengah upaya merumuskan ulang hari jadi Majalengka, misalnya, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sejatinya spiritual: apakah kita menulis sejarah untuk mencatat atau untuk merawat? Apakah penetapan tanggal lebih penting daripada pemulihan makna? Sejarah yang menyembuhkan tidak anti pada tanggal, tetapi ia tidak menjadikannya sebagai pusat makna. Yang ia cari adalah rasa keterhubungan yang utuh—perasaan bahwa masyarakat memiliki masa lalu yang dihayati bersama, bukan yang dikte dari atas.

Kita harus mulai melihat penulisan sejarah sebagai bentuk etika perawatan. Sejarah tidak bisa hanya dibangun dari data, ia juga harus dibentuk dari cinta. Cinta pada tanah, pada orang-orang yang dilupakan, pada narasi yang nyaris tenggelam. Cinta semacam ini adalah energi penyembuh. Ia membebaskan sejarah dari kesombongan akademis dan menjadikannya tempat perjumpaan antara generasi, antara manusia dan tanahnya, antara masa lalu dan masa kini yang bersedia mendengar.

Sejarah yang menyembuhkan juga merupakan bentuk pengakuan atas keberagaman narasi. Ia membuka ruang dialog antar versi, bukan untuk saling menegasikan, tetapi untuk saling memperkaya. Ketika kita menerima bahwa sejarah adalah ruang tafsir, maka kita berhenti memaksakan satu kebenaran. Kita mulai merawat pluralitas suara. Dan dari situlah penyembuhan dimulai: ketika setiap suara diberi tempat, ketika setiap kenangan—sekalipun pahit—diakui sebagai bagian dari tubuh kolektif yang harus dirawat bersama.

Membaca sejarah sebagai tindakan etis sekaligus spiritual adalah upaya menyalakan kembali nyala nurani dalam praksis kebudayaan. Kita tidak menulis sejarah untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menjaga warisan batin. Maka siapa pun yang menulis sejarah harus terlebih dahulu belajar mendengar, bukan hanya membaca. Ia harus mampu hadir secara total, bukan hanya menghitung

kronologi. Karena sejarah sejati bukan tentang urutan waktu, tetapi tentang kedalaman makna. Dan makna, sebagaimana luka dan cinta, hanya bisa dipahami dengan jiwa yang bersedia disentuh.

Sejarah yang menyembuhkan adalah sejarah yang tidak usai pada halaman terakhir. Ia terus hidup dalam ritus, dalam dialog antar-generasi, dalam keputusan-keputusan kecil yang dibuat dengan kesadaran akan apa yang telah terjadi. Sejarah ini bukan bahan hafalan, tetapi sumber kebijaksanaan. Ia tidak berbicara dalam huruf tebal, tetapi dalam bisikan: *“Jangan lupa dari mana kamu berasal, agar kamu tahu ke mana kamu pulang.”*

Maka biarlah kita menulis sejarah bukan sebagai pengadilan, tetapi sebagai rumah. Tempat semua kenangan pulang tanpa rasa takut, tempat semua suara bisa duduk bersama, dan tempat luka-luka tidak untuk dihakimi, melainkan untuk dimengerti. Karena sejatinya, sejarah bukan tentang masa lalu. Ia adalah tentang bagaimana kita memilih untuk hidup hari ini—apakah sebagai hakim, atau sebagai penyembuh.

C. Memori Kolektif sebagai Jalan Spiritual dan Kultural

Memori kolektif tidak sekadar merupakan kumpulan kenangan masa lalu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia adalah semesta simbolik tempat suatu komunitas menemukan makna, meneguhkan jati diri, dan menyalakan kembali nyala spiritualitas yang tidak bisa

dijelaskan oleh angka dan dokumen. Dalam kebudayaan yang masih menyatu erat dengan ritus dan lisan seperti Majalengka, memori kolektif bukan nostalgia. Ia adalah napas yang memberi kehidupan pada masa kini, dan jembatan yang menghubungkan masa depan dengan kebijaksanaan yang telah tertanam di masa silam.

Memori kolektif menyimpan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana sebuah masyarakat merasakan peristiwa itu. Ia tidak beroperasi secara linear, melainkan spiral. Kenangan tidak berjalan dari titik A ke titik B, tetapi kembali lagi, berputar, bertumbuh, dan menyesuaikan diri dengan konteks batin kolektif yang terus berubah. Maka memori kolektif tidak pernah selesai. Ia adalah teks yang hidup—terbuka untuk ditafsir ulang, tetapi tetap memiliki akar spiritual yang kuat. Dalam konteks ini, memori kolektif menjadi jalan: bukan jalan menuju kepastian, tetapi jalan pulang menuju kedalaman makna.

Dalam tradisi Sunda Majalengka, hal ini terlihat dari bagaimana kisah-kisah leluhur masih dipelihara bukan lewat arsip, tetapi lewat tembang, pantun, mantra, dan ritus adat. Setiap kisah bukan hanya peristiwa, tetapi peringatan—bukan hanya kronik, tetapi cermin moral dan spiritual. Di sinilah kita menyaksikan bagaimana memori bekerja sebagai zikir budaya: ia tidak menuntut untuk dipercaya secara literal, tetapi dihayati secara simbolik. Karena yang penting bukan sekadar apa yang terjadi, tetapi bagaimana kejadian itu terus menggetarkan hati manusia dan membimbingnya dalam hidup bersama.

Dalam banyak masyarakat, termasuk Majalengka, memori kolektif juga terwujud dalam ruang. Sebuah mata air keramat, makam leluhur, batu tua yang dianggap menyimpan energi, semua itu bukan sekadar benda mati. Mereka adalah titik-titik resonansi spiritual yang menyimpan ingatan kolektif. Mereka menjadi situs perjumpaan antara yang kelihatan dan yang tak kasat mata, antara sejarah yang bisa dibaca dan sejarah yang hanya bisa dirasakan. Maka menghapus ruang-ruang ini bukan hanya kehilangan situs budaya, tetapi juga menghilangkan simpul-simpul batin kolektif yang selama ini menjadi sumber arah dan pegangan.

Memori kolektif bukan sekadar mengulang masa lalu. Ia adalah perangkat tafsir. Di saat masyarakat mengalami perubahan sosial, memori kolektif menjadi alat refleksi: apakah langkah kita hari ini setia pada nilai-nilai yang pernah menjadikan kita manusia yang utuh? Dalam dinamika modernisasi yang cepat dan globalisasi yang masif, memori kolektif menjadi benteng spiritual: bukan untuk menolak perubahan, tetapi agar perubahan tidak mencabut manusia dari akarnya. Majalengka yang tengah menata dirinya ke masa depan, memerlukan bukan hanya rencana pembangunan, tetapi juga penguatan ingatan kolektif agar tidak kehilangan wajah sejatinya.

Dalam dunia yang semakin mengutamakan rasionalitas dan efisiensi, memori kolektif mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat dihitung. Ada pengalaman batin, peristiwa transendental, dan bisikan nilai yang hidup dalam bahasa

simbol. Puisi, tembang, dan seni pertunjukan tradisional bukan hanya hiburan, tetapi ruang di mana memori itu dirawat. Dalam pertunjukan Topeng Beber, misalnya, wajah-wajah masa lalu dipanggil kembali bukan untuk dikenang sebagai fakta sejarah, tetapi untuk dihadirkan sebagai arketipe batin yang masih relevan di zaman ini.

Secara filosofis, memori kolektif juga menyadarkan manusia bahwa hidup bukanlah sekadar proyek pribadi. Ia adalah bagian dari jaringan keberadaan yang saling terkait. Kita mewarisi, kita mengemban, dan kita meneruskan. Dalam hal ini, memori kolektif bukan hanya spiritualitas kultural, tetapi juga etika sosial. Ia mengajarkan tanggung jawab untuk tidak melupakan, untuk tidak membiarkan yang rapuh ditinggalkan, dan untuk terus menyuarakan yang sunyi agar tidak terbenam dalam sejarah yang dikendalikan oleh yang kuat semata.

Majalengka menyimpan banyak bentuk memori semacam ini. Dari dongeng tentang asal-usul nama, hingga kisah pangeran dan pertapa, hingga tata laku adat panen yang dilafalkan dalam bahasa halus dan nyaris tak diterjemahkan ke dalam modernitas. Semua itu adalah bentuk-bentuk kecil dari jalan spiritual yang diwariskan lewat memori. Mereka tidak hanya menciptakan identitas, tetapi juga memberi arah—arah yang tidak dibisikkan oleh peta, tetapi oleh suara batin yang telah teruji oleh waktu dan pengalaman.

Menjaga memori kolektif adalah menjaga keutuhan masyarakat secara batiniah. Tanpa ingatan yang hidup,

masyarakat hanya akan menjadi kerumunan yang terorganisir, bukan komunitas yang memiliki ikatan makna. Maka penting bagi setiap generasi untuk belajar mendengar: bukan hanya membaca buku sejarah, tetapi juga hadir dalam peristiwa budaya, dalam dialog dengan para tetua, dalam sunyi yang hidup di antara kata-kata yang tidak sempat ditulis. Karena di situlah memori menyelamatkan: ia memberi arah tanpa peta, memberi cahaya tanpa sorotan, dan memberi kekuatan tanpa hiruk-pikuk.

Dalam kerangka ini, pemajuan kebudayaan sejatinya adalah pemulihan memori kolektif. Bukan sekadar pemeliharaan artefak, tetapi penyambungan kembali simpul-simpul spiritual yang selama ini terputus. Melalui revitalisasi ritus, penguatan bahasa daerah, pengarsipan narasi lisan, dan pemberdayaan komunitas adat, memori kolektif dapat dihidupkan kembali sebagai energi moral dan estetik dalam menghadapi zaman. Di sinilah kebudayaan bertemu dengan keadaban. Di sinilah sejarah tidak menjadi museum, melainkan ruang batin yang terus tumbuh dan memberi arah.

Akhirnya, memori kolektif bukan hanya catatan tentang masa lalu. Ia adalah kesadaran tentang siapa kita di tengah dunia yang terus bergerak. Ia adalah akar yang menyatu dengan bumi dan dahan yang menjulur ke langit. Ia adalah doa yang tak selalu diucapkan, tetapi selalu mengiringi langkah. Di tengah krisis identitas, kehilangan arah, dan kebisingan zaman, memori kolektif adalah suara lembut yang mengajak kita untuk kembali—bukan sekadar ke tempat,

tetapi ke makna. Dan dari makna itulah, sejarah dan masa depan bisa ditulis dengan jiwa yang utuh.

D. Penutup

Menulis sejarah sebagai tindakan etis bukanlah sebuah pilihan gaya atau pendekatan intelektual belaka. Ia adalah panggilan batin yang menuntut keberanian untuk menempatkan sejarah tidak sebagai ruang kekuasaan, tetapi sebagai ruang penyembuhan. Dalam paradigma ini, sejarah berhenti menjadi narasi yang menempatkan diri di atas, dan mulai menjadi pelipatan batin yang hadir di samping: mendengar, menyimak, dan memeluk luka yang pernah dirasakan bersama. Sejarah yang ditulis dengan kepekaan etis tidak memuja pemenang, tidak mengutuk yang kalah. Ia justru mencari jembatan di antara keduanya, menyulam simpul-simpul makna yang berserakan di sepanjang perjalanan umat manusia.

Memori kolektif hadir sebagai denyut yang menghidupi tindakan etis ini. Ia bukan catatan masa lalu, tetapi getaran spiritual yang meresapi hidup bersama. Di dalamnya terdapat suara-suara yang tak pernah mendapat ruang di panggung sejarah formal: nyanyian nenek di lumbung padi, tangis anak dalam ritus kematian, dan doa-doa yang tidak pernah dicatat, tetapi selalu dipanjatkan dalam sunyi. Menulis sejarah berarti membuka ruang bagi suara-suara ini untuk hidup kembali – tidak sebagai data, tetapi sebagai cara lain untuk mengingat siapa kita, dan mengapa kita masih

bertahan sebagai komunitas yang saling menggenggam makna.

Majalengka, dan banyak wilayah seperti, tidak hanya membutuhkan sejarawan. Ia membutuhkan penutur yang lembut, penyaksi yang sabar, dan penulis yang berani menulis dengan empati. Sejarah bukan untuk dibekukan sebagai perayaan satu versi, melainkan untuk terus dihidupkan sebagai ladang tafsir bersama. Kita tidak ditakdirkan untuk menyepakati satu narasi tunggal, melainkan untuk saling berbagi fragmen-fragmen pengalaman yang jika dijahit dengan kejujuran, akan membentuk kain batik eksistensial yang melampaui batas administrasi dan ideologi.

Sejarah yang etis, dan memori yang hidup, membawa kita pada ziarah kemanusiaan yang lebih dalam. Ia tidak menunggu perayaan seremonial, tetapi hadir dalam laku harian yang penuh kesadaran: ketika kita berbicara dalam bahasa leluhur, ketika kita menari dalam ritme yang ditinggalkan nenek moyang, ketika kita menyentuh tanah dan merasakan bahwa di bawahnya tersimpan doa dan harapan yang pernah dipanjatkan ratusan tahun lalu. Di situlah sejarah menjadi etika, dan memori menjadi cahaya batin. Kita tidak hanya mencatat, tetapi menghidupi. Kita tidak hanya mengingat, tetapi menyembuhkan. Dan di situlah letak martabat kita sebagai manusia yang terus mencari makna melalui narasi yang tidak berhenti.

A. Pengantar

Tidak semua nama dimaksudkan untuk berhenti pada satu definisi. Ada nama-nama yang justru lahir untuk terus ditafsir, diperbarui, dan dijiwai kembali dalam irama zaman yang selalu bergerak. Majalengka adalah salah satunya. Ia bukan hanya sebuah penanda geografis di peta administratif negara, tetapi medan batin yang hidup dalam irisan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang sedang dijanjikan. Nama “Majalengka” adalah teks yang tidak pernah selesai ditulis; setiap generasi menyumbang satu bait, satu ritus, satu lapis ingatan untuk menyempurnakan maknanya yang tak akan pernah tunggal.

Ziarah intelektual yang dilakukan melalui pembacaan ulang sejarah Majalengka bukan dimaksudkan untuk sampai pada simpulan final. Ia tidak berangkat dari keinginan untuk memutuskan “mana yang benar,” melainkan dari kerendahan hati untuk memahami bahwa sejarah adalah ruang keterlibatan—bukan monumen keagungan, melainkan ladang tempat kita menanam pertanyaan dan memetik kebijaksanaan. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa Majalengka bukan soal tanggal lahir atau silsilah kuasa, melainkan soal denyut hidup yang terus disulam melalui bahasa, tari, tanah, dan diam.

Di sinilah titik tolak paling penting: sejarah bukan sekadar warisan, melainkan ajakan. Ia mengundang kita

untuk tidak hanya menjadi pewaris pasif, tetapi menjadi penggali aktif yang tahu bahwa apa yang tertulis bisa ditinjau ulang, dan apa yang terlupakan bisa dinyalakan kembali. Sejarah Majalengka bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja dari pusat-pusat kuasa, tetapi sesuatu yang harus ditulis ulang dari bawah: dari sawah, dari panggung rakyat, dari cerita ibu-ibu di dapur, dari tembang anak-anak yang diwariskan bukan lewat buku, tetapi lewat bunyi dan tubuh.

Untuk generasi mendatang, Majalengka menawarkan bukan hanya identitas, tetapi kemungkinan. Ia adalah ruang tempat tafsir dibuka, bukan ditutup. Maka tugas kita bukan membakukan sejarah, melainkan menghidupinya terus-menerus. Kita perlu menulis Majalengka dari dalam—dari rasa memiliki yang lahir karena keterlibatan, bukan sekadar karena warisan administratif. Nama ini, yang katanya berasal dari pohon maja yang langka, mengandung pesan tentang kelangkaan nilai, tentang betapa sesuatu menjadi mahal justru karena hampir hilang. Dan karena itu, nama ini layak untuk terus ditulis, dirawat, dan dihidupi, sebagai doa panjang yang tidak selesai dibacakan oleh satu generasi saja.

B. Simpulan dari Ziarah Intelektual: Bukan tentang Akhir, Tetapi tentang Kontinuitas

Ziarah, dalam pemahaman yang paling mendalam, bukanlah perjalanan untuk sampai. Ia adalah perjalanan untuk mengalami. Seperti itu pula hakikat ziarah intelektual atas Majalengka—sebuah upaya menyelami ulang jejak-jejak

makna, membacanya tidak sebagai kronologi mati, tetapi sebagai teks hidup yang terus dibaca ulang oleh generasi demi generasi. Ketika kita mencoba merangkai narasi tentang Majalengka, kita tidak sedang mencari satu titik akhir, melainkan membuka ruang keterlibatan yang tiada henti. Sejarah, dalam pengertian ini, bukan garis lurus yang menuntut kepastian, tetapi jejaring makna yang mengundang keterlibatan batin dan kontemplasi kultural yang tak pernah selesai.

Setiap langkah dalam ziarah intelektual ini bukan untuk membakukan Majalengka ke dalam satu versi sejarah tunggal, tetapi untuk mempertemukan suara-suara yang tersembunyi, ingatan-ingatan yang terpinggirkan, dan simbol-simbol yang selama ini tak tercatat dalam dokumen resmi. Kita menemukan bahwa Majalengka bukan sekadar kabupaten, melainkan ruang eksistensial yang hidup dalam tubuh masyarakatnya – dalam kesenian, bahasa, ritus, dan nama-nama tempat yang menyimpan gema spiritual leluhur. Ziarah ini tidak membawa kita ke jawaban, tetapi kepada kesadaran bahwa jawaban bukanlah satu-satunya tujuan sejarah. Yang lebih penting adalah keterbukaan untuk terus mendengar, bertanya, dan menafsir.

Dalam konteks ini, kontinuitas menjadi kata kunci. Sejarah Majalengka tidak dapat, dan tidak perlu, disimpulkan. Ia adalah proses yang terus berlangsung, bukan artefak yang dikunci dalam museum waktu. Menulis tentang Majalengka adalah menulis tentang proses menjadi – menjadi

diri, menjadi masyarakat, menjadi budaya yang terus berkembang. Dalam setiap ritus tradisi, dalam setiap gerakan tari Kedempling, dalam setiap syair pantun yang diucapkan tanpa naskah, kita menemukan denyut kontinuitas itu. Denyut yang tidak bersuara keras, tetapi setia. Denyut yang tidak mencari sorotan, tetapi mengakar dalam kesetiaan harian.

Majalengka sebagai teks kultural adalah contoh sempurna tentang bagaimana masa lalu tidak bisa dimiliki oleh satu narasi. Ia harus dibaca dengan hermeneutika yang rendah hati. Kita tidak datang sebagai hakim sejarah, melainkan sebagai peziarah yang menyadari bahwa setiap versi menyimpan kebenarannya sendiri. Ziarah ini bukan tentang menang dan kalah, bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang keterlibatan spiritual dalam membangun ruang dialog yang adil antara yang tertulis dan yang terlupakan, antara yang diarsipkan dan yang hanya dibisikkan dari generasi ke generasi.

Kesadaran akan kontinuitas ini mengubah cara kita memandang warisan. Warisan tidak lagi dilihat sebagai pusaka yang harus dilestarikan dalam bentuk aslinya, tetapi sebagai sumber daya batin yang harus dihidupkan kembali melalui tafsir baru. Tari Topeng Beber tidak harus dipertahankan secara identik seperti dahulu, tetapi harus dibaca ulang dengan konteks masa kini agar ruhnya tetap hidup. Bahasa Sunda Majalengka tidak cukup diajarkan, tetapi harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari agar

memori kolektifnya tidak hanya tinggal di ruang akademik, melainkan di bibir masyarakat yang menenun masa depan.

Dalam ziarah ini, kita juga menyadari bahwa kontinuitas bukan berarti stagnasi. Ia menuntut keberanian untuk berubah, tetapi tetap menjaga akar. Seperti pohon yang kokoh bukan karena tidak bergoyang, melainkan karena akarnya menancap dalam tanah sejarah yang subur. Begitu pula Majalengka – ia akan kuat bukan karena menyatu dalam versi tunggal sejarah, tetapi karena keberaniannya untuk merayakan keberagaman narasi yang menjadi kekuatannya yang paling otentik.

Kontinuitas adalah bentuk tertinggi dari keberanian kultural. Ia tidak menolak masa lalu, tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia memaknai, menyaring, dan membangun ulang dengan kesadaran zaman. Dalam konteks ini, Majalengka bukan sekadar objek sejarah, tetapi subjek yang hidup – yang menulis dirinya sendiri melalui laku warga, melalui keputusan-keputusan kecil yang dibuat dengan kesadaran akan warisan, dan melalui keinginan untuk tetap menyambung kehidupan batin yang telah diwariskan oleh leluhur.

Ziarah intelektual ini, pada akhirnya, adalah panggilan untuk merawat kontinuitas sebagai jalan hidup. Ia tidak bisa dituntaskan dalam satu buku, satu peringatan hari jadi, atau satu seminar. Ia harus dihidupi setiap hari, melalui pendidikan yang menghargai lokalitas, melalui kebijakan yang mendengar suara rakyat kecil, dan melalui seni yang

tetap memberi ruang bagi narasi-narasi sunyi yang penuh kebijaksanaan. Ziarah ini tidak selesai karena makna tidak pernah selesai. Ia tumbuh, menyusup, dan menyapa kita dalam bentuk yang tak terduga.

Oleh karena itu, ketika kita berkata bahwa Majalengka adalah "sebuah nama yang terus ditulis oleh waktu," kita sejatinya sedang merayakan kekuatan kontinuitas sebagai bentuk paling luhur dari kebudayaan. Kita sedang menyatakan bahwa sejarah bukan untuk dipahat dalam batu, tetapi untuk ditiupkan dalam napas kolektif yang menjadikan kita tetap manusia. Manusia yang tidak hanya hidup di masa kini, tetapi yang membawa serta roh masa lalu untuk membimbing langkah ke masa depan.

Ziarah intelektual ini bukanlah akhir. Ia adalah pembuka jalan, sebuah undangan untuk kembali hadir dalam kehidupan bersama dengan cara yang lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih terbuka pada keberagaman makna. Sejarah Majalengka tidak memerlukan simpulan, tetapi membutuhkan penjaga. Penjaga yang tahu bahwa setiap generasi bukan penentu, tetapi penyambung. Dan dalam kesadaran itulah, kontinuitas menemukan bentuknya yang paling jernih: sebagai kesetiaan terhadap makna, sebagai cinta yang tak mengikat, dan sebagai doa yang tidak pernah usai dibisikkan.

C. Ajakan untuk Memahami Sejarah sebagai Proses Keterlibatan

Sejarah terlalu sakral untuk diserahkan sepenuhnya kepada catatan birokrasi. Ia bukan sekadar susunan tanggal, nama, dan peristiwa yang dibingkai dalam dokumen, melainkan sebuah medan keterlibatan batiniah yang menghidupkan kembali fragmen-fragmen makna dari masa silam. Dalam perspektif ini, sejarah bukanlah sesuatu yang selesai diceritakan; ia adalah ruang terbuka yang menunggu untuk terus diisi oleh keterlibatan manusia – melalui rasa, tafsir, dan tanggung jawab untuk merawat ingatan.

Menghayati sejarah sebagai proses keterlibatan berarti menggeser peran kita dari sekadar pembaca menjadi peserta aktif. Kita tidak lagi berada di luar narasi, melainkan menjadi bagian darinya. Ini bukan tentang menulis ulang masa lalu dengan niat manipulatif, tetapi tentang mendekatinya dengan kesadaran bahwa sejarah adalah cermin, bukan monumen. Ia memantulkan siapa kita di masa kini berdasarkan bagaimana kita memilih untuk mengingat dan menghargai jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dalam hal ini, sejarah adalah dialog batin: bukan hanya antara fakta dan makna, tetapi juga antara yang tercatat dan yang tersirat, antara yang diperingati dan yang terlupakan.

Majalengka, sebagai sebuah ruang kebudayaan, mengajarkan kita bahwa sejarah tidak hanya hidup di gedung arsip, tetapi juga di ladang, di panggung rakyat, di tembang yang dibisikkan oleh sinden tua, dan di batu-batu yang

disakralkan oleh waktu. Sejarah di sini bukan urusan elit akademik atau pejabat kebudayaan semata; ia adalah milik bersama yang harus dirawat dengan cinta dan kepekaan. Oleh karena itu, memahami sejarah sebagai keterlibatan berarti menghadirkan kembali masyarakat ke dalam narasinya sendiri—mengajak mereka tidak hanya sebagai objek sejarah, tetapi sebagai subjek yang memiliki wewenang untuk berbicara, menafsir, dan merayakan identitas kolektifnya.

Keterlibatan dalam sejarah adalah proses spiritual. Ia membutuhkan keheningan untuk mendengar yang sunyi, dan keberanian untuk menampung yang terusik. Dalam keterlibatan ini, sejarah tidak menuntut kepastian, melainkan kejujuran; tidak menagih heroisme, tetapi kesediaan untuk hadir secara utuh. Menyimak sejarah dengan cara ini seperti mendengarkan lantunan gamelan dari kejauhan: kita tidak perlu memahami setiap denting nada secara rasional, cukup hadir dan membiarkan resonansi itu menjalar ke dalam kesadaran. Sejarah tidak selalu berbicara dengan bahasa formal. Kadang ia hadir dalam tangis, dalam bisikan, atau dalam diam yang penuh makna.

Dalam dunia yang semakin digital dan cepat, sejarah sebagai proses keterlibatan menjadi semacam tindakan kontemplatif. Ia mengajak kita melambat, menyimak kembali narasi yang pernah dibisukan, dan menyusun ulang makna yang berserakan di antara retakan waktu. Di sinilah sejarah menyembuhkan. Ia menyatukan yang tercerai, memulihkan

yang terlukai, dan memberi nama pada yang sebelumnya tak disebut. Keterlibatan bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang merasakan dan memberi makna baru pada apa yang diwariskan. Setiap individu yang memilih untuk terlibat dalam sejarah sejatinya sedang merawat martabat kolektif komunitasnya.

Masyarakat Majalengka memiliki warisan keterlibatan ini dalam banyak bentuk: dalam cerita-cerita tentang leluhur, dalam upacara adat, dalam nyanyian masa panen, dan dalam kerajinan tangan yang diwariskan tanpa perlu kurikulum resmi. Semua ini adalah ekspresi keterlibatan yang menolak dibekukan. Ketika sejarah hanya didekati melalui dokumen resmi, maka yang hadir hanyalah versi steril dari kenyataan. Namun ketika sejarah dihayati melalui laku hidup, maka setiap orang menjadi penyaksi dan penjaga – penyaksi akan nilai, dan penjaga akan jiwa komunitas.

Keterlibatan juga berarti keberanian untuk menolak narasi yang menindas. Ketika versi resmi sejarah meniadakan peran perempuan, minoritas, atau komunitas adat, maka keterlibatan menuntut kita untuk menggali ulang dan memberi ruang bagi yang dibungkam. Ini adalah tindakan etis sekaligus spiritual – sebuah upaya untuk menjadikan sejarah bukan tempat untuk memamerkan kejayaan semu, tetapi medan untuk menemukan keadilan yang tersembunyi di balik debu waktu. Sejarah yang hidup dari keterlibatan adalah sejarah yang terus tumbuh, yang memberi ruang bagi luka dan harapan, yang tidak takut untuk berubah karena tahu bahwa makna adalah sesuatu yang dinamis.

Sebagai bagian dari ajakan ini, kita dituntut untuk membangun sistem edukasi yang tidak hanya mengajarkan sejarah sebagai hafalan, tetapi sebagai pengalaman. Anak-anak harus diajak menziarahi situs budaya, mendengarkan cerita dari kakek-nenek, dan menulis ulang sejarah mereka sendiri berdasarkan laku harian yang mereka jalani. Ketika sejarah diajarkan sebagai keterlibatan, maka yang muncul bukan sekadar pengetahuan, tetapi cinta: cinta terhadap tempat, terhadap leluhur, terhadap tradisi, dan terhadap masa depan yang ingin diwariskan.

Akhirnya, memahami sejarah sebagai proses keterlibatan adalah bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita bukan pengamat netral, melainkan bagian dari jalinan waktu yang saling menyentuh. Majalengka, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar nama daerah, tetapi medan makna tempat manusia menemukan kembali dirinya di tengah dunia yang cepat berubah. Ketika kita memilih untuk terlibat, kita sejatinya sedang menegaskan bahwa sejarah bukan tentang kejayaan masa lalu, melainkan tentang keberanian untuk hadir secara utuh hari ini—dan untuk terus menyambung makna esok hari, tanpa kehilangan akar kita yang terdalam.

Dan mungkin di situlah ziarah sejarah menemukan maknanya yang paling hakiki: bukan sebagai penggalian data, tetapi sebagai pertemuan jiwa-jiwa yang saling memanggil dalam gema waktu yang terus hidup di dalam dan melalui kita semua.

D. Harapan untuk Generasi Mendatang: Menulis Majalengka dari Dalam, Bukan dari Atas

Ada harapan yang lebih luhur daripada sekadar merayakan ulang tahun administratif, yaitu harapan agar Majalengka ditulis dan diceritakan dari dalam: dari tubuh-tubuh yang merawat tanahnya, dari suara-suara yang tidak pernah menjadi headline, dan dari denyut kehidupan yang berjalan tenang, sabar, dan konsisten di luar pusat-pusat kekuasaan. Generasi mendatang dipanggil bukan untuk menjadi pewaris pasif atas sejarah yang telah dirumuskan oleh yang di atas, tetapi untuk menjadi penulis ulang narasi lokal yang mengakar, jujur, dan berdaya hidup.

Menulis Majalengka dari dalam berarti hadir di tengah-tengah denyut keseharian masyarakat: menyimak bahasa mereka, mengamati ritus mereka, mendengarkan dongeng yang dituturkan oleh nenek di beranda rumah kayu, dan memahami bahwa semua itu adalah arsip yang tidak dituliskan dalam dokumen negara, tetapi hidup dan diwariskan lewat tubuh dan kebiasaan. Ini bukan sekadar pendekatan partisipatif; ini adalah kesadaran eksistensial bahwa sejarah tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan atau sumber pencatatan.

Generasi muda Majalengka harus diyakinkan bahwa mereka memiliki otoritas spiritual dan kultural untuk menulis ulang narasinya sendiri. Tidak perlu menunggu pengakuan dari luar untuk mulai menggali apa yang ada di dalam.

Kearifan lokal, bahasa daerah, filosofi agraris, dan tradisi seni tidak boleh direduksi sebagai objek wisata atau arsip akademik, tetapi harus diposisikan sebagai lumbung makna, sebagai sumber yang bisa menyuplai energi kreatif dan moral untuk menjawab tantangan zaman.

Ketika sejarah hanya ditulis dari atas, maka yang hadir adalah narasi yang linier, steril, dan sering kali kehilangan sentuhan batin masyarakatnya. Yang muncul adalah peringatan-peringatan seremonial yang kering, foto-foto formal di panggung-panggung birokrasi, dan dokumen resmi yang tidak menyisakan ruang untuk air mata, tawa, atau kegetiran rakyat biasa. Padahal, Majalengka yang sejati hidup justru di luar sorotan itu: di pematang sawah, di panggung kecil pertunjukan Kedempling, di rumah-rumah bambu yang masih menyimpan pupujian tua, dan di bahasa sehari-hari yang penuh lapisan rasa.

Harapan untuk generasi mendatang adalah agar mereka berani melawan narasi tunggal dengan cara yang lembut dan bermartabat: dengan menulis puisi dalam bahasa Sunda Majalengka, dengan mendokumentasikan cerita kakek-nenek, dengan menciptakan ruang-ruang komunitas yang tidak mengharuskan legalitas tetapi mendengarkan realitas. Ini bukan bentuk perlawanan keras, tetapi sebuah keberanian batin untuk tetap berada di jalur yang jujur – menulis dari akar, bukan dari langit.

Menulis dari dalam juga berarti memahami waktu secara berbeda. Sejarah tidak harus dipaku pada satu tanggal

lahir. Sejarah bisa hadir dalam musim panen yang selalu kembali, dalam ritme tembang rakyat yang tidak berubah meski dunia telah banyak bergeser. Waktu dalam perspektif lokal bukan linier, melainkan spiral. Ia kembali, tetapi membawa lapisan makna baru. Maka menulis Majalengka dari dalam berarti juga menulis waktu dari sudut pandang batin, bukan hanya dari kronologi politik.

Generasi mendatang harus diajak untuk menyadari bahwa menjadi Majalengka bukan soal tinggal di sana, tetapi soal menghidupi nilai-nilainya. Bahkan yang merantau pun bisa ikut menulis Majalengka, selama ia membawa pulang nilai kesahajaan, kesetiaan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri di tengah arus seragam dunia modern. Identitas Majalengka bukan dipamerkan, melainkan dijalani. Ia hadir dalam cara seseorang menyapa, dalam cara bekerja tanpa riuh, dan dalam ketulusan menjaga yang rapuh.

Masa depan Majalengka tergantung pada sejauh mana generasi mudanya mampu menyerap nilai-nilai ini, lalu mengekspresikannya dengan cara-cara baru. Tidak semua harus dilakukan secara tradisional. Teknologi bisa digunakan untuk merekam, menulis, dan membagikan. Tapi yang lebih penting dari medianya adalah sikap dasarnya: apakah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau sekadar proyek citra? Menulis dari dalam berarti menulis dari rasa memiliki, bukan karena tuntutan kurikulum atau insentif luar. Ia lahir dari kegelisahan, dari cinta, dan dari keinginan untuk tidak

kehilangan sesuatu yang terasa penting, meski tak bisa selalu dijelaskan.

Majalengka perlu terus ditulis sebagai proses, bukan hasil. Ia bukan identitas yang selesai ditentukan, melainkan ruang tafsir yang terus berkembang. Setiap generasi menambahkan babak baru, bukan untuk menggantikan yang lama, tetapi untuk memperkaya dan menyambunginya. Dalam logika ini, sejarah tidak dibekukan, tetapi dihidupkan. Tidak disederhanakan, tetapi dibiarkan tumbuh dalam kompleksitasnya.

Harapan ini bukan utopia. Ia bisa diwujudkan dalam hal-hal kecil: dalam festival lokal yang jujur, dalam pelajaran sejarah yang membuka ruang dialog, dalam pemimpin komunitas yang lebih memilih mendengar daripada memerintah, dan dalam anak muda yang tidak malu menulis blog tentang cerita kakeknya. Majalengka dari dalam bukan proyek besar negara. Ia adalah gerakan sunyi dari hati ke hati, dari rumah ke rumah, dari musim ke musim.

Maka generasi mendatang jangan diberi beban untuk menjawab semua pertanyaan sejarah Majalengka. Beri mereka ruang untuk bertanya, untuk menafsir, untuk salah, dan untuk mencoba lagi. Biarkan mereka menulis Majalengka bukan sebagai peta yang sudah selesai, tetapi sebagai sajak yang terus dibacakan dalam berbagai nada dan irama. Karena hanya dengan cara itu, Majalengka akan tetap hidup: bukan sebagai tempat yang dikenang, tetapi sebagai jiwa yang menghidupkan.

E. Penutup

Tidak setiap tempat memiliki nasib untuk terus ditulis oleh warganya, dan tidak setiap nama diberkahi kesempatan untuk menjadi ruang tafsir yang tak kunjung habis. Majalengka adalah salah satu dari sedikit yang demikian. Ia bukan sekadar nama administratif dalam peta, melainkan suara sunyi yang terus memanggil agar kita tidak hanya mengingat, tetapi juga menghidupi. Dalam ziarah intelektual yang telah ditempuh, kita tidak sampai pada simpulan yang menutup, melainkan pada kesadaran bahwa sejarah Majalengka adalah narasi yang bersifat kontinum—ia tak menuntut ujung, tetapi memanggil setiap generasi untuk menyambungannya dalam kejujuran makna dan kedalaman rasa.

Ketika sejarah dilihat sebagai ruang keterlibatan, bukan sekadar urusan pencatatan, maka setiap langkah hidup masyarakat menjadi bagian dari teks yang hidup. Perjalanan ini bukan tentang menemukan satu versi yang paling sahih, melainkan tentang keberanian untuk mendengar suara-suara yang kerap dibungkam oleh narasi dominan. Ia tentang membuka kembali halaman-halaman yang dilipat terlalu cepat, dan tentang membaca kembali jejak-jejak yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan tanah, tubuh, dan air mata. Di sinilah Majalengka menemukan dirinya—bukan di arsip pusat kekuasaan, tetapi di denyut waktu yang diciptakan oleh rakyatnya sendiri.

Harapan terbesar dari perjalanan pemaknaan ini adalah agar generasi mendatang tidak jatuh pada ketergantungan terhadap narasi dari atas. Majalengka harus terus ditulis dari dalam, oleh mereka yang menjalaninya dalam keseharian. Mereka yang bekerja di ladang, yang menari dalam ritual Kedempling, yang berbicara dalam bahasa Sunda Majalengka, yang menyanyikan pantun dan pupujian yang tidak tercatat oleh sejarah formal—mereka inilah penulis sejati Majalengka. Dan kepada generasi baru, pesan ini ditiptikan: jangan buru-buru menyimpulkan, jangan tergesa mengarsipkan, tetapi hadir dan rasakan. Karena Majalengka sejati tidak untuk ditentukan, tetapi untuk didengarkan, dihidupi, dan diwariskan melalui ziarah makna yang tak pernah selesai.

Majalengka adalah nama yang akan terus tumbuh, bukan karena ditetapkan, tetapi karena terus ditulis—dengan kesadaran, cinta, dan kejujuran. Sejarahnya bukan tentang kemenangan, melainkan tentang keberanian untuk tidak melupakan. Ia bukan tentang kelahiran yang dibakukan dalam tanggal, tetapi tentang kehidupan yang menyatu dengan ruang dan makna. Dan selama masih ada yang menulisnya dari dalam, Majalengka akan terus menjadi: bukan sebagai legenda masa lalu, tetapi sebagai ruang batin yang terus bernapas di tubuh bangsa.

LAMPIRAN:

Sejarah Majalengka: Antara Mithos, Realita dan Fakta

Oleh: Endi Rochaendi

Pengantar

Kabupaten Majalengka merupakan entitas wilayah yang memiliki lintasan sejarah panjang dan kompleks, tercermin dari periodisasi yang telah dilaluinya. Jejak historis ini mencakup masa prasejarah Hindu-Buddha, masa kerajaan sekitar abad ke-15, masa kekuasaan Mataram (1601-1706), era dominasi VOC (1706-1791), serta masa kolonial Belanda/Hindia Belanda yang berlangsung sejak 1791 hingga awal tahun 1942. Perjalanan sejarah tersebut kemudian berlanjut ke masa pendudukan Jepang (awal 1942 - 15 Agustus 1945) dan akhirnya memasuki fase kemerdekaan yang dimulai sejak 17 Agustus 1945 hingga kini. Walaupun sejarah panjang tersebut seharusnya dapat menjadi fondasi kuat bagi pemaknaan jati diri daerah, kenyataannya masih terdapat kekosongan dalam pengungkapan historis yang komprehensif mengenai Majalengka.

Ketidakutuhan narasi sejarah Majalengka tidak semata disebabkan oleh keterbatasan sumber, tetapi juga karena sebagian periodenya masih diselimuti oleh "sisi gelap" yang belum sepenuhnya terurai. Hal ini terutama tampak pada masa kerajaan, yang kisah-kisahannya lebih banyak dibalut oleh mitos dan legenda. Absennya artefak fisik seperti petilasan

atau peninggalan arkeologis menambah kaburnya verifikasi historis masa tersebut, sehingga narasi tentang Majalengka pada era kerajaan kerap mengandung unsur kontroversial dan spekulatif.

Situasi ini, dalam analisis lebih lanjut, dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, rendahnya perhatian masyarakat Majalengka sendiri terhadap sejarah lokal menyebabkan minimnya tuntutan kolektif akan kejelasan historis. Kedua, secara struktural dan akademik, masih sedikit sejarawan yang memiliki minat dan kapasitas untuk menggali sejarah Majalengka secara serius. Selain karena keterbatasan jumlah ahli, kegiatan riset sejarah daerah memerlukan biaya, waktu, serta akses terhadap sumber-sumber primer yang sering kali tersebar atau tidak terdokumentasi dengan baik. Meskipun beberapa upaya penelitian telah dilakukan, sebagian besar hanya mampu mengulas aspek-aspek tertentu secara garis besar tanpa menjangkau integrasi lintas periode yang utuh.

Dalam konteks inilah penting untuk menegaskan kembali fungsi sejarah yang melampaui aspek informatif semata. Sejarah memikul tanggung jawab edukatif dan pragmatik, terutama bagi pemerintah daerah yang ingin membangun fondasi identitas dan arah pembangunan yang berakar pada kearifan lokal. A. Sobana Hardjasaputra menekankan bahwa sejarah adalah proses kausalitas yang berkesinambungan; kehidupan masa kini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu, dan masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi masa kini.

Oleh karena itu, belajar dari sejarah bukanlah sekadar aktivitas retrospektif, tetapi sebuah upaya menuju keberlanjutan yang sadar dan terarah.

Lebih jauh, Hardjasaputra mengingatkan bahwa sejarah adalah “obor kebenaran” – penuntun agar kita tidak menjadi masyarakat yang “pareumeun obor”, yaitu kehilangan arah dalam kegelapan ketidaktahuan akan asal-usul. Dengan demikian, menjadi niscaya bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama masyarakatnya untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sejarah lokal. Penguatan kesadaran historis tidak hanya akan membangun identitas yang lebih solid, tetapi juga menjadi dasar reflektif dalam merancang kebijakan publik yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai budaya serta pengalaman kolektif masyarakat Majalengka.

Asal-Usul dan Arti Kata Majalengka

Nama “Majalengka” mulai memperoleh legitimasi administratif dan dikenal secara luas sejak diterbitkannya *Staatsblad* Nomor 7 yang memuat ketentuan perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Transformasi nomenklatur tersebut disahkan melalui *Besluit* Gubernur Jenderal D. J. de Eerens No. 2 tertanggal 11 Februari 1840. Selain mengganti nama kabupaten, Pemerintah Hindia Belanda juga memindahkan pusat pemerintahan dari Sindangkasih ke wilayah yang kemudian secara resmi disebut Majalengka. Hal ini sebagaimana termaktub dalam dokumen

resmi: *"Ten derde te bepalen, dat het regentschap Madja (residentie Cheribon) alsmede de zetel van dit Regentschap, thans genaamd Sindang-Kassie, voortaan den naam zullen voeren van: MADJA-LENGKA"*. Pada saat keputusan ini diberlakukan, jabatan Bupati Majalengka diemban oleh Raden Adipati Aria Kartadiningrat, cucu dari Kyai Bestaman, seorang tokoh asal Semarang yang berjasa bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Sebelum perubahan tersebut, Kabupaten Majalengka dikenal sebagai Kabupaten Maja, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tertanggal 5 Januari 1819, Nomor 23. Dalam keputusan tersebut, wilayah Keresidenan Cirebon dibagi menjadi lima kabupaten, yakni Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan. Penetapan itu juga mencantumkan batas-batas teritorial masing-masing kabupaten secara rinci, termasuk untuk Kabupaten Maja. Wilayahnya dibatasi oleh jalan utama dari Karangsambong ke arah timur hingga Sungai Cipicung dekat Jamblang, mengikuti aliran sungai ke hulu hingga Desa Lengkong, lalu menelusuri perbatasan Kabupaten Rajagaluh hingga puncak Gunung Ciremai, kemudian ke selatan hingga Sungai Cijulang, dan berlanjut ke barat dan utara hingga kembali ke Karangsambong. Uraian batas ini menunjukkan konfigurasi wilayah administratif yang mencakup daerah-daerah yang kini dikenal sebagai bagian integral dari Kabupaten Majalengka.

Dengan demikian, secara historis, nama "Majalengka" belum dikenal sebelum tahun 1819. Pada masa itu, wilayah

yang kini disebut Kabupaten Majalengka masih terdiri dari dua entitas mandiri, yakni Kabupaten Talaga dan Kabupaten Rajagaluh. Ketika Kabupaten Maja didirikan, cakupan wilayahnya mencakup kedua kabupaten tersebut, yang penentuan batasnya mengacu pada batas-batas Talaga dan Rajagaluh. Sebagai pengakuan atas kepemimpinannya di Talaga, Komisaris Jenderal mengangkat Pangeran Sacanata II sebagai Bupati Maja. Namun, penunjukan tersebut tidak berlangsung lama karena Pangeran Sacanata II menolak dipindahkan dari Talaga ke Maja, yang kemudian berujung pada pemberhentiannya dan pemberian kompensasi berupa 60 bau lahan persawahan di Desa Sindang dan Banjaransari, Kecamatan Cikijing.

Untuk menjamin kelangsungan administrasi pemerintahan, jabatan Bupati Maja selanjutnya diamanahkan kepada Raden Adipati Denda Negara. Berdasarkan reorganisasi tersebut, Kabupaten Maja terdiri atas tiga distrik utama: Talaga, Sindangkasih, dan Rajagaluh, dengan luas wilayah mencapai 625 pal persegi atau setara dengan 1.419,3 km². Adapun batas-batas wilayah administratifnya meliputi Sumedang di sebelah barat, Cirebon dan Kuningan di timur, Indramayu di utara, serta Galuh dan Sukapura di sebelah selatan.

Seiring perkembangan sistem pemerintahan kolonial, pada tahun 1830, Kabupaten Maja mengalami pemekaran administratif menjadi enam distrik: Maja, Sindangkasih, Rajagaluh, Talaga, Palimanan, dan Kadongdong. Namun,

perubahan struktural terus berlangsung. Pada tahun 1850-an, Distrik Jatiwangi dibentuk, sementara Distrik Kadongdong dihapus. Memasuki dekade 1860-an, Distrik Palimanan dikeluarkan dari wilayah administratif Kabupaten Majalengka dan dialihkan ke Kabupaten Cirebon. Pemindahan ini didasarkan pada pertimbangan geografis dan efisiensi administratif, mengingat kedekatan letak Palimanan dengan pusat kekuasaan Kabupaten Cirebon. Kebijakan ini dikuatkan melalui *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 24 Mei 1862.

Rekonstruksi sejarah administratif ini tidak hanya menunjukkan dinamika pembentukan identitas wilayah Majalengka, tetapi juga menggambarkan proses politik kolonial dalam membentuk struktur pemerintahan lokal. Transformasi dari Maja ke Majalengka bukan sekadar perubahan nama, melainkan cerminan dari strategi kolonial dalam memetakan ulang kekuasaan dan wilayah demi kepentingan administratif dan pengawasan. Pemahaman terhadap asal-usul nama Majalengka ini, dengan demikian, menjadi bagian penting dalam mengungkap identitas historis yang lebih luas dari daerah tersebut.

Pandangan historis mengenai asal-usul nama "Majalengka" memperoleh pematangan melalui analisis Tatang M. Amirin (2010), yang mengemukakan beberapa poin penting terkait dinamika penamaan dan pemindahan ibu kota Kabupaten Maja. Pertama, ketika Pemerintah Hindia Belanda berkehendak memindahkan pusat pemerintahan dari daerah

Maja, dilakukan pencarian wilayah baru yang dianggap ideal dan strategis. Pilihan akhirnya jatuh pada bagian barat laut Desa Sindangkasih. Wilayah ini dipandang memenuhi kriteria administratif dan geografis yang diinginkan, dan oleh karenanya dipisahkan dari Sindangkasih serta diberi nama baru yang mengikuti nomenklatur kabupaten.

Kedua, perubahan lokasi pusat pemerintahan turut mendorong peninjauan ulang terhadap nama kabupaten. Nama "Maja" yang selama ini digunakan dianggap kurang representatif dalam konfigurasi administratif yang baru. Pilihan alternatif yang semula mengarah pada penggunaan istilah "Majapahit" akhirnya ditolak, karena mengandung risiko kebingungan historis dan potensi polemik akibat kemiripannya dengan nama kerajaan besar dalam sejarah Nusantara. Untuk menghindari konflik simbolik, digunakan nama alternatif "Majalengka", yang dalam satu penafsiran etimologis berarti "pahit" – merujuk pada kata *lengka* yang bermakna demikian dalam bahasa daerah. Menurut Amirin, nama ini juga merupakan varian penyebutan Majapahit yang telah mengalami pelunturan dalam pelafalan sehari-hari masyarakat dan dalam sumber-sumber tertentu, meski kini jarang digunakan secara eksplisit dalam merujuk pada kerajaan tersebut.

Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari penetapan nama kabupaten yang baru, wilayah administratif yang semula merupakan bagian dari Desa Sindangkasih secara resmi diubah menjadi "desa" atau kota Majalengka dan ditetapkan

sebagai ibu kota Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Februari 1840. Keempat, meskipun sebagian wilayahnya telah dimekarkan, Desa Sindangkasih tetap dipertahankan sebagai satuan administratif tersendiri dengan nama yang tidak mengalami perubahan.

Dari kronologi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum penerbitan *Staatsblad* Nomor 7 tahun 1840, nama "Majalengka" belum dikenal dalam nomenklatur resmi maupun dalam penggunaan administratif. Nama tersebut muncul sebagai produk rekayasa administratif kolonial yang bertujuan menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan kontrol teritorial yang lebih efisien. Oleh karena itu, berbagai tafsir yang mengaitkan asal-usul nama Majalengka dengan frasa "Maja-Langka"—yang dalam bahasa Jawa berarti "maja tidak ada"—memerlukan kehati-hatian metodologis. Sejauh ini, narasi tersebut lebih bersifat folkloristik daripada akademis karena belum didukung oleh dokumentasi atau evidensi historis yang valid dan terverifikasi secara ilmiah.

Kisah mengenai ucapan "maja langka" yang konon diucapkan oleh Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah atas mandat Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja di wilayah Kerajaan Sindangkasih memang hidup dan beredar luas dalam masyarakat Majalengka. Dalam narasi lisan tersebut, ketiadaan buah maja melahirkan ungkapan spontan yang kemudian dipercaya sebagai asal muasal nama Majalengka. Akan tetapi, hingga saat ini belum ditemukan

catatan tertulis atau sumber akademik yang kredibel untuk mengonfirmasi kisah ini sebagai fakta historis. Oleh sebab itu, narasi ini lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari khazanah mitologi lokal yang memperkaya imajinasi kolektif masyarakat Majalengka, bukan sebagai pijakan historiografis yang definitif.

Nama Majalengka semakin memperoleh pengakuan formal setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang menetapkan struktur administratif kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam ketetapan tersebut, Majalengka secara resmi diakui sebagai salah satu kabupaten bersama wilayah lain seperti Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, dan Indramayu. Legalitas ini menjadi tonggak penting dalam penguatan posisi Majalengka dalam struktur pemerintahan provinsial dan nasional.

Sejalan dengan diberlakukannya regulasi tersebut, R.M. Nuratmadibrata diangkat sebagai Bupati Majalengka pertama dalam era pasca-pembentukan provinsi dan menjabat hingga tahun 1957. Pada periode awal ini, Kabupaten Majalengka terdiri dari empat kewedanaan utama—yakni Majalengka, Jatiwangi, Talaga, dan Rajagaluh—serta mencakup 13 kecamatan dan 258 desa. Setelah masa kepemimpinan Nuratmadibrata berakhir, estafet pemerintahan dilanjutkan oleh H. Aziz Halim hingga tahun 1960, dan kemudian

diteruskan oleh H.R.A. Sutisna. Perkembangan kepemimpinan ini turut membentuk dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Majalengka, yang terus berkembang hingga kini.

Dengan demikian, asal-usul nama Majalengka tidak hanya merefleksikan proses administratif dan politis yang kompleks pada masa kolonial, tetapi juga mencerminkan negosiasi antara realitas sejarah dan konstruksi identitas lokal yang terus bergulir dalam memori kolektif masyarakatnya.

Mitos sebagai Refleksi Mentalitas dan Ingatan Kolektif Masyarakat Majalengka

Masyarakat Kabupaten Majalengka memiliki khazanah mitologis yang kaya, mencerminkan dinamika budaya dan pola pikir masyarakat pada suatu periode tertentu. Mitos-mitos tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau pewarisan narasi turun-temurun, tetapi juga merepresentasikan sistem nilai, persepsi dunia, serta upaya masyarakat dalam memahami asal-usul ruang hidupnya. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penamaan tempat, benda-benda sakral, maupun praktik budaya yang masih lestari hingga kini. Salah satu mitos yang paling menonjol adalah kisah asal-usul nama "Majalengka", yang bersumber dari *Wawacan Sejarah Karatuan Sindangkasih*, sebuah teks naratif yang hidup dalam tradisi lisan masyarakat setempat.

Dalam karya penelitiannya, Nina Lubis (2012) mengangkat narasi rakyat yang menyebutkan bahwa pada

penghujung abad ke-15, wilayah Sindangkasih diperintah oleh seorang ratu bernama Nyi Rambutkasih. Ia disebut-sebut sebagai keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, dan dengan demikian memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Sunda, seperti Nyi Rarasantang, Prabu Kiansantang, dan Prabu Walangsungsang. Meski ketiga saudaranya telah memeluk agama Islam, Nyi Rambutkasih tetap setia memegang teguh ajaran Hindu yang menjadi bagian dari identitas spiritual dan kebudayaannya.

Kisah ini berlanjut dengan keinginan Nyi Rambutkasih untuk menemui saudaranya, Raden Munding Sariangeng, yang pada masa itu memerintah wilayah Talaga. Namun, niat tersebut tidak terlaksana karena ketika tiba di perbatasan Majalengka dan Talaga, ia mendengar bahwa wilayah Talaga telah berada di bawah pengaruh Islam. Hal ini membuatnya mengurungkan niat dan memutuskan untuk menetap di Sindangkasih, memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup daerah seperti Kulur, Kawunghilir, Cieurih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati.

Di bawah kepemimpinan Nyi Rambutkasih, Kerajaan Sindangkasih dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan stabil. Kehidupan masyarakat berlangsung dalam suasana aman dan sejahtera, ditopang oleh sistem pertanian yang mapan. Tumbuhan maja tumbuh subur di wilayah ini dan diyakini memiliki khasiat menyembuhkan demam. Selain itu, keberhasilan kerajaan dalam membudidayakan kapas dan

pohon aren turut mencerminkan kemandirian ekonomi warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian dan gula. Narasi ini menggarisbawahi peran perempuan dalam struktur kekuasaan dan produksi ekonomi lokal pada masa itu.

Kendati demikian, keberlangsungan Kerajaan Sindangkasih tidak mampu bertahan menghadapi gelombang Islamisasi yang diprakarsai oleh para wali. Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Muhammad beserta istrinya, Nyi Siti Armilah, ke wilayah tersebut dengan dua misi utama: mencari pohon maja yang dibutuhkan untuk mengobati wabah demam di Cirebon dan menyebarkan ajaran Islam ke daerah yang masih mempertahankan kepercayaan lama. Namun, karena Nyi Rambutkasih diduga menyembunyikan keberadaan pohon maja, upaya pertama tidak membuahkan hasil.

Sementara Pangeran Muhammad melanjutkan pencariannya, Nyi Siti Armilah mendekati Nyi Rambutkasih dengan maksud mengajak memeluk Islam. Terjadi dialog penuh ketegangan di antara dua perempuan dengan latar keyakinan dan pandangan dunia yang berbeda. Ketika Nyi Siti Armilah mengingatkan tentang kematian, Nyi Rambutkasih justru menyatakan bahwa dirinya tidak akan mati. Pernyataan tersebut menjadi klimaks narasi, yang dilanjutkan dengan "ngahiang"-nya sang ratu di daerah Cilutung – sebuah bentuk lenyap secara spiritual yang dalam

tradisi Sunda sering dimaknai sebagai kembali kepada alam gaib.

Setelah peristiwa itu, Nyi Siti Armilah menetap di wilayah tersebut dan berhasil mengislamkan masyarakat Sindangkasih, menandai berakhirnya eksistensi Kerajaan Sindangkasih sebagai entitas politik dan spiritual. Meskipun kerajaan itu telah lama lenyap secara historis, jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Majalengka. Beberapa situs seperti Sumur Sindangkasih, Sumur Sundajaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu tempat semedi masih dihormati sebagai *patilasan*, tempat keramat yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan dianggap angker.

Narasi mitologis ini, meskipun tidak dapat dibuktikan secara empirik dalam tradisi historiografi modern, tetap menyimpan nilai kultural dan simbolik yang tinggi. Ia merepresentasikan relasi antara identitas lokal, spiritualitas, dan sejarah; serta menunjukkan bagaimana masyarakat membangun kontinuitas makna melalui cerita-cerita lisan yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, mitos bukan sekadar khayalan, melainkan refleksi dari struktur mentalitas dan sistem nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Majalengka.

Rekonstruksi Historiografis Hari Jadi Kabupaten Majalengka: Antara Legenda dan Validitas Sejarah

Dalam beberapa forum diskusi terbatas yang berlangsung secara informal, muncul dorongan dari sejumlah

rekan sejawat kepada penulis untuk meninjau ulang aspek kesejarahan Kabupaten Majalengka, terutama terkait penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai Hari Jadi Kabupaten Majalengka. Revisi terhadap narasi sejarah, termasuk dalam hal penentuan hari jadi suatu wilayah administratif, tidak semestinya dianggap sebagai tindakan tabu. Sebaliknya, dalam perspektif akademik, langkah tersebut merupakan keniscayaan metodologis guna menjamin obyektivitas sejarah serta mencegah berlangsungnya kekeliruan naratif yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak 32 tahun yang lalu, melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1982, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menetapkan 7 Juni 1490 sebagai Hari Jadi, dengan merujuk pada kisah kedatangan Pangeran Muhammad dan istrinya, Nyi Siti Armilah, ke wilayah Karatuan Sindangkasih. Keduanya, menurut narasi tersebut, diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari pohon maja serta mengislamkan daerah tersebut.

Namun demikian, dasar penetapan tanggal tersebut menimbulkan keraguan yang serius dari sudut pandang historiografi. Kisah Karatuan Sindangkasih dan tokoh-tokoh seperti Nyi Rambutkasih, Pangeran Muhammad, serta Nyi Siti Armilah kerap dikategorikan sebagai legenda atau mitos lokal yang belum terverifikasi melalui data historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tidak ditemukan bukti primer, sekunder, maupun tersier yang mendukung validitas historis cerita tersebut. Meski kisah tersebut hidup dan terpelihara dalam memori kolektif

masyarakat, menjadikannya sebagai rujukan tunggal untuk menandai berdirinya kabupaten tentu menimbulkan persoalan metodologis yang substansial. Sebab, jika Kabupaten Majalengka memang sudah berdiri sejak lima abad yang lalu, pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa tidak ditemukan peninggalan fisik berupa prasasti, struktur kota, lambang kekuasaan, situs pemakaman kerajaan, atau bahkan dokumen administratif yang menandai keberadaannya?

Secara konseptual, cerita rakyat tidak serta-merta dapat dijadikan rujukan kronologis untuk menandai berdirinya suatu entitas administratif. Dalam studi folkloristik, cerita rakyat terbagi menjadi tiga kategori: *mite* (cerita yang dianggap benar terjadi dan bersifat sakral), *legenda* (cerita yang diyakini pernah terjadi tetapi tidak bersifat suci), dan *dongeng* (cerita fiktif yang tidak mengacu pada ruang dan waktu tertentu). Agar sebuah narasi lisan dapat diangkat sebagai bagian dari sejarah, diperlukan uji validasi historiografi, antara lain melalui metode *cross-checking* dengan data sejaman yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, perlu ditanyakan secara kritis: dalam klasifikasi mana seharusnya narasi tentang Nyi Rambutkasih dan kedatangan utusan Sunan Gunung Jati itu ditempatkan? Apakah bukan sekadar upaya spekulatif yang dipaksakan sebagai dasar historis?

Permasalahan metodologis ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan kronologi penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Berdasarkan *Babad Cirebon, Naskah*

Wangsakerta, dan *Babad Sumedang*, penyebaran Islam di wilayah tersebut dipelopori oleh Pangeran Cakrabuana dan Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Raja Cirebon pada tahun 1479 M, dan dikukuhkan sebagai wali tiga tahun kemudian. Proses Islamisasi wilayah sekitar – termasuk Rajagaluh pada tahun 1528 dan Katumenggungan Talaga pada tahun 1530 – terjadi jauh setelah tahun 1490. Maka, menjadi tidak masuk akal secara historis apabila diklaim bahwa Karatuan Sindangkasih telah diislamkan lebih awal, bahkan 46 tahun sebelumnya. Terlebih jika narasi ini hanya bersumber pada Candrasangkala “Sindang Kasih Sugih Mukti” (1412 Saka) yang ditafsirkan dengan penambahan angka arbitrer menjadi 1490 Masehi.

Oleh karena itu, demi ketepatan historis, sudah sepatutnya penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka ditinjau kembali secara kritis. Tanggal 7 Juni 1490, meskipun memiliki nilai simbolik dalam narasi masyarakat, tidak dapat dijadikan dasar yang sah secara ilmiah untuk menetapkan awal mula berdirinya kabupaten. Tanggal tersebut, pada dasarnya, hanya merujuk pada kisah kedatangan Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah ke Karatuan Sindangkasih – sebuah peristiwa yang belum terbukti sebagai tonggak administratif. Selain itu, menurut kajian A. Sobana Hardjasaputra (2010), pada abad ke-15 belum ada struktur pemerintahan kabupaten di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, penggunaan cerita rakyat sebagai dasar penetapan

hari jadi berpotensi mengandung dua bentuk kesalahan mendasar: kesalahan verifikasi (pembuktian) dan kesalahan interpretasi (penafsiran).

Sebagai alternatif yang lebih sah dan dapat dipertanggungjawabkan, penetapan hari jadi seharusnya mengacu pada dua momentum historis yang memiliki dasar dokumen resmi. Pertama, berdirinya Kabupaten Maja melalui Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Nomor 23 tanggal 5 Januari 1819, yang membagi wilayah Keresidenan Cirebon menjadi lima kabupaten: Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan. Momentum ini secara faktual menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Majalengka. Kedua, perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka melalui *Besluit* Gubernur Jenderal D.J. de Eerens Nomor 2 tanggal 11 Februari 1840. Tanggal ini menandai penetapan resmi nama "Majalengka" sebagai identitas administratif yang digunakan hingga kini.

Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan tanggal 11 Februari 1840 akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat – seolah-olah pemerintahan kabupaten baru dimulai pada tahun tersebut – perlu ditegaskan bahwa penetapan ini adalah lanjutan langsung dari eksistensi Kabupaten Maja. Argumentasi ini justru memiliki kekuatan historis karena didukung oleh dokumen resmi kolonial yang terverifikasi.

Dengan demikian, fakta pembentukan Kabupaten Maja dan transformasinya menjadi Kabupaten Majalengka adalah

pijakan historis yang valid, meskipun berasal dari masa kolonial. Dalam logika akademik, kebenaran sejarah tidak bergantung pada siapa yang mencatatnya, melainkan pada integritas dan keabsahan sumbernya. Maka, pengakuan terhadap fakta tersebut bukanlah bentuk afirmasi terhadap kolonialisme, tetapi komitmen terhadap obyektivitas sejarah. Revisi terhadap Hari Jadi Kabupaten Majalengka bukan berarti menanggalkan identitas lokal, melainkan memperkuatnya melalui pijakan historis yang kokoh dan dapat diuji secara ilmiah.

Penutup: Menimbang Ulang Sejarah, Menata Ulang Kesadaran

Melalui pemaparan panjang ini, terlihat dengan gamblang bahwa sejarah Kabupaten Majalengka adalah suatu lanskap yang kompleks, di mana mitos, realitas sosial, dan fakta administratif saling berkelindan dalam membentuk identitas kolektif masyarakatnya. Sejarah Majalengka bukan hanya kumpulan tanggal dan tokoh, melainkan ruang kontestasi antara narasi tradisional yang hidup dalam memori rakyat dan rekonstruksi historiografis yang menuntut verifikasi ilmiah.

Mitos seperti kisah Nyi Rambutkasih, Pangeran Muhammad, dan Nyi Siti Armilah memiliki nilai kultural yang tidak dapat disangkal. Ia adalah ekspresi dari cara masyarakat memaknai masa lalu, membangun identitas, dan mempertahankan kebersamaan melalui narasi simbolik.

Namun demikian, ketika mitos dijadikan dasar tunggal untuk penetapan tonggak sejarah formal seperti Hari Jadi Kabupaten, maka diperlukan kehati-hatian metodologis. Sejarah sebagai disiplin ilmiah tidak hanya menuntut cerita yang memikat, tetapi juga sumber yang sah dan dapat diuji secara intersubjektif.

Dalam hal ini, penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai Hari Jadi Kabupaten Majalengka perlu dikaji ulang secara kritis. Tidak adanya bukti arkeologis, administratif, maupun dokumenter yang menyokong keberadaan struktur pemerintahan kabupaten pada abad ke-15 membuat narasi tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari warisan mitologis, bukan sejarah institusional. Sebaliknya, dokumen resmi kolonial seperti *Besluit* Gubernur Jenderal tahun 1840 dan SK Komisaris Jenderal Hindia Belanda tahun 1819, meskipun lahir dari kerangka kekuasaan kolonial, justru memberikan titik referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara historis mengenai awal berdirinya Kabupaten Maja – cikal bakal Majalengka.

Oleh karena itu, penulisan ulang sejarah bukanlah tindakan pembongkaran identitas, melainkan ikhtiar pemurnian narasi. Revisi sejarah tidak menghapus nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi justru menyinari kembali fondasi budaya dengan lentera kritis. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama masyarakat sipil dan akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memulihkan ketepatan sejarah, bukan demi

romantisme masa lalu, melainkan sebagai basis etis dan strategis bagi pembangunan jati diri Majalengka yang lebih autentik dan berorientasi masa depan.

Menimbang ulang sejarah berarti menata ulang kesadaran. Hanya dengan keberanian untuk merevisi yang keliru dan menguatkan yang sah, Majalengka akan tumbuh bukan sebagai daerah yang besar karena legenda, tetapi sebagai wilayah yang berkarakter karena kejujurannya dalam merawat kebenaran sejarah. Sebab, sebagaimana diingatkan A. Sobana Hardjasaputra, sejarah adalah *obor kebenaran* – dan tanpa cahaya obor itu, kita hanya akan berjalan dalam bayang-bayang masa lalu yang salah dibaca.

Majalengka, 5 Juni 2014

Sejarah Majalengka: Kontroversi Yang Tetap Dipelihara.

Oleh: Endi Rochaendi

Pengantar

Setiap tanggal 7 Juni, masyarakat Kabupaten Majalengka memperingati hari jadi daerahnya – sebuah ritus yang telah dilembagakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 dan dimaknai secara luas sebagai penanda identitas kolektif. Tanggal 7 Juni 1490 yang ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Majalengka tidak hanya dimaknai sebagai angka administratif, tetapi juga dimitoskan sebagai tonggak sejarah panjang yang menempatkan Majalengka lebih tua dari kota-kota besar lain seperti Jakarta (1527) dan Ciamis (1642). Penetapan ini seolah menautkan Majalengka ke dalam arus utama historiografi klasik Nusantara, yang sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh, Sunda, dan Pajajaran. Akan tetapi, dari sudut pandang historiografi kritis, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan metodologis yang mendalam. Tidak ditemukan satu pun sumber primer, prasasti, atau manuskrip kontemporer yang secara sah mendukung tanggal tersebut sebagai awal berdirinya entitas administratif bernama Majalengka. Narasi-narasi yang dijadikan acuan, seperti dongeng “majae-langka” dan kisah spiritual “ngahiangnya Ratu Ambet Kasih”, lebih merepresentasikan produk memori kolektif dan sistem

pengetahuan mitologis daripada struktur sejarah faktual yang diverifikasi secara akademik.

Kritik terhadap validitas kronologi tersebut semakin kuat ketika ditempatkan dalam konteks sejarah Islamisasi di wilayah Cirebon. Berdasarkan *Babad Cirebon* dan Naskah *Wangsakerta*, proses Islamisasi struktural di wilayah ini dimulai pasca pengangkatan Syeikh Syarif Hidayatullah sebagai Raja Cirebon pada 1479 dan pengukuhanannya sebagai Sunan Gunung Jati pada 1482. Wilayah Rajagaluh dan Katumenggungan Talaga, dua entitas penting yang berbatasan langsung dengan Sindangkasih, baru mengalami Islamisasi pada tahun 1528 dan 1530, menandakan bahwa narasi mengenai Islamisasi Sindangkasih pada tahun 1490 oleh Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah mengandung kontradiksi kronologis yang signifikan. Argumen akademik Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra memperkuat posisi ini, menyatakan bahwa bentuk pemerintahan kabupaten tidak dikenal di Tatar Sunda pada akhir abad ke-15 dan bahwa entitas Majalengka adalah produk administratif dari struktur kolonial Hindia Belanda, yakni kelanjutan dari Kabupaten Maja. Di tengah ketegangan antara narasi simbolik dan bukti historis ini, tantangan terbesar bagi Majalengka adalah merumuskan hari jadi yang bukan hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai kultural yang hidup dalam kesadaran masyarakatnya.

Sejarah Majalengka: Kontroversi yang Tetap Dipelihara

Penetapan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 adalah sebuah bentuk institusionalisasi sejarah yang sekaligus menjadi ladang kontestasi antara mitos dan fakta. Secara administratif, keputusan ini memberikan kepastian simbolik atas identitas historis Majalengka. Namun secara akademik, fondasi naratif yang mendasarinya belum sepenuhnya dapat dibenarkan. Ketika tanggal tersebut diposisikan sebagai penanda kelahiran sebuah kabupaten, ia seakan-akan menegaskan kompleksitas kronologis dan struktur pemerintahan yang berlaku pada akhir abad ke-15. Dalam konteks ini, kehadiran bentuk kabupaten sebagai unit administratif belumlah eksis. Wilayah Majalengka masih berada di bawah otoritas Kerajaan Sunda, yang terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil seperti Rajagaluh dan Talaga. Belum ada struktur administratif yang menyerupai sistem pemerintahan kabupaten sebagaimana kita kenal saat ini.

Ketidakjelasan sumber primer—baik berupa naskah, prasasti, maupun artefak yang sahih—menjadikan narasi hari jadi Majalengka dibangun di atas fondasi folklor yang bersifat lisan. Legenda seperti "majae-langka", mitos "ngahiangnya Ratu Ambet Kasih", atau kisah "enteng pasosore" tidak memiliki kredibilitas metodologis yang kuat untuk dijadikan basis historiografis. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami perbedaan antara sejarah sebagai ilmu dengan cerita rakyat sebagai konstruksi kolektif yang bersifat

simbolik. Perlu dicatat bahwa dalam tradisi akademik, sejarah menuntut verifikasi bukti, kronologi logis, serta analisis sumber secara kritis. Oleh karena itu, mempertahankan tanggal 7 Juni 1490 sebagai hari jadi Majalengka tanpa bukti empiris yang memadai justru akan memperpanjang polarisasi tafsir dan melemahkan integritas sejarah lokal.

Lebih problematik lagi, narasi yang menyatakan bahwa Sindangkasih telah diislamkan pada tahun 1490 oleh Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah bertentangan dengan kronologi penyebaran Islam berdasarkan sumber-sumber primer seperti *Babad Cirebon* dan *Naskah Wangsakerta*. Menurut dokumen-dokumen tersebut, proses Islamisasi di wilayah Cirebon baru mengalami institusionalisasi pada penghujung abad ke-15, dimulai oleh Pangeran Cakrabuana dan dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Bahkan, Rajagaluh dan Talaga baru diislamkan pada tahun 1528 dan 1530. Oleh karena itu, klaim bahwa Sindangkasih telah lebih dahulu diislamkan secara struktural menjadi sangat sulit untuk dibuktikan secara akademik, sebab bertentangan dengan nalar geografis, genealogis, dan temporal.

Gugatan atas validitas klaim ini secara eksplisit dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra, seorang sejarawan terkemuka, yang menegaskan bahwa pada tahun 1490 belum ada bentuk pemerintahan kabupaten di wilayah Majalengka. Beliau menyatakan bahwa Kabupaten Majalengka adalah kelanjutan administratif dari Kabupaten

Maja, yang secara resmi dibentuk oleh otoritas Hindia Belanda berdasarkan dokumen Staatsblad No. 7 Tahun 1840 dan Besluit Gubernur Jenderal D.J. de Eerens tertanggal 11 Februari 1840. Dokumen ini tidak hanya menyebutkan perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, tetapi juga menetapkan pemindahan pusat pemerintahan dari Sindangkasih ke Majalengka. Fakta ini merupakan referensi historis yang dapat diverifikasi dan telah diakui dalam konteks administrasi kolonial yang tertib dan terdokumentasi.

Namun di sinilah letak paradoks kebudayaan: resistensi terhadap sumber kolonial sebagai basis sejarah lebih didorong oleh sensitivitas simbolik ketimbang pertimbangan epistemologis. Dalam memori kolektif masyarakat, kolonialisme merupakan simbol penindasan, sehingga menggunakan dokumen kolonial sebagai dasar hari jadi dianggap mengandung kekuatan yang bertentangan secara moral. Padahal, dari perspektif historiografi, fakta tetaplah fakta, tidak peduli dari mana sumber itu berasal. Keberanian akademik untuk mengakui kebenaran, meskipun berasal dari era kolonial, justru menjadi tanda kedewasaan budaya dalam mengelola memori sejarahnya.

Meski begitu, sejarah bukanlah semata urusan arsip dan kronologi. Sejarah adalah ladang makna tempat masyarakat membangun jati diri, menyusun memori kolektif, dan menegosiasikan warisan simbolik yang memperkuat identitas kultural. Oleh karena itu, hari jadi suatu daerah tidak hanya

dituntut sah secara historis, tetapi juga harus resonan secara emosional dan simbolik. Di sinilah titik temu antara historiografi dan kultur—antara fakta akademik dan kebutuhan kolektif. Ketika dua ranah ini tidak saling berjumpa, lahirlah semacam disonansi naratif yang berujung pada pemeliharaan kontroversi secara terus-menerus.

Kontroversi sejarah Majalengka tidak semata-mata berkuat pada problematika faktual kronologis, melainkan menyimpan lapisan makna yang jauh lebih kompleks terkait relasi dialektis antara masyarakat dan narasi sejarah yang mereka hayati. Dalam konteks ini, sejarah tidak hanya hadir sebagai serangkaian peristiwa lampau yang harus dicatat secara akurat, tetapi juga sebagai medan artikulasi identitas kultural yang terus-menerus dinegosiasikan. Ketika tanggal 7 Juni 1490 terus dirayakan secara masif dan emosional oleh masyarakat, meskipun keabsahannya masih diperdebatkan, hal itu mencerminkan betapa pentingnya peran simbol dalam membentuk dan meneguhkan memori kolektif. Sejarah dalam praktik kultural masyarakat sering kali lebih berfungsi sebagai refleksi identitas daripada sebagai rekonstruksi objektif atas masa lalu.

Kekuatan simbolik tanggal 7 Juni sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka telah melampaui batas-batas kronologi dan validitas akademik, menjelma menjadi sebuah ritus sosial yang mengafirmasi eksistensi kolektif komunitas. Perayaan tersebut menjadi mekanisme sosial untuk merawat rasa memiliki dan menumbuhkan kebanggaan terhadap asal-

usul lokal, bahkan ketika bukti historis yang mendukungnya belum terverifikasi secara memadai. Dalam proses ini, masyarakat secara tidak langsung menjadikan sejarah sebagai wahana pembentukan makna bersama, yang tidak selalu membutuhkan legitimasi ilmiah untuk mendapatkan validitas sosial. Akan tetapi, problem muncul ketika ritus ini dianggap sebagai satu-satunya kebenaran sejarah, sehingga menutup ruang bagi dialog historiografis yang lebih kritis dan terbuka terhadap revisi serta pembaruan makna.

Ketimpangan antara sejarah akademik dan sejarah simbolik ini berpotensi menjadi ruang kosong yang rawan diisi oleh kepentingan ideologis tertentu. Ketika narasi yang belum terbukti kebenarannya dilembagakan secara resmi dan direproduksi tanpa refleksi, maka sejarah dapat tergelincir menjadi alat legitimasi kekuasaan atau instrumen mobilisasi identitas yang eksklusif. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya mengaburkan kebenaran sejarah, tetapi juga dapat menghambat tumbuhnya kesadaran sejarah yang sehat dan kritis. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan – baik akademisi, birokrat, budayawan, maupun masyarakat sipil – untuk membangun dialog yang produktif antara aspek simbolik dan aspek faktual sejarah. Sejarah Majalengka harus dibaca bukan semata sebagai warisan naratif, tetapi sebagai ruang kontestasi makna yang membutuhkan kejernihan intelektual dan keberanian moral untuk menyandingkan romantisme lokal dengan kejujuran akademik.

Maka dari itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak menolak simbolisme, tetapi juga tidak meninggalkan keakuratan historis. Sebuah rekonsiliasi naratif antara data historis dan makna kultural dapat dilakukan melalui telaah ulang yang metodologis dan inklusif. Proses ini harus melibatkan sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam dialog terbuka untuk merumuskan kembali hari jadi Kabupaten Majalengka berdasarkan landasan epistemologis yang sahih dan bermakna. Pilihan alternatif seperti penggunaan tanggal 11 Februari 1840—berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal—dapat menjadi opsi akademik yang layak, selama dilengkapi dengan narasi interpretatif yang menjelaskan mengapa warisan kolonial juga bagian dari sejarah kita.

Dalam upaya membangun ulang narasi sejarah Kabupaten Majalengka secara lebih akurat dan bermakna, lima pendekatan konseptual dapat dijadikan sebagai kerangka evaluatif dan strategis. Pendekatan pertama adalah pendekatan nilai kekunoan yang menekankan pada keberadaan bukti-bukti arkeologis atau prasasti kuno, seperti yang dilakukan oleh Kota Kediri dengan menetapkan Prasasti Kwak dari abad ke-9 sebagai pijakan historisnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan nilai perjuangan, yang merujuk pada momen heroik dalam sejarah lokal, sebagaimana dilakukan oleh Kota Jakarta yang menetapkan 22 Juni 1527 sebagai hari jadi berdasarkan keberhasilan Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Meskipun kedua

pendekatan ini mengandung daya simbolik dan historis yang kuat, keduanya memerlukan validasi artefaktual atau kejadian monumental yang dapat diverifikasi secara ilmiah – sebuah prasyarat yang hingga kini belum terpenuhi secara memadai dalam konteks sejarah Majalengka.

Sebaliknya, pendekatan ketiga hingga kelima menawarkan alternatif yang lebih kontekstual, inklusif, dan dapat dijangkau secara historiografis. Pendekatan ketiga, yakni pendekatan spiritual-historis, dapat merujuk pada proses Islamisasi Kerajaan Talaga dan Rajagaluh oleh Sunan Gunung Jati pada awal abad ke-16. Pendekatan ini sarat dengan makna simbolik dan religius yang mendalam, serta mencerminkan transformasi nilai yang signifikan dalam sejarah budaya lokal. Pendekatan keempat, yaitu pendekatan administratif kerajaan, memiliki keunggulan dalam presisi kronologis karena merujuk pada dokumen atau peristiwa pengangkatan pejabat atau raja dalam struktur kekuasaan tradisional, sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah. Adapun pendekatan kelima, yaitu pendekatan sosio-historis, memberikan ruang bagi pembacaan sejarah berbasis dinamika masyarakat secara fungsional, mengakui bahwa eksistensi pemerintahan lokal sering kali tumbuh organik dari interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kombinasi ketiga pendekatan ini menghadirkan sintesis antara kontinuitas sejarah, legitimasi administratif, dan resonansi spiritual, menjadikannya sebagai landasan paling relevan dan proporsional untuk menetapkan hari jadi Majalengka secara ilmiah dan kultural.

Sejarah Majalengka, sebagaimana ditelaah dalam berbagai diskursus akademik maupun kultural, merupakan medan pengetahuan yang belum sepenuhnya mapan dan final. Ia berada pada fase transisional, sebuah narasi yang terus mencari artikulasi terbaiknya di antara berbagai versi, mitos, dan dokumen administratif yang saling bersinggungan. Kenyataan bahwa sejarah ini masih menyisakan celah-celah interpretatif menunjukkan bahwa yang dirawat bukan sekadar kepastian faktual, melainkan kebutuhan kolektif akan rasa memiliki terhadap jejak waktu dan identitas bersama. Dalam kerangka itu, sejarah Majalengka tidak serta-merta dijaga karena kejelasan akademiknya, melainkan karena perannya sebagai ruang simbolik yang mengikat emosi dan solidaritas sosial warga. Dalam konteks tersebut, sejarah menjelma menjadi ekosistem memori yang hidup, yang tak hanya diisi oleh fakta, tetapi juga oleh harapan, kesadaran, dan imajinasi kolektif.

Oleh karena itu, kontroversi yang melekat pada narasi sejarah Majalengka seharusnya tidak dilihat sebagai beban atau ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperdalam refleksi dan memperkaya perspektif. Proses menjaga sejarah bukan berarti membekukan tafsir dalam satu versi tunggal yang beku dan tertutup, tetapi justru merawat kompleksitasnya secara terbuka, lentur, dan bertanggung jawab. Upaya merevisi atau bahkan merumuskan ulang sejarah bukanlah tindakan pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan sebuah keberanian intelektual untuk

menghadirkan narasi yang lebih jujur terhadap dinamika waktu, ruang, dan masyarakatnya. Sejarah Majalengka yang ideal bukanlah yang paling tua, paling gemilang, atau paling agung dalam glorifikasinya, melainkan yang paling jujur dalam mengakui lapisan-lapisan naratifnya—yang mampu menjadi cermin kritis bagi masyarakatnya untuk menatap masa depan tanpa kehilangan akar budayanya.

Penutup

Sebagai simpulan, polemik seputar penetapan hari jadi Kabupaten Majalengka mencerminkan tidak hanya problematika historiografis, tetapi juga ketegangan antara fakta akademik dan konstruksi simbolik yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Ketidaksesuaian antara narasi resmi yang dilegitimasi melalui peraturan daerah dan kelemahan dokumentasi historis yang menyertainya menandakan perlunya pendekatan baru yang lebih kritis dan inklusif dalam membaca sejarah lokal. Dalam konteks ini, sejarah tidak lagi diposisikan semata sebagai himpunan tanggal dan peristiwa, melainkan sebagai medan tafsir yang dinamis, yang menghubungkan masa lalu dengan kebutuhan identitas masa kini. Kontroversi bukanlah akhir dari narasi, melainkan justru ruang produktif untuk menguji keabsahan klaim, memperkaya horizon pengetahuan, dan memperhalus narasi kebudayaan yang berakar pada realitas lokal.

Dengan demikian, tantangan utama bagi Majalengka bukan terletak pada keharusan menemukan satu kebenaran

sejarah yang absolut, melainkan pada keberanian kolektif untuk membuka ruang dialog yang sehat antara mitos, memori, dan metodologi ilmiah. Dalam semangat itu, sejarah Majalengka harus dipahami sebagai proses yang terus berkembang—sebuah proses yang tidak hanya menuntut verifikasi faktual, tetapi juga pemaknaan kultural yang mencerminkan aspirasi masyarakatnya. Memelihara sejarah, dalam kerangka ini, berarti menjaga integritas intelektual sekaligus menghormati pluralitas makna yang terkandung di dalamnya. Hanya melalui keterbukaan dan keberanian untuk merevisi, sejarah Majalengka dapat berfungsi secara utuh sebagai fondasi identitas, inspirasi moral, dan panduan kolektif menuju masa depan yang lebih berkesadaran dan berkeadaban.

Majalengka, 19 Oktober 2019

Kronologi Narasi Sejarah Majalengka dari Berbagai Versi

Oleh Endi Rochaendi

A. Pengantar

Kajian historiografi daerah merupakan upaya krusial dalam memahami identitas dan dinamika kebudayaan lokal, terlebih dalam konteks wilayah-wilayah yang mengalami transformasi panjang akibat interaksi antara kekuasaan politik, kosmologi tradisional, dan struktur kolonial. Kabupaten Majalengka, sebagai salah satu entitas administratif di Provinsi Jawa Barat, menyimpan lintasan sejarah yang panjang namun masih menyisakan banyak ruang gelap yang belum terungkap secara menyeluruh. Narasi sejarah daerah ini berkembang dalam spektrum yang luas, mulai dari dokumen administratif kolonial, legenda yang tertanam dalam tradisi lisan, hingga interpretasi kontemporer yang bersandar pada pendekatan akademik.

Artikel ini berupaya menyajikan kronologi naratif sejarah Majalengka berdasarkan berbagai versi yang berkembang, baik dari sumber resmi maupun folkloristik. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan menakar secara kritis validitas historis setiap versi tersebut, serta mengidentifikasi motif epistemologis di balik pembentukan narasi-narasi yang ada. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam banyak kasus, narasi sejarah lokal di Indonesia

tidak hanya dipengaruhi oleh temuan arkeologis dan dokumen tertulis, tetapi juga oleh konstruksi memori kolektif yang dipertahankan dalam bentuk mite, legenda, dan simbol-simbol budaya.

Dalam kerangka tersebut, artikel ini mengulas secara sistematis berbagai narasi mengenai asal-usul nama Majalengka, pembentukan Kabupaten Maja dan transformasinya menjadi Kabupaten Majalengka, hingga polemik penetapan Hari Jadi yang hingga kini masih menimbulkan diskursus publik. Perbedaan versi ini tidak selalu menandakan pertentangan kebenaran, tetapi menunjukkan dinamika epistemologis dalam memaknai masa lalu. Oleh karena itu, membandingkan narasi-narasi ini secara kronologis dan kontekstual merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran historis yang lebih utuh, adil, dan rasional.

Dengan menyajikan analisis atas beragam versi tersebut, artikel ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pembaca terhadap sejarah Majalengka, serta mendorong munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya penulisan sejarah yang tidak semata-mata mengukuhkan memori mitologis, melainkan juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah, verifikasi sumber, dan akuntabilitas naratif. Sejarah bukan hanya cermin masa lalu, tetapi juga fondasi etis dan intelektual dalam merancang masa depan daerah yang berkarakter.

B. **Mitos sebagai Cermin Mentalitas dan Identitas Lokal**

Mitos, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dipahami sebagai bentuk pengetahuan awal yang dikonstruksi manusia untuk memberikan makna terhadap fenomena yang belum mampu dijelaskan secara rasional dan empiris. Ia lahir bukan dari kehendak untuk merekayasa sejarah, melainkan dari dorongan kultural untuk menata semesta pemahaman melalui struktur naratif yang sarat simbolisme dan spiritualitas. Di balik ketidakmampuannya memenuhi kriteria verifikasi ilmiah modern, mitos menyimpan signifikansi antropologis dan kultural yang sangat tinggi. Ia mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap realitas, relasi kuasa, sistem nilai, dan orientasi spiritual yang berkembang pada masanya. Dalam konteks ini, mitos tidak sekadar cerita, melainkan cerminan dari sistem mental kolektif yang membentuk identitas suatu komunitas.

Majalengka, sebagai wilayah yang sarat akan warisan budaya lokal, menyimpan berbagai narasi mitologis yang hidup dalam kesadaran masyarakat hingga kini. Salah satu yang paling menonjol adalah kisah Nyi Rambutkasih, penguasa Karatuan Sindangkasih pada akhir abad ke-15. Mitos ini tidak hanya berfungsi sebagai kisah asal-usul (etiologi), tetapi juga merepresentasikan tegangan historis antara nilai-nilai lama yang bersumber dari agama Hindu dan arus besar Islamisasi yang dibawa oleh para wali. Dalam narasi ini, Nyi Rambutkasih digambarkan sebagai keturunan Prabu Siliwangi yang memilih bertahan pada keyakinan

lamanya di tengah desakan perubahan yang dibawa oleh saudaranya, yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Di sinilah letak nilai reflektif mitos: ia memperlihatkan dilema eksistensial antara kontinuitas dan transformasi budaya.

Lebih jauh, kedatangan Pangeran Muhammad dan istrinya, Nyi Siti Armilah, atas perintah Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan Sindangkasih, menjadi titik balik dalam kisah tersebut. Perjumpaan antara dua tokoh perempuan ini—yang masing-masing merepresentasikan dua sistem keyakinan besar—menjadi simbol pergeseran struktur spiritual masyarakat setempat. Dialog teologis antara Nyi Siti Armilah dan Nyi Rambutkasih, yang berpuncak pada pernyataan bahwa sang ratu tidak akan mati dan kemudian "ngahiang" di Cilutung, merupakan puncak dramatik dari mitos tersebut. Dalam kerangka kebudayaan Sunda, tindakan "ngahiang" bukan kematian dalam pengertian biologis, melainkan transformasi menuju alam spiritual yang lebih tinggi. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi simbol dari punahnya tatanan lama sekaligus kelahiran tatanan baru dalam struktur keyakinan masyarakat.

Kekuatan mitos ini tidak terletak pada akurasi faktualnya, melainkan pada daya hidupnya dalam kesadaran kolektif masyarakat. Keberadaan patilasan-patilasan seperti Sumur Sindangkasih, Sumur Sundajaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu pertapaan yang masih dianggap angker hingga kini, merupakan bukti bahwa narasi ini telah bertransformasi menjadi *site of memory*—ruang ingatan yang tidak hanya

bersifat simbolik, tetapi juga ritus dan spiritual. Dalam konteks ini, mitos Nyi Rambutkasih menjadi semacam “arsip hidup” yang dijaga melalui laku budaya, bukan sekadar melalui teks tertulis.

Sebagai *mentifact*—yakni unsur kebudayaan nonmaterial yang mencerminkan sistem nilai, kepercayaan, dan ideologi masyarakat—mitos ini memainkan peran vital dalam membentuk identitas Majalengka. Ia bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga perangkat ideologis yang membingkai pemaknaan terhadap ruang, sejarah, dan eksistensi kolektif. Maka, dalam pembacaan historiografis yang lebih reflektif, mitos seperti ini sebaiknya tidak dihadapkan secara biner dengan sejarah faktual, melainkan diperlakukan sebagai bagian integral dari narasi kebudayaan yang layak dibaca, ditafsirkan, dan dipelajari. Sebab, memahami mitos adalah juga memahami cara masyarakat mengingat, menghayati, dan membentuk dirinya melalui narasi yang mereka warisi.

C. Narasi Kerajaan Talagamanggung dan Rajagaluh: Antara Sejarah dan Legenda

Narasi mengenai eksistensi Kerajaan Talagamanggung (Talaga) dan Rajagaluh merupakan bagian integral dari konstruksi kesejarahan Majalengka yang membentang di antara batas tipis antara fakta dan legenda. Kedua kerajaan ini, meskipun lebih sering dijumpai dalam tradisi lisan ketimbang dalam dokumentasi historiografis formal,

menyimpan jejak-jejak penting dalam pemahaman struktur kekuasaan lokal di tatar Sunda sebelum terbentuknya institusi kabupaten modern. Dalam perspektif sejarah sosial, kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan konfigurasi politik masa lalu, tetapi juga memperlihatkan proses artikulasi identitas kolektif masyarakat Majalengka yang terus diwariskan dan dinegosiasikan lintas generasi.

Kerajaan Talaga, sebagaimana tercatat dalam narasi tradisional, didirikan oleh Raden Sudhayasa yang kemudian dikenal sebagai Batara Gunung Bitung. Ia merupakan figur spiritual-karismatik yang disebut-sebut memperoleh ilham dalam pertapaannya di Gunung Bitung dan kemudian membentuk basis religius yang berkembang menjadi struktur kerajaan bercorak Buddha. Keberadaan Talaga sebagai kerajaan bercorak keagamaan yang kemudian bertransformasi menjadi kekuasaan teritorial menunjukkan adanya hubungan erat antara otoritas spiritual dan politik dalam struktur kerajaan-kerajaan lokal di Jawa Barat. Kerajaan ini tidak terisolasi; ia terhubung secara genealogis dan politis dengan Kerajaan Galuh, Sumedanglarang, dan kemudian Kesultanan Cirebon. Ikatan-ikatan ini sering kali diperkuat melalui strategi pernikahan antar elite penguasa, suatu praktik yang lazim digunakan untuk menjaga harmoni sekaligus memperluas pengaruh kekuasaan.

Transformasi ideologis Kerajaan Talaga terjadi secara signifikan pada dekade pertama abad ke-16, ketika gelombang Islamisasi yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati

dari Cirebon mulai merambah ke wilayah selatan. Proses Islamisasi ini tidak berlangsung dalam satu fase tunggal, melainkan melalui strategi “pengepungan kultural” dengan mengislamkan wilayah-wilayah sekitar terlebih dahulu. Ketika Sunan Parung Gangsa, penguasa Talaga, memutuskan memeluk Islam dan diberi gelar Prabu Pucuk Umum Talaga oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529, maka secara simbolik dan struktural Kerajaan Talaga telah terintegrasi ke dalam orbit politik Kesultanan Cirebon. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran fundamental dari otoritas keagamaan lama menuju hegemoni Islam, sekaligus mengubah orientasi kekuasaan dari mandala bercorak lokal-spiritual menjadi bagian dari jaringan kekuasaan Islam transregional.

Sementara itu, Kerajaan Rajagaluh, meskipun tidak setenar Talaga dalam narasi kesejarahan Majalengka, tetap memiliki posisi penting dalam peta politik lokal masa pramodern. Rajagaluh digambarkan sebagai kerajaan bercorak Hindu yang memiliki hubungan erat dengan Talaga melalui aliansi genealogis dan politis. Figur Prabu Cakraningrat menjadi pusat narasi yang menggambarkan dinamika resistensi lokal terhadap ekspansi Cirebon. Ia disebut sebagai penguasa Rajagaluh yang menolak pengaruh Islamisasi dan menuntut pengakuan terhadap kedaulatan wilayahnya. Konflik dengan Cirebon yang kemudian berujung pada pertempuran dengan Adipati Kuningan dan pasukan Sunan Gunung Jati menjadi simbol tragis dari

benturan dua kekuatan ideologis: kekuasaan lama yang bercorak Hindu dan kekuasaan baru berbasis Islam. Gugurnya Prabu Cakraningrat dalam pertempuran tersebut menandai bukan hanya runtuhnya Rajagaluh sebagai entitas politik, tetapi juga akhir dari satu babak peradaban lokal yang terdesak oleh arus perubahan sejarah.

Keberadaan kedua kerajaan ini, baik Talaga maupun Rajagaluh, tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar narasi Majalengka sebagai wilayah yang mengalami peralihan dari struktur kekuasaan tradisional ke dalam sistem administrasi kolonial dan modern. Walaupun kisah-kisah ini sarat dengan unsur legenda, mereka tetap memegang nilai historis – baik sebagai refleksi dari realitas politik masa lalu maupun sebagai representasi simbolik dari dinamika sosial, kultural, dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, membacanya tidak dapat dilakukan secara reduktif sebagai dongeng belaka, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka interpretatif yang melihat mitologi sebagai bagian dari historiografi kultural yang menyimpan jejak-jejak struktur mental dan kosmologis masyarakatnya.

Secara keseluruhan, narasi Kerajaan Talagamanggung dan Rajagaluh menegaskan bahwa sejarah lokal tidak selalu bergantung pada dokumentasi tertulis, melainkan juga pada daya hidup memori kolektif yang terwariskan. Legenda-legenda tersebut, jika dibaca secara kritis dan kontekstual, dapat menjadi jendela berharga untuk memahami struktur sosial-politik dan dinamika transformasi budaya yang

membentuk Majalengka dari masa ke masa. Mereka menjadi narasi pengimbang dalam historiografi yang terlalu sering tersentralisasi, sekaligus memperkaya pemahaman kita terhadap keberagaman ekspresi sejarah yang hidup dalam tubuh bangsa.

D. Kronologi Etimologis dan Administratif Kabupaten Majalengka

Penelusuran sejarah Majalengka, apabila dilihat dari perspektif administratif dan etimologis, memperlihatkan proses historis yang tidak semata ditopang oleh warisan lisan dan mitologi lokal, tetapi juga melalui instrumen legal-formal yang dikeluarkan oleh otoritas kolonial Hindia Belanda. Transformasi dari nama “Kabupaten Maja” menjadi “Kabupaten Majalengka” bukanlah perubahan semantis belaka, melainkan bagian dari proses rasionalisasi dan sistematisasi pemerintahan kolonial atas struktur wilayah yang sebelumnya berakar pada sistem mandala kerajaan-kerajaan lokal. Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal D.J. de Eerens Nomor 2 tanggal 11 Februari 1840, perubahan nomenklatur tersebut disahkan secara resmi, menandai momen penting dalam sejarah administratif Majalengka. Peristiwa ini menyusul Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tertanggal 5 Januari 1819, yang mengukuhkan Kabupaten Maja sebagai salah satu dari lima kabupaten dalam struktur Keresidenan Cirebon, bersama dengan Cirebon, Bengawan Wetan, Galuh, dan Kuningan.

Transformasi ini memperlihatkan bagaimana intervensi kolonial bukan hanya mengubah tata kelola wilayah, tetapi juga mengonstruksi ulang identitas tempat melalui penamaan. Nama "Majalengka" dalam konteks tersebut bukan sekadar produk linguistik, tetapi juga hasil dari pergulatan antara bahasa lokal, narasi mitologis, dan kepentingan administratif kolonial. Penamaan menjadi instrumen penting dalam menandai kekuasaan, menetapkan batas, dan menciptakan pengenalan atas wilayah dalam sistem kolonial yang didasarkan pada kontrol spasial dan pengumpulan data geografis yang presisi.

Dari segi etimologis, terdapat beragam versi mengenai asal-usul nama Majalengka, yang semuanya menunjukkan bagaimana dinamika budaya dan bahasa saling berinteraksi dalam proses penamaan tersebut. Versi yang paling populer menyatakan bahwa kata "Majalengka" berasal dari frase "maja langka", merujuk pada cerita Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armilah yang konon gagal menemukan buah maja di wilayah Sindangkasih. Narasi ini bukan hanya memuat unsur etimologis, tetapi juga membingkai penamaan dalam konteks spiritual dan misi Islamisasi, sekaligus mempertegas posisi mitologi dalam membentuk toponimi lokal. Versi lain menyebut bahwa nama tersebut berasal dari gabungan kata "maja" dan "alengka" atau "lengka", yang berarti pahit, mengacu pada karakteristik buah maja yang dikenal karena rasanya. Pendekatan semantik ini memperlihatkan bagaimana pengalaman inderawi dan

simbolisme rasa dijadikan pijakan dalam menciptakan identitas tempat.

Sementara itu, versi etimologi yang lebih modern dan mungkin lahir dari tradisi urban menyebut bahwa nama Majalengka berasal dari pelafalan lokal atas nama perusahaan Belanda “Madja, L & Co” yang beroperasi di wilayah Maja pada abad ke-19. Masyarakat lokal yang kesulitan mengucapkan nama perusahaan tersebut diduga melafalkannya sebagai “Majalengka”. Versi ini, meskipun terkesan spekulatif, tetap menarik untuk dicermati karena menunjukkan bagaimana unsur kolonial bisa saja ikut berperan dalam pembentukan penamaan melalui mekanisme *verbastering*—proses penyerapan dan pelafalan asing ke dalam idiom lokal. Pendapat ini juga memperlihatkan betapa bahasa, kekuasaan ekonomi, dan identitas wilayah saling berkelindan dalam konstruksi simbolik masyarakat kolonial.

Apapun versi etimologinya, yang jelas bahwa penamaan Majalengka mengandung lapisan makna yang kompleks. Ia tidak lahir dari satu sumber tunggal, melainkan dari hasil negosiasi antara mitos, budaya lokal, dan logika administratif kolonial. Proses ini memperlihatkan bahwa toponimi bukan entitas netral, melainkan medan artikulasi makna yang merekam dinamika kekuasaan, kosmologi, dan narasi historis. Dalam konteks historiografi lokal, penamaan Majalengka harus dibaca bukan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai titik temu antara representasi lokal dan struktur hegemonik kolonial yang kemudian membentuk narasi dominan dalam sejarah modern daerah ini.

Dengan demikian, kronologi etimologis dan administratif Kabupaten Majalengka tidak sekadar menyajikan peristiwa-peristiwa faktual yang dikodifikasi melalui dokumen-dokumen resmi, tetapi juga menyiratkan proses panjang pengendapan memori, simbol, dan narasi yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas wilayah. Sebagai produk interaksi antara berbagai kekuatan—lokal, kolonial, spiritual, dan ekonomis—Majalengka merupakan entitas historis yang tidak dapat dipahami secara sepihak. Ia harus ditafsirkan melalui pendekatan multidisipliner yang menghargai kompleksitas sejarah dan keterbukaan terhadap pluralitas narasi.

E. Penutup

Konstruksi historiografis mengenai Majalengka menampakkannya sebagai medan yang kompleks, penuh lapisan makna, dan jauh dari keseragaman. Kronologi narasi sejarah Majalengka tidak dapat direduksi menjadi garis waktu yang bersifat linear dan tunggal, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari pergumulan antara berbagai unsur naratif yang saling bersinggungan—mitos kolektif yang hidup dalam memori kultural masyarakat, legenda-legenda kerajaan lokal yang tertanam dalam ingatan komunal, serta dokumen administratif yang lahir dari kepentingan struktur kekuasaan kolonial dan modern. Ketiganya membentuk mozaik naratif yang tidak hanya menyimpan fakta, tetapi juga memuat ekspresi nilai, identitas, dan interpretasi atas masa lalu.

Dalam konteks ini, membaca sejarah Majalengka memerlukan pendekatan dialogis yang mampu mempertemukan berbagai versi narasi tanpa menafikan salah satunya secara apriori. Mitos lokal, meskipun tidak memenuhi kriteria verifikasi empiris, menyimpan nilai simbolik dan reflektif yang tak ternilai. Ia merepresentasikan alam pikir, struktur nilai, dan kosmologi masyarakat pada suatu periode sejarah tertentu. Sementara itu, narasi kerajaan seperti Talagamanggung dan Rajagaluh menyediakan kerangka genealogis dan politis yang menjelaskan dinamika relasi kekuasaan lokal dalam konteks Sunda pra-Islam dan pasca-Islam. Di sisi lain, dokumentasi administratif kolonial seperti *Besluit* tahun 1840 atau keputusan tahun 1819 menawarkan landasan faktual dan legal atas terbentuknya Kabupaten Majalengka dalam kerangka sistem negara modern.

Penting untuk ditegaskan bahwa ketiga bentuk narasi tersebut bukanlah entitas yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk narasi besar tentang asal-usul dan perjalanan identitas Majalengka. Pemahaman sejarah yang hanya berpijak pada dokumentasi formal tanpa mempertimbangkan dimensi mitologis dan narasi lokal akan cenderung kering dan reduksionis. Sebaliknya, sejarah yang hanya mengandalkan mitos tanpa validasi kritis berisiko terjebak dalam glorifikasi ahistoris. Maka, pendekatan integratif dan multidisipliner menjadi

keniscayaan dalam membangun kesadaran sejarah yang utuh, adil, dan reflektif.

Dalam semangat tersebut, upaya merekonstruksi sejarah Majalengka harus dijalankan tidak hanya sebagai usaha akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kultural. Sejarah bukanlah sekadar arsip masa lalu, melainkan cermin untuk menatap masa depan. Kesadaran sejarah yang dibangun dengan landasan interpretatif yang kokoh dan ilmiah akan menjadi fondasi penting dalam pembentukan jati diri daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal, namun tetap terbuka terhadap dialog kebudayaan yang lebih luas. Sejarah yang demikian tidak berhenti pada nostalgia, tetapi menjadi sumber energi kolektif bagi pembangunan peradaban daerah yang bermartabat, visioner, dan berkelanjutan.

Dengan memahami bahwa narasi sejarah Majalengka adalah ruang perjumpaan antara legenda, realitas lokal, dan struktur kekuasaan yang terus berubah, kita diajak untuk tidak terjebak pada kebenaran tunggal. Sebaliknya, kita ditantang untuk terus menggali, menyusun ulang, dan merefleksikan narasi-narasi tersebut agar tetap hidup dalam kesadaran masyarakat—tidak sebagai relik masa lalu, tetapi sebagai cahaya penuntun yang menuntun langkah ke masa depan yang berakar dan tercerahkan.

Peta Simbolik Ruang Budaya Majalengka

Oleh: Endi Rochaendi

A. Pengantar

Kajian kebudayaan kontemporer menunjukkan bahwa ruang tidak semata-mata dipahami sebagai entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai konstruksi simbolik yang merefleksikan identitas kolektif, ingatan sosial, dan relasi kuasa yang berkembang di dalamnya. Kabupaten Majalengka, sebagai wilayah yang berada pada simpul perlintasan sejarah, tradisi, dan modernitas, menyimpan konfigurasi ruang budaya yang kaya akan simbol, narasi, dan praktik kultural. Peta simbolik ruang budaya Majalengka merupakan representasi dari keragaman unsur kebudayaan yang hidup dalam masyarakatnya – mulai dari bahasa, ritus, adat istiadat, hingga kesenian dan pengetahuan tradisional – yang masing-masing memiliki artikulasi makna tersendiri dalam membentuk kesadaran historis dan arah kultural suatu komunitas.

Berdasarkan dokumen *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah* (PPKD) Kabupaten Majalengka, ditemukan 11 unsur utama kebudayaan yang mengisi ruang budaya Majalengka sebagai representasi dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), yakni: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Unsur-unsur

ini tidak hanya hadir sebagai fakta-fakta kebudayaan yang berdiri sendiri, melainkan membentuk jaringan simbolik yang saling terkait, membangun horizon pemaknaan yang dinamis antara masyarakat dan ruang tempat tinggalnya. Melalui jaringan ini, Majalengka tidak sekadar menjadi wilayah administratif, tetapi hadir sebagai lanskap kultural yang hidup dan memiliki daya lenting terhadap perubahan zaman.

Setiap unsur dalam peta simbolik tersebut mencerminkan cara masyarakat Majalengka merawat nilai-nilai lama dan merespons arus transformasi sosial. Misalnya, ritus agraris seperti *Mapag Sri* dan *Seren Taun* tidak hanya menyatakan relasi kosmologis masyarakat terhadap alam, tetapi juga mengukuhkan kembali tatanan sosial dan struktur spiritual yang mendasari pola kehidupan komunal. Demikian pula kesenian seperti *Topeng Beber*, *Sampyong*, dan *Gaok* memperlihatkan bentuk ekspresi kultural yang bukan hanya mempertahankan estetika tradisional, tetapi juga menjadi medium artikulasi identitas lokal yang khas. Kehadiran permainan rakyat dan teknologi tradisional pun memperlihatkan keberlanjutan pengetahuan yang diturunkan secara intergenerasional, sekaligus sebagai penanda nilai-nilai etika dan solidaritas sosial.

Memahami ruang budaya Majalengka sebagai peta simbolik mengajak kita membaca kebudayaan tidak sebatas sebagai produk masa lalu, tetapi sebagai proses negosiasi identitas yang berlangsung terus-menerus. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kesadaran baru bahwa

pelestarian budaya bukan hanya bertujuan melindungi warisan, melainkan juga mengaktivasi daya kreatif masyarakat untuk merevitalisasi makna-makna lama dalam konteks kehidupan masa kini. Oleh karena itu, pemetaan ruang budaya Majalengka secara simbolik merupakan langkah strategis dalam merancang masa depan kebudayaan yang inklusif, berakar kuat pada nilai lokal, namun tetap terbuka terhadap dialog global.

B. Peta Simbolik Ruang Budaya Majalengka

Peta simbolik ruang budaya Majalengka merepresentasikan lanskap kebudayaan yang tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga simbolik, naratif, dan eksistensial. Dalam konteks ini, ruang budaya bukanlah semata-mata teritori geografis yang dihuni oleh objek-objek budaya, melainkan arena di mana berbagai nilai, makna, dan memori kolektif terus diproduksi, dipertukarkan, dan ditransformasikan oleh masyarakat yang menghidupinya. Berdasarkan dokumen *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah* (PPKD) Kabupaten Majalengka, ruang budaya mencakup sebelas unsur Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi bahasa, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Unsur-unsur ini bukanlah entitas statis yang terisolasi satu sama lain, melainkan membentuk struktur semiotik yang saling terhubung dan menegaskan identitas lokal secara

multidimensional. Ruang budaya Majalengka dalam kerangka ini menjelma sebagai medan simbolik yang memelihara kontinuitas nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi dan fragmentasi modernitas.

Lebih jauh, setiap unsur OPK tersebut menyimpan kapasitas reflektif untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Majalengka menafsirkan keberadaannya di dunia, baik secara historis maupun spiritual. Bahasa Sunda dialek Majalengka Tengah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium konseptual untuk menyampaikan kosmologi, etika, dan pengetahuan lokal. Tradisi lisan seperti mitos Gaok dan kisah Nyi Rambutkasih menyajikan bukan hanya cerita, melainkan sistem keyakinan dan logika simbolik yang menstrukturkan realitas sosial. Demikian pula, ritus seperti *Mapag Sri* atau *Seren Taun* tidak sekadar seremoni pertanian, tetapi representasi konkret dari ekologi spiritual dan hubungan ontologis antara manusia, alam, dan yang transenden. Cagar budaya, manuskrip, dan teknologi tradisional yang masih lestari menunjukkan adanya mekanisme pelestarian memori kolektif dan pengetahuan teknologis yang terintegrasi ke dalam praktik hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, peta simbolik ruang budaya Majalengka dapat dipahami sebagai konstruksi historis sekaligus medan aktualisasi nilai yang mengartikulasikan siapa masyarakat Majalengka di hadapan dirinya sendiri dan dunia yang terus berubah.

Bahasa dan tradisi lisan dalam konteks budaya Majalengka tidak hanya dapat dipahami sebagai sarana

komunikasi praktis, melainkan sebagai arsitektur konseptual yang menopang pembentukan makna dan struktur kesadaran kolektif. Bahasa Sunda dialek Majalengka Tengah memainkan peran sentral sebagai wahana transmisi nilai-nilai budaya yang bersumber dari tradisi agraris, spiritualitas lokal, dan relasi sosial yang khas. Keunikan dialektologis ini diperkuat oleh keberadaan pengaruh linguistik dari bahasa Cirebon dan Dermayon yang menyusup di wilayah-wilayah perbatasan, menciptakan ruang dialog antarbudaya yang memperkaya khazanah ekspresif masyarakat. Perpaduan ini menandakan bahwa bahasa di Majalengka tidak bersifat homogen, tetapi hidup dalam kontinum yang lentur, responsif terhadap geografi kultural, dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Tradisi lisan, sebagai perpanjangan dari struktur bahasa, membentuk korpus naratif yang berfungsi sebagai 'memori hidup' masyarakat. Legenda Nyi Rambutkasih, misalnya, tidak sekadar menyampaikan peristiwa mitologis, melainkan menyiratkan konflik antara kepercayaan lama dan Islamisasi yang mengubah orientasi spiritual masyarakat Sindangkasih. Cerita Gaok dan kisah Gunung Tilu pun menyimpan tafsir kosmologis atas relasi manusia dan alam semesta, sekaligus menjadi mekanisme pengajaran nilai-nilai moral, seperti keberanian, ketekunan, atau kesetiaan. Dalam tradisi masyarakat Sunda, lisan bukanlah bentuk komunikasi yang inferior terhadap tulisan, melainkan justru menjadi pusat produksi pengetahuan dan legitimasi kultural. Oleh karena itu, eksistensi tradisi lisan harus diposisikan sebagai

epistemologi lokal yang memiliki logika dan rasionalitas tersendiri, yang tidak dapat dinilai secara simplistik melalui kerangka sejarah tertulis Barat.

Lebih dari itu, bahasa dan tradisi lisan di Majalengka juga memainkan fungsi ritmis dan performatif dalam kehidupan komunal. Banyak dari narasi-narasi tersebut dihidupkan kembali melalui pertunjukan seni tradisional seperti *Pantun Sunda*, *Longser*, atau *Ngadongeng*, di mana ujaran menjadi tubuh, dan makna menjadi pengalaman kolektif yang dirasakan secara simultan oleh penutur dan pendengar. Dalam konteks ini, bahasa dan tradisi lisan tidak hanya menghidupi warisan budaya, tetapi juga menciptakan ruang-ruang aktualisasi identitas yang bersifat dinamis. Keberlanjutan tradisi ini sangat bergantung pada ekosistem kultural yang mendukung regenerasi makna melalui pendidikan berbasis lokal, komunitas budaya yang aktif, serta kebijakan pemerintah daerah yang progresif dalam mengarusutamakan warisan takbenda sebagai modal pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Maka dari itu, peta simbolik ruang budaya Majalengka tak dapat dilepaskan dari denyut bahasa dan tradisi lisan sebagai denyut nadinya yang paling purba sekaligus paling visioner.

Ritus dan adat istiadat seperti *Mapag Sri*, *Guar Bumi*, dan *Seren Taun* merupakan ekspresi simbolik yang menegaskan relasi transendental antara manusia, tanah, dan siklus kosmis dalam kerangka kehidupan masyarakat agraris di Majalengka. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan sebagai

ritual tahunan, tetapi juga sebagai bentuk pernyataan spiritualitas kolektif yang mengafirmasi bahwa bumi bukan sekadar sumber daya material, melainkan entitas hidup yang suci dan layak dihormati. Dalam *Mapag Sri*, misalnya, masyarakat meyakini bahwa Dewi Sri—sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan—harus dijemput secara simbolik melalui prosesi ritual sebelum panen, agar hasil pertanian tidak hanya melimpah secara kuantitatif, tetapi juga berkah secara spiritual. Tradisi ini mengandung makna ekoteologis yang dalam, yakni bahwa keseimbangan antara manusia dan alam mesti dijaga melalui penghormatan simbolik, doa kolektif, serta praktik yang mencerminkan kesadaran ekologis yang luhur.

Lebih jauh, ritus-ritus tersebut memegang peran strategis dalam membentuk tatanan sosial masyarakat agraris melalui mekanisme konsolidasi solidaritas kolektif. Prosesi *Guar Bumi* misalnya, memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal tidak hanya merayakan panen atau memohon perlindungan dari hama dan bencana, tetapi juga merajut ulang relasi sosial antarkomunitas, antarwilayah, bahkan antar generasi. Dalam konteks ini, ritus bukan sekadar seremoni religius, melainkan instrumen sosial-politik yang mengatur ulang keseimbangan kekuasaan simbolik dan distribusi legitimasi kultural. *Seren Taun* sebagai bentuk ritus penutupan dan pembukaan siklus tanam baru juga menjadi ruang pengakuan identitas lokal yang diperkuat oleh partisipasi kolektif masyarakat. Ritus ini menunjukkan bahwa

kebudayaan Majalengka tidak dibangun dalam kerangka individualisme modern, melainkan berakar pada prinsip komunalitas dan harmoni sosial yang kuat.

Ketika ritus-ritus tersebut dianalisis dalam perspektif simbolik, terlihat bahwa mereka mengandung struktur naratif dan performatif yang kompleks. Pada satu sisi, ritus ini meneguhkan etika ekologis lokal, di mana alam tidak ditempatkan sebagai objek eksploitatif, melainkan sebagai subjek relasional yang memiliki daya hidup dan kehendak simbolik. Pada sisi lain, ritus menjadi medan reproduksi nilai-nilai lokal, baik yang bersifat spiritual, sosial, maupun kultural. Kearifan tradisional Majalengka dalam merawat ritus-ritus tersebut memperlihatkan bahwa budaya agraris tidak hanya menyimpan teknik produksi pangan, tetapi juga sistem epistemologis dan kosmologis yang mengajarkan bagaimana hidup secara seimbang dalam ruang, waktu, dan relasi. Oleh karena itu, keberlangsungan ritus seperti *Mapag Sri*, *Guar Bumi*, dan *Seren Taun* harus dilihat sebagai pilar penting dalam peta simbolik ruang budaya Majalengka, yang tidak hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga menawarkan arah etis bagi masa depan yang berkelanjutan.

Seni tradisional di Majalengka, seperti *Topeng Beber*, *Kedempling*, *Sampyong*, dan *Wayang Golek*, merupakan ekspresi budaya yang tidak hanya menampilkan kekayaan estetika lokal, tetapi juga memuat sistem simbolik yang kompleks. Setiap pertunjukan seni tersebut membawa muatan makna yang mencerminkan dinamika hubungan antara manusia,

masyarakat, dan kosmos. Misalnya, *Topeng Beber* tidak sekadar menampilkan gerak dan rupa topeng, tetapi mengisahkan perjalanan batin manusia dalam menghadapi dilema moral dan transisi sosial. *Kedempling*, dengan ketukan ritmis dan gerak kolektifnya, menghadirkan energi komunal yang mengikat solidaritas masyarakat desa, sementara *Sampyong*—sebagai seni bela diri yang dipentaskan dalam bentuk pertunjukan—menegaskan semangat kepahlawanan, keberanian, dan disiplin yang tertanam dalam tradisi lisan. *Wayang Golek*, sebagai seni tutur dan bayangan, berfungsi sebagai media pengajaran nilai-nilai etika dan filsafat hidup yang dibungkus dalam cerita-cerita tokoh pewayangan dan kisah rakyat.

Di balik estetika visual dan auditori yang disuguhkan, seni-seni tersebut menyimpan muatan historis dan fungsi komunikatif yang mendalam. Pertunjukan seni tradisional menjadi medium bagi masyarakat Majalengka untuk mengartikulasikan memori kolektif atas peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah lokal maupun nasional. Selain itu, berbagai kesenian tersebut sering kali digunakan sebagai alat kritik sosial secara halus terhadap ketimpangan kekuasaan, kemerosotan moral, atau disorientasi budaya. Karakter-karakter simbolik dalam pertunjukan menjadi representasi dari sosok-sosok ideal maupun antitesis dalam masyarakat, yang memungkinkan publik untuk melakukan refleksi kritis terhadap kondisi sosial mereka. Dalam perspektif ini, tubuh para penampil bukan sekadar instrumen visual, tetapi media

simbolik yang menyuarakan ketegangan antara kontinuitas nilai tradisional dan tekanan perubahan modernitas. Pertunjukan tidak hanya menyampaikan pesan, melainkan menciptakan ruang diskursif di mana nilai-nilai lama dinegosiasikan ulang dan ditransformasikan untuk menjawab tantangan zaman.

Lebih jauh, seni tradisional di Majalengka menunjukkan kapasitasnya sebagai ruang dialektika budaya, tempat perjumpaan antara masa lalu, masa kini, dan harapan akan masa depan. Dalam konteks peta simbolik ruang budaya, seni pertunjukan menjadi medan kultural di mana masyarakat tidak hanya merayakan warisan leluhur, tetapi juga menggali kembali narasi-narasi yang selama ini tersembunyi atau terpinggirkan. Proses kreatif dalam seni pertunjukan mendorong revitalisasi makna-makna lama dan mendorong penciptaan makna-makna baru yang kontekstual. Di tengah derasnya arus globalisasi dan tekanan homogenisasi budaya, keberadaan *Topeng Beber*, *Sampyong*, dan bentuk kesenian lainnya menjadi bentuk resistensi simbolik yang elegan, membuktikan bahwa identitas lokal tidak statis, tetapi hidup dan berkembang dalam interaksi yang berkesinambungan antara tradisi dan transformasi. Maka, seni tradisional Majalengka bukan sekadar warisan, tetapi merupakan “bahasa kedua” masyarakatnya dalam menafsirkan, mengkritisi, dan membentuk realitas sosial secara berkesinambungan.

Pengetahuan dan teknologi tradisional yang berkembang di Majalengka mencerminkan tingkat adaptasi

ekologis dan kreativitas sosial yang tinggi dalam menjawab kebutuhan hidup masyarakat setempat. Produk seperti tenun *gadod*, kecap Majalengka, genteng tanah liat, dan gula *cakar* tidak hanya merupakan hasil dari keterampilan teknis, tetapi juga bukti konkret dari sistem pengetahuan lokal yang terstruktur dan teruji oleh waktu. Tenun *gadod*, misalnya, bukan sekadar tekstil fungsional, melainkan representasi visual dari identitas dan kosmologi lokal yang tercermin melalui motif, warna, dan teknik pembuatannya. Sementara itu, kecap Majalengka dan gula *cakar* merupakan warisan gastronomi yang menunjukkan penguasaan masyarakat terhadap fermentasi, pengolahan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua ini merupakan bukti bahwa teknologi tidak selalu bersumber dari industri modern, melainkan juga bisa tumbuh dari interaksi kultural antara manusia, alam, dan tradisi.

Produk-produk tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Majalengka memiliki sistem produksi yang tidak hanya berbasis pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan sosial dan ekologis. Proses-proses produksi tradisional itu melibatkan nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, ketekunan, dan penghormatan terhadap siklus alam. Teknologi tradisional di sini juga mengandung dimensi pedagogis: ia mengajarkan generasi muda tentang pentingnya merawat warisan leluhur, menjaga kelestarian lingkungan, serta menginternalisasi etika kerja dan kebersahaan. Setiap alat, teknik, dan hasil produksi

adalah artefak hidup yang mengandung narasi, pengalaman, dan makna simbolik yang melampaui fungsinya secara teknis. Dalam hal ini, pengetahuan tradisional bukanlah masa lalu yang tertinggal, melainkan sumber daya kultural yang relevan untuk menghadapi tantangan keberlanjutan dan kemandirian masa depan.

Permainan rakyat seperti *egrang*, *gatrik*, dan *boyboyan* memperkaya dimensi sosial dan edukatif dari peta simbolik ruang budaya Majalengka. Permainan ini, yang tumbuh dari ruang-ruang publik dan interaksi horizontal antar anak-anak, bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga instrumen pembelajaran nilai-nilai moral seperti kejujuran, sportivitas, ketahanan, serta kolaborasi. Aktivitas bermain tersebut menjadi ruang awal terbentuknya identitas sosial dan emosional anak-anak, sekaligus menjadi mekanisme internalisasi norma dalam suasana yang egaliter. Permainan rakyat juga berfungsi sebagai media transmisi budaya yang non-formal namun efektif, di mana generasi tua mewariskan kebiasaan, cerita, dan aturan main kepada generasi muda secara alami. Ketika ditilik secara simbolik, permainan rakyat ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak hanya diproduksi dalam institusi formal, tetapi juga tumbuh dari dinamika keseharian yang sederhana, membumi, dan berakar pada kebersamaan.

Cagar budaya dan manuskrip kuno yang tersebar di Majalengka bukan sekadar peninggalan arkeologis atau artefak estetis, melainkan jejak material dari peradaban lokal

yang mengandung dimensi spiritual, historis, dan identitas kolektif. Situs-situs seperti patilasan para leluhur, makam tokoh-tokoh adat dan keagamaan, serta naskah-naskah kuno, termasuk mushaf Al-Qur'an tulisan tangan di Pagaraji, menyimpan narasi panjang tentang bagaimana masyarakat Majalengka memaknai waktu, warisan, dan keberadaan. Keberadaan artefak semacam ini tidak hanya menandai keberlangsungan tradisi literasi dan spiritualitas, tetapi juga memperlihatkan bahwa Majalengka memiliki posisi penting dalam jaringan budaya dan agama yang lebih luas. Relasi masyarakat dengan objek-objek tersebut bukanlah hubungan yang profan, melainkan relasi simbolik yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai adiluhung sebagai pedoman hidup lintas generasi.

Keberadaan cagar budaya di Majalengka, meskipun memiliki potensi luar biasa sebagai pusat pembelajaran sejarah dan spiritualitas, masih menghadapi tantangan serius. Banyak situs belum terdokumentasi secara ilmiah maupun digital, menjadikan mereka rentan terhadap proses pelupaan kolektif. Modernisasi yang tidak disertai kesadaran kultural menyebabkan sebagian situs warisan ini terdesak oleh pembangunan infrastruktur tanpa pertimbangan nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya. Kurangnya sistem pendataan yang komprehensif dan lemahnya regulasi perlindungan warisan budaya membuat artefak-artefak ini rentan terhadap kerusakan fisik, alih fungsi ruang, bahkan pencurian dan peredaran ilegal. Ketidakhadiran kebijakan

pelestarian yang berbasis komunitas turut memperburuk situasi, karena banyak masyarakat belum diberdayakan secara memadai untuk turut serta menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai dari warisan tersebut.

Perlindungan dan revitalisasi cagar budaya Majalengka menuntut pendekatan yang tidak sekadar legal-formal, melainkan juga partisipatif dan berbasis pada pemaknaan kultural yang hidup. Pemahaman terhadap artefak budaya sebagai bagian dari identitas lokal mesti dikembangkan melalui pendidikan sejarah kritis di sekolah, pelibatan komunitas dalam pemetaan situs budaya, serta digitalisasi naskah-naskah kuno sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan kolektif. Di tengah arus global yang kerap menstandarkan nilai-nilai, cagar budaya di Majalengka dapat menjadi titik balik dalam menguatkan kembali rasa memiliki terhadap warisan lokal. Ia bukan hanya menjadi monumen masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa kini dan arah bagi masa depan – di mana spiritualitas, nilai luhur, dan warisan kultural dapat menjadi landasan berpikir, bertindak, dan membangun masyarakat yang berakar sekaligus terbuka.

Peta simbolik ruang budaya Majalengka tidak sekadar menginventarisasi unsur-unsur kebudayaan secara kategoris, tetapi merepresentasikan konfigurasi makna yang dinamis, saling berkelindan, dan berlapis. Setiap unsur budaya – mulai dari bahasa, tradisi lisan, ritus, hingga cagar budaya – tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dalam suatu jejaring simbolik yang menghubungkan pengalaman historis,

ekspresi kolektif, dan tatanan nilai lokal. Konstelasi ini menunjukkan bahwa kebudayaan Majalengka tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan deskriptif, melainkan harus dibaca sebagai teks sosial yang sarat narasi, simbol, dan afeksi. Di dalamnya, tercermin cara masyarakat membangun relasi antara masa lalu, masa kini, dan harapan terhadap masa depan secara simultan dan terus-menerus.

Struktur peta simbolik tersebut juga menjadi refleksi hidup dari jati diri masyarakat Majalengka, yang dibentuk melalui proses historis panjang dan dialektika antara kontinuitas tradisi dan respons terhadap perubahan. Jati diri ini tidak hadir sebagai konstruksi homogen, melainkan sebagai entitas yang terbuka terhadap tafsir baru, namun tetap berakar kuat pada pengalaman lokal yang partikular. Dalam narasi-narasi simbolik yang terkandung di setiap unsur budaya, tersimpan etos kolektif masyarakat Majalengka: kearifan dalam merawat alam, solidaritas dalam ritus sosial, kebijaksanaan dalam tradisi lisan, serta ketangguhan dalam menghadapi modernitas tanpa kehilangan akar. Oleh sebab itu, peta simbolik ini tidak hanya mencerminkan budaya sebagai warisan, tetapi juga sebagai proyek aktif masyarakat untuk terus memperbarui identitasnya dalam kerangka yang otentik dan kontekstual.

Pentingnya peta simbolik ruang budaya ini menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan kebijakan kebudayaan dan pendidikan berbasis lokal. Ia dapat dijadikan sebagai dasar epistemik dalam merumuskan arah pelestarian

budaya yang tidak sekadar administratif, tetapi juga inspiratif dan partisipatif. Peta ini mampu menjadi alat navigasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan budaya lokal, penyusunan regulasi pelestarian warisan takbenda, maupun perancangan program pengembangan ekonomi kreatif berbasis nilai tradisional. Dalam konteks pembangunan daerah, peta simbolik ini menawarkan model kebudayaan yang tidak hanya memperkuat identitas kultural, tetapi juga memfasilitasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemetaan budaya bukanlah tugas teknokratis belaka, melainkan tindakan kultural strategis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menghidupkan kembali makna dan nilai dari warisan budayanya sendiri.

C. Implikasi bagi Pemajuan Kebudayaan

Implikasi dari Peta Simbolik Ruang Budaya Majalengka bagi pemajuan kebudayaan baik pada tataran daerah maupun nasional memiliki cakupan strategis yang luas dan berlapis. Pemetaan tersebut bukan semata-mata sebuah inventarisasi unsur budaya, melainkan sebuah konstruksi epistemik dan praksis kultural yang memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif tentang identitas, keberlanjutan, serta arah kebijakan kebudayaan. Di tingkat lokal, peta simbolik ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan program pelestarian berbasis komunitas yang kontekstual, mengingat bahwa sebagian besar unsur OPK di Majalengka, seperti

tradisi lisan, ritus, dan teknologi tradisional, masih terikat erat pada pola hidup masyarakat agraris dan spiritualitas lokal. Upaya pelestarian budaya tidak cukup dilakukan secara seremonial atau kuratorial, melainkan harus menyentuh aspek sistem pendukungnya, mulai dari revitalisasi lembaga adat, penguatan kapasitas pelaku budaya, hingga penyusunan regulasi perlindungan berbasis HAKI.

Secara nasional, peta simbolik ruang budaya Majalengka dapat berkontribusi pada penguatan basis data kebudayaan Indonesia yang inklusif dan beragam. Kontribusi Majalengka, sebagai representasi daerah Sunda Tengah-Timur yang berada pada simpul transkultural antara Sunda, Cirebon, dan Dermayon, dapat memperkaya narasi kebudayaan nasional yang tidak homogen. Dalam hal ini, praktik kebudayaan seperti Gaok, Kedempling, hingga ritual Guar Bumi dan Mapag Sri, membuka kemungkinan reinterpretasi atas nilai-nilai lokal yang relevan untuk menghadapi isu-isu global seperti krisis ekologis, disrupsi digital, dan erosi identitas. Ketika peta budaya ini diintegrasikan ke dalam sistem nasional seperti APIK (Aplikasi Pemetaan Kebudayaan Indonesia), maka Majalengka dapat berperan sebagai model pendekatan holistik yang menggabungkan pelestarian dengan inovasi serta pelibatan masyarakat secara partisipatif.

Lebih lanjut, implikasi kebijakan dari peta simbolik ini terletak pada potensinya untuk mendorong kebijakan budaya yang berbasis data dan reflektif terhadap dinamika lokal. Misalnya, keberadaan teknologi tradisional seperti kecap

Majalengka, tenun gadod, dan gula cakar tidak hanya dapat diangkat sebagai produk unggulan daerah, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi budaya nasional. Demikian pula, peninggalan manuskrip dan situs cagar budaya di Majalengka yang belum terdokumentasi optimal menunjukkan urgensi penyusunan kebijakan konservasi yang bersifat interdisipliner –melibatkan sejarah, arkeologi, filologi, hingga ilmu kebijakan publik. Implikasi akhirnya adalah menjadikan kebudayaan bukan sebagai warisan statis, tetapi sebagai ruang strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan, berkeadaban, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal yang dinamis.

D. Penutup

Peta simbolik ruang budaya Majalengka bukan sekadar hasil dari pemetaan unsur-unsur kebudayaan secara kategoris, melainkan representasi reflektif dari proses historis, spiritual, dan sosial yang membentuk kesadaran kolektif masyarakatnya. Di dalamnya termuat warisan lisan, artefak material, praktik sosial, serta sistem pengetahuan lokal yang saling terhubung dalam jaringan makna yang berlapis dan dinamis. Melalui pemetaan ini, kebudayaan tidak dipahami sebagai entitas yang membeku dalam waktu, melainkan sebagai medan simbolik yang terus tumbuh, ditafsirkan ulang, dan direvitalisasi dalam respons terhadap perubahan zaman. Ruang budaya Majalengka, dengan demikian, adalah palimpsest kultural yang mengandung jejak-jejak masa lalu sekaligus denyut tafsir masa depan.

Kehadiran peta simbolik ini menjadi kontribusi penting bagi pembangunan kebudayaan yang inklusif dan kontekstual. Ia tidak hanya menawarkan sumber data dan inspirasi bagi para pembuat kebijakan dan pelaku budaya, tetapi juga berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat Majalengka untuk meninjau ulang identitas, nilai, dan praktik hidupnya dalam ranah yang lebih luas. Peta ini membuka ruang untuk pendidikan kultural yang berakar, pembangunan ekonomi kreatif yang berbasis nilai lokal, serta diplomasi budaya yang membawa pesan pluralisme dan keberlanjutan. Keberadaannya menjadi modal simbolik yang kuat untuk mengembangkan Majalengka sebagai wilayah yang bukan hanya kaya secara sejarah, tetapi juga visioner dalam menatap masa depan kebudayaan Indonesia.

Penutup dari keseluruhan pemetaan ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari ruang hidup masyarakat yang menghidupkannya. Majalengka, dengan segala keragaman ekspresinya – dari Gaok hingga Kedempling, dari patilasan leluhur hingga manuskrip kuno – menyimpan potensi kultural yang luar biasa. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola, merawat, dan memaknai warisan tersebut secara adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Peta simbolik ini, pada akhirnya, bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk terus menggali, merumuskan, dan menghidupkan kebudayaan sebagai fondasi peradaban lokal yang kontributif bagi wacana kebudayaan nasional dan global.

Kontroversi Rekonstruksi Sejarah Majalengka: Antara Validitas Historiografis dan Kepentingan Representasi Identitas Lokal

Oleh: Endi Rochaendi

Abstrak: Rekonstruksi sejarah Majalengka memunculkan perdebatan fundamental antara keabsahan historiografis dan legitimasi naratif yang telah lama hidup dalam memori kolektif masyarakat. Usulan perubahan Hari Jadi Majalengka dari 7 Juni – yang selama ini dilegitimasi melalui Peraturan Daerah Tahun 1982 – menjadi 11 Februari, yang didasarkan pada kajian kritis terhadap sumber primer kolonial dan genealogi kekuasaan lokal, menjadi titik temu antara dua kutub yang kerap berseberangan: kebenaran akademik dan kesadaran kultural. Kontroversi ini menunjukkan bahwa sejarah tidaklah entitas yang netral, final, atau steril dari pengaruh emosi dan kekuasaan, melainkan sebuah konstruksi naratif yang terus-menerus dinegosiasikan dalam kerangka sosial, politik, dan simbolik. Fakta-fakta historis yang dirumuskan secara ilmiah, sering kali tidak serta-merta diterima dalam ruang publik, terutama jika bersinggungan dengan identitas komunal dan simbol-simbol kebanggaan daerah yang telah tertanam secara afektif dalam praktik sosial dan ritus kolektif. Dalam konteks Majalengka, narasi historis yang telah mapan tidak hanya mengisi ruang kognitif, tetapi juga memainkan fungsi integratif dan performatif dalam membentuk imajinasi kolektif masyarakat terhadap asal-usul dan eksistensinya. Maka, pertanyaan krusial yang mengemuka adalah: siapa yang memiliki otoritas untuk menetapkan narasi sejarah yang sah – apakah sejarawan akademik dengan perangkat metodologis dan verifikasiatifnya, atau masyarakat lokal yang mewarisi dan menghidupi sejarah melalui rasa, ingatan, dan tradisi? Ketegangan ini menggarisbawahi bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang siapa yang menceritakan dan untuk kepentingan apa. Oleh karena itu,

rekonstruksi sejarah Majalengka seharusnya diposisikan bukan semata sebagai aktivitas akademik, melainkan sebagai proses sosial yang menuntut keseimbangan antara ketelitian ilmiah dan empati kultural, agar narasi yang dibangun tidak menjadi monumen epistemik yang kaku, melainkan jembatan intergenerasi yang hidup, reflektif, dan berakar.

Pengantar

Rekonstruksi sejarah bukanlah sekadar proses penelusuran kronik masa lalu, melainkan sebuah arena pergulatan antara fakta-fakta empiris, narasi kolektif, dan kepentingan representasional. Di Kabupaten Majalengka, isu ini mencapai titik krusial ketika pada *Seminar Uji Publik Naskah Akademik Perubahan Hari Jadi Majalengka* yang diselenggarakan pada Rabu, 7 Mei 2025 di Gedung Yudha Karya, wacana perubahan hari jadi dari tanggal **7 Juni** (sebagaimana diatur dalam PERDA No. 05/Dp.013.1/PD/1982) menjadi **11 Februari** mencuat dan memantik kontroversi publik yang luas. Usulan ini, yang digagas oleh sejumlah sejarawan melalui pendekatan kritis terhadap sumber historis primer dan struktur historis naratif Majalengka, menjadi pemantik perdebatan antara keabsahan historiografis dan loyalitas terhadap narasi identitas yang telah terlembaga (detikjabar, 07-05-2025).

Dalam konteks ini, Majalengka menjadi cermin dari fenomena global yang menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah steril dari tarik-menarik kuasa, emosi, dan persepsi. Rekonstruksi sejarah Majalengka—yang semula ditujukan untuk *meluruskan kronologi dan fondasi historis berdirinya*

daerah—telah berkembang menjadi diskursus identitas yang lebih kompleks. Ini melibatkan pelbagai aktor: sejarawan akademik, budayawan lokal, pemerintahan daerah, dan masyarakat yang telah menginternalisasi narasi tertentu sebagai bagian dari memori kolektif.

Sumber-sumber historiografis yang mendasari usulan perubahan ini menunjukkan bahwa tanggal 11 Februari memiliki korelasi lebih kuat dengan proses administratif dan genealogi kekuasaan lokal yang secara historis dapat diverifikasi, dibanding tanggal 7 Juni yang lebih bersifat simbolik dan tidak sepenuhnya ditopang oleh dokumen historis primer. Namun demikian, upaya pelurusan sejarah ini justru menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang memandang narasi lama sebagai pilar identitas dan kebanggaan daerah. Di sinilah letak paradoks historiografi: antara kebutuhan akademik untuk verifikasi historis dan aspirasi kultural yang berakar pada romantisme masa lalu.

Artikel ini bertolak dari pemahaman bahwa sejarah adalah konstruksi naratif yang terbentuk dalam ketegangan antara memori dan fakta, antara politik representasi dan etika akademik. Dengan merujuk pada pendekatan historiografi kritis dan studi identitas kultural, kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi sejarah Majalengka membuka ruang kontestasi baru: bukan hanya tentang *apa yang benar terjadi*, melainkan tentang *siapa yang berhak mengatakan kebenaran itu* dan *dengan cara apa narasi itu harus ditransmisikan ke generasi berikutnya*.

Lebih jauh, artikel ini juga akan membahas bagaimana narasi sejarah lokal—ketika menyentuh akar kultural dan simbolisme kolektif—sering kali menjelma menjadi medan politis yang rentan terhadap kooptasi kepentingan ideologis, baik oleh negara maupun oleh elite lokal. Dalam kerangka inilah, perubahan hari jadi Majalengka tidak semata sebagai peristiwa administratif atau akademik, melainkan sebagai bentuk *rekontekstualisasi identitas daerah* yang tengah berjuang menemukan pijakan historis yang sah sekaligus inklusif.

Dengan demikian, pembacaan ulang atas sejarah Majalengka bukan sekadar mengangkat dimensi akademik historiografi, tetapi juga memperlihatkan dinamika emosi kolektif, konstruksi simbolik, dan pergeseran epistemik dalam memaknai *siapa kita sebagai masyarakat Majalengka hari ini*. Rekonstruksi sejarah, dalam konteks ini, menjadi cermin dari kematangan budaya dalam menerima kompleksitas masa lalu—bukan sebagai beban, melainkan sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih otentik dan berakar.

1. **Sejarah sebagai Ranah Tafsir dan Bukan Fakta Final**

Rekonstruksi sejarah Majalengka secara fundamental mencerminkan bahwa sejarah tidak pernah berdiri sebagai representasi objektif yang final, melainkan sebagai konstruksi naratif yang terus-menerus dinegosiasikan dalam konteks sosial, politik, dan budaya kontemporer. Dalam perkembangan historiografi modern, pemahaman terhadap sejarah telah bergeser dari paradigma positivistik—yang menekankan kronologi dan kausalitas linier—menuju

pendekatan hermeneutik yang melihat sejarah sebagai hasil interpretasi yang diproduksi oleh subjek pengetahuan. Dengan demikian, setiap narasi sejarah tidak terlepas dari subjektivitas penulisnya, baik dalam pemilihan sumber, kerangka analisis, maupun kepentingan ideologis yang menyertainya.

Dalam konteks Majalengka, keterbatasan sumber-sumber tertulis yang valid, khususnya untuk periode-periode awal, memunculkan ketergantungan yang tinggi terhadap tradisi lisan sebagai medium transmisi historis. Tradisi ini mengandung kekayaan simbolik dan refleksi nilai-nilai lokal, namun bersifat plastis dan adaptif terhadap konteks kultural yang berubah dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ketika narasi sejarah dibangun di atas fondasi lisan, ia tidak hanya merepresentasikan peristiwa masa lalu, tetapi juga mengekspresikan imajinasi kolektif masyarakat yang hidup pada masa kini. Hal ini menjadikan setiap upaya rekonstruksi historis sebagai ruang pertemuan antara ingatan dan pengetahuan, antara harapan identitas dan akurasi akademik.

Akibat dari kondisi tersebut adalah munculnya *multivokalitas* dalam narasi sejarah Majalengka, yakni keberadaan berbagai versi cerita yang saling bersaing atau bahkan saling bertentangan. Akademisi, budayawan lokal, tokoh adat, hingga masyarakat awam masing-masing memiliki narasi, perspektif, dan otoritas yang berbeda dalam menafsirkan masa lalu. Dalam medan seperti ini, sejarah bukan lagi hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang

berhak menceritakan dan untuk tujuan apa cerita itu disampaikan. Narasi sejarah menjadi arena artikulasi kuasa simbolik dan legitimasi sosial, di mana perbedaan interpretasi mencerminkan keberagaman klaim atas makna dan identitas.

Dengan menyadari bahwa sejarah bersifat interpretatif, maka pendekatan terhadap rekonstruksi sejarah Majalengka seharusnya dilakukan dengan kesadaran epistemologis yang reflektif. Tafsir bukan sekadar aksesori akademik, melainkan unsur esensial dalam memahami sejarah sebagai produk kultural yang hidup. Dalam kerangka ini, narasi sejarah Majalengka bukanlah representasi tunggal atas kebenaran historis, melainkan hasil negosiasi antara fakta empiris dan struktur simbolik dari memori kolektif masyarakat. Oleh karenanya, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan historiografi, antropologi budaya, dan sosiologi pengetahuan menjadi sangat relevan untuk menangkap kompleksitas ini.

Akhirnya, memahami sejarah sebagai medan tafsir menuntut kepekaan untuk membaca narasi masa lalu secara kritis, tanpa mengabaikan nilai-nilai kultural yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi penyusunan sejarah lokal yang lebih kontekstual, inklusif, dan partisipatif. Namun di sisi lain, hal ini juga menantang setiap upaya akademik untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab secara intelektual dalam menghadirkan narasi sejarah yang tidak semata mengafirmasi identitas, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap dinamika sosial-politik yang membentuknya. Rekonstruksi sejarah Majalengka,

dengan demikian, menjadi lebih dari sekadar kerja pengarsipan—ia adalah proses kebudayaan yang menguji kematangan kolektif dalam menghadapi kompleksitas masa lalu.

2. **Ketegangan antara Kebenaran Akademik dan Memori Sosial**

Perubahan usulan Hari Jadi Majalengka dari tanggal 7 Juni—yang telah lama dilegitimasi melalui Peraturan Daerah tahun 1982—menjadi 11 Februari, merupakan pemantik perdebatan yang melampaui aspek administratif atau kronologis belaka. Kontroversi ini menyentuh inti terdalam dari kesadaran identitas kolektif masyarakat Majalengka, yang selama beberapa dekade telah menginternalisasi tanggal 7 Juni sebagai simbol peringatan sejarah berdirinya daerah mereka. Maka dari itu, resistensi yang muncul terhadap usulan akademik ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap data sejarah baru, tetapi lebih sebagai ekspresi kegelisahan atas disrupsi terhadap fondasi simbolik yang telah membentuk rasa memiliki terhadap ruang dan sejarah lokal.

Dalam konteks tersebut, kita dihadapkan pada benturan antara dua jenis kebenaran: kebenaran akademik yang bersandar pada prinsip verifikasi, dokumentasi, dan metodologi ilmiah, versus kebenaran sosial yang hidup dalam ingatan kolektif dan diwariskan melalui praktik budaya, upacara publik, serta transmisi antar generasi. Fakta sejarah hasil kajian akademik kerap tidak sepenuhnya sejalan dengan

narasi yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. “Fakta sosial” – yakni apa yang diyakini bersama sebagai benar oleh sekelompok masyarakat (Durkheim, 1895) – sering kali memiliki daya resistensi yang tinggi terhadap perubahan, terutama bila fakta tersebut menyangkut simbol identitas kolektif.

Ketegangan ini bukan hanya soal isi narasi, tetapi menyentuh ranah afeksi dan emosi kultural. Di banyak kasus, termasuk di Majalengka, sejarah bukan hanya tentang “apa yang terjadi”, tetapi juga tentang “apa yang ingin dikenang”. Ketika pendekatan akademik mencoba menggeser kerangka waktu atau tokoh simbolik yang selama ini dijunjung, masyarakat kerap memaknainya sebagai bentuk pengingkaran terhadap jati diri kolektif. Dalam hal ini, rasionalitas ilmiah berhadapan dengan loyalitas emosional; dan yang terakhir sering kali lebih kuat dalam membentuk persepsi publik karena ia tertanam dalam dimensi afektif kehidupan komunitas.

Selain itu, pergeseran hari jadi tidak dapat dilepaskan dari makna representasional yang melekat padanya. Setiap tanggal historis tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga merepresentasikan narasi politik, genealogis, dan simbolik tertentu. Oleh karena itu, perubahan tanggal peringatan secara otomatis juga menyusun ulang hirarki makna: siapa yang dianggap sebagai pelaku sejarah utama, dari mana dimulainya legitimasi pemerintahan lokal, dan bagaimana masyarakat seharusnya memahami asal-usul mereka. Proses

ini, secara tidak langsung, dapat menggeser posisi simbolik kelompok tertentu dalam narasi sejarah lokal, yang kemudian menimbulkan resistensi politis dan kultural.

Dalam kerangka demikian, artikulasi sejarah sebagai bentuk pengetahuan ilmiah perlu disertai dengan sensitivitas sosial dan etnografis. Kebenaran akademik yang disusun di atas basis metodologis yang kokoh sekalipun, tidak akan efektif jika tidak mampu berdialog dengan ekosistem memori sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan bukanlah konfrontasi naratif, melainkan integrasi dialogis antara historiografi akademik dan konstruksi ingatan kolektif. Hanya melalui pendekatan yang inklusif dan deliberatif, rekonstruksi sejarah dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kebenaran dan kebersamaan, bukan sekadar pemisah antara ilmu dan identitas.

3. Identitas Lokal dan Politik Emosi dalam Narasi Sejarah

Dalam kajian sejarah kultural, identitas lokal tidak pernah terbentuk semata dari data objektif mengenai masa lalu, melainkan dari narasi-narasi simbolik yang dihidupi oleh komunitas sebagai bagian dari eksistensinya. Di Majalengka, sejarah telah menjadi medium pembentukan identitas kolektif yang tertanam dalam ritual, simbol-simbol kultural, serta cerita-cerita turun-temurun yang diwariskan secara lisan. Oleh karena itu, ketika narasi historis yang telah mapan diusik atau direvisi oleh temuan-temuan akademik

baru, yang terguncang bukan hanya struktur narasi, tetapi juga konstruksi eksistensial masyarakat terhadap dirinya sendiri.

Proses internalisasi sejarah lokal berlangsung dalam waktu yang panjang dan kompleks. Ia melibatkan pembentukan memori kolektif melalui berbagai bentuk ekspresi sosial: perayaan hari jadi daerah, penyebutan tokoh-tokoh leluhur dalam upacara adat, bahkan pengajaran nilai-nilai lokal dalam pendidikan formal dan informal. Semua elemen ini membentuk imajinasi bersama tentang siapa “kita” sebagai orang Majalengka. Maka, intervensi naratif terhadap sejarah masa lalu, terutama yang melibatkan figur atau peristiwa simbolik, kerap dimaknai sebagai ancaman terhadap integritas identitas itu sendiri – meskipun didasarkan pada argumen akademik yang valid.

Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut sebagai *politik emosi* dalam historiografi lokal: bagaimana perasaan kolektif, nostalgia, dan kebanggaan historis menjadi landasan kuat dalam mempertahankan atau menolak narasi sejarah tertentu. Dalam situasi ini, emosi tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan, tetapi juga menjadi alat pembingkai makna sejarah itu sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa satu narasi lama telah memberi legitimasi dan rasa hormat terhadap leluhur mereka, maka segala upaya untuk meninjau ulang narasi tersebut dianggap sebagai bentuk delegitimasi atas martabat kolektif.

Lebih jauh, narasi sejarah yang berperan sebagai fondasi identitas lokal cenderung tidak hanya bersifat

representasional, tetapi juga performatif. Artinya, narasi tersebut tidak sekadar menceritakan masa lalu, tetapi juga membentuk perilaku sosial dan kebijakan kultural masa kini. Dalam konteks Majalengka, misalnya, figur-figur sejarah tertentu menjadi rujukan dalam penamaan tempat, pemberian gelar adat, hingga strategi pembangunan berbasis kearifan lokal. Ketika narasi ini digeser oleh pembacaan akademik yang berbeda, maka terjadi gangguan terhadap struktur simbolik yang telah mengatur relasi sosial dan persepsi diri masyarakat selama ini.

Oleh sebab itu, dalam proses rekonstruksi sejarah, sensitivitas terhadap dimensi emosional-kultural menjadi prasyarat penting agar proses akademik tidak terjerumus dalam determinisme epistemik yang menafikan perasaan kolektif masyarakat. Keseimbangan antara ketelitian ilmiah dan empati sosial menjadi krusial agar narasi sejarah yang direkonstruksi dapat berfungsi sebagai medium reflektif, bukan destruktif. Narasi yang berakar pada kebenaran akademik, tetapi juga mampu menjangkau rasa kolektif, akan lebih diterima dan berpotensi menjadi narasi pemersatu yang tidak hanya menjelaskan siapa kita, tetapi juga membantu kita menjadi lebih dewasa dalam memahami dari mana kita berasal.

4. Masalah Legitimasi dan Otoritas Historiografis

Dalam setiap upaya rekonstruksi sejarah, pertanyaan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan narasi historis yang sah menjadi isu yang tidak terhindarkan.

Hal ini tampak sangat menonjol dalam kasus Majalengka, di mana upaya akademik untuk meninjau ulang kronologi sejarah—termasuk perubahan Hari Jadi dari 7 Juni ke 11 Februari—menyingkap persoalan yang lebih dalam terkait legitimasi epistemik. Siapakah yang berhak menyatakan bahwa suatu versi sejarah lebih valid daripada yang lain: apakah sejarawan dengan perangkat metodologisnya, budayawan lokal yang merawat memori komunitas, atau keturunan tokoh sejarah yang mengklaim otoritas berdasarkan silsilah?

Persoalan ini tidak sekadar teknis-metodologis, melainkan juga bersifat politis dan kultural. Dalam konteks lokal, klaim terhadap sejarah kerap kali berkelindan dengan legitimasi sosial, identitas komunal, dan bahkan kepentingan simbolik dari kelompok-kelompok tertentu. Ketika narasi sejarah ditentukan oleh sekelompok akademisi yang mungkin dianggap "asing" dari kultur lokal, maka muncul potensi resistensi karena dianggap mencabut hak partisipatif masyarakat dalam merumuskan sejarahnya sendiri. Dalam hal ini, sejarah tidak hanya menjadi milik para ahli, melainkan juga milik komunitas yang merasa terlibat secara emosional dan genealogis dalam narasi tersebut.

Di sisi lain, akademisi sering mengklaim legitimasi historiografis melalui metodologi ilmiah yang berbasis sumber primer, kritik dokumen, dan rasionalitas empiris. Namun, legitimasi tersebut dapat tereduksi ketika tidak disertai dengan pemahaman kontekstual terhadap cara

masyarakat membentuk dan memaknai sejarah mereka secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas dalam historiografi bukanlah monolitik, melainkan bersifat polisentris – terbentuk dari interaksi antara keahlian akademik, kepekaan kultural, dan penerimaan sosial. Dalam masyarakat yang plural, upaya rekonstruksi sejarah harus menyadari adanya pluralitas epistemik dan tidak jatuh pada hegemonisasi naratif tunggal.

Lebih jauh, perlu disadari bahwa otoritas sejarah tidak hanya menyangkut siapa yang menulis, tetapi juga untuk siapa narasi itu ditulis. Sejarah yang hanya ditujukan bagi komunitas akademik, tetapi tidak membuka ruang partisipasi dan keterlibatan publik, berisiko teralienasi dari realitas sosial tempat sejarah itu hidup. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas lokal dalam proses validasi narasi sejarah menjadi elemen penting dalam membangun otoritas historiografis yang inklusif dan berkelanjutan. Dialog antara akademisi dan masyarakat, antara sumber tertulis dan ingatan lisan, adalah syarat untuk menciptakan narasi sejarah yang dapat diterima secara luas tanpa kehilangan integritas ilmiahnya.

Dalam konteks Majalengka, tantangan terbesar bukan terletak pada persoalan benar atau salah secara akademik, melainkan pada bagaimana mengelola klaim-klaim historiografis yang bersumber dari aktor-aktor dengan latar belakang epistemik yang berbeda. Pendekatan deliberatif, yang menempatkan sejarah sebagai medan dialog antar tafsir, perlu dikedepankan untuk menjembatani perbedaan tersebut.

Dengan demikian, narasi sejarah tidak hanya menjadi hasil kerja para ahli, tetapi juga menjadi proses kolektif dalam merumuskan identitas bersama yang reflektif, inklusif, dan berakar pada penghargaan terhadap keragaman sumber makna historis.

5. Romantisisme Masa Lalu dan Tanggung Jawab Akademik

Dalam narasi sejarah lokal, masa lalu kerap kali diidealkan sebagai ruang waktu yang penuh harmoni, kejayaan, dan keteladanan moral. Romantisisme ini merupakan bagian dari mekanisme psikososial masyarakat dalam membangun harga diri kolektif dan memperkuat solidaritas identitas. Tak terkecuali dalam konteks Majalengka, masa lalu sering dipersonifikasikan sebagai zaman emas—di mana tatanan sosial dianggap lebih tertib, tokoh-tokoh leluhur dimuliakan, dan peradaban lokal memperoleh kehormatannya. Imaji tersebut telah melekat dalam benak publik, dan menjadikannya sebagai fondasi naratif yang sulit digugat, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta-fakta historis.

Romantisisme terhadap sejarah tidak selalu bermasalah; dalam banyak hal, ia memiliki fungsi afektif dan integratif yang kuat. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kecenderungan idealisasi tersebut menghambat proses refleksi kritis dan koreksi naratif yang berbasis data. Ketika masyarakat menolak temuan-temuan baru karena dianggap merusak "kesakralan" narasi lama, maka romantisisme

berubah menjadi resistensi terhadap pembaruan wacana. Dalam kondisi ini, sejarah terancam membeku menjadi mitos, dan bukannya berkembang sebagai pengetahuan yang hidup dan kontekstual. Tantangan terbesar akademisi adalah bagaimana menghadirkan sejarah yang tetap berpijak pada prinsip ilmiah, namun tidak serta-merta menyingkirkan nilai-nilai kultural yang telah terlembaga dalam memori sosial.

Tanggung jawab akademik dalam menghadapi hal tersebut tidak berhenti pada produksi pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Ia juga mencakup tanggung jawab etis dan komunikatif—yakni bagaimana menyampaikan narasi sejarah dengan cara yang dialogis, empatik, dan kontekstual. Akademisi bukan hanya pelacak jejak masa lalu, tetapi juga mediator antara berbagai versi kebenaran yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Majalengka, para sejarawan lokal dan nasional perlu merumuskan strategi naratif yang tidak hanya mencerahkan secara intelektual, tetapi juga merangkul secara emosional, agar sejarah dapat diterima sebagai alat pembelajaran, bukan sebagai ancaman terhadap identitas.

Pendekatan semacam ini memerlukan keberanian intelektual sekaligus kepekaan kultural. Artikulasi sejarah harus mampu membuka ruang bagi keragaman tafsir, sambil tetap memelihara prinsip-prinsip keilmuan yang kritis. Dengan demikian, sejarah dapat berfungsi sebagai arena refleksi kolektif, di mana masyarakat belajar untuk mencintai masa lalunya secara dewasa—yakni dengan mengakui

kebesaran tanpa menutup mata terhadap kompleksitas, kontradiksi, bahkan kekeliruan yang pernah terjadi. Kematangan historis semacam ini penting tidak hanya untuk merumuskan identitas lokal yang utuh, tetapi juga untuk membangun kesadaran historis yang transformatif dan visioner.

Akhirnya, tujuan utama dari rekonstruksi sejarah bukanlah meruntuhkan bangunan memori kolektif yang telah ada, melainkan menyegarkannya melalui pengetahuan baru yang lebih tajam dan kontekstual. Tugas akademisi adalah menjembatani antara romantisme yang memelihara dan kritik yang mencerahkan. Jika dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, maka sejarah tidak akan menjadi alat pemecah, tetapi sebaliknya, menjadi ruang perjumpaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang saling menyapa dalam kesadaran yang lebih inklusif dan berdaya.

Penutup

Kontroversi seputar rekonstruksi sejarah Majalengka, khususnya terkait perubahan Hari Jadi dari 7 Juni ke 11 Februari, memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya merupakan domain akademik, tetapi juga medan sensitif di mana identitas kolektif, emosi kultural, dan legitimasi sosial berinteraksi secara kompleks. Upaya meluruskan sejarah melalui pendekatan historiografis modern tidak dapat dilepaskan dari resistensi yang muncul dari masyarakat yang telah lama menginternalisasi narasi lama sebagai bagian dari memori sosial mereka. Ketegangan antara kebenaran

akademik dan fakta sosial bukan sekadar refleksi perbedaan epistemologi, tetapi juga representasi konflik laten antara rasionalitas ilmiah dan loyalitas emosional terhadap simbol-simbol kultural.

Sejarah Majalengka, sebagaimana sejarah lokal lainnya, tidak bisa direduksi menjadi kronik peristiwa semata. Ia adalah konstruksi tafsir yang terbentuk melalui dialog panjang antara masa lalu dan masa kini, antara bukti empiris dan makna simbolik, antara pengetahuan dan pengakuan. Dalam konteks ini, rekonstruksi sejarah menuntut lebih dari sekadar akurasi data; ia juga memerlukan kepekaan etis terhadap konteks sosial tempat narasi tersebut akan diterima atau ditolak. Akademisi, oleh karena itu, dituntut tidak hanya sebagai penyusun kebenaran, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antar narasi – antara yang tertulis dalam dokumen dan yang terpatrit dalam ingatan kolektif.

Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan transdisipliner dalam penyusunan ulang sejarah lokal. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan – akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, dan generasi muda – untuk menciptakan narasi sejarah yang tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga berterima secara sosial. Dengan demikian, sejarah dapat difungsikan sebagai medium reflektif yang memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong masyarakat menuju kedewasaan kultural yang lebih terbuka dan kritis.

Lebih dari itu, proses rekonstruksi sejarah seharusnya tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap warisan budaya, melainkan sebagai upaya memurnikan kembali akar-akar identitas yang telah lama tertutup oleh kabut mitologisasi. Sejarah yang dibaca secara kritis dan terbuka bukanlah sejarah yang menghianati leluhur, melainkan sejarah yang justru merawat mereka dalam terang pemahaman yang jujur dan berimbang. Hanya melalui keberanian untuk meninjau ulang masa lalu dengan sikap intelektual yang reflektif dan kultural yang empatik, Majalengka dapat merumuskan identitas historisnya secara lebih otentik dan berdaya guna untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, rekonstruksi sejarah Majalengka bukanlah sekadar proyek akademik, tetapi sekaligus proses sosial yang menantang masyarakat untuk berani menyulam luka-luka naratif menjadi kearifan bersama. Di tengah dunia yang terus berubah, sejarah lokal tidak boleh menjadi artefak beku yang dilestarikan tanpa makna, melainkan harus menjadi sumber inspirasi yang hidup, kritis, dan terus diperbaharui dalam semangat kejujuran dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Majalengka, 08 Mei 2025

Mengapa Sejarah Majalengka Harus Direkonstruksi? Dari Ingatan Kolektif Menuju Peta Batin dan Strategi Peradaban

(Tanggapan atas Seminar Uji Publik Naskah Akademik
Perubahan Hari Jadi Majalengka, 7 Mei 2025)

Oleh: Endi Rochaendi

Pendahuluan

Sejarah bukan sekadar susunan kronologi atau katalog peristiwa; ia adalah ruang batin yang menyimpan resonansi makna dan arah. Ia hidup dalam ingatan kolektif, menjelma dalam ritus, serta membentuk horizon nilai sebuah komunitas tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ke mana mereka hendak menuju. Pertanyaan mengapa sejarah Majalengka harus direkonstruksi tidak boleh dipahami sebagai persoalan teknis administratif belaka. Ia adalah pertanyaan eksistensial yang menyentuh kesadaran terdalam tentang jati diri, keterhubungan dengan tanah leluhur, dan masa depan yang ingin diciptakan secara sadar.

Majalengka hari ini dikenali sebagai sebuah kabupaten di wilayah administratif Jawa Barat, tetapi akar historisnya menjulur jauh lebih dalam dan luas daripada sekadar tahun berdiri yang tertulis dalam dokumen kolonial. Di balik garis-garis batas geografis dan struktur birokratis, terdapat lanskap batin yang dibentuk oleh interaksi panjang antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai lokal yang tumbuh dalam tubuh

sejarah yang tidak pernah utuh diceritakan. Ketika pertanyaan “mengapa sejarah Majalengka harus direkonstruksi” diajukan, yang sejatinya diminta bukan sekadar data atau arsip, tetapi pemaknaan ulang terhadap keberadaan.

Narasi sejarah Majalengka selama ini lebih banyak dibingkai oleh logika formal negara—seremonial, slogan pembangunan, dan konstruksi simbolik yang kerap dibangun di atas dasar pemahaman yang terburu-buru, sepotong-sepotong, bahkan kadang artifisial. Rekonstruksi yang sejati tidak dilandasi oleh kerinduan romantik terhadap masa lalu, melainkan oleh kesadaran moral untuk merangkai kembali benang-benang identitas yang tercerai-berai. Ini adalah tanggung jawab kultural untuk menghindari kekosongan makna dalam pembangunan, agar perubahan tidak berhenti sebagai proyek fisik tanpa jiwa.

Pembangunan yang tidak ditopang oleh pemahaman sejarah berisiko menciptakan masyarakat yang tercerabut dari akar dan kehilangan arah. Ketika narasi historis dibiarkan kabur atau dimonopoli oleh kepentingan simbolik, masyarakat pun kehilangan peta batin. Rekonstruksi sejarah adalah upaya untuk merebut kembali hak masyarakat atas narasi dirinya sendiri—agar identitas tidak dikaburkan oleh kekuasaan, dan masa depan tidak dibangun di atas kehampaan ingatan.

Tulisan ini bertujuan bukan hanya untuk menegaskan urgensi rekonstruksi sejarah Majalengka, tetapi juga

mengajak pembaca menyelami lebih dalam: bagaimana sejarah dapat menjadi peta batin bersama, fondasi moral, dan strategi peradaban yang berpijak pada pluralitas warisan. Dari titik perenungan inilah, kita mulai menelusuri pertanyaan mendasar yang tak kunjung selesai dijawab secara tuntas: *Mengapa sejarah Majalengka harus direkonstruksi?*

Ingatan Kolektif dan Krisis Identitas Daerah

Ingatan kolektif tidak terlahir dari sekadar tumpukan fakta atau rangkaian peristiwa yang dihafal. Ia merupakan hasil dari proses internalisasi makna yang berlangsung dalam jangka panjang, tertanam dalam praktik budaya, bahasa, ritus, serta kebiasaan sehari-hari yang membentuk pola pikir masyarakat. Ketika sebuah daerah kehilangan kemampuan untuk merawat dan menyalurkan ingatan kolektifnya, maka yang terjadi bukan sekadar lupa, tetapi kekosongan identitas. Majalengka tengah menghadapi situasi semacam ini: ketika sejarahnya dibungkam oleh keheningan dokumentasi, dan kebudayaannya tergantikan oleh bentuk-bentuk visual yang tidak mewakili kedalaman nilai lokal.

Majalengka tumbuh sebagai ruang yang menyimpan jejak panjang peradaban, dari agraris spiritual di Talaga, struktur kekuasaan Sumedanglarang, hingga jalinan Islam kosmopolit Cirebon. Namun, warisan itu kini nyaris tidak hadir dalam kesadaran publik. Kota ini dirayakan melalui festival hari jadi dan tugu-tugu simbolik, tetapi narasi yang menghidupkan jiwa Majalengka tetap tertinggal di balik layar

pembangunan. Perayaan menjadi peristiwa formal yang terlepas dari nilai, dan sejarah disempitkan menjadi kalender, bukan sebagai denyut pengalaman yang dialami secara kolektif dan terus-menerus dibaca ulang.

Ketika sejarah dikerdilkan menjadi formalitas seremonial, masyarakat kehilangan daya refleksi. Generasi muda mengenal Majalengka dari baliho promosi wisata atau ikon visual yang kehilangan konteks. Mereka tidak lagi mendengar hikayat tentang asal-usul tempat tinggalnya, tidak diajarkan makna di balik nama-nama kampung atau gunung yang mengitari kehidupan mereka. Narasi menjadi asing, dan identitas menjadi lapisan tipis yang rapuh, mudah digantikan oleh budaya instan dan simbol-simbol luar yang tidak tumbuh dari tanah ini.

Proses pemutusan narasi tersebut melahirkan ruang publik yang kehilangan referensi. Desa menjadi permukiman, pasar menjadi pusat transaksi, dan sekolah menjadi tempat menghafal – bukan lagi arena pewarisan nilai. Hilangnya ingatan kolektif menciptakan kekeringan batin yang tak selalu tampak secara fisik, tetapi terasa dalam bentuk keterasingan, keraguan diri, dan ketidakpastian arah dalam kehidupan bersama. Masyarakat seperti hidup di atas tanah yang tidak lagi dikenali, meski setiap hari mereka menginjaknya.

Rekonstruksi sejarah dalam konteks ini adalah panggilan untuk kembali kepada akar, bukan dengan cara melarikan diri ke masa lalu, tetapi dengan menggali ulang sumber daya batin yang pernah menyatukan masyarakat ini

secara spiritual dan sosial. Ia adalah proses ziarah, bukan hanya ke situs atau artefak, tetapi ke kesadaran itu sendiri: bahwa di balik setiap ritus desa, lagu anak, atau cerita rakyat, tersimpan fondasi identitas yang mampu memberi arah hidup. Tanpa rekonstruksi ini, pembangunan akan terus bergerak secara mekanis, tetapi akan kehilangan resonansi batinnya.

Tindakan menyelamatkan ingatan kolektif tidak bisa diserahkan hanya kepada institusi formal. Ia harus menjadi gerakan sosial, gerakan keluarga, gerakan kampung – yang sadar bahwa setiap kisah, bahasa, dan kebiasaan adalah bagian dari peta diri yang tidak boleh terhapus. Upaya ini bisa dimulai dari hal kecil: mendokumentasikan cerita nenek, menghidupkan kembali permainan tradisional, menyelipkan nilai lokal dalam pembelajaran di sekolah, atau merancang ruang publik yang menampilkan narasi sejarah lokal secara kontekstual dan bermakna.

Majalengka tidak bisa menjadi kota yang kuat jika tidak tahu dari mana ia bertumbuh. Ingatan kolektif adalah fondasi dari ketangguhan budaya. Ketika masyarakat tahu kisahnya, tahu tokoh dan nilai-nilai yang membentuknya, maka mereka tidak akan mudah terseret oleh arus imitasi global. Mereka akan menapaki zaman dengan pijakan yang kuat, karena mereka tahu bahwa identitas bukan sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang dirawat – dengan cinta, kesadaran, dan kontinuitas. Di sanalah sejarah menjadi bukan sekadar masa lalu, tetapi kekuatan hidup yang memberi makna pada hari ini dan arah bagi masa depan.

Rekonstruksi Sejarah sebagai Peta Batin

Pembangunan yang tidak disertai kedalaman makna hanya akan melahirkan ruang-ruang hampa yang kehilangan jiwa. Sejarah, dalam konteks ini, berfungsi bukan sebagai kronik masa lalu semata, tetapi sebagai peta batin yang menuntun arah kolektif sebuah masyarakat. Di Majalengka, rekonstruksi sejarah tidak hanya menjadi kerja dokumentasi, melainkan sebuah laku spiritual untuk menelusuri kembali jalur makna yang mengikat manusia dengan tanahnya, dengan leluhurnya, dan dengan sesamanya. Ia bukan upaya memahat masa lalu di batu nisan waktu, tetapi menggali kompas yang telah lama tertanam dalam kesadaran komunal.

Peta batin bukan dibentuk oleh garis batas teritorial, melainkan oleh simpul-simpul pengalaman yang diwariskan secara kolektif dan sublim: dari bahasa ibu yang mengandung nilai kesantunan lokal, dari perkampungan yang dibangun dengan pertimbangan arah angin dan gunung, dari sistem pertanian yang tak hanya memikirkan hasil panen, tetapi juga ritme semesta dan keberkahan. Di titik ini, sejarah tidak lagi dilihat sebagai deretan fakta, tetapi sebagai jaringan relasi yang hidup, yang memberi arah dan daya tahan.

Memahami sejarah sebagai peta batin mengharuskan kita untuk membaca ulang relasi antara manusia dan ruang. Di Majalengka, banyak kampung tua dibangun di lereng, jauh dari pusat jalan raya, bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena kesadaran ekologis dan spiritual yang mempertimbangkan aliran air, keteduhan angin, dan

kesucian hutan. Rekonstruksi sejarah akan menemukan bahwa pilihan-pilihan spasial semacam itu bukan tindakan pragmatis semata, tetapi perwujudan dari etika ekologis yang tertanam dalam nilai-nilai seperti *sawala* (musyawarah), *silih asah*, *silih asih*, dan *silih asuh*—nilai-nilai yang menjadi fondasi keseimbangan sosial dan batin.

Ketika pembangunan modern merayakan kecepatan dan efektivitas, peta batin justru menekankan kesinambungan dan keutuhan jiwa kolektif. Di sinilah letak krisis zaman ini: ketika jalan dibangun, tetapi arah batin hilang; ketika gedung ditinggikan, tetapi akar spiritual masyarakat tercerabut. Peta batin memberi pengingat bahwa pembangunan sejati tidak dimulai dari tiang pancang, tetapi dari pengakuan terhadap nilai dan makna yang hidup di tengah masyarakat. Rekonstruksi sejarah Majalengka menjadi jalan untuk merajut kembali keutuhan ini.

Bukan glorifikasi masa lalu yang ingin dituju, melainkan penyerapan hikmah: mengapa leluhur kita merawat ruang, menjaga waktu, menata hidup bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pintu masuk untuk memahami bahwa sejarah bukan kumpulan kenangan mati, melainkan medan makna yang jika dibaca dengan kejernihan, akan membawa kita pada kesadaran baru. Peta batin adalah fondasi kebudayaan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruhnya. Tanpa itu, Majalengka akan menjadi tempat tinggal yang terus tumbuh secara fisik, tetapi terus kehilangan kemanusiaannya yang terdalam.

Strategi Peradaban: Dari Narasi Menuju Arah Kebijakan

Rekonstruksi sejarah tidak dapat berhenti pada ruang akademik atau terbatas pada wacana budaya elite. Ia harus menyeberang ke ranah praksis, menjadi panduan dalam menyusun strategi peradaban yang konkret. Ketika sejarah diposisikan sebagai sumber nilai dan bukan sekadar arsip, maka ia dapat mengilhami arah pembangunan yang lebih kontekstual, berakar, dan berkelanjutan. Keberhasilan masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan mengimpor teknologi atau mengejar statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana kebijakan publik mampu bersandar pada nilai-nilai lokal yang telah teruji oleh waktu dan kearifan kolektif.

Narasi sejarah yang hidup dapat dijadikan fondasi untuk menyusun ulang sistem pendidikan yang tidak tercerabut dari tanahnya sendiri. Kurikulum sekolah yang memasukkan sejarah lokal sebagai arus utama bukan sekadar untuk mengajarkan fakta, tetapi untuk membentuk identitas yang sadar asal-usul dan memiliki tanggung jawab moral terhadap warisannya. Di ruang-ruang publik, sejarah bisa hadir melalui seni rupa, arsitektur, nama jalan, taman kota, dan pusat-pusat kebudayaan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan simbolik yang memanusiaikan.

Pembangunan kota pun dapat dirancang tidak hanya berdasarkan efisiensi tata ruang, tetapi juga berdasar pada ingatan kolektif dan konfigurasi batin masyarakatnya. Ruang-

ruang lama yang menyimpan jejak sejarah tidak harus digusur oleh arus modernisasi, melainkan bisa dikonservasi sebagai titik-titik makna yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ketika Majalengka merancang masa depannya berdasarkan narasi sejarah yang telah direkonstruksi secara jujur dan mendalam, maka yang dibangun bukan sekadar kota, tetapi peradaban—yang tahu dari mana ia datang, ke mana ia menuju, dan mengapa ia harus terus berdiri.

Kebijakan yang bersumber dari narasi lokal memiliki ketahanan jangka panjang karena ia tidak dibentuk oleh proyek sesaat, melainkan oleh fondasi nilai yang telah terbukti hidup dan diterima. Sejarah yang diintegrasikan ke dalam diplomasi budaya antarwilayah juga memperluas jangkauan Majalengka sebagai entitas yang tidak hanya administratif, tetapi juga simbolik: kota yang membawa narasi, bukan hanya angka. Keberadaan Majalengka di antara kekuatan Sunda, Cirebon, dan Priangan menjadikannya titik temu kultural yang kaya, dan narasi inilah yang dapat dijadikan sebagai kekuatan lunak (*soft power*) dalam membangun relasi antardaerah berbasis penghormatan terhadap warisan sejarah.

Pembangunan sejati adalah yang menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu tarikan napas. Ketika sejarah dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang, maka masyarakat tidak hanya tumbuh secara teknologis, tetapi juga dewasa secara

batin. Mereka tidak hanya tahu bagaimana hidup, tetapi juga tahu mengapa mereka hidup seperti itu. Di situlah letak peradaban yang sesungguhnya: ketika kemajuan tidak melupakan akar, dan ketika masa depan dibangun di atas kejujuran terhadap masa lalu.

Menolak Reduksi: Sejarah Bukan Sekadar Tanggal dan Tokoh

Reduksi sejarah menjadi deretan tanggal dan tokoh merupakan bentuk pelumpuhan terhadap makna yang seharusnya hidup dan dinamis. Sejarah bukan sekadar kronik birokratis yang mencatat siapa memerintah dan kapan sesuatu dimulai, melainkan medan makna yang menampung denyut batin kolektif, narasi yang tak tercatat, dan jejak-jejak spiritual yang mengakar dalam laku hidup masyarakat. Di Majalengka, perdebatan mengenai “tahun berdiri” terlalu sering menutupi pertanyaan-pertanyaan yang lebih substantif: nilai-nilai apa yang diwariskan dari generasi ke generasi? Sistem sosial seperti apa yang pernah membentuk harmoni antarwarga? Etika seperti apa yang menopang hidup masyarakat pegunungan, hutan, dan sawah selama berabad-abad?

Sejarah yang direduksi pada angka kehilangan dimensi kemanusiaannya. Angka tidak pernah cukup untuk menjelaskan mengapa suatu komunitas bertahan di tengah ancaman, bagaimana relasi spiritual terbangun antara manusia dan gunung, atau apa arti berkumpul di balai

kampung ketika musim tanam datang. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menuntut kedalaman pendekatan, keberanian untuk mendengar suara yang selama ini tidak dicatat dalam buku-buku resmi: suara ibu-ibu tua di dapur, suara pemangku adat di pinggir hutan, suara angin yang membawa mitos dari generasi ke generasi.

Majalengka adalah ruang yang dihuni oleh ribuan lapis memori—bukan hanya memori kekuasaan, tetapi juga memori tanah, air, dan tubuh manusia yang menyatu dengannya. Rekonstruksi sejarah yang hanya mengejar keakuratan angka akan gagal menangkap apa yang membuat masyarakat Majalengka hidup secara spiritual dan sosial. Perkampungan yang dibangun di lereng, kepercayaan terhadap “tempat keramat”, laku bertani yang mengikuti kalender bulan, semuanya adalah artefak dari kebijaksanaan lokal yang membentuk struktur eksistensial masyarakat. Tidak satu pun dari itu bisa dijelaskan hanya dengan kronologi.

Pendekatan terhadap sejarah Majalengka harus berani melampaui arsip kolonial dan dokumen negara. Ada nilai-nilai yang tersembunyi dalam cerita rakyat, dalam ritus sunyi, dalam tarian yang hanya digelar setahun sekali, dan dalam bahasa yang pelan-pelan punah. Setiap benda pusaka, setiap puing dari situs tua, dan setiap legenda yang diwariskan dengan nada rendah adalah teks yang layak dibaca—tidak dengan mata akademik semata, tetapi dengan mata batin yang mau menafsirkan. Sejarah harus menjadi praktik

interdisipliner yang melibatkan antropologi, ekologi, linguistik, hingga mistisisme lokal, karena hanya dari situlah kita bisa mendekati makna yang utuh.

Etika historis harus tumbuh dari kesadaran bahwa tidak ada satu pun versi tunggal yang mampu mewakili kompleksitas sejarah Majalengka. Masyarakat agraris, komunitas pesantren, dan tradisi pegunungan tidak dapat dijelaskan hanya dengan kisah Arya Talaga, Sumedanglarang, atau Cirebon. Setiap sudut menyimpan narasi, dan setiap narasi menyimpan legitimasi yang tidak selalu harus dibenturkan, tetapi justru perlu dijahit menjadi satu kesadaran bersama. Sejarah menjadi hidup bukan ketika ia diperebutkan, tetapi ketika ia dihargai sebagai cermin bersama untuk menata masa depan.

Menghidupkan sejarah berarti mengizinkannya hadir dalam keseharian: dalam cara kita berbicara, bekerja, berdoa, dan membangun. Sejarah bukan milik masa lalu yang mati, melainkan energi simbolik yang terus mengalir, membentuk cara kita menatap diri dan orang lain. Di Majalengka, sejarah dapat menjelma menjadi rancang bangun desa, menjadi isi kurikulum sekolah, menjadi prinsip kebijakan, bahkan menjadi dasar dalam merancang ruang publik yang tidak asing bagi jiwa warganya. Dari sinilah sejarah menjadi bukan hanya kenangan, tetapi fondasi peradaban yang hidup.

Ketika kita menolak reduksi terhadap sejarah, kita sedang membuka pintu untuk pengalaman yang lebih luas, lebih jujur, dan lebih membumi. Majalengka tidak perlu

dikurung dalam angka tahun atau nama besar. Ia cukup dimaknai sebagai ruang yang dihuni oleh ingatan yang saling bersilang—antara yang terdengar dan yang nyaris hilang. Menulis ulang sejarahnya berarti menuliskan ulang cara kita mencintai tanah ini, tidak sekadar sebagai tempat berpijak, tetapi sebagai tubuh kolektif yang menyimpan arah, nilai, dan jiwa.

Implikasi Kultural dan Pembangunan Masa Depan

Rekonstruksi sejarah yang telah dijalankan dengan pendekatan kritis dan kontemplatif tidak boleh berhenti pada tataran refleksi. Ia mesti ditindaklanjuti dengan tindakan kultural yang konkret. Pertanyaan besar yang muncul setelah proses penyingkapan sejarah bukanlah lagi tentang siapa dan kapan, melainkan tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Proses pembacaan ulang terhadap masa lalu harus menjadi titik awal bagi perumusan strategi peradaban yang memungkinkan masyarakat Majalengka tidak hanya mengenal dirinya secara historis, tetapi juga membentuk masa depannya secara sadar dan berakar.

Transformasi dari rekonstruksi menuju reimajinasi adalah langkah yang krusial. Imajinasi kultural yang sehat hanya mungkin tumbuh dari fondasi historis yang jernih. Ketika narasi sejarah telah direkonstruksi secara utuh, masyarakat memiliki landasan simbolik dan etis untuk membangun kebudayaan yang tidak sekadar meniru modernitas, tetapi mengolahnya dengan daya tafsir lokal.

Imajinasi ini perlu dirawat dalam bentuk institusi dan gerakan kebudayaan yang hidup. Mendirikan pusat studi sejarah dan kebudayaan Majalengka bukan semata proyek akademik, melainkan bagian dari upaya mengkristalkan ingatan kolektif menjadi pusat refleksi dan penyemaian ide-ide masa depan.

Integrasi sejarah lokal ke dalam pendidikan dasar menjadi langkah strategis yang sangat mendesak. Anak-anak Majalengka berhak mengenal tanah air kecilnya tidak hanya dari peta administratif, tetapi dari cerita, ritus, tokoh, dan nilai yang tumbuh dari desa-desa tempat mereka dibesarkan. Kurikulum yang mengajarkan nilai *sawala*, penghormatan terhadap tanah leluhur, dan keindahan kebijaksanaan lokal akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga utuh secara spiritual. Mereka akan tumbuh bukan hanya sebagai warga negara, tetapi sebagai pewaris batin tanah kelahirannya.

Revitalisasi festival budaya yang berakar pada tradisi lokal adalah salah satu bentuk artikulasi kolektif dari ingatan sejarah. Festival bukan hanya perayaan simbolik, tetapi juga cara masyarakat menyuarakan apa yang mereka anggap sakral, layak dihidupkan, dan diserahkan kepada generasi berikutnya. Ketika Majalengka merayakan dirinya dengan cara yang otentik, ia sedang mengukuhkan posisinya sebagai ruang kultural yang tidak larut dalam arus industri pariwisata yang banal. Perayaan yang menyatu dengan nilai dan sejarah lokal adalah bentuk keberanian untuk tetap berdiri di tengah derasnya globalisasi.

Kebijakan publik yang lahir dari semangat rekonstruksi sejarah akan memiliki karakter yang lebih reflektif, etis, dan kontekstual. Setiap kebijakan, baik dalam bidang tata ruang, pendidikan, lingkungan, maupun budaya, akan menyadari bahwa ruang bukan hanya tempat, tetapi memori; bahwa infrastruktur bukan hanya beton, tetapi arah; bahwa pembangunan bukan hanya pertumbuhan, tetapi kebermaknaan. Majalengka bisa menjadi contoh bagaimana sebuah wilayah administratif menjelma menjadi subjek peradaban yang membangun dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan eksternal.

Arus globalisasi dan teknologi telah menciptakan ruang kompetisi yang ketat bagi setiap daerah. Di tengah perubahan yang cepat dan massif, identitas lokal sering kali dikorbankan atas nama efisiensi atau investasi. Majalengka tidak harus menolak modernitas, tetapi harus membangunnya dengan kesadaran sejarah yang mendalam. Ketika masyarakat memiliki akar yang kuat dan narasi yang utuh, mereka dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan wajahnya sendiri. Inilah kekuatan simbolik yang tidak bisa dibeli: kepercayaan diri kolektif yang bersumber dari pemahaman sejarah yang jujur.

Masyarakat yang tahu siapa dirinya tidak akan mudah tergoda untuk menjadi orang lain. Ketika Majalengka membangun dari sejarahnya sendiri, ia tidak hanya akan tumbuh secara fisik, tetapi juga matang secara spiritual dan beradab secara kultural. Jalan sunyi rekonstruksi sejarah

adalah jalan yang memulihkan arah dan makna. Di tengah dunia yang makin gaduh oleh algoritma dan percepatan, Majalengka bisa menjadi ruang yang tenang dan terang: tempat di mana waktu bukan hanya bergerak, tetapi berakar.

Penutup: Jalan Sunyi Menuju Diri Sendiri

Majalengka bukan sekadar satu titik administratif di peta Jawa Barat. Ia adalah lanskap batin yang terbentuk dari perjumpaan panjang antara manusia, alam, dan nilai-nilai yang tumbuh melalui waktu. Setiap gunungnya menyimpan mitos, setiap sawahnya mengandung laku hidup, dan setiap desa memelihara ritus-ritus diam yang tak tercatat dalam arsip negara. Ketika sejarahnya dikerangkeng dalam angka dan simbol formal—kapan didirikan, siapa bupati, apa logonya—maka kita sedang menyusutkan cakrawala makna menjadi sebatas prosedur.

Reduksi sejarah menjadi urusan administratif membuat masyarakat kehilangan cermin untuk melihat dirinya secara utuh. Identitas dibentuk oleh narasi, bukan oleh nomenklatur. Ketika narasi tercerabut, masyarakat menjadi rapuh—mudah meniru, mudah silau, mudah lupa. Rekonstruksi sejarah bukanlah usaha romantik untuk mengenang masa lalu secara sentimental, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual dan strategis. Kita sedang berupaya menjahit kembali tenunan makna yang robek, menyatukan fragmen-fragmen pengalaman yang tercecer agar bisa diwariskan secara utuh kepada generasi mendatang.

Tindakan ini bukan pekerjaan intelektual semata, tetapi juga kerja batin. Sejarah harus direngkuh sebagai ruang kesadaran kolektif yang tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara atau akademisi. Ia harus dipeluk oleh masyarakat sendiri: oleh para petani yang masih menanam dengan kalender warisan leluhur, oleh para guru yang mengajarkan puisi dalam bahasa ibu, oleh anak-anak muda yang berani menyanyikan lagu-lagu lama di panggung masa kini. Ketika semua itu dikembalikan kepada masyarakat, sejarah menjadi hidup kembali—bukan sebagai beban, tapi sebagai napas.

Majalengka membutuhkan peta batin—peta yang tidak bisa dibuat oleh satelit atau software perencanaan wilayah, tetapi yang ditulis oleh pengalaman, nilai, dan rasa. Peta semacam itu lahir dari keheningan: dari cerita yang diceritakan saat senja, dari petuah yang dibisikkan oleh kakek di bale bambu, dari bahasa-bahasa yang hampir punah tetapi masih bergetar di ruang-ruang hati. Itulah peta yang menunjuk arah tanpa menunjuk jalan; yang memberi tahu kita ke mana melangkah tanpa mengikat kaki pada jalan tertentu.

Setelah rekonstruksi sejarah dimulai, Majalengka perlu menyusun langkah-langkah berikutnya: membangun peradaban dari dalam. Bukan untuk membanggakan masa lalu secara berlebihan, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan tidak dibangun di atas kehampaan. Peradaban yang berakar tahu bagaimana berdialog dengan zaman tanpa

kehilangan jati diri. Ia tidak tergesa-gesa dalam meniru, tidak rendah diri dalam menghadapi globalisasi, dan tidak kering dari makna di tengah modernitas yang sering kali tak menyisakan ruang bagi renungan.

Peradaban yang sejati lahir dari kemampuan sebuah masyarakat menyatukan dua kekuatan besar: ingatan dan harapan. Ingatan memberi kedalaman, harapan memberi arah. Jika Majalengka bisa menyatukan keduanya, maka ia tidak sekadar tumbuh, tetapi bertumbuh dengan jiwa. Sejarah bukan hanya fondasi masa lalu, tapi juga arsitek masa depan. Di tangan masyarakat yang sadar, ia bisa menjadi cahaya yang menuntun di tengah zaman yang gelap oleh kehilangan makna.

Majalengka sedang menapaki jalan sunyinya sendiri— sebuah jalan yang tidak selalu gemerlap, tidak selalu cepat, tetapi pasti. Jalan yang membuatnya kembali kepada dirinya sendiri: sebagai ruang hidup, sebagai tanah batin, sebagai rumah bersama yang tak hanya ditempati secara fisik, tetapi juga dihuni secara spiritual. Di sanalah kekuatan sejatinya terletak: bukan pada besar kecilnya wilayah, tetapi pada kejernihan jiwanya dalam membaca masa lalu dan merumuskan masa depan.

Majalengka, 9 Mei 2025

**Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Majalengka:
Pergulatan Kepentingan Di Antara Tiga
Keturunan (Katumenggungan Talaga, Kerajaan
Sumedanglarang, dan Kesultanan Cirebon)**
(Tanggapan atas Seminar Uji Publik Naskah Akademik
Perubahan Hari Jadi Majalengka, 7 Mei 2025)

Oleh: Endi Rochaendi

**Pengantar: Ketika Sejarah Menjadi Medan Tafsir dan
Kepentingan**

Rekonstruksi sejarah Kabupaten Majalengka bukanlah proyek sederhana yang dapat diselesaikan melalui penetapan tanggal lahir atau penunjukan figur pendiri tunggal. Di balik struktur administratif yang tampak formal, tersembunyi medan epistemologis yang rumit—ruang di mana lapisan identitas, ingatan kolektif, dan kepentingan simbolik saling bertaut dalam kontestasi makna yang belum selesai. Sejarah Majalengka bergerak tidak hanya sebagai kronik peristiwa, tetapi sebagai arena tafsir, tempat tiga poros besar—Katumenggungan Talaga, Kerajaan Sumedanglarang, dan Kesultanan Cirebon—beradu visi tentang keabsahan, warisan, dan arah historis.

Perdebatan publik mengenai siapa yang paling layak disebut sebagai “pewaris sah” sejarah Majalengka merefleksikan dinamika kekuasaan yang melampaui dimensi masa lalu. Talaga membawa jejak spiritualitas agraris dan

otonomi lokal berbasis tatanan adat; Sumedanglarang menandai peralihan struktur kekuasaan dari sistem Hindu-Buddha ke Islam, seraya membentuk tradisi birokrasi aristokratik yang tersentralisasi; Cirebon memperluas cakrawala religius dan ekonomi Majalengka melalui model Islamisasi kosmopolit yang lentur dan transnasional. Perdebatan tentang sejarah sesungguhnya adalah perdebatan tentang siapa yang berhak menafsirkan identitas masa kini dan memproyeksikan arah masa depan.

Reduksi sejarah ke dalam klaim-klaim keturunan sering kali menjebak masyarakat dalam ruang sempit yang memutlakkan narasi. Warisan Talaga, Sumedanglarang, dan Cirebon bukan entitas yang saling meniadakan, tetapi simpul-simpul yang membentuk tenunan kompleks dari jati diri Majalengka. Membaca sejarah melalui logika kompetisi akan melahirkan fragmentasi kesadaran kolektif dan membekukan keberagaman dalam bingkai identitas hegemonik. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk membaca sejarah sebagai ruang dialog, tempat berbagai warisan berdamai dalam kebersamaan yang saling menguatkan.

Majalengka tidak membutuhkan satu kebenaran sejarah tunggal, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa dirinya dibentuk oleh banyak tangan, banyak suara, dan banyak arus kebudayaan. Rekonstruksi sejarah yang bijak adalah rekonstruksi jiwa – pengakuan bahwa identitas bukan barang beku yang diwariskan secara tunggal, melainkan proses pencarian yang terus berlangsung. Di titik itulah

sejarah bukan lagi alat pembenaran kekuasaan, tetapi jalan menuju kematangan kultural dan spiritual suatu bangsa lokal yang tengah membangun dirinya dari lapisan-lapisan memori yang beragam.

Penaklukan Rajagaluh dan Talaga: Awal Fragmentasi Kekuasaan

Penaklukan Rajagaluh oleh Kesultanan Cirebon sekitar tahun 1528, disusul jatuhnya Katumenggungan Talaga pada tahun 1530, menandai momen penting yang lebih dari sekadar ekspansi politik. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam sejarah pergeseran nilai, kuasa, dan spiritualitas di wilayah yang kini bernama Majalengka. Rajagaluh dan Talaga bukan hanya wilayah administratif, tetapi pusat kebudayaan dalam tatanan Sunda klasik yang mengintegrasikan kosmologi lokal, tata sosial patronistik, dan ekonomi agraris yang menyatu dengan siklus alam dan harmoni spiritual.

Kehadiran Cirebon membawa paradigma baru yang menyelaraskan misi Islamisasi dengan kepentingan ekspansi kekuasaan pesisir. Model kekuasaan yang ditawarkan tidak lagi berbasis genealogi dan kesakralan lokal, melainkan dibangun atas fondasi otoritas kesultanan, patronase religius, dan loyalitas pada pusat-pusat kekuasaan Islam yang lebih luas. Transformasi ini memunculkan konfigurasi baru dalam memaknai legitimasi, menantang cara lama dalam melihat hubungan antara penguasa dan rakyat, serta menanamkan

benih perubahan dalam struktur sosial-budaya masyarakat lokal.

Identitas masyarakat Talaga dan Rajagaluh tidak serta-merta tercerabut, tetapi juga tidak luput dari guncangan. Proses transisi tersebut menciptakan ruang ambiguitas, di mana tradisi leluhur tetap dipeluk, sementara nilai-nilai baru perlahan diterima. Terjadi ketegangan batin antara kesetiaan terhadap akar kultural dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan sistem kekuasaan yang lebih luas dan menjanjikan kestabilan. Krisis ini melampaui dimensi politik; ia menjelma sebagai pertarungan epistemologis yang mempertanyakan ulang siapa yang berhak menafsirkan dunia, sejarah, dan tempat manusia di dalamnya.

Pergeseran kekuasaan dari otoritas lokal menuju struktur kesultanan telah menggantikan cara masyarakat memaknai waktu, ruang, dan kekuasaan sakral. Majalengka, sejak saat itu, memasuki sejarah baru yang terus bergulat antara warisan yang tumbuh dari tanahnya sendiri dan tekanan identitas yang datang dari luar. Ketegangan ini tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hidup sebagai resonansi laten dalam cara masyarakat merawat tradisi, menyusun narasi asal-usul, dan menakar ulang siapa yang dianggap memiliki hak suara atas masa lalu.

Penaklukan Rajagaluh dan Talaga menciptakan narasi pembuka tentang dislokasi yang belum selesai, tentang sejarah yang selalu dalam proses tawar-menawar antara kekuasaan dan ingatan. Dari sini, muncul kesadaran bahwa

sejarah Majalengka tidak dibentuk oleh satu jalur lurus, melainkan oleh benturan, percampuran, dan negosiasi berkelanjutan antara kekuatan-kekuatan yang membawa tafsirnya masing-masing. Sejarah tidak hadir sebagai naskah yang tertulis sekali jadi, melainkan sebagai simfoni yang terus dikomposisi ulang oleh mereka yang merasa menjadi bagian dari denyut Majalengka hari ini.

Sumedanglarang dan Persaingan Teritorial

Transformasi Kerajaan Sumedanglarang dari entitas Hindu-Budha di bawah naungan Pajajaran menjadi kerajaan Islam pada awal abad ke-16 bukan sekadar pergeseran teologis, melainkan reorientasi strategis yang membuka babak baru dalam konfigurasi kekuasaan di tatar Priangan. Afiliasinya yang erat dengan Kesultanan Mataram memperluas cakupan pengaruhnya, menghubungkannya ke pusat kekuasaan Islam pedalaman Jawa, serta memperkuat posisinya sebagai entitas politik yang tidak hanya bertahan, tetapi juga ekspansif. Ruang pengaruh itu meluas ke kawasan timur Majalengka – wilayah perbatasan yang secara geografis dan historis menjadi titik temu antara kekuasaan gunung dan gelombang, antara struktur agraris dan jaringan maritim.

Sumedanglarang membentuk dirinya sebagai tandingan terhadap dominasi Cirebon yang lebih dahulu menancapkan pengaruh di wilayah utara dan barat Majalengka. Cirebon, dengan karakter kosmopolit dan keunggulan dalam diplomasi dagang serta penyebaran Islam berbasis tarekat,

menawarkan model kekuasaan yang lentur namun meluas. Sebaliknya, Sumedanglarang menampilkan arsitektur kekuasaan yang lebih rigid, dengan jejak Mataram yang kuat dalam sistem hierarki, militerisasi, dan patronase administratif. Di antara dua model inilah Majalengka menjadi medan kontestasi yang tidak terbuka secara frontal, melainkan berlangsung secara simbolik dan kultural—melalui penyebaran nilai, pengaruh sosial, dan formasi identitas.

Tarik-ulur pengaruh tersebut tidak melahirkan garis demarkasi yang tegas, tetapi menumbuhkan ruang identitas yang cair. Warga Majalengka tumbuh dalam ambiguitas yang produktif, mewarisi silang budaya yang membentuk struktur sosial hibrid: di satu sisi ketaatan pada sistem hierarkis-kerajaan, di sisi lain kelenturan budaya maritim-pesantren. Pernikahan antarbangsawan, keberadaan pesantren yang silsilahnya bercabang ke dua poros, hingga praktik kepemimpinan desa yang bersifat adaptif, menunjukkan bahwa identitas lokal dibentuk dari simpul-simpul keterhubungan yang fleksibel dan dinamis.

Realitas tersebut memperkaya konfigurasi kultural Majalengka, tetapi sekaligus menyisakan dilema historis. Masyarakat mengalami kesulitan dalam merumuskan akar identitas tunggal karena apa yang tumbuh adalah pluralitas tafsir. Sejarah tidak berbicara dalam satu suara, melainkan dalam polifoni yang saling bersahutan dan kadang bertentangan. Inilah sumber kekuatan sekaligus sumber

kerentanan: ketika narasi sejarah hendak dijadikan alat legitimasi politik kontemporer, ketegangan-ketegangan lama pun kembali muncul dalam bentuk baru.

Kehadiran Sumedanglarang tidak hanya menyumbang lapis sejarah, tetapi juga mendesak kita untuk melihat kembali apa arti menjadi “Majalengka”. Kebangsaan lokal bukan soal garis tunggal, melainkan kemampuan suatu komunitas untuk merangkul perbedaan menjadi kekuatan kohesif. Warisan Sumedanglarang bukan soal dominasi, tetapi tentang kemampuan menciptakan ruang kontestasi yang tidak destruktif—sebuah pelajaran bahwa keutuhan sejarah dibangun dari perjumpaan dan peneguhan, bukan penyeragaman.

Kolonialisme dan Kelahiran Kabupaten: Strategi Penyatuan Simbolik

Tahun 1840 dicatat sebagai momen resmi kelahiran Kabupaten Majalengka oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keputusan administratif ini bukanlah fondasi sejarah, melainkan bentuk kristalisasi dari dinamika kekuasaan yang telah berlangsung jauh sebelumnya. Sejarah Majalengka telah ditempa oleh serangkaian perjumpaan, penaklukan, dan asimilasi antara kekuatan lokal—Talaga, Sumedanglarang, dan Cirebon—yang membentuk lanskap kultural dan politik yang kompleks. Intervensi kolonial datang bukan untuk menciptakan, melainkan mengatur

ulang. Dalam struktur kolonial, sejarah disusun agar sesuai dengan logika penguasaan dan administrasi.

Pemilihan nama "Majalengka" tidak menunjuk langsung pada salah satu dari tiga kekuatan besar yang mengakar dalam sejarah lokal. Nama itu seperti ruang kosong yang dipilih dengan sengaja – sebuah nama geografis yang netral, tidak membawa warisan konflik, dan cukup lentur untuk disematkan ke entitas baru yang hendak diatur. Pilihan ini mencerminkan kalkulasi kolonial yang presisi: menciptakan stabilitas politik lokal melalui simbol yang tidak memihak, namun mampu mengikat. Nama menjadi strategi penyatuan tanpa harus berpihak; sebuah peredam simbolik atas potensi retakan identitas historis.

Majalengka dijadikan titik temu administratif yang secara simbolik mengaburkan batas antara perlawanan dan kolaborasi. Penggabungan berbagai kawedanan ke dalam satu kabupaten adalah bentuk pembekuan dinamika sejarah dalam kerangka rasionalisasi kolonial. Apa yang sebelumnya merupakan ruang dialektis antara lokalitas dan spiritualitas, antara kekuasaan agraris dan perdagangan maritim, dilipat ke dalam satu sistem pemerintahan yang bertujuan efisiensi dan kendali. Majalengka bukan hanya diciptakan sebagai unit birokrasi, melainkan juga sebagai simbol keberhasilan kolonial dalam mentransformasikan memori menjadi teritori yang patuh.

Di balik peresmian itu, terdapat upaya subtil untuk menjinakkan masa lalu. Sejarah disederhanakan, ditata ulang

agar sesuai dengan peta kekuasaan Eropa. Di titik inilah kekuasaan kolonial menunjukkan kepiawaiannya: bukan hanya menguasai tanah dan penduduk, tetapi juga mengatur narasi—menentukan apa yang layak diingat dan apa yang disisihkan. Sejak saat itu, Majalengka tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ruang hidup warisan Talaga, Sumedanglarang, atau Cirebon, melainkan sebagai produk rasionalitas kolonial yang membekukan konflik menjadi struktur administratif.

Majalengka yang kita kenal hari ini lahir dari simpul sejarah yang tidak tunggal. Ia adalah hasil dari dialektika panjang antara lokalitas yang resistan dan kolonialisme yang hegemonik. Di satu sisi, nama Majalengka berhasil merangkul banyak identitas yang pernah bersilang; di sisi lain, ia juga menjadi ruang sunyi di mana banyak jejak sejarah lokal diredam atau dikaburkan. Rekonstruksi sejarah kabupaten ini menuntut keberanian untuk menyingkap tabir simbolik yang dipasang kolonialisme, dan membuka kembali ruang untuk mendengarkan suara-suara yang lama terdiam dalam lanskap resmi sejarah.

Klaim Keturunan dan Politik Simbolik

Beberapa dekade terakhir memperlihatkan kebangkitan ulang wacana genealogis dalam diskursus sejarah Majalengka. Berbagai kelompok keturunan—dari trah Arya Talaga yang mewarisi narasi agraris-spiritual, jalur bangsawan Sumedanglarang yang menyandang legitimasi

aristokratik, hingga keluarga ulama yang berakar pada jejaring Cirebon—berlomba menempatkan dirinya sebagai aktor sentral dalam penafsiran ulang sejarah lokal. Representasi peran itu tidak hanya hadir dalam narasi ilmiah atau folklor, tetapi menjelma ke dalam simbol-simbol konkret: tugu, prasasti, ritual tahunan, hingga perdebatan digital yang mempersoalkan "siapa pewaris sah Majalengka".

Perebutan simbolik ini menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah netral. Ia menjadi arena artikulasi kepentingan dan sumber daya makna, terutama ketika kekuasaan politik dan kultural menjadi bagian dari taruhan. Klaim keturunan tidak sekadar menyatakan asal-usul biologis, tetapi memperjuangkan hak atas representasi, bahkan dalam beberapa kasus, untuk mempengaruhi kebijakan lokal dan arah identitas kolektif. Ruang sejarah pun menjelma menjadi medan persaingan legitimasi yang terselubung: siapa yang layak dikenang, siapa yang layak dilupakan.

Kecenderungan semacam ini berisiko melahirkan regresi identitas. Alih-alih membebaskan masyarakat dari narasi hegemonik masa lalu, rekonstruksi sejarah yang terjebak dalam glorifikasi eksklusif justru menciptakan dominasi baru atas ingatan bersama. Sejarah digunakan sebagai alat untuk meneguhkan klaim politik dan budaya, bukan sebagai ruang kontemplatif untuk mengurai kompleksitas dan keragaman yang sesungguhnya membentuk Majalengka. Bila ini terus berlangsung, narasi sejarah hanya akan menjadi alat seleksi yang membungkam suara-suara alternatif.

Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah perlunya menjauh dari logika pengutamaan tunggal dan mendekat ke arah konsensus makna. Fokus sejarah seharusnya tidak terletak pada siapa yang “lebih dahulu” atau “lebih berhak”, melainkan bagaimana seluruh warisan—baik dari Talaga, Sumedanglarang, maupun Cirebon—dapat disusun menjadi narasi bersama yang memperkaya, bukan mengeliminasi. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh identitas, sejarah dapat menjadi ruang penyatuan jika dibaca secara bijak—sebagai mozaik yang saling melengkapi, bukan sebagai arsitektur yang harus diseragamkan.

Penutup: Merekonstruksi Jiwa, Bukan Sekadar Kronologi

Majalengka tidak dapat direduksi menjadi serangkaian tanggal, peristiwa administratif, atau perubahan nomenklatur politik. Ia adalah lanskap batin yang dihuni oleh lapisan-lapisan makna yang saling berjaln: spiritualitas agraris yang diwariskan Katumenggungan Talaga, struktur aristokratis dan transisi keislaman yang dibentuk Sumedanglarang, serta kosmopolitanisme religius yang dibawa oleh Kesultanan Cirebon. Setiap warisan tersebut bukan fragmen terpisah, melainkan bagian dari arus kesadaran kolektif yang membentuk identitas Majalengka secara utuh.

Rekonstruksi sejarah tidak cukup jika hanya dilakukan melalui pendekatan kronologis atau legalistik. Upaya membaca ulang Majalengka memerlukan keberanian intelektual dan kejernihan batin untuk menyelami narasi yang

tersisa dalam memori sosial, tradisi lisan, dan ritus harian masyarakatnya. Sejarah sejati tidak berdiam dalam arsip atau monumen, melainkan hidup dalam cara orang mengingat, merayakan, dan mentransmisikan nilai—yang seringkali justru tak tercatat oleh otoritas resmi.

Identitas Majalengka bukan milik satu trah, satu peristiwa, atau satu figur simbolik. Ia adalah tenunan halus dari berbagai benang sejarah yang saling menyeberang: antara gunung dan pesisir, antara pusat dan pinggiran, antara yang lokal dan yang transnasional. Masyarakat Majalengka hari ini memikul warisan yang rumit, tetapi justru dari kerumitan itulah muncul kekayaan batin dan potensi harmoni kultural yang tak ternilai.

Merekonstruksi sejarah Majalengka berarti mengembalikan hak suara kepada narasi-narasi yang selama ini terpinggirkan, menata ulang hubungan antar warisan bukan dalam hierarki, melainkan dalam dialog yang saling memperkaya. Ketika sejarah dibaca sebagai jalan pulang ke dalam diri, maka yang direkonstruksi bukan hanya peristiwa, tetapi juga jiwa kolektif yang selama ini mencari bentuknya sendiri di tengah kekacauan tafsir.

Majalengka hanya akan menjadi rumah bersama ketika semua warisan yang membentuknya diakui bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai harta bersama. Di titik itu, sejarah tidak lagi menjadi alat klaim, tetapi menjadi fondasi etis untuk hidup berdampingan. Di situlah jiwa Majalengka menemukan kedewasaannya: ketika ia tidak lagi bertanya

siapa yang paling berhak, melainkan apa yang bisa diwariskan untuk masa depan yang lebih bijak.

Majalengka, 08 Mei 2025

Rekonstruksi Sejarah Majalengka: Ketika Tanggal Lahir Diperdebatkan?

(Tanggapan atas Seminar Uji Publik Naskah Akademik
Perubahan Hari Jadi Majalengka, 7 Mei 2025)

Oleh: Endi Rochaendi

Pendahuluan

Perdebatan tentang tanggal lahir suatu daerah tampak sederhana di permukaan, tetapi sesungguhnya menyentuh lapisan terdalam dari cara kita memahami eksistensi kolektif. Ketika masyarakat begitu bersemangat menentukan satu hari sebagai momen kelahiran resmi, kita perlu bertanya: apakah yang sedang kita rayakan adalah kenyataan historis, atau sekadar kebutuhan simbolik untuk merasa memiliki asal-usul yang pasti? Kecemasan terhadap ketidakpastian sering kali melahirkan dorongan untuk meresmikan sesuatu yang sebenarnya telah lama hidup—bahkan tanpa perlu pengakuan formal apa pun.

Majalengka, sebagaimana banyak wilayah lain di Nusantara, telah hidup jauh sebelum negara memberi nama, batas, dan status administratif. Ia hadir dalam narasi yang tidak dicetak, tetapi diceritakan. Ia bernafas lewat tutur, lagu, dan ritus yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarahnya tidak ditulis oleh pemerintah kolonial atau republik muda, melainkan oleh para petani, pemangku adat, pelaku kebudayaan, dan alam itu sendiri. Ketika tanggal

lahir menjadi pusat perayaan, kita justru sedang menyaksikan bagaimana kekuasaan membingkai eksistensi berdasarkan kriteria legalistik, bukan kedalaman pengalaman.

Kecenderungan untuk memaknai sejarah melalui angka dan peresmian berisiko mereduksi realitas yang jauh lebih kompleks. Kita mengabaikan narasi-narasi hidup yang mengalir dalam bahasa ibu, dalam struktur sosial kampung, dalam tata letak pemukiman tradisional, dalam praktik keagamaan yang membumi, dan dalam cara masyarakat membangun relasi dengan ruang dan waktu. Kita mengganti pengalaman eksistensial yang organik dengan narasi institusional yang steril.

Pertanyaan yang lebih esensial bukanlah “kapan Majalengka dilahirkan?”, tetapi “bagaimana Majalengka menjadi dirinya?” Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa ditemukan dalam arsip Belanda atau dokumen pemerintah, melainkan dalam ingatan kolektif yang dijaga oleh masyarakatnya sendiri. Ketika perayaan hari jadi hanya merujuk pada angka yang tercatat secara administratif, maka yang dirayakan bukanlah Majalengka sebagai ruang budaya, melainkan Majalengka sebagai produk birokrasi.

Sejarah yang sejati tidak pernah tunduk pada formalitas tanggal. Ia hidup dalam cara orang menanam padi, menamai mata angin, menyebut bulan dan musim, serta merawat ritus yang membentuk keterhubungan antara manusia dan semesta. Di sinilah Majalengka yang otentik berada – bukan pada nama yang dilegalisasi tahun 1840, tetapi pada tubuh

kolektif yang telah lama menuliskan eksistensinya dalam diam dan keberlanjutan. Ketika itu diabaikan, maka sejarah kehilangan substansinya dan hanya menjadi perayaan bentuk tanpa isi.

Majalengka tidak lahir pada satu hari tertentu. Ia bertumbuh perlahan, dalam irama yang selaras dengan alam dan denyut masyarakatnya. Ia tidak dibangun dari keputusan administratif, tetapi dari keberlangsungan kehidupan yang menyulam waktu, ruang, dan nilai. Ketika kita memperdebatkan tanggal kelahiran, yang sering kali terlewat adalah kenyataan bahwa sejarah sejati tidak pernah menunggu pengakuan untuk menjadi nyata. Ia hidup, karena dihidupi. Ia hadir, karena diwariskan.

Sudah saatnya kita mengalihkan pertanyaan dari “kapan” menjadi “mengapa”. Kita harus mulai bertanya bukan kapan Majalengka berdiri, tetapi mengapa kita merasa perlu mengingatnya. Sebab mengingat bukan sekadar mencatat, melainkan menghidupkan. Dan hanya sejarah yang dihidupkanlah yang bisa membimbing kita kembali ke akar, memulihkan arah, dan menyalakan cahaya untuk menempuh jalan ke depan—sebuah jalan yang tidak selalu cepat, tetapi selalu jujur.

Sejarah sebagai Proses, Bukan Titik Tunggal

Majalengka tidak muncul secara tiba-tiba pada tanggal 11 Februari 1840. Ia tidak lahir karena satu keputusan administratif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda,

melainkan tumbuh dari lapisan-lapisan waktu yang menyatu dengan tanah, air, dan kehidupan masyarakatnya. Tanggal itu mungkin sah secara yuridis sebagai titik awal kabupaten dalam konteks pemerintahan kolonial, tetapi tidak bisa mewakili keseluruhan dinamika historis yang telah berlangsung jauh sebelumnya. Sejarah tidak bermula dari pengesahan, melainkan dari keberadaan yang dijalani secara kolektif.

Waktu historis tidak bersifat linier seperti urutan bab dalam buku sejarah negara. Ia bersifat cair dan berlapis. Di Majalengka, waktu tidak hanya diukur dari kronologi negara, tetapi juga dari musim tanam, ritus desa, perubahan angin, dan ritme alam. Dalam dimensi itu, sejarah adalah proses hidup yang ditenun oleh relasi antara manusia dan lingkungannya. Menyederhanakan sejarah ke dalam satu tanggal berarti mencabutnya dari kompleksitas itu dan menjadikannya hanya sebagai instrumen simbolik untuk keperluan perayaan atau legitimasi.

Wilayah Talaga, Rajagaluh, dan lembah-lembah pegunungan Majalengka telah lama menjadi ruang budaya yang mandiri, yang memiliki sistem sosial dan spiritualnya sendiri. Struktur kekuasaan lokal, relasi dengan gunung sebagai ruang sakral, serta praktik agrikultur yang berbasis pada kearifan kosmis membuktikan bahwa masyarakat Majalengka sudah hadir sebagai entitas budaya yang utuh sebelum diberi nama oleh negara kolonial. Keberadaan mereka tidak membutuhkan pengakuan administratif untuk

menjadi nyata. Mereka hadir karena menghidupi ruang itu dengan makna dan nilai.

Mengaitkan eksistensi Majalengka dengan satu titik waktu administratif seperti 11 Februari 1840 adalah bentuk kekerasan simbolik yang diam-diam menghapus jejak pengalaman lokal. Dalam logika seperti ini, masyarakat hanya dianggap “ada” setelah diakui oleh kekuasaan. Pandangan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa sejarah rakyat hidup justru di luar jalur dokumentasi formal: di dalam cerita yang diwariskan, bahasa ibu yang dijaga, dan tanah yang terus ditanami. Sejarah yang hidup tidak pernah tunduk pada satu narasi tunggal.

Majalengka adalah hasil dari proses kultural dan spiritual yang tidak dapat dipadatkan ke dalam satu dokumen resmi. Ia lahir dari jejak langkah manusia yang berdoa, bekerja, dan bermimpi di atas tanah yang sama selama ratusan tahun. Jejak ini tidak selalu tercatat dalam bentuk tertulis, tetapi terekam dalam ingatan kolektif, dalam nama-nama tempat, dan dalam sistem nilai yang masih terpelihara meski tak diakui oleh negara. Memaksakan tanggal lahir tunggal justru membekukan keragaman makna yang telah diwariskan secara organik.

Sejarah harus dipahami sebagai medan tafsir, bukan hanya fakta. Ia adalah proses penafsiran terus-menerus atas makna kehidupan bersama, yang harus dibaca dari banyak sudut pandang. Ketika kita membatasi sejarah pada angka dan peristiwa, kita kehilangan kedalaman batinnya. Kita

menjadikan sejarah sebagai benda mati yang diperingati setahun sekali, bukan sebagai cermin yang hidup yang bisa membimbing arah masa depan. Kesadaran akan sejarah sebagai proses memberi ruang bagi kita untuk menghidupi warisan itu secara aktif dan penuh tanggung jawab.

Merayakan Majalengka tidak cukup hanya dengan menetapkan tanggal. Yang lebih penting adalah menjadikan sejarah sebagai dasar untuk menyusun masa depan secara jujur dan kontekstual. Ketika sejarah diakui sebagai proses, bukan titik tunggal, maka kita diberi peluang untuk melihat ulang jati diri kita sebagai masyarakat yang berakar, berdaya tafsir, dan mampu merumuskan makna di luar batas-batas simbolik yang telah ditentukan dari luar. Di situlah Majalengka bisa berdiri, bukan hanya sebagai kabupaten administratif, tetapi sebagai ruang peradaban yang hidup, bernapas, dan terus bertumbuh.

Antara Representasi Administratif dan Realitas Kultural

Perdebatan tentang tanggal lahir Majalengka sejatinya mencerminkan kegelisahan kolektif tentang cara kita mengenang dan merumuskan diri. Perubahan dari 7 Juni ke 11 Februari tidak hanya berbicara tentang akurasi arsip atau preferensi birokrasi, tetapi juga tentang arah sejarah yang sedang dibentuk ulang. Di balik diskusi teknis itu tersembunyi ketegangan yang lebih mendalam: apakah kita sedang membangun ingatan untuk menegaskan kekuasaan

administratif, atau sedang berusaha menggali kembali ruh kultural yang telah lama terpendam?

Majalengka yang hidup dalam ingatan masyarakat tidak pernah menunggu negara untuk diresmikan. Ia tumbuh dari getar tanah yang diolah petani, dari doa-doa sunyi yang dinaikkan di surau-surau kampung, dari cerita-cerita tua yang mengikat generasi dalam satu kesadaran. Ketika negara memberi nama dan menetapkan batas, masyarakat sudah terlebih dahulu menamai ruangnya dengan makna dan harapan. Ketika negara menetapkan kabupaten, kehidupan telah lama berjalan dengan nilai dan tatanan sendiri.

Perubahan tanggal lahir mestinya menjadi momentum untuk merefleksikan ulang cara kita memandang sejarah. Identitas daerah tidak ditentukan oleh tanggal pendirian formal, melainkan oleh sejarah yang dijalani bersama. Ketika yang dirayakan adalah tanggal administratif semata, maka yang ditekankan adalah keberhasilan sistem kekuasaan. Kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan segala kebijaksanaannya, justru tersingkir dari panggung sejarah resmi. Di sinilah proses pendangkalan makna mulai berlangsung – saat struktur menggantikan substansi.

Majalengka sebagai ruang budaya telah lama eksis sebelum diberi legalitas. Ia hidup dalam laku, bukan dalam lembar dokumen. Ketika perdebatan tentang tanggal menjadi agenda utama peringatan sejarah, kita mesti bertanya: sejauh mana realitas kultural dihargai? Apakah suara masyarakat adat, petani, pemuka tradisi, dan pelaku kebudayaan turut

terlibat? Atau sejarah kembali didefinisikan dari atas, ditetapkan oleh siapa yang punya wewenang mengarsip?

Representasi administratif selalu memiliki risiko menyingkirkan keragaman pengalaman hidup. Sejarah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelembagaan sering kali tidak sanggup merangkul warisan spiritual, etnografis, dan ekologis yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat lokal. Majalengka bukan hanya kabupaten; ia adalah hasil dari proses kultural yang kompleks, yang tidak pernah bisa direduksi menjadi satu narasi tunggal. Ketika sejarah diposisikan sebagai alat validasi kekuasaan, ia kehilangan potensi transformasinya.

Perubahan narasi sejarah harus diarahkan untuk memperkuat penghargaan terhadap realitas kultural yang telah ada jauh sebelum hadirnya sistem pemerintahan modern. Ini bukan soal mengganti tanggal semata, tetapi soal mengubah cara kita membangun kesadaran. Masyarakat Majalengka tidak hanya butuh perayaan formal, tetapi ruang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur yang terbenam dalam tanah dan bahasa. Sejarah bukan soal kapan kabupaten ditetapkan, melainkan bagaimana kehidupan masyarakat terus bertahan, berkembang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Saat negara menggeser angka di kalender resmi, masyarakat dapat memilih untuk menghidupkan makna yang lebih dalam. Perubahan ini bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan narasi yang lebih menyeluruh – narasi yang

tidak hanya merayakan keberadaan administratif, tetapi juga menghidupkan kesadaran bahwa Majalengka adalah tubuh sejarah yang bernapas melalui rakyatnya. Ketika representasi administratif bersentuhan jujur dengan realitas kultural, maka sejarah tidak lagi menjadi beban perayaan, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk membangun masa depan yang berakar.

Ingatan Kolektif dan Krisis Identitas Lokal

Ingatan kolektif adalah jantung dari keberlangsungan sebuah kebudayaan. Ia bukan sekadar akumulasi cerita masa lalu, tetapi juga fondasi eksistensial yang membentuk kesadaran bersama tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang layak diwariskan. Ketika ingatan kolektif dikaburkan atau diabaikan, masyarakat kehilangan pijakan untuk memahami dirinya sendiri. Tanpa narasi sejarah yang utuh dan kontekstual, ruang batin kolektif menjadi senyap – tak lagi mampu memberi pantulan tentang jati diri, arah hidup, maupun alasan keberadaan.

Majalengka hari ini hidup di tengah paradoks antara modernitas yang tumbuh cepat dan akar budaya yang mulai mengering. Generasi muda tidak lagi mengenal dirinya dari hikayat yang diceritakan nenek, dari makna nama tempat, atau dari ritus yang dijalani bersama. Mereka justru diperkenalkan kepada Majalengka melalui ikon-ikon visual yang dibuat untuk tujuan promosi wisata atau pembangunan citra kota. Identitas yang mereka terima bukan berasal dari

dalam, tetapi dari luar – hasil desain simbolik yang sering kali terputus dari warisan pengalaman hidup masyarakatnya sendiri.

Pengikisan makna ini tidak hanya terjadi secara kultural, tetapi juga secara spiritual. Ketika sejarah tidak lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai kehilangan orientasi batin. Sejarah menjadi sesuatu yang asing, hanya dibicarakan dalam seminar atau diperingati dalam seremoni. Ia tidak lagi menjadi bagian dari napas harian, dari bahasa sehari-hari, dari nilai yang dianut tanpa perlu diajarkan. Identitas lokal pun menjadi tipis, mudah diimpor, mudah dilupakan. Kekosongan ini menyisakan generasi yang hidup di tempat yang tidak mereka kenal secara mendalam.

Ketidakhadiran sejarah yang hidup menyebabkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap diri dan ruangnya. Simbol-simbol yang diciptakan tanpa keterlibatan masyarakat hanya membentuk permukaan yang licin – indah, tetapi tak bisa digenggam. Akibatnya, masyarakat teralienasi dari ruangnya sendiri. Mereka tinggal di Majalengka, tetapi tidak mengenalnya; mereka menyebut namanya setiap hari, tetapi tidak tahu kisah di baliknya. Identitas menjadi semacam pakaian pinjaman yang dipakai untuk keperluan simbolik, bukan bagian dari tubuh dan jiwa.

Ingatan kolektif mestinya menjadi rumah tempat masyarakat pulang secara spiritual. Ia memberi kehangatan, arah, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah perubahan. Ketika rumah ini ditinggalkan,

masyarakat menjadi pengembara yang kehilangan kompas. Mereka bergerak cepat, tetapi tanpa arah. Mereka membangun kota, tetapi tanpa jiwanya. Ini adalah krisis yang tak terlihat secara langsung, tetapi merusak secara perlahan: krisis identitas yang lahir dari krisis sejarah.

Pemulihan ingatan kolektif bukan pekerjaan instan. Ia membutuhkan kehendak untuk mendengar ulang cerita lama, untuk mencatat ulang laku hidup yang terabaikan, dan untuk menempatkan kembali nilai-nilai lokal ke dalam ruang-ruang publik. Ini adalah kerja sunyi yang harus dilakukan oleh keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Ketika masyarakat kembali mendengar suara sejarahnya sendiri, mereka akan mulai mengenal kembali siapa diri mereka. Ketika narasi hidup dihidupkan, maka identitas pun tumbuh kembali – bukan sebagai beban masa lalu, tetapi sebagai bekal masa depan.

Majalengka tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan makna. Ingatan kolektif adalah fondasi dari ketahanan budaya. Ia adalah akar yang menyambungkan generasi, ruang yang mengikat komunitas, dan cahaya yang menuntun arah. Ketika masyarakat mengenali dirinya dari dalam, mereka tidak akan mudah terseret oleh arus imitasi. Mereka akan menapaki masa depan dengan kesadaran yang utuh—karena mereka tahu siapa mereka, dan mengapa mereka memilih untuk tetap menjadi diri mereka sendiri.

Epistemologi Kuasa: Siapa yang Mendefinisikan Sejarah?

Pertanyaan tentang kapan Majalengka lahir tidak hanya menyangkut kronologi administratif, tetapi menyentuh wilayah yang lebih dalam dan kritis: siapa yang berhak mendefinisikan eksistensi suatu tempat? Siapa yang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sesuatu telah “ada” atau “belum ada”? Ketika jawaban atas pertanyaan itu hanya bersumber dari dokumen kolonial atau catatan negara, maka sejarah tidak lagi menjadi ruang kesaksian kolektif, melainkan alat validasi bagi kekuasaan yang datang dari luar.

Sejarah, dalam banyak kasus, ditulis oleh mereka yang memiliki wewenang untuk mencatat, menyimpan, dan mengesahkan. Dalam konteks Majalengka, suara rakyat yang hidup secara otonom sebelum hadirnya struktur pemerintahan formal kerap tersingkir dari panggung naratif resmi. Perkampungan adat, ritus agraris, relasi spiritual dengan alam, hingga sistem nilai lokal, semua menjadi tak terlihat karena tidak termuat dalam teks yang dianggap sah oleh kekuasaan. Keberadaan mereka hanya dianggap nyata ketika tercatat, bukan ketika dijalani.

Kuasa epistemik bekerja dalam senyap. Ia mengatur apa yang layak disebut “sejarah” dan apa yang didefinisikan sebagai “mitos” atau “kebiasaan”. Ketika negara dan kekuasaan kolonial menjadi satu-satunya sumber narasi sejarah, maka yang lahir adalah sejarah yang timpang: sejarah yang memuliakan struktur, melupakan suara. Ketika angka-angka dan peta menggantikan laku hidup dan ingatan

kolektif, maka sejarah berubah menjadi arsip kosong yang tidak mewakili denyut kehidupan masyarakat lokal.

Kebenaran historis tidak pernah tunggal. Ia hidup dalam banyak suara dan bentuk. Dalam Majalengka, kebenaran itu tersimpan dalam tradisi lisan yang bertahan di saung-saung tua, dalam toponimi kampung yang menyimpan jejak spiritualitas, dalam alat-alat tani yang diwariskan secara turun-temurun, dalam kebiasaan yang tak tertulis tetapi terus dijalani. Ketika semua itu tidak diakui sebagai bagian dari sejarah, maka sejarah kehilangan keadilannya. Ia menjadi alat dominasi, bukan ruang rekonsiliasi memori.

Menentukan tanggal lahir Majalengka berdasarkan dokumen formal adalah tindakan yang secara epistemologis memihak. Ia mengabaikan kemungkinan bahwa masyarakat telah memiliki sistem pengingatan sendiri—yang tidak bergantung pada tulisan, melainkan pada penghayatan waktu secara kosmik dan ekologis. Masyarakat tidak menandai waktu dengan tahun dan bulan, tetapi dengan musim tanam, peristiwa langit, atau siklus alam yang mereka hormati. Sistem pengetahuan semacam ini tidak pernah diberi ruang dalam sejarah versi resmi.

Keberanian untuk meninjau ulang sumber sejarah bukan sekadar keberanian intelektual, tetapi juga keberanian moral. Ini adalah sikap untuk mengakui bahwa narasi negara tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Ini adalah kehendak untuk memberi suara kepada mereka yang selama ini dibungkam oleh sistem pencatatan yang selektif. Sejarah

Majalengka tidak akan utuh jika hanya dibaca dari lembar negara; ia hanya akan menjadi adil jika juga dibaca dari sawah, dari suara rakyat, dari tapak yang tertinggal di tanah, bukan hanya di kertas.

Majalengka layak memiliki sejarah yang tidak ditentukan sepihak oleh mereka yang berkuasa atas pena, tetapi dibangun bersama oleh mereka yang selama ini hidup, menjaga, dan menghidupi ruang ini. Ketika sejarah dimaknai sebagai hak bersama, maka narasi menjadi jembatan – bukan sekat. Maka yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar menetapkan tanggal, tetapi menciptakan cara pandang yang lebih jernih dan adil terhadap sejarah itu sendiri. Sebab sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa yang diberi ruang untuk berbicara tentang masa lalu itu.

Bahaya Seremonialisasi dan Dekontekstualisasi Sejarah

Sejarah kehilangan daya hidupnya ketika direduksi menjadi ritual tahunan yang tanpa makna. Perayaan hari jadi yang berpusat pada seremoni, iring-iringan visual, dan peresmian tugu-tugu monumental berisiko melumpuhkan sejarah sebagai sumber kesadaran kolektif. Ketika ruang refleksi digantikan oleh protokol, dan keterlibatan masyarakat tergantikan oleh delegasi simbolik, maka sejarah berubah menjadi panggung formalitas yang membungkam suara-suara paling otentik dari masa lalu.

Majalengka tidak dibangun oleh seremoni, tetapi oleh kerja sunyi masyarakatnya. Mereka yang menanam di ladang,

menjaga mata air, merawat bahasa, dan menyampaikan cerita dari satu generasi ke generasi lain adalah pelaku sejarah yang sesungguhnya. Ketika peringatan hari jadi tidak menghadirkan kembali narasi mereka, maka yang diwariskan hanyalah kulit sejarah, bukan ruhnyanya. Sebuah kota bisa saja terus bertambah usia, tetapi menjadi asing bagi generasi yang hidup di dalamnya karena tidak pernah diajak memahami maknanya.

Peringatan yang tidak berpijak pada refleksi berisiko menciptakan generasi yang akrab dengan logo dan angka, tetapi asing terhadap nilai. Mereka hafal tanggal dan slogan, tetapi tak tahu kisah yang menyertainya. Sejarah bukan sesuatu yang cukup diperingati, tetapi harus dijalani dan ditafsirkan ulang terus-menerus. Ketika sejarah berubah menjadi upacara, maka ia berhenti menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Padahal, kekuatan sejarah justru terletak pada kemampuannya menyalakan kesadaran—bukan sekadar dikenang, tetapi dipertanyakan dan diwariskan dalam bentuk tindakan.

Dekontekstualisasi sejarah terjadi ketika simbol-simbol masa lalu dipisahkan dari ruang makna yang melahirkannya. Tugu peringatan yang tidak diiringi oleh pendidikan sejarah yang memadai hanya menjadi penanda kosong. Lagu tema yang tidak lahir dari dialektika nilai masyarakat hanya menjadi jingle musiman. Ketika sejarah dikelola seperti proyek estetika, bukan warisan ideologis, maka ia mudah

dimanipulasi, dibingkai untuk keperluan politis, dan dijual sebagai produk visual yang memukau tetapi kehilangan akar.

Keterlibatan komunitas menjadi elemen yang tak bisa ditawarkan dalam setiap narasi sejarah yang ingin dihidupkan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam merumuskan ulang ingatannya sendiri, maka sejarah menjadi milik elit yang berbicara atas nama kolektif, tetapi tidak hidup bersamanya. Masyarakat bukan hanya penonton dari narasi yang dideklarasikan di panggung, melainkan pemilik memori yang menyimpan banyak versi dan makna. Tanpa keterlibatan ini, sejarah menjadi instrumen, bukan jembatan.

Peringatan sejarah seharusnya menjadi momen kontemplatif. Ia bisa menjadi ruang untuk bertanya ulang: nilai apa yang ingin kita jaga? Warisan hidup apa yang layak dilanjutkan? Apa yang telah hilang, dan mengapa kita membiarkannya? Tanpa pertanyaan-pertanyaan semacam ini, setiap peringatan hanyalah repetisi tanpa daya hidup. Kota yang terus merayakan hari jadinya tanpa merenungkan arah, perlahan akan kehilangan identitasnya sendiri, meski terus dihias dengan spanduk dan festival.

Majalengka harus belajar merayakan sejarah secara bermakna, bukan hanya spektakuler. Sejarah tidak menuntut kemegahan, tetapi kejujuran. Ia tidak mencari tepuk tangan, tetapi kesediaan untuk menyelami. Ketika sejarah diberi ruang untuk kembali ke tubuh masyarakat, maka perayaan akan berubah menjadi perenungan, dan simbol akan kembali bernyawa. Di situlah sejarah menjadi cahaya, bukan dekorasi; menjadi napas kolektif, bukan hanya kalender tahunan.

Rekonstruksi Sejarah sebagai Jalan Kultural dan Spiritualitas Kolektif

Membaca ulang sejarah Majalengka adalah upaya untuk menyentuh kembali denyut batin masyarakatnya yang perlahan melemah oleh arus administratif dan pelapukan ingatan. Tindakan ini bukan sekadar koreksi terhadap tanggal atau data, tetapi bentuk ziarah intelektual dan spiritual menuju akar kolektif yang pernah memberi makna pada kehidupan bersama. Sejarah, dalam hal ini, tidak dilihat sebagai kumpulan fakta masa lalu, melainkan sebagai ruang makna yang hidup—yang terus bisa ditafsirkan ulang, dimaknai ulang, dan dijalani ulang.

Majalengka tidak hanya memiliki geografi administratif, tetapi juga memiliki lanskap batin yang dibentuk dari pengalaman, bahasa, dan laku hidup masyarakatnya. Ketika sejarah direkonstruksi dengan berpijak pada bahasa lokal, ritus tradisional, dan memori kolektif, maka yang sedang dibangun adalah peta batin. Peta ini tidak berfungsi untuk menunjukkan tempat, melainkan arah—sebuah arah yang membawa masyarakat kembali pada nilai-nilai kejujuran, kesahajaan, keseimbangan, dan kebersamaan yang dulu mengikat ruang hidup mereka.

Sejarah yang hidup berasal dari keterhubungan. Keterhubungan antara generasi dan tanah, antara ritus dan musim, antara suara dan makna. Ketika sejarah dibaca dari sumber-sumber lokal yang otentik—dari cerita rakyat, mantra pertanian, tata letak kampung, atau filosofi sawala—maka ia

menjelma menjadi jalan kultural yang menghidupkan kembali tubuh sosial masyarakat. Jalan ini tidak bisa dibangun oleh keputusan politik, tetapi oleh kesediaan untuk mendengar, menyerap, dan menyatu dengan lapisan-lapisan makna yang masih tersisa dalam kehidupan sehari-hari.

Spiritualitas kolektif tidak lahir dari ritual yang dipaksakan, tetapi dari kesadaran bersama yang tumbuh dari pengalaman bersama. Ketika masyarakat kembali terhubung dengan sejarah yang mereka jalani sendiri, maka spiritualitas itu muncul dalam bentuk rasa hormat terhadap tanah, perhatian pada bahasa ibu, dan kesetiaan terhadap nilai hidup yang diwariskan tanpa perlu diajarkan secara formal. Sejarah yang dihidupkan dengan cara ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi sumber energi moral dan kultural.

Rekonstruksi sejarah yang menyentuh ranah spiritual adalah bentuk pembebasan dari cara pandang mekanis yang hanya memandangi masyarakat sebagai objek pembangunan. Sejarah tidak hanya menjelaskan siapa kita, tetapi juga mengingatkan mengapa kita ada. Ketika Majalengka membacakan kembali sejarahnya dengan jujur, masyarakatnya bisa mulai menata kembali makna hidupnya dengan cara yang lebih otentik, lebih berakar, dan lebih bermartabat. Di situlah sejarah bukan lagi milik masa lalu, tetapi menjadi napas masa kini.

Transformasi sejarah menjadi jalan kultural juga menuntut keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa dibingkai dalam narasi tunggal. Ada banyak versi, banyak suara, banyak alur, dan semuanya memiliki legitimasi

dari pengalaman kolektif yang menyusunnya. Ketika negara memberi ruang bagi narasi-narasi kecil yang selama ini dipinggirkan, maka yang dibangun adalah mosaik sejarah yang lebih adil dan mencerminkan kekayaan kehidupan masyarakat.

Majalengka yang direkonstruksi bukan sekadar kabupaten yang mencari tanggal lahir, tetapi ruang hidup yang sedang mencari kembali jiwanya. Peta batin yang lahir dari proses ini bisa menjadi kompas peradaban—kompas yang tidak tunduk pada pasar atau kekuasaan, tetapi setia pada nilai-nilai yang telah membentuknya. Ketika sejarah dirawat sebagai jalan kultural dan spiritual, maka yang terbentuk bukan hanya masyarakat yang tahu siapa mereka, tetapi juga yang tahu ke mana mereka hendak melangkah.

Dari Tanggal Menuju Makna: Sejarah sebagai Energi Peradaban

Majalengka tidak membutuhkan satu tanggal pasti untuk membuktikan eksistensinya. Kehadirannya telah terpatri dalam laku hidup masyarakatnya yang menanam padi, menyebut nama-nama angin, merawat ritus musim, dan menjaga bahasa ibu yang tak pernah diajarkan di sekolah formal. Keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara, karena telah lama hidup sebagai kenyataan kultural yang dibangun oleh generasi demi generasi yang setia menjaga kehidupan dan nilai.

Ketika sejarah direduksi menjadi tanggal, yang dirayakan bukan lagi makna, melainkan legalitas simbolik.

Sejarah menjadi seperti ornamen: indah dipajang, tapi tak memberi arah. Padahal, makna sejarah tidak terletak pada hari atau bulan tertentu, melainkan pada bagaimana ia memberi pengetahuan tentang siapa diri kita, bagaimana kita sampai di titik ini, dan ke mana kita hendak melangkah. Sejarah yang demikian adalah energi peradaban—sumber moral dan arah kolektif yang tidak pernah usang meski zaman terus berubah.

Tanggal lahir hanyalah pintu masuk kecil ke dalam rumah besar bernama sejarah. Di dalamnya ada kamar-kamar kenangan, lorong-lorong nilai, dan ruang-ruang perenungan yang menyimpan pengalaman kolektif yang tidak tertulis. Ketika hanya tanggal yang dihafalkan, rumah itu menjadi kosong; yang diingat hanyalah pintunya, bukan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Yang dibutuhkan bukan pengukuhan ulang atas pintu tersebut, melainkan keberanian untuk masuk, tinggal, dan memahami ulang isi rumah itu bersama-sama.

Majalengka sebagai peradaban kecil hanya bisa hidup ketika sejarah dijadikan fondasi untuk membentuk kesadaran. Kesadaran itu lahir dari pengakuan terhadap keberagaman narasi, dari keterbukaan terhadap nilai lokal, dan dari penghormatan terhadap pengalaman masyarakat yang membentuk ruang ini sejak lama. Ketika sejarah dijadikan bagian dari imajinasi masa depan, maka ia bukan lagi warisan masa lalu, melainkan bekal untuk melangkah lebih bijak dan berakar.

Energi sejarah tidak akan pernah habis ketika ia dibaca dengan hati yang jernih dan disambut oleh masyarakat yang mau mengenalnya dengan rendah hati. Ia adalah cahaya yang menyinari arah, bukan patung yang disembah tanpa makna. Ketika masyarakat menyentuh sejarahnya sendiri, lahirlah keberanian untuk mengakui luka, merayakan kebijaksanaan, dan belajar dari perjalanan. Dari situlah muncul peradaban yang bukan hanya kuat secara struktural, tetapi juga matang secara spiritual.

Majalengka bisa tumbuh menjadi ruang yang tidak hanya dihuni, tetapi dihayati. Ketika sejarah dihidupkan dalam kurikulum, seni, kebijakan publik, arsitektur, dan laku hidup harian, maka kota ini akan menjadi medan kebudayaan yang tidak kering oleh simbol, tetapi subur oleh makna. Peradaban bukan soal gedung atau jumlah penduduk, tetapi soal ingatan yang hidup dan arah yang dijaga. Sejarah menjadi kekuatan karena ia menanamkan rasa memiliki, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab.

Pilihan untuk berpindah dari perayaan tanggal ke penghayatan makna adalah pilihan yang menuntut keberanian politik dan kebijaksanaan budaya. Ketika Majalengka berjalan menuju arah itu, maka ia sedang menulis sejarah baru: bukan sejarah tentang kapan ia diresmikan, tetapi bagaimana ia hidup dan menghidupi masyarakatnya sendiri. Di titik ini, sejarah tidak lagi menjadi soal arsip, tetapi soal arah hidup. Ia tidak lagi menjadi milik masa lalu, tetapi menjadi napas masa depan.

Penutup: Menyulam Arah dari Jejak yang Terlupakan

Sejarah yang sejati bukanlah narasi yang disusun oleh otoritas tunggal, melainkan jalinan makna yang tumbuh dari tanah, tubuh, dan batin masyarakatnya. Ketika Majalengka dipandang hanya melalui tanggal lahir administratif, kita sesungguhnya sedang memenjarakan sejarah dalam bingkai yang sempit. Sejarah seperti itu tidak menumbuhkan, tetapi membekukan; tidak menyatukan, tetapi memisahkan. Ia menjadi tumpukan kronologi yang kehilangan ruh, dan lupa bahwa hidup lebih panjang dari dokumen.

Setiap ruang yang dihuni oleh manusia selalu membawa sejarah yang lebih dalam dari apa yang bisa dicatat. Majalengka telah hidup sebagai medan kultural sebelum ia ditetapkan sebagai kabupaten. Jejaknya tersimpan dalam nama-nama kampung, dalam logat tutur, dalam ritus panen dan nyanyian malam. Ketika kita terlalu sibuk menentukan tanggal peresmian, kita sering kali lupa bahwa Majalengka sudah lama hadir dalam sunyi yang dihormati, dalam hidup yang dijalani, dan dalam nilai yang diwariskan secara halus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Identitas tidak dibangun dari satu momen simbolik, melainkan dari proses panjang internalisasi makna. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam merefleksikan sejarahnya sendiri, maka yang lahir adalah perayaan tanpa pemaknaan, pembangunan tanpa akar. Ingatan yang diputus dari konteks kulturalnya hanya akan menjadi pelengkap seremonial yang

tidak menyentuh dasar-dasar kesadaran. Sejarah seperti itu hanya tinggal nama, tidak pernah tumbuh menjadi arah.

Pekerjaan besar rekonstruksi sejarah bukan untuk menyusun kembali dokumen yang hilang, tetapi untuk membangunkan ingatan yang tertidur. Tugas ini bukan semata tanggung jawab negara, melainkan kerja kolektif yang melibatkan masyarakat, keluarga, komunitas, dan ruang-ruang kebudayaan. Ketika semua unsur itu menyatu dalam semangat menelaah dan menafsir ulang, maka sejarah Majalengka akan menjelma sebagai narasi yang hidup, fleksibel, dan mampu memberi kekuatan moral serta spiritual pada kehidupan publik.

Pilihan untuk berpindah dari sekadar perayaan tanggal ke penghayatan makna adalah langkah menuju kedewasaan kolektif. Sebuah masyarakat hanya bisa bertahan menghadapi gelombang perubahan ketika ia mengenali dirinya secara utuh—bukan sebagai produk negara, tetapi sebagai tubuh kebudayaan yang hidup dan bernapas. Sejarah dalam bentuk ini tidak hanya mengajarkan asal-usul, tetapi juga menanamkan arah, membentuk karakter, dan menyalakan harapan.

Majalengka memiliki kesempatan langka untuk menulis ulang sejarahnya secara lebih jujur dan berani. Kesempatan ini bukan tentang memilih tanggal baru, melainkan tentang membentuk narasi yang memuliakan keberagaman jejak, mengakui pluralitas sumber makna, dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Dari proses

inilah lahir peradaban yang tidak dibangun oleh satu tangan, tetapi dirajut oleh banyak jiwa yang saling mengingat dan menghormati.

Peradaban yang besar tidak dibentuk oleh ingatan yang seragam, tetapi oleh kemampuan untuk menyulam jejak yang beragam menjadi arah bersama. Ketika Majalengka kembali membaca dirinya dengan cinta dan ketelitian, maka sejarahnya akan kembali menjadi cermin – bukan sekadar etalase. Cermin yang tak hanya memantulkan bayang-bayang masa lalu, tetapi yang memberi terang ke mana kaki harus melangkah, dan mengapa arah itu layak dipilih.

Majalengka, 9 Mei 2025

Memahami Majalengka Sebagai Ruang Budaya: Sebuah Analisis Kritis dan Reflektif

Oleh: Endi Rochaendi

Abstrak: Memahami Majalengka sebagai ruang budaya menuntut pembacaan yang melampaui batas administratif dan kronologi formal yang ditetapkan oleh negara. Sebagai entitas kultural yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya struktur kabupaten pada 1840, Majalengka menyimpan lapisan sejarah yang terwujud dalam narasi lisan, ritus tradisi, dan relasi ekologis yang menyatu dengan identitas masyarakatnya. Penanda formal seperti hari jadi daerah memang penting dalam struktur simbolik negara-bangsa, namun cenderung menyederhanakan kompleksitas historis yang lebih dalam dan lebih luas. Narasi sejarah Majalengka tidak sekadar bicara tentang “kapan” atau “siapa”, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membangun makna, mempertahankan nilai, dan menyusun orientasi spiritual serta sosialnya melalui ruang dan waktu. Dalam konteks ini, Majalengka bukan hanya kabupaten, tetapi lanskap hidup yang dihuni oleh kosmologi lokal, pengetahuan intergenerasional, dan kesadaran ekologis yang berakar. Oleh karena itu, pendekatan terhadap sejarahnya tidak cukup deskriptif atau birokratis, melainkan harus interpretatif dan partisipatif, melibatkan aktor-aktor lokal sebagai subjek narasi. Menjadikan Majalengka sebagai arsitektur makna adalah upaya merekonstruksi sejarah yang hidup – sebuah sejarah yang membimbing masa kini dan memberi arah bagi masa depan yang lebih otentik, reflektif, dan berakar pada kebijaksanaan lokal.

Pengantar

Majalengka, dalam khazanah sejarah dan kebudayaan Sunda, bukan sekadar satu entitas administratif yang dibakukan dalam nomenklatur kenegaraan pada pertengahan

abad ke-20. Lebih dari itu, ia adalah ruang budaya yang tumbuh dari jejak-jejak peradaban yang berlapis dan berakar dalam lanskap batin masyarakatnya – ruang di mana ingatan kolektif, ritus tradisi, relasi ekologis, dan sistem nilai lokal saling terjalin membentuk suatu entitas yang hidup dan dinamis. Dalam kerangka ini, penghormatan terhadap Majalengka tidak cukup direduksi pada perayaan institusional seperti hari jadi kabupaten semata; ia harus dimaknai sebagai sebuah upaya kontemplatif untuk membaca kembali narasi kebudayaannya yang tak terjangkau hanya melalui pendekatan birokratik atau administratif.

Pernyataan bahwa *“Menghormati Majalengka bukan hanya dengan merayakan kelahirannya sebagai kabupaten, melainkan juga dengan memahami perjalanan batinnya sebagai ruang budaya yang telah berumur jauh lebih panjang dari angka-angka administratif yang tercatat”* menjadi titik berangkat penting bagi sebuah refleksi kritis. Artikel ini bertujuan mengurai kompleksitas makna Majalengka sebagai ruang budaya melalui pendekatan interdisipliner: memadukan kajian historis terhadap warisan lokal, pembacaan antropologis atas praktik hidup masyarakat, serta perenungan filosofis terhadap makna kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, tulisan ini bukan sekadar menawarkan pengetahuan deskriptif tentang Majalengka, melainkan mengajak pembaca untuk membangun kesadaran kultural yang lebih dalam, kritis, dan transformatif terhadap ruang hidup yang mereka warisi dan huni.

1. **Melampaui Reduksi Administratif: Sejarah Sebagai Lapisan Makna**

Dalam wacana sejarah lokal, sering kali terjadi reduksi makna sejarah menjadi sekadar rangkaian fakta administratif yang dibakukan dalam arsip negara. Tanggal pembentukan kabupaten, pengangkatan bupati pertama, atau penetapan batas wilayah menjadi penanda utama dalam konstruksi historis yang resmi. Meskipun valid secara dokumenter, pendekatan semacam ini menyempitkan sejarah ke dalam dimensi birokratik yang kering, seolah-olah sejarah dimulai saat kekuasaan formal mencatat dan mengesahkannya. Reduksi ini mengabaikan kenyataan bahwa sejarah tidak hanya bergerak di ranah institusional, tetapi juga hidup dalam dimensi kultural, spiritual, dan ekologis masyarakat.

Majalengka, sebagai satu entitas geografis dan kultural, telah lama hadir sebelum aparat kolonial maupun negara modern membubuhkan segel legal atas wilayah ini. Eksistensinya sebagai ruang hidup telah terbangun melalui relasi-relasi komunitas yang berlangsung lintas generasi—relasi yang tak selalu tercatat dalam dokumen resmi, namun nyata dalam praktik hidup sehari-hari, dalam tradisi lisan, ritus lokal, dan orientasi nilai masyarakatnya. Maka, memahami sejarah Majalengka hanya melalui kerangka administratif sama halnya dengan membaca hanya permukaan teks, tanpa menyelami lapisan-lapisan makna yang terkandung di baliknya.

Wilayah yang kini disebut Majalengka merupakan bagian integral dari lanskap sejarah Sunda-Galuh, yang jejaknya dapat ditelusuri sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan ini bukan sekadar latar pasif, tetapi telah menjadi simpul penting dalam jaringan relasi dagang, spiritualitas lokal, serta mobilitas manusia yang membentuk karakter sosial budaya masyarakatnya. Penemuan arkeologis, ragam toponimi, hingga struktur sosial desa-desa adat menunjukkan bahwa Majalengka telah lama memainkan peran signifikan dalam dinamika sejarah Tatar Sunda. Semua ini menandakan keberadaan sejarah yang lebih luas dan dalam dibandingkan narasi administratif yang baru terbentuk dalam satu abad terakhir.

Tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat Majalengka menyimpan arsip batin kolektif yang tak kalah sah dengan dokumen resmi negara. Dalam kisah-kisah rakyat, legenda asal-usul tempat, hingga ritual keagamaan lokal, tergambar dengan jelas bahwa masyarakat telah lama membangun relasi sakral dengan ruang geografis mereka. Di sinilah letak nilai sejarah sebagai lapisan makna: bahwa ia tak hanya berbicara tentang "kapan" dan "siapa", melainkan juga tentang "bagaimana" masyarakat memaknai keberadaannya di dunia, serta "mengapa" nilai-nilai itu bertahan atau berubah seiring waktu. Dengan kata lain, sejarah adalah cermin perjalanan batin kolektif, bukan sekadar kronologi formal.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mereposisi cara pandang terhadap sejarah lokal – terutama dalam kasus seperti Majalengka – agar tidak terjebak dalam determinisme administratif. Melampaui reduksi tersebut berarti membuka ruang bagi pembacaan sejarah yang lebih integral dan dialogis: yang mengakui keberadaan narasi resmi, tetapi juga memberi tempat yang setara bagi narasi kultural, spiritual, dan ekologis. Dengan demikian, sejarah dapat berfungsi bukan hanya sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai medan refleksi atas jati diri kolektif yang terus bergerak dalam dialektika antara ruang, waktu, dan makna.

2. Ruang Budaya sebagai Manifestasi Historis dan Eksistensial

Konsep “ruang budaya” mengimplikasikan bahwa suatu wilayah tidak hanya bermakna secara geografis atau administratif, tetapi juga sebagai konstruksi simbolik yang dihuni oleh nilai-nilai, memori kolektif, dan pengalaman spiritual masyarakat yang mendiaminya. Dalam konteks ini, Majalengka tidak cukup dipahami sebagai kabupaten dalam struktur negara-bangsa modern, melainkan sebagai medan eksistensial tempat berlangsungnya artikulasi identitas kultural masyarakat Sunda. Ia adalah ruang yang tidak hanya dibatasi oleh koordinat topografis, tetapi juga oleh lanskap makna yang terbentuk melalui bahasa, mitos, tradisi, dan relasi ekologis yang khas.

Sebagai ruang budaya, Majalengka memuat dinamika sosial dan spiritual yang telah berlangsung jauh sebelum batas administratif ditetapkan. Nama-nama kampung tua seperti Sindangkasih, Ciborelang, atau Salagedang, misalnya, tidak hanya menunjukkan lokasi geografis, tetapi juga mengandung jejak semantik, sejarah migrasi, serta struktur nilai yang telah diwariskan secara intergenerasional. Demikian pula, sistem desa adat dan struktur gotong royong masyarakat agraris Majalengka menjadi manifestasi dari cara hidup yang berakar pada keseimbangan antara manusia, alam, dan yang transendental – suatu prinsip yang tak dapat dipisahkan dari pembacaan historis terhadap ruang tersebut.

Lebih dari sekadar memori terfragmentasi, ruang budaya menyimpan kontinuitas nilai yang diekspresikan melalui ritus pertanian seperti *hajat bumi*, *seren taun*, atau *mapag sri*, yang mengandung kosmologi lokal sekaligus fungsi sosial yang kohesif. Ritus-ritus tersebut bukan hanya bentuk ekspresi keagamaan lokal, melainkan juga representasi dari sistem pengetahuan yang kompleks, yang menjembatani relasi antara manusia dengan waktu siklus alam, antara masyarakat dengan leluhur, serta antara ruang profan dan ruang sakral. Dengan demikian, Majalengka sebagai ruang budaya mencerminkan keberlangsungan peradaban lokal yang otonom secara simbolik, meskipun berada dalam struktur negara yang lebih besar.

Oleh karena itu, sejarah Majalengka tidak seharusnya direduksi menjadi kronologi kekuasaan atau rangkaian data

administratif semata, tetapi harus diperlakukan sebagai narasi kebudayaan yang hidup. Sejarah dalam perspektif ruang budaya adalah sejarah yang menghidupkan—yang membingkai kembali pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat menciptakan makna, membangun struktur sosial, dan menavigasi keberadaan mereka melalui waktu. Dalam hal ini, Majalengka menjadi medan reflektif untuk menelaah bagaimana warisan budaya bukan sekadar peninggalan, melainkan juga praksis hidup yang terus dimaknai ulang.

Dengan menyadari Majalengka sebagai entitas kultural yang historis dan eksistensial, maka upaya membaca sejarahnya harus menembus lapisan simbolik dan spiritual masyarakatnya. Tugas akademik dan intelektual tidak cukup berhenti pada pencatatan peristiwa, tetapi harus bergerak menuju penggalian makna, interpretasi naratif, dan pembentukan pemahaman yang utuh tentang peradaban lokal. Dalam pendekatan ini, Majalengka tidak hanya menjadi objek sejarah, tetapi subjek kultural yang berbicara tentang dirinya sendiri melalui jejak-jejak budaya yang masih hidup hingga hari ini.

3. Identitas Historis dan Tanggung Jawab Intelektual

Menghormati Majalengka sebagai ruang budaya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab intelektual dan etis dalam membingkai ulang identitas historisnya. Tindakan ini bukan sekadar bentuk romantisme lokal, melainkan sebuah proyek kritis yang menuntut keberanian untuk menelusuri

akar-akar sejarah yang kompleks, terkadang tidak nyaman, dan mungkin berbeda dari narasi resmi yang selama ini dikonstruksi secara institusional. Di titik inilah, kehormatan terhadap Majalengka menjadi praktik pengetahuan yang reflektif, yakni mengakui bahwa sejarah lokal tidak pernah tunggal, melainkan berlapis, dinamis, dan penuh dialektika antara kuasa, ingatan, dan identitas.

Tahun 1840 sebagai penanda pembentukan Kabupaten Majalengka dalam sistem administrasi kolonial Belanda memang memiliki signifikansi dalam kerangka formal negara-bangsa. Namun, membatasi pemahaman sejarah Majalengka hanya sampai titik itu akan menafikan fakta bahwa identitas kolektif masyarakatnya telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum tanggal tersebut. Jauh sebelumnya, Majalengka berada dalam orbit pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Galuh, Cirebon, dan Banten, sekaligus mempertahankan praktik lokal yang otonom dan khas. Dengan demikian, yang disebut Majalengka bukanlah produk tunggal dari kebijakan kolonial, melainkan hasil sintesis panjang antara relasi kekuasaan regional dan praktik kebudayaan lokal yang mengakar.

Memahami identitas historis Majalengka memerlukan kesediaan untuk membaca ulang warisan sejarah dengan pendekatan yang inklusif dan kritis. Ini berarti membuka ruang bagi narasi-narasi pinggiran yang kerap tidak mendapatkan legitimasi dalam historiografi resmi: cerita rakyat, silsilah komunitas adat, struktur desa tua, hingga

ekspresi simbolik yang mengendap dalam bahasa, seni, dan ritual. Tanggung jawab intelektual dalam hal ini adalah membangun narasi sejarah yang bukan hanya akurat secara data, tetapi juga adil secara representasi. Majalengka harus dilihat bukan sebagai objek pasif dari pembentukan sejarah, melainkan sebagai subjek aktif yang menciptakan, mempertahankan, dan mereproduksi pengetahuannya sendiri.

Mengabaikan kekayaan sejarah budaya Majalengka berisiko besar terhadap kesinambungan memori kolektif masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mereduksi Majalengka menjadi sekadar unit administratif pembangunan, kehilangan maknanya sebagai ruang hidup yang memuat identitas, kebijaksanaan lokal, dan agensi historis. Tanpa fondasi kultural yang kuat, proses pembangunan bisa kehilangan arah, karena terputus dari nilai-nilai dan makna yang selama ini menopang solidaritas sosial serta keberlanjutan ekologis masyarakatnya. Oleh karena itu, revitalisasi identitas historis menjadi kebutuhan strategis sekaligus imperatif moral bagi siapa pun yang mengupayakan kemajuan Majalengka secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, para intelektual, akademisi, budayawan, dan pemangku kebijakan memiliki peran yang krusial sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Tugas mereka bukan hanya membongkar data dan menyusun laporan sejarah, melainkan juga menumbuhkan kesadaran kritis dan apresiatif di tengah masyarakat. Identitas historis

bukanlah harta mati, tetapi warisan hidup yang harus terus dimaknai dan dirawat. Dengan menjadikan Majalengka sebagai subjek historis yang memiliki suara dan narasi, kita tidak hanya membangun koneksi dengan masa lalu, tetapi juga memperkuat fondasi kultural untuk masa depan yang lebih inklusif dan berakar.

4. Reposisi Wacana Sejarah: Dari Perayaan ke Perenungan

Perayaan hari jadi kabupaten merupakan bentuk artikulasi simbolik dari identitas kolektif dan ekspresi kebanggaan terhadap keberadaan suatu entitas administratif. Dalam konteks Majalengka, peringatan tahun 1840 sebagai tonggak pembentukan kabupaten tentu memiliki legitimasi historis dalam kerangka negara modern. Namun, ketika perayaan tersebut terjebak dalam ritualisme formal yang kosong dari refleksi kritis, maka ia berisiko menjelma menjadi praktik seremonial yang memutus masyarakat dari kedalaman sejarah kulturalnya sendiri. Perayaan yang tidak disertai dengan penggalian makna akan menghasilkan euforia sesaat, tanpa menyentuh kesadaran historis yang transformatif.

Dalam hal ini, perlu adanya reposisi wacana sejarah: dari seremoni menuju perenungan, dari glorifikasi tanggal menuju artikulasi makna. Sejarah Majalengka harus dipahami bukan hanya dalam bentuk angka—seperti 1840 sebagai penanda institusional—tetapi juga sebagai medan naratif

yang menyimpan kompleksitas perjalanan budaya, spiritualitas, dan sosial masyarakatnya. Wacana sejarah tidak dapat terus-menerus direduksi menjadi instrumen legitimasi birokratis atau kebanggaan simbolik semata; ia harus berfungsi sebagai ruang kontemplatif yang menghubungkan masa lalu dengan kesadaran kini dan orientasi masa depan.

Mengenang Majalengka dalam kerangka ini berarti melakukan kerja intelektual dan kultural yang lebih mendalam: menggali ulang narasi-narasi sejarah yang terpinggirkan, membuka ruang interpretasi baru terhadap artefak budaya, dan menyusun peta peradaban lokal yang menyeluruh dan kontekstual. Narasi sejarah tidak hanya perlu ditulis ulang, tetapi juga ditafsirkan ulang dengan melibatkan aktor-aktor lokal sebagai subjek sejarah. Dengan demikian, sejarah tidak lagi menjadi wacana dari atas (top-down), tetapi menjadi medan partisipatif yang mengaktifkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap warisan mereka sendiri.

Reposisi ini juga mengandung dimensi strategis dalam pembangunan kebudayaan. Ketika narasi sejarah berhasil diintegrasikan secara organik ke dalam visi pembangunan kontemporer, maka sejarah tidak hanya berfungsi sebagai nostalgia, melainkan menjadi modal sosial dan simbolik yang memperkuat arah transformasi masyarakat. Misalnya, integrasi kearifan lokal dalam tata kelola lingkungan, pelestarian bahasa dan ritus adat dalam kurikulum pendidikan lokal, atau revitalisasi situs sejarah sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi berbasis kebudayaan. Ini adalah bentuk konkret dari sejarah yang hidup – sejarah yang tidak diam dalam buku, tetapi mengalir dalam praktik sosial harian.

Oleh karena itu, momen peringatan Hari Jadi Majalengka seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai waktu untuk mengenang formalitas administratif, melainkan sebagai momentum intelektual dan spiritual untuk menengok kembali denyut peradaban lokal yang telah membentuk identitas masyarakat. Dari ruang-ruang desa hingga situs-situs arkeologis, dari puisi rakyat hingga kearifan ekologi, semua menjadi bagian dari narasi besar yang menanti untuk dirangkai ulang secara utuh dan bermakna. Dalam upaya ini, sejarah bukan lagi sekadar perayaan, tetapi perenungan yang membangkitkan kesadaran, menghimpun ingatan, dan merancang masa depan dengan akar yang lebih dalam.

5. **Penutup: Dari Administrasi Menuju Arsitektur Makna**

Pada akhirnya, penghormatan sejati terhadap Majalengka tidak dapat direduksi menjadi sekadar perayaan angka administratif atau peringatan institusional belaka. Lebih dari itu, ia harus dimaknai sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun *arsitektur makna* yang mengakar pada kesadaran sejarah, spiritualitas lokal, dan dinamika budaya masyarakatnya. Kabupaten, dalam pengertian formal, memang merupakan struktur administratif yang penting. Namun, di balik struktur itu terdapat lanskap batin yang jauh

lebih dalam: narasi-narasi yang hidup dalam ingatan leluhur, simbol-simbol yang tertanam dalam topografi budaya, serta nilai-nilai yang membentuk orientasi kolektif masyarakat.

Dengan demikian, penghormatan terhadap Majalengka mesti diarahkan pada upaya menghidupkan kembali warisan sejarah sebagai sumber makna dan identitas. Hal ini mencakup keberanian untuk merekonstruksi narasi sejarah yang selama ini terpinggirkan, mengakui pluralitas tafsir terhadap masa lalu, serta membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dalam percakapan sejarah yang reflektif. Proses ini bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga kultural dan etis – sebuah proses penyembuhan sekaligus pembaruan atas relasi kita dengan ruang dan warisan yang telah membentuk kita.

Menjadikan Majalengka sebagai arsitektur makna berarti juga menolak pendekatan simplistik terhadap sejarah yang hanya bertumpu pada data formal dan peristiwa politik. Ia menuntut penciptaan ruang-ruang diskursif di mana masyarakat dapat berbicara, mengingat, dan menafsirkan ulang asal-usulnya. Dalam proses ini, sejarah tidak diposisikan sebagai otoritas yang membekukan makna, melainkan sebagai dialog terbuka yang terus-menerus diperbarui oleh pengalaman kolektif dan dinamika sosial kontemporer.

Sebagai ruang budaya yang hidup, Majalengka memiliki potensi besar untuk menjadi teladan dalam bagaimana sebuah wilayah dapat merekonstruksi identitasnya secara

berdaulat dan berakar. Pengintegrasian warisan sejarah ke dalam kebijakan pembangunan, pendidikan lokal, serta wacana publik menjadi kunci agar sejarah tidak hanya hadir di museum atau monumen, tetapi juga menjadi bagian integral dari cara masyarakat memahami dirinya sendiri dan masa depannya. Inilah bentuk keberlanjutan sejarah yang tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga memungkinkan masa kini dan masa depan untuk tumbuh secara otentik.

Maka dari itu, mari kita mulai melihat Majalengka bukan hanya sebagai kabupaten yang lahir secara administratif pada tahun 1840, tetapi sebagai ruang budaya yang terus menulis ulang dirinya sendiri melalui ingatan, percakapan, dan partisipasi. Dengan menjadikannya sebagai arsitektur makna, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga membangunnya kembali—dengan kesadaran, dengan kasih, dan dengan tanggung jawab generasional. Sebab sejarah yang paling hidup bukanlah yang sekadar dihafal, melainkan yang terus diperjuangkan dalam kesadaran bersama.

“Majalengka adalah jiwa yang telah berjalan jauh sebelum dikenali sebagai kabupaten. Maka, memuliakannya adalah dengan menyelami jiwanya, bukan hanya mencatat tanggal lahirnya”

Majalengka, Mei 2025

Riwayat Hidup Penulis



Aku bukan penulis yang dilahirkan oleh gelar, bukan pula yang ditabalkan oleh panggung, podium, ataupun selebrasi akademik. Aku lahir dari kebudayaan yang sunyi—dari nyanyian ibu di dapur rumah panggung, dari kidung Sindir yang dituturkan di pematang saat senja, dari cerita-cerita tua para juru kunci yang lebih banyak dipercaya daripada buku-buku sejarah. Namaku Endi Rochaendi, seorang peziarah makna yang berjalan perlahan di lorong-lorong batin Majalengka, menyusuri fragmen waktu, puing mitos, serta sisa-sisa ritus yang masih bernafas meski tanpa saksi.

Pada tahun 2012, aku diberi amanah sebagai Kepala Seksi Permuseuman, Kepurbakalaan, Kesejarahan, dan Nilai-Nilai Tradisi (Muskala) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dari ruang birokrasi yang sunyi itulah aku belajar bahwa kebudayaan tidak bisa dijaga hanya dengan rapat dan laporan. Ia harus dihirup, diselami, dan dihormati dengan batin yang jernih. Melalui tugas inilah aku bersentuhan langsung dengan makam-makam tua yang tak dikenal dalam literatur resmi, dengan naskah-naskah kuna yang terlipat dalam debu laci perpustakaan desa, dengan artefak yang bukan hanya benda mati, tetapi pengingat spiritual bahwa kita berasal dari yang tak selalu bisa dijelaskan oleh akademik.

Kepurbakalaan membawaku melihat bahwa batu bukan hanya massa, melainkan memori. Permuseuman mengajarkanku bahwa benda bukan sekadar koleksi, tetapi tubuh dari suatu zaman. Kesejarahan menuntunku membaca bahwa narasi bukanlah monopoli negara, melainkan milik rakyat yang hidup dalam bahasa, ritual, dan puasa leluhur. Dan nilai-nilai tradisi membuka mataku bahwa kearifan itu tidak selalu dijelaskan dengan teori, tetapi dihidupi dengan etika yang diwariskan secara diam-diam.

Menulis, bagi diriku, bukan upaya menegakkan otoritas, tetapi bentuk perlawanan spiritual terhadap pelupaan. Ia bukan alat untuk menguasai pengetahuan, tetapi cara untuk menjaga keberadaan. Setiap tulisan yang lahir dariku adalah hasil pergulatan batin antara yang dilihat dan yang dirasakan, antara yang resmi dan yang sunyi. Di antara laporan teknis dan narasi akademik, aku menyelipkan catatan-catatan kecil – tentang kuburan tua yang tak bertuan, tentang sebuah lagu panen yang hanya dinyanyikan oleh dua ibu di lereng gunung, tentang kalender adat yang lebih jujur daripada penanggalan dinas. Catatan-catatan inilah yang kemudian kugubah menjadi tulisan, sebagai upaya untuk tidak hanya mencatat apa yang terlihat, tetapi menghidupi apa yang belum sempat diucapkan.

Aku menulis bukan karena merasa lebih tahu, tetapi karena merasa tak ingin kebudayaan ini mati dalam diam. Jejak akademikku mungkin bisa dirunut dalam struktur formal: pendidikan, jabatan, pelatihan. Tapi jejak budayaku tertulis di langit-langit masjid tua, di relief makam-makam leluhur, dalam kidung nenek-nenek yang menggendong cucunya

dengan tembang. Di situlah aku menyerap nilai, bukan dari diktat kampus, tetapi dari percakapan diam antara tanah dan manusia yang menyapanya dengan hormat.

Buku ini, seperti sebagian besar catatanku, lahir bukan untuk menyusun teori, melainkan untuk menyalakan lentera kecil di lorong panjang pencarian jati diri kultural masyarakat Majalengka. Ia tidak ditulis untuk meneguhkan kebenaran tunggal, tetapi untuk menjaga percakapan yang telah lama hening – percakapan antara yang terabaikan dan yang tengah dicari kembali. Ia hadir sebagai bentuk tanggung jawab batin terhadap ribuan ingatan yang nyaris tenggelam dalam modernitas dan kebijakan pembangunan yang seringkali alpa pada akar.

Jika suatu hari catatan ini hanya menjadi buku yang terselip di rak perpustakaan desa, aku tak berharap lebih dari satu hal: semoga ada satu anak muda yang menemukannya, membacanya, dan merasa bahwa dirinya bukan sedang membaca buku, tetapi sedang mendengar bisikan tanah tempat ia lahir.

Akhirnya, aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang lelaki dari Majalengka – Endi Rochaendi – yang menapaki jalan panjang Muskala bukan sekadar sebagai jabatan, tetapi sebagai jalan hidup. Sebagai upaya untuk menyalakan kembali api kecil kebudayaan yang hampir padam, dan sebagai bentuk cinta kepada leluhur, tanah, dan warisan simbolik yang terus kugendong dalam doa-doa sunyi sepanjang jalan pulang yang tak pernah selesai.

MAJALENGKA

Yang Tak Pernah Selesai Didefinisikan

Buku Majalengka yang Tak Pernah Selesai Didefinisikan: Ziarah Intelektual atas Ingatan, Simbol, dan Keberadaan merupakan refleksi kultural dan spiritual atas kompleksitas sejarah, identitas, dan keberadaan Majalengka yang tak bisa dirangkum dalam satu tanggal, satu versi narasi, atau satu konstruksi politik-administratif. Lebih dari sekadar naskah sejarah atau dokumen birokrasi, buku ini adalah bentuk "ziarah batin"—suatu perjalanan intelektual yang ditulis dengan ketekunan kontemplatif dan kedalaman empatik, menyusuri lapisan-lapisan kultural yang sering kali luput dari perhatian formal.

Bersumber dari catatan-catatan pribadi penulis yang dihimpun selama menjabat sebagai Kepala Seksi Permuseuman, Kepurbakalaan, Kesenjajaraan, dan Nilai-Nilai Tradisi (Muskalajarahnitra) Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka pada tahun 2012-2014, buku ini menjelajahi ruang-ruang sunyi dalam ingatan kolektif masyarakat. Catatan tersebut tidak hanya merekam kegiatan administratif, tetapi juga perjumpaan eksistensial dengan tokoh adat, para maestro seni tradisi, dan tapak-tapak simbolik seperti tarian Kedempling, Guar Bumi, Sintren, hingga nyanyian para sinden dan doa-doa lisan yang nyaris punah.

Alih-alih menawarkan narasi tunggal tentang kapan Majalengka "lahir," buku ini justru mengajak pembaca merenungkan makna di balik setiap ritus, simbol, dan mitos yang membentuk kesadaran kolektif masyarakatnya. Ia menempatkan Majalengka bukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai medan eksistensi yang terus bergerak dan dibentuk oleh interpretasi, konflik, dan harapan.

Dalam dunia yang dipenuhi oleh politik representasi dan hasrat atas legitimasi sejarah, buku ini menjadi oase reflektif yang mengingatkan kita bahwa definisi atas tanah kelahiran bukanlah angka dalam prasasti, tetapi nyawa dalam ingatan. Buku ini tidak menyelesaikan definisi Majalengka—dan memang tidak ingin menyelesaikannya. Ia justru membuka ruang dialog, agar masyarakat Majalengka dapat terus menyusun ulang narasinya, dengan kejujuran, keberanian, dan cinta pada kebudayaan yang menghidupinya.



DUTA MEDIA PRESS

Jalan Abiyasa, Ngental, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Web: dutamediapress.com
Email: dutamediapress@gmail.com
WA: +62 809-5409-917

Duta Media Press

Endi Rochaendi